



Ekonomi Syariah



Syariah
Jamkrindo

TRANSFORMASI UNTUK TUMBUH BERKELANJUTAN

Transformation for Sustainable Growth



SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

DISCLAIMER AND LIMITATION OF RESPONSIBILITY

Laporan Tahunan PT Jamkrindo Syariah tahun buku 2023 ini diterbitkan sesuai Peraturan Menteri BUMN PER- 2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis di mana Jamkrindo menjalankan kegiatan usaha. Jamkrindo tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan tahunan ini memuat kata "JSR" dan "Perusahaan" yang didefinisikan sebagai PT Jamkrindo Syariah yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penjaminan kredit. Adakalanya kata "kami" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Jamkrindo Syariah secara umum.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah", "Rp" atau "IDR" merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dolar AS" atau "USD" merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah. Laporan ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di situs web resmi Jamsyar yaitu www.jamkrindosyariah.co.id.

PEMBERITAHUAN TABEL DAN GRAFIK

Laporan Tahunan ini juga menyajikan tabel dan grafik yang memaparkan data numerik dengan standar penulisan mengikuti kaidah Bahasa Indonesia. Pemaparan numerik dalam teks menggunakan standar kaidah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sesuai konteks.

PT Jamkrindo Syariah's Annual Report for the fiscal year 2023 is published in accordance with the Minister of SOE Regulation PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, regarding Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

This Annual Report contains statements about financial conditions, operational results, policies, projections, plans, strategies, and objectives of the Company that are classified as forward-looking statements under applicable legislation, except for historical matters. These statements carry prospects of risk, uncertainty, and may result in actual developments that materially differ from what is reported.

Prospective statements in this Annual Report are made based on various assumptions regarding current and future conditions as well as the business environment in which Jamkrindo conducts its business activities. Jamkrindo does not guarantee that documents that have been verified for authenticity will bring certain results as expected.

This annual report contains the words "JSR" and "Company" which are defined as PT Jamkrindo Syariah, which conducts business activities in the field of credit guarantee. At times, the word "we" is used for convenience to refer to PT Jamkrindo Syariah in general.

References to the currency units "Rupiah," "Rp," or "IDR" refer to the official currency of the Republic of Indonesia, while "US Dollar" or "USD" refers to the official currency of the United States of America. All financial information is presented in Rupiah. This report is presented in two languages, Indonesian and English, using font types and sizes that are easy to read and printed with good quality. This Annual Report can be viewed and downloaded on Jamsyar's official website at www.jamkrindosyariah.co.id.

NOTICE REGARDING TABLES AND GRAPHICS

This Annual Report also presents tables and graphs that display numerical data with writing standards following Indonesian language rules. Numerical presentations in the text use standard Indonesian and English language rules according to context.



PENJELASAN TEMA THEME EXPLANATION



Transformasi untuk Tumbuh Berkelanjutan Transformation for Sustainable Growth

Jamkrindo Syariah senantiasa melakukan inovasi dan transformasi untuk terus meraih pertumbuhan berkelanjutan. Berbagai transformasi terus dilakukan baik dari sisi transformasi pada struktur organisasi, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), sistem teknologi, bisnis dan operasional, tata kelola manajemen risiko dan kepatuhan serta keuangan guna memperkuat kinerja perseroan secara berkelanjutan.

Dalam transformasi bisnis perusahaan menitik beratkan diversifikasi pendapatan antara lain dengan optimalisasi bisnis non penugasan dan juga pengembangan bisnis model dan bisnis proses. Dalam tata kelola risiko dan kepatuhan dilakukan penguatan three line of defense serta four eyes principles. Adanya dinamika usaha yang terus berkembang juga melakukan penguatan di bidang teknologi dan sumber daya manusia. Hal ini dengan tujuan agar perusahaan senantiasa menghadirkan layanan penjaminan inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif serta efisien secara berkelanjutan.

Di tahun 2023 beragam layanan penjaminan yang mempermudah UMKMK memperoleh akses pembiayaan kepada lembaga keuangan telah dihadirkan oleh Jamkrindo Syariah. Tidak hanya itu, Perusahaan juga mengambil peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKMK serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan tanggung jawab dan sosial (TJSL).

Jamkrindo Syariah continuously conducts innovation and transformation to achieve sustainable growth. Various transformations are continuously implemented, both in terms of organizational structure, Human Resource (HR) management, technology systems, business and operations, risk management governance and compliance, as well as finance to strengthen the company's performance sustainably.

In business transformation, the company emphasizes income diversification, among others, by optimizing non-assignment business and also developing business models and business processes. In risk governance and compliance, the company strengthens the three lines of defense and four eyes principles. The dynamics of the continuously evolving business also include strengthening in the fields of technology and human resources. This is aimed at ensuring the company consistently delivers innovative, competitive guarantee services with professional, effective, and efficient service on a sustainable basis.

In 2023, various guarantee services that facilitate MSMEs in obtaining access to financing from financial institutions have been provided by Jamkrindo Syariah. Not only that, the Company also takes an important role in supporting the growth of MSMEs and improving community welfare through various responsibility and social activities (TJSL).

JEJAK LANGKAH JAMKRINDO SYARIAH

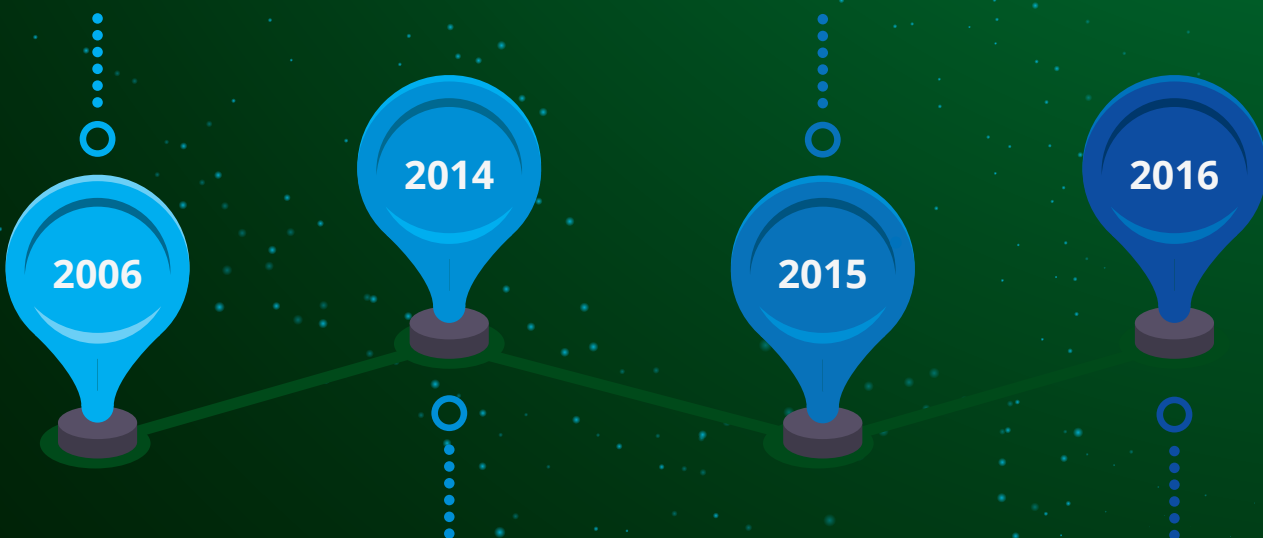
Jamkrindo syariah Milestones

Divisi Penjaminan Syariah Awal Beroperasi / Initial Operations of the Sharia Guarantee Division

- Launching Penjaminan Syariah
Pada 15 September 2006 terbit rekomendasi DSN MUI melalui surat nomor U217/DSN-MUI/IX/2006 untuk mulai menjalankan usaha penjaminan syariah.
- Launching Penjaminan Syariah (Divisi Penjaminan Syariah) Perum Jamkrindo 2007
- Launching of Sharia Guarantee
- On September 15, 2006, the National Sharia Council (DSN) of the Indonesian Ulema Council (MUI) issued a recommendation through letter number U217/DSN-MUI/IX/2006 to commence Sharia guarantee operations.
- Launching of Sharia Guarantee (Sharia Guarantee Division) of Perum Jamkrindo 2007

Jamkrindo Syariah sebagai Perusahaan Penjamin KUR / Jamkrindo Syariah as a KUR Guarantee Company

- Penunjukkan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah sebagai Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah nomor 105 tahun 2016
- Pembukaan Sharia Office Channelling di Semarang dan Palembang pada 7 Juni 2016
- Penerbitan Sertifikat Kafalah (Penjaminan) Pertama untuk Produk Kafalah (Penjaminan) Produk KPR Sejahtera FLPP
- Appointment of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah as the People's Business Credit Guarantee Company through Decree of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia, as Chair of the Financing Policy Committee for Micro, Small, and Medium Enterprises, No. 105 of 2016.
- Opening of Sharia Office Channelling in Semarang and Palembang on June 7, 2016.
- Issuance of the First Kafalah (Guarantee) Certificate for the Kafalah (Guarantee) Product of the FLPP Sejahtera Mortgage (KPR) Product.



Berdirinya Perusahaan / establishment of the company

Perum Jamkrindo mendirikan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (disingkat PT Jamkrindo Syariah) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 68 Tanggal 19 September Tahun 2014. Kemudian mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-134/D.05/2014.

Perum Jamkrindo mendirikan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (disingkat PT Jamkrindo Syariah) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 68 Tanggal 19 September Tahun 2014. Kemudian mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-134/D.05/2014.

Pembukaan Kantor Cabang / Opening of Branch Office

Untuk memperluas layanan bisnis Jamsyar, maka pada tanggal 23 Januari 2015 Jamsyar mendapatkan izin pembukaan Kantor Cabang Medan, Bandung, dan Surabaya dari OJK RI No. S-57/NBB.223/2015.

To expand Jamsyar's business services, on January 23, 2015, Jamsyar obtained permission to open Medan, Bandung, and Surabaya Branch Offices from the Indonesian Financial Services Authority No. S-57/NBB.223/2015.

Pengembangan Jaringan dan Layanan / Network and Service Development

Pembukaan Kantor Unit Pelayanan Pontianak, Banjarmasin, Palembang, Semarang dan Makassar.

Opening of Service Unit Offices in Pontianak, Banjarmasin, Palembang, Semarang and Makassar.

Penambahan Modal dan Pengembangan Jaringan & Layanan / Capital Increase and Network & Service Development

- Penambahan Modal sebesar Rp 175.000.000.000
- Pembukaan Kantor Unit Pelayanan Padang
- Peningkatan status Makassar, Semarang, Aceh, Banjarmasin, Mataram, Lampung, Balikpapan menjadi Cabang
- Capital Increase of IDR 175,000,000,000
- Opening of Padang Service Unit Office
- Upgrading the status of Makassar, Semarang, Aceh, Banjarmasin, Mataram, Lampung, and Balikpapan to branches



Penerbitan Sertifikat Kafalah SCF & Pengembangan Jaringan dan Layanan / Issuance of SCF Kafalah Certificate & Network and Service Development

- Penerbitan Sertifikat Kafalah (Penjaminan) Pertama untuk Produk Kafalah (Penjaminan) Produk Supply Chain Financing (SCF)
- Pembukaan Kantor Unit Pelayanan Aceh, Mataram, Pekanbaru, Lampung dan Balikpapan
- Peningkatan status Kantor Unit Pelayanan Palembang menjadi Cabang
- Issuance of the First Kafalah (Guarantee) Certificate for Supply Chain Financing (SCF) Kafalah (Guarantee) Products
- Opening of Service Unit Offices in Aceh, Mataram, Pekanbaru, Lampung, and Balikpapan
- Upgrading the status of the Palembang Service Unit Office to a Branch

Penerbitan Sertifikat Kafalah KMK Pemulihan Ekonomi Nasional dan Gedung Baru Kantor Pusat / Issuance of the National Economic Recovery KMK Kafalah Certificate and New Head Office Building

- Penunjukkan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah sebagai Perusahaan Penjaminan Pembiayaan Modal Kerja Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2020
 - Jamsyar memiliki Gedung Baru Kantor Pusat
 - Penambahan Modal sebesar Rp. 75.000.000.000
- Peningkatan status KUP Mataram, Balikpapan dan Lampung menjadi Kantor Cabang
- Appointment of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah as the National Economic Recovery Working Capital Financing Guarantee Company through Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 71 of 2020
 - Jamsyariah has a new head office building
 - Additional capital of IDR 75,000,000,000
- Upgrading the status of KUP Mataram, Balikpapan, and Lampung to branch offices

Pembukaan Kantor Cabang Utama (Jakarta) dan Memperoleh Opini WTP oleh PwC atas Laporan Keuangan 2020 / Opening of Main Branch Office (Jakarta) and Obtaining WTP Opinion by PwC on 2020 Financial Report

- Pembukaan Kantor Cabang Utama (Jakarta)
- Memperoleh Opini Wajar Tanpa Modifikasian / Wajar Tanpa Pengecualian dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, firma anggota jaringan global Price Water House Coopers (PwC) atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2020
- Penambahan Modal sebesar Rp. 150.620.692.192,00 dalam rangka Phase Out UUS Jamkrindo ke JamSyar
- Opening of Main Branch Office (Jakarta)
- Obtained an Unmodified/Unqualified Opinion from Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, a member firm of the PricewaterhouseCoopers (PwC) global network, on the 2020 Financial Statements
- Capital Increase of IDR 150,620,692,192.00 in connection with the phase-out of Jamkrindo's UUS to JamSyar

Siap untuk Bertransformasi / Ready to Transform

Memperoleh Opini Wajar Tanpa Modifikasian / Wajar Tanpa Pengecualian dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, firma anggota jaringan global Price Water House Coopers (PwC) atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2022

Obtained an Unqualified Opinion from KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Rekan, a member firm of the Price Water House Coopers (PwC) global network on the Financial Statements for the 2022 Fiscal Year

2021

2022

2023

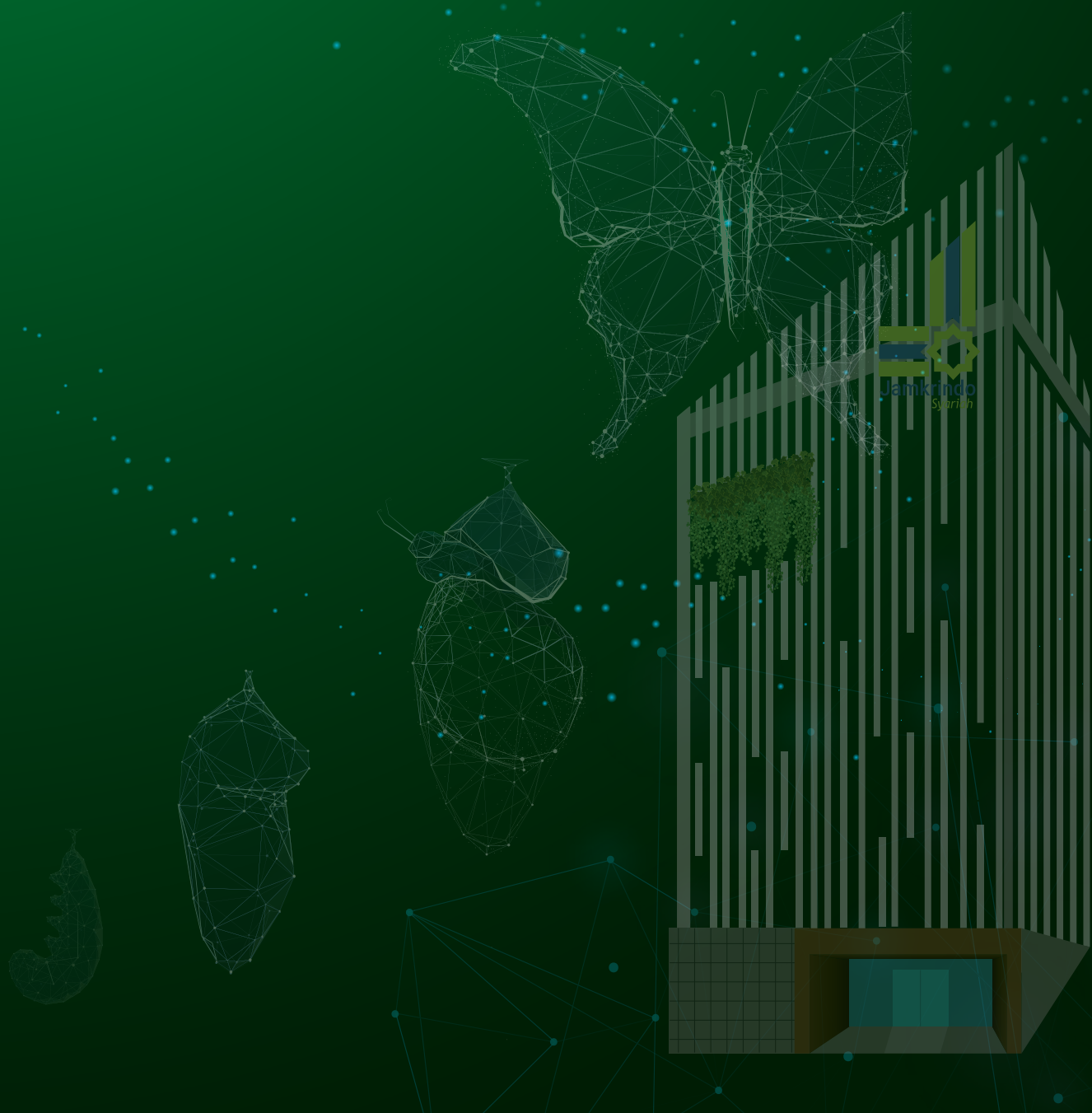
Sewindu Always Excellent

Memperoleh Opini Wajar Tanpa Modifikasian / Wajar Tanpa Pengecualian dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, firma anggota jaringan global Price Water House Coopers (PwC) atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021

- Obtained an Unqualified Opinion from KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Rekan, a member firm of the Price Water House Coopers (PwC) global network on the Financial Statements for the 2021 Fiscal Year



Syariah Jamkrindo



DAFTAR ISI

Table Of Contents

2	SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB DISCLAIMER AND LIMITATION OF RESPONSIBILITY	50	VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE
3	PENJELASAN TEMA THEME EXPLANATION	52	MAKNA LOGO MEANING OF LOGO
4	JEJAK LANGKAH JAMKRINDO SYARIAH JAMKRINDO SYARIAH MILESTONES	54	STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE
8	DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS	57	PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE
01	IKHTISAR KINERJA PERFORMANCE HIGHLIGHT	65	PROFIL DIREKSI BOARD OF DIRECTORS PROFILE
12	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING HIGHLIGHT OF IMPORTANT FINANCIAL DATA	73	PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH BOARD OF SHARIA SUPERVISORS PROFILE
16	IKHTISAR BISNIS DAN ORGANISASI BUSINESS AND ORGANIZATIONAL HIGHLIGHTS	76	PROFIL KEPALA DIVISI PROFILE OF DIVISION HEAD
18	IKHTISAR SAHAM SHARE OVERVIEW	80	DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND HUMAN RESOURCES COMPETENCY DEVELOPMENT
18	INFORMASI TENTANG OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI, SERTA INFORMASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PENDANAAN LAINNYA INFORMATION ABOUT BONDS, SUKUK OR CONVERTIBLE BONDS, AND OTHER CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY FUNDING INFORMATION	85	KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM COMPOSITION OF SHAREHOLDERS
19	KILAS PERISTIWA 2023 2023 EVENTS HIGHLIGHTS	87	STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA GROUP AND BUSINESS GROUPS STRUCTURE
02	LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT	88	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS
22	LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS REPORT	89	PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI AWARDS AND CERTIFICATIONS
28	LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTOR'S REPORT	90	KEANGGOTAAN ASOSIASI ASSOCIATION MEMBERSHIP
37	PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT STATEMENT OF RESPONSIBILITY	92	DAFTAR ALAMAT ENTITAS KANTOR CABANG ADDRESS LIST OF BRANCH OFFICES
03	PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE	94	INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN INFORMATION ON THE COMPANY'S WEBSITE
40	INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN GENERAL INFORMATION AND CORPORATE IDENTITY	04	ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
42	RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN BRIEF HISTORY OF THE COMPANY	98	TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI ECONOMIC AND INDUSTRIAL REVIEW
44	BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA LINE OF BUSINESS AND PRODUCTS AND SERVICES	102	KEGIATAN USAHA PT JAMKRINDO SYARIAH BUSINESS ACTIVITIES OF PT JAMKRINDO SYARIAH
48	KOMPETENSI INTI CORE COMPETENCY	109	SEGMENT USAHA BUSINESS SEGMENT
		115	TINJAUAN KEUANGAN FINANCIAL REVIEW

DAFTAR ISI

Table Of Contents

117	LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT (LOSS) AND COMPREHENSIVE INCOME
118	STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY
120	PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2023 TARGET ACHIEVEMENT IN 2023
124	LIABILITAS LIABILITIES
05	TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
128	Prinsip Umum GENERAL PRINCIPLES
131	LATAR BELAKANG BACKGROUND
140	TRANSPARANSI PENERAPAN GCG TRANSPARENCY OF IMPLEMENTATION GCG
195	PENILAIAN SECARA MANDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK OLEH PT. JAMKRINDO SYARIAH SELF ASSESSMENT ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE BY PT. JAMKRINDO SYARIAH
06	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
220	TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN GOVERNANCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
222	PRINSIP PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PRINCIPLES OF ZAKAT MANAGEMENT AS A SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM
07	LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL REPORT



1

IKHTISAR KINERJA *Performance Highlight*



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

HIGHLIGHT OF IMPORTANT FINANCIAL DATA

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian

Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

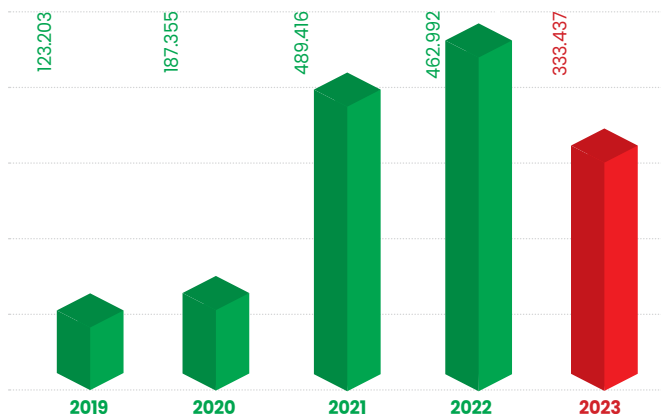
dalam jutaan Rupiah
in IDRmillion

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Pendapatan Penjaminan – bersih Guarantee Income – Net	333.437	462.992	489.416	187.355	123.203
Beban Penjaminan – bersih Guarantee Expenses – Net	-253.217	-170.033	-224.880	-113.638	-84.680
Pendapatan Penjaminan – bersih Guarantee Income – Net	80.220	292.959	264.536	73.717	38.523
Pendapatan Investasi – bersih Investment Income – Net	85.822	68.229	56.865	56.451	44.872
Beban Usaha Operating Expenses	-128.258	-113.972	-101.345	-70.497	-55.433
Pendapatan Lain-lain Bersih Other Income – Net	-10.470	-13.177	-13.317	-10.207	-14.845
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	27.314	234.039	206.739	49.464	13.117
(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan Income Tax Benefits/(Expenses)	6.575	-44.409	-38.582	-4.327	4.087
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	33.889	189.630	168.157	45.137	17.204
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	14.407	-20.852	77	5,323	5,733
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Profit for the Year	48.296	168.778	168.234	50.460	22.937



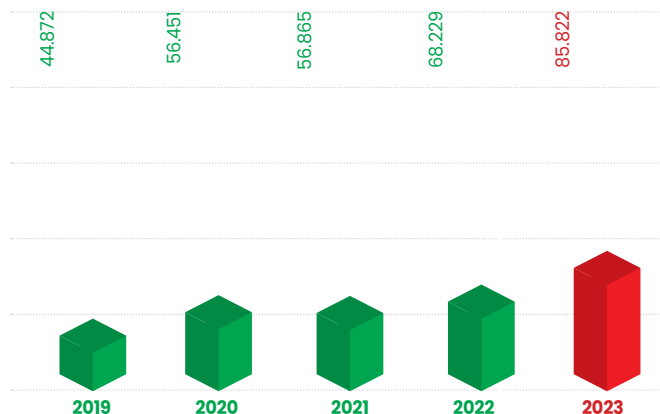
Pendapatan Penjaminan Guarantee Income

(juta Rp)
(IDRmillion)



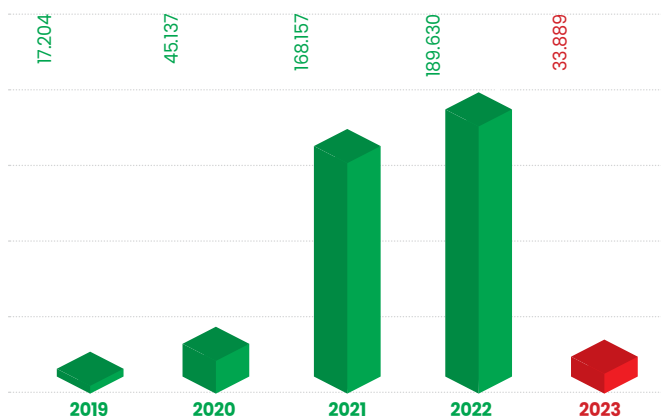
Pendapatan Investasi Bersih Investment Income - Net

(juta Rp)
(IDRmillion)



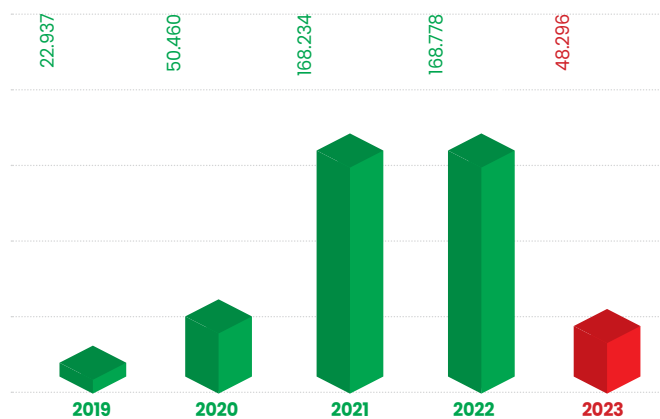
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year

(juta Rp)
(IDRmillion)



Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Profit for the Year

(juta Rp)
(IDRmillion)





Posisi Keuangan Konsolidasian

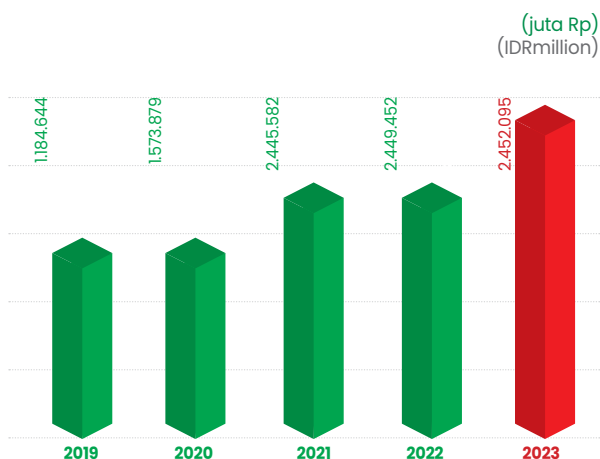
Consolidated Statement of Financial Position

dalam jutaan Rupiah
in IDRmillion

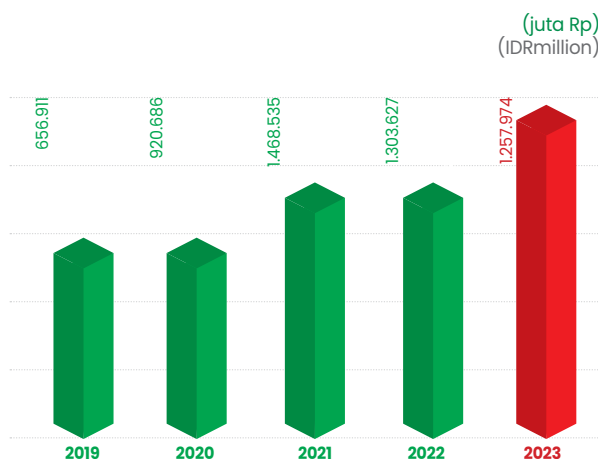
Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah Aset Total Assets	2.452.095	2.449.452	2.445.582	1.573.879	1.184.644
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.257.974	1.303.627	1.468.535	920.686	656.911
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.194.121	1.145.825	977.047	653.193	527.733

*) Disajikan Kembali
*) Restatement

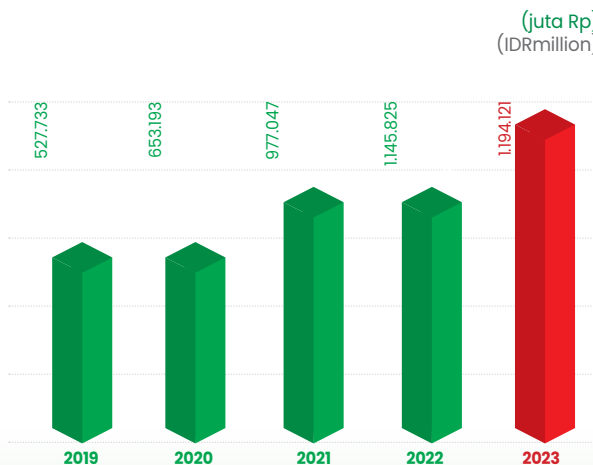
Jumlah Aset
Total Assets



Jumlah Liabilitas
Total Liabilities



Jumlah Ekuitas
Total Equity





Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Statement of Cash Flows

dalam jutaan Rupiah
In IDRmillion

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Net Cash Flow from Operating Activities	-21.405	51.999	482.767	200.059	78.932
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Net Cash Flow from Investment Activities	-137.545	-234.907	-102.865	-54.269	-72.500
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Net Cash Flow from Funding Activities	-5.131	-3.353	152.248	70.862	175.000
Kenaikan/Penurunan (Bersih) Kas dan Setara Kas (Net) Increase/Decrease in Cash and Cash Equivalents	-164.081	-186.261	532.150	216.652	181.432
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	1.209.221	1.395.482	863.332	646.680	465.248
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	1.045.140	1.209.221	1.395.482	863.332	646.680

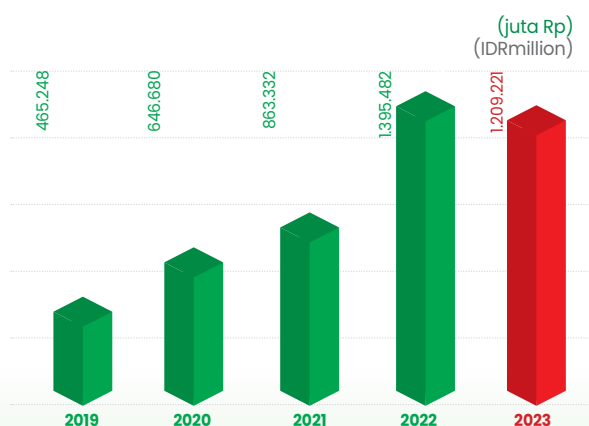
Rasio-rasio Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Ratios

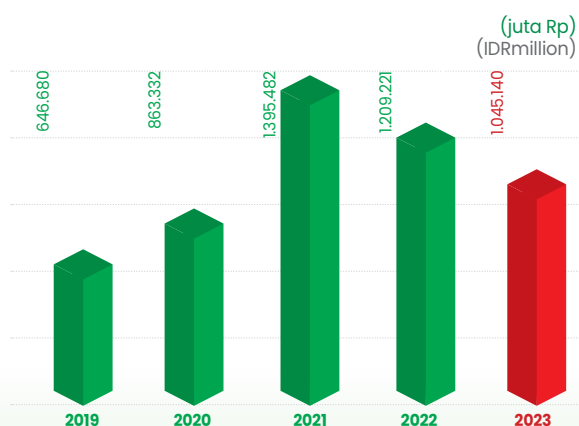
dalam jutaan Rupiah
In IDRmillion

Uraian Description		2023	2022	2021	2020	2019
RASIO RENTABILITAS PROFITABILITY RATIO						
Return on Equity (ROE)	Laba Sesudah Pajak Rata-Rata Ekuitas	3%	18%	21%	8%	4%
Return on Assets (ROA)	Laba Sebelum Pajak Rata-Rata Total Asset	2%	10%	11%	4%	2%
RASIO LIKUIDITAS LIQUIDITY RATIO						
Current Ratio	Utang Lancar Aset Lancar	313%	261%	185%	199%	415%
RASIO SOLVABILITAS SOLVENCY RATIO						
Debt to Equity Ratio (DER)	Total Ekuitas Total Utang	105%	114%	150%	141%	124%

Kas dan Setara Kas Awal Tahun
Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year



Kas dan Setara Kas Akhir Tahun
Cash and Cash Equivalents at End of the Year





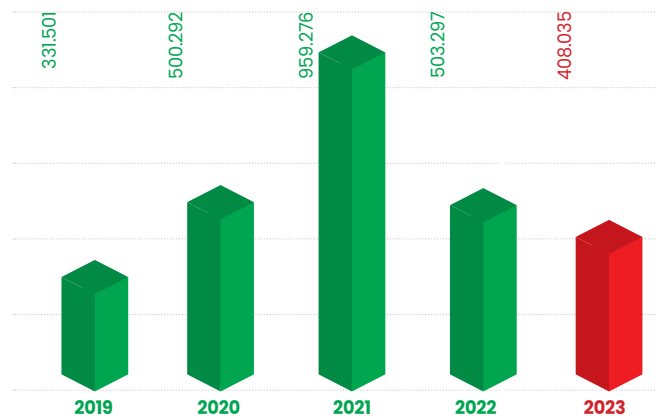
IKHTISAR BISNIS DAN ORGANISASI BUSINESS AND ORGANIZATIONAL HIGHLIGHTS

dalam jutaan Rupiah
In IDRmillion

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
PENDAPATAN IMBAL JASA PENJAMINAN GUARANTEE FEE INCOME					
Imbal Jasa Kafalah Bruto Kafalah Guarantee Fee Income Total	408.035	503.297	959.276	500.292	331.501

Imbal Jasa Kafalah Bruto
Kafalah Guarantee Fee Income Total

(juta Rp)
(IDRmillion)





Ikhtisar Organisasi

Organization Overview

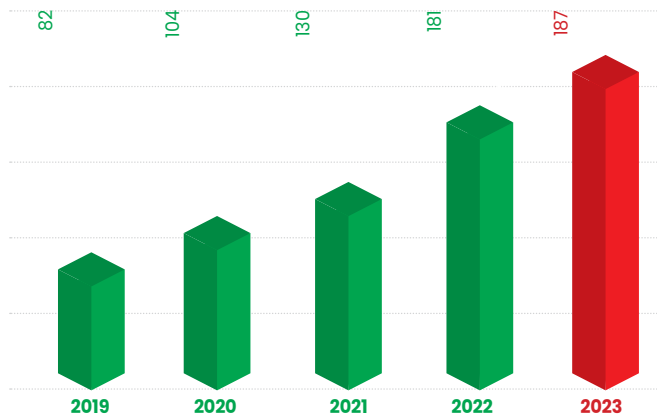
Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
KONTRAK MANAJEMEN MANAGEMENT CONTRACT					
PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE					
Skor Assessment GCG GCG Assessment Score	90,88	87,01	86,34	85,51	84,79
Predikat Hasil Assessment GCG GCG Assessment Predicate	"Sangat Baik" "Very Good"	"Sangat Baik" "Very Good"	"Sangat Baik" "Very Good"	"Sangat Baik" "Very Good"	"Sangat Baik" "Very Good"
KETENAGAKERJAAN MANPOWER					
Jumlah Karyawan (orang) Number of Employees (people)	187	181	130	104	82

Ketjumlah :

karyawan pkwt 184 (tanpa karyawan penugasan), 187 (dengan karyawan penugasan),

karyawan pkwt 93

Jumlah Karyawan (orang)
Number of Employees (people)





IKHTISAR SAHAM SHARE OVERVIEW

Jumlah Saham dan Pemegang Saham

Jumlah keseluruhan saham Jamkrindo Syariah sebanyak 1.410.241 lembar saham Seri A yang dimiliki oleh PT Jamkrindo (Persero) atau 99,93%, dan Kowajasa sebanyak 1000 (seribu) lembar saham Seri B atau sebesar 0,07%,

Informasi Tentang Perdagangan Saham Dan Kepemilikan Saham Oleh Publik

Hingga 31 Desember 2023 Jamkrindo Syariah tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait perdagangan saham.

Informasi Tentang Aksi Korporasi

Di sepanjang tahun 2022 dan 2023, Jamkrindo Syariah tidak melakukan aksi korporasi seperti aksi pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus, maupun penurunan nilai nominal saham.

Number of Shares and Shareholders

The total number of Jamkrindo Syariah shares consists of 0 Series A shares owned by PT Jamkrindo (Persero) or 99.99%, and Kowajasa with 1 (one) Series B share or 0.01%.

Information About Share Trading And Public Share Ownership

As of December 31, 2023, Jamkrindo Syariah did not trade its shares to the public. Therefore, there is no information regarding share trading.

Information About Corporate Actions

Throughout 2022 and 2023, Jamkrindo Syariah did not conduct corporate actions such as stock splits, reverse stocks, bonus shares, or reduction in the nominal value of shares.

INFORMASI TENTANG OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI, SERTA INFORMASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PENDANAAN LAINNYA INFORMATION ABOUT BONDS, SUKUK OR CONVERTIBLE BONDS, AND OTHER CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY FUNDING INFORMATION

Hingga 31 Desember 2023, Jamkrindo Syariah tidak melakukan pencatatan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, maupun pencatatan efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk. Jamkrindo Syariah juga tidak menerbitkan surat utang untuk pendanaan lainnya seperti Surat Berjangka Menengah, atau *Medium Term Notes*.

As of December 31, 2023, Jamkrindo Syariah has not listed any bonds, sukuk or convertible bonds, or other securities. Therefore, there is no information regarding the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest rates/returns, maturity dates, and bond/sukuk ratings. Jamkrindo Syariah also did not issue debt securities for other funding such as *Medium Term Notes*.



KILAS PERISTIWA 2023

2023 EVENTS HIGHLIGHTS



4 Januari 2023

January 4, 2023

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
Antara PT Jamkrindo Syariah Dengan PT
Bursa Akselerasi Indonesia
Signing of the Cooperation Agreement
between PT Jamkrindo Syariah and PT
Bursa Acceleration Indonesia



21 Maret 2023

March 21, 2023

PT Jamkrindo Syariah Meraih Penghargaan
Baznas Award 2023
PT Jamkrindo Syariah Wins the 2023 Baznas
Award



31 Maret 2023

March 31, 2023

PT Jamkrindo Syariah Terus Meroket di
Tahun 2023
PT Jamkrindo Syariah Continues to
Skyrocket in 2023



7 Juni 2023

June 7, 2023

PT Jamkrindo Syariah mendapatkan
penghargaan apresiasi pada TOP CSR
awards 2023.
PT Jamkrindo Syariah received an
appreciation award at the 2023 TOP CSR
awards.



3 Juli 2023

July 3, 2023

Ungkapan rasa bersyukur, Jamkrindo
Syariah berbagi hewan kurban pada hari
raya idul adha 1444H
As an expression of gratitude, Jamkrindo
Syariah shared sacrificial animals on Eid
al-Adha 1444H.



21 Juli 2023

July 21, 2023

Perubahan Susunan Direksi Dan Komisaris
PT Jamkrindo Syariah .
Changes to the composition of the
directors and commissioners of PT
Jamkrindo Syariah.



10 Agustus 2023

August 10, 2023

PT Jamkrindo Syariah mendapatkan
penghargaan dalam acara "TJSL & CSR
Awards 2023".
PT Jamkrindo Syariah received an award
at the "TJSL & CSR Awards 2023" event.



6 Oktober 2023

October 6, 2023

Kick off meeting audit tahun buku 2023 PT
Jamkrindo Syariah.
Kick off meeting of the 2023 financial year
audit of PT Jamkrindo Syariah.



21 Juli 2023

July 21, 2023

Pengadaan storage server dan server
database PT Jamkrindo Syariah.
Procurement of storage servers and
database servers for PT Jamkrindo
Syariah.



2

LAPORAN MANAJEMEN *Management Report*

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Report

Arikowo

Komisaris Utama
President Commissioner



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Report

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Assalamualaikum Wr. Wb.

Perkenankanlah kami menyampaikan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yang telah mampu melalui berbagai dinamika dan tantangan dalam menjalankan kegiatan usaha di industri penjaminan syariah sepanjang tahun 2023. Di tengah kondisi perekonomian nasional dan global yang penuh ketidakpastian, Perusahaan tetap menunjukkan kinerja yang terjaga serta komitmen dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penjaminan syariah yang mendukung penguatan ekonomi nasional.

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan dilakukan terhadap perumusan dan pelaksanaan strategi, kebijakan, serta langkah-langkah manajerial yang diambil oleh Direksi, dengan memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional Perusahaan telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah ditetapkan, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip kepatuhan syariah.

Dewan Komisaris juga senantiasa memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan nilai-nilai syariah. Dalam menjalankan perannya, Dewan Komisaris memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjaga objektivitas dan independensi. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Perusahaan, kecuali dalam hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Refleksi Ekonomi dan Industri Penjaminan Syariah 2023

Sepanjang tahun 2023, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang relatif baik di tengah perlambatan ekonomi global dan dinamika kebijakan moneter internasional yang masih ketat. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,05%, sedikit melambat dibandingkan capaian tahun sebelumnya, seiring dengan dampak kebijakan suku bunga tinggi (higher for longer) di negara maju dan normalisasi harga komoditas global. Kendati demikian, stabilitas makroekonomi nasional tetap terjaga, didukung oleh konsumsi domestik yang solid serta kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif. Dalam konteks tersebut, Dewan Komisaris memandang bahwa industri penjaminan syariah memiliki peran strategis dalam

To the esteemed Shareholders and Stakeholders,

Assalamualaikum Wr. Wb.

We express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for the performance of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, which has successfully navigated various dynamics and challenges in carrying out its business activities within the sharia guarantee industry throughout 2023. Amid continued uncertainty in the national and global economic landscape, the Company was able to maintain sound performance while consistently fulfilling its role as a sharia guarantee institution that supports national economic development.

Throughout 2023, the Board of Commissioners carried out its supervisory and advisory functions to the Board of Directors in a consistent and continuous manner. Oversight was conducted on the formulation and implementation of strategies, policies, and managerial actions undertaken by the Board of Directors, ensuring that all operational activities were executed in accordance with the approved Corporate Work Plan and Budget (RKAP), as well as in compliance with prevailing laws and regulations, including adherence to sharia principles.

The Board of Commissioners also continuously ensured that the Company was managed in a professional, transparent, and accountable manner, in line with the implementation of Good Corporate Governance principles and sharia values. In performing its duties, the Board of Commissioners took into account the interests of shareholders and other stakeholders, while maintaining objectivity and independence. The Board of Commissioners does not engage in the Company's operational decision-making, except for matters as stipulated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

Reflection on the Sharia Guarantee Economy and Industry in 2023

Throughout 2023, the Indonesian economy demonstrated relatively strong resilience amidst the global economic slowdown and the continued tightness of international monetary policy. National economic growth was recorded at 5.05%, a slight slowdown compared to the previous year, due to the impact of high interest rate policies (higher for longer) in developed countries and the normalization of global commodity prices. Nevertheless, national macroeconomic stability remained intact, supported by solid domestic consumption and adaptive fiscal and monetary policies. In this context, the Board of Commissioners views the Sharia guarantee industry as



menjaga kesinambungan pembiayaan sektor produktif serta mendukung proyek-proyek bernilai besar yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan kondisi ekonomi tersebut, industri penjaminan nasional mencatatkan kinerja yang positif sepanjang tahun 2023. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset industri penjaminan meningkat menjadi Rp46,41 triliun, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, penerbitan Roadmap Lembaga Penjamin 2023–2027 oleh OJK memberikan arah kebijakan yang penting bagi penguatan industri penjaminan ke depan, termasuk dalam aspek tata kelola, pengembangan produk, serta pengelolaan risiko. Dewan Komisaris menilai bahwa kebijakan ini memberikan fondasi yang kuat bagi peningkatan daya tahan dan keberlanjutan industri penjaminan syariah, sekaligus menjadi momentum bagi Jamkrindo Syariah untuk terus memperkuat perannya dalam ekosistem keuangan syariah nasional.

Evaluasi terhadap Kinerja Direksi dan Perusahaan

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi atas upaya dan capaian kinerja yang berhasil diraih PT Penjaminan Jamkrindo Syariah sepanjang tahun 2023. Di tengah dinamika ekonomi dan tantangan industri penjaminan, Perusahaan mampu mencatatkan laba bersih sebesar Rp33,8 miliar dengan tingkat gearing ratio yang tetap terjaga dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dewan Komisaris juga mencermati langkah strategis dalam memperkuat Mitigasi, antara lain melalui penyebaran risiko dengan menggarap celah pasar (niche market) yang menghasilkan potensi bisnis kafalah baru di beberapa Bank Pembangunan Daerah Syariah, risiko klaim yang telah berjalan secara efektif, sebagai wujud komitmen terhadap prinsip kehati-hatian serta keberlanjutan usaha Perusahaan.

Namun demikian, Dewan Komisaris menilai masih terdapat sejumlah area strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan penguatan lebih lanjut ke depan. Aspek tersebut antara lain peningkatan efisiensi operasional, percepatan transformasi dan digitalisasi proses bisnis, serta pengembangan inovasi produk penjaminan syariah yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Dewan Komisaris meyakini bahwa perbaikan berkelanjutan di area-area tersebut akan memperkuat daya saing Perusahaan, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan kontribusi Jamkrindo Syariah dalam mendukung pertumbuhan dan penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional.

Pandangan dan Rekomendasi Strategis

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat strategis, Dewan Komisaris memandang bahwa keberlanjutan bisnis PT Jamkrindo Syariah ke depan harus ditopang oleh penguatan tata kelola perusahaan yang konsisten dan berintegritas. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan serta prinsip-prinsip syariah perlu terus menjadi landasan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan

having a strategic role in maintaining the continuity of financing for the productive sector and supporting large-scale projects that contribute to national economic growth. In line with these economic conditions, the national guarantee industry recorded positive performance throughout 2023. According to data from the Financial Services Authority (OJK), total assets of the guarantee industry increased to IDR 46.41 trillion, representing significant growth compared to the previous year. Furthermore, the issuance of the 2023–2027 Guarantee Institution Roadmap by the Financial Services Authority (OJK) provides a crucial policy direction for strengthening the guarantee industry going forward, including in aspects of governance, product development, and risk management. The Board of Commissioners believes that this policy provides a strong foundation for increasing the resilience and sustainability of the Sharia guarantee industry, while also providing momentum for Jamkrindo Syariah to continue strengthening its role in the national Sharia financial ecosystem.

Evaluation of the Board of Directors' and Company Performance

The Board of Commissioners extends its appreciation to the Board of Directors for the efforts and performance achievements delivered by PT Jamkrindo Syariah throughout 2023. Amid economic dynamics and challenges within the guarantee industry, the Company successfully recorded a net profit of IDR 33.8 billion, while maintaining its gearing ratio within the limits stipulated by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK). The Board of Commissioners also observes strategic steps in strengthening Mitigation, including through risk distribution by working on market gaps (niche markets) that generate new kafalah business potential in several Sharia Regional Development Banks, claim risks that have been running effectively, as a form of commitment to the principle of prudence and the sustainability of the Company's business.

Nevertheless, the Board of Commissioners observes that several strategic areas require further strengthening going forward. These include the enhancement of operational efficiency, acceleration of business process digitalization, and the development of more adaptive and innovative sharia guarantee products in response to evolving market needs. Continuous improvements in these areas are expected to further strengthen the Company's competitiveness, expand its service outreach, and enhance PT Jamkrindo Syariah's contribution to the growth and strengthening of the national sharia economic ecosystem.

Strategic Outlook and Recommendations

In carrying out its oversight and advisory functions, the Board of Commissioners is of the view that the future sustainability of PT Jamkrindo Syariah's business must be supported by the consistent strengthening of good corporate governance implemented with integrity. The application of the principles of transparency, accountability, and compliance with regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), as well as adherence to Sharia principles, should continue to serve as the fundamental

usaha, guna menjaga kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris juga menekankan pentingnya pengelolaan risiko yang komprehensif dan berkesinambungan. Penguatan sistem pengendalian risiko melalui pemantauan klaim dan subrogasi secara intensif, serta pelaksanaan stress testing secara berkala, menjadi langkah krusial untuk mengantisipasi potensi dampak volatilitas ekonomi global terhadap portofolio penjaminan. Pendekatan manajemen risiko yang terukur diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan dan ketahanan Perusahaan dalam berbagai kondisi ekonomi.

Sejalan dengan dinamika pasar, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus mengembangkan inovasi layanan penjaminan berbasis risiko. Pengembangan produk dan layanan perlu didukung oleh model penetapan harga (pricing) yang akurat dan berbasis analisis risiko, serta pemantauan berkelanjutan terhadap tren makroekonomi dan kebutuhan pasar. Pendekatan ini diyakini dapat meningkatkan daya saing Perusahaan sekaligus memastikan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, Dewan Komisaris memandang optimalisasi sinergi dalam ekosistem holding Indonesia Financial Group (IFG) sebagai faktor strategis untuk memperluas penetrasi pasar dan menciptakan nilai tambah. Penguatan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dalam ekosistem IFG diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan penjaminan syariah serta memperkuat peran Jamkrindo Syariah dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah nasional.

Dewan Komisaris juga menegaskan dukungan penuh terhadap tiga pilar transformasi yang telah ditetapkan oleh Direksi, yaitu Rejuvenasi Segmen Bisnis, Risk Culture, dan Digitalisasi. Konsistensi dalam penguatan lini bisnis dan kualitas layanan, penanaman budaya sadar risiko di seluruh organisasi, serta percepatan integrasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan pengendalian internal, menjadi kunci dalam memastikan transformasi berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi kinerja dan tata kelola Perusahaan secara menyeluruh.

Komposisi dan susunan Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, komposisi anggota Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang. Yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Komisaris Independen, dan 1 (satu) orang Komisaris.

basis for every business decision and operational activity, in order to maintain the trust of shareholders and stakeholders. The Board of Commissioners also emphasizes the importance of comprehensive and sustainable risk management. Strengthening the risk control system through intensive monitoring of claims and subrogation, as well as the regular implementation of stress testing, is considered essential to anticipate the potential impact of global economic volatility on the Company's guarantee portfolio. A measured and prudent risk management approach is expected to safeguard financial stability and enhance the Company's resilience under various economic conditions.

In line with market dynamics, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to continuously pursue innovation in risk-based guarantee services. Product and service development should be supported by accurate pricing models based on robust risk analysis, accompanied by continuous monitoring of macroeconomic trends and market needs. This approach is expected to enhance the Company's competitiveness while ensuring healthy and sustainable growth.

Furthermore, the Board of Commissioners views the optimization of synergies within the Indonesia Financial Group (IFG) holding ecosystem as a strategic factor in expanding market penetration and creating added value. Strengthening collaboration with Sharia financial institutions within the IFG ecosystem is expected to broaden the reach of Sharia guarantee services and reinforce Jamkrindo Syariah's role in supporting the development of the national Sharia economic ecosystem.

The Board of Commissioners also reaffirms its full support for the three transformation pillars established by the Board of Directors, namely Business Segment Rejuvenation, Risk Culture, and Digitalization. Consistent efforts to strengthen business lines and service quality, instill a risk-aware culture throughout the organization, and accelerate technological integration to improve efficiency and internal controls are regarded as key drivers in ensuring that the transformation is effectively implemented and delivers positive impacts on the Company's performance and overall governance.

Composition & structure of the Board of Commissioners

During 2023, the Board of Commissioners will consist of 3 (three) members, consisting of 1 (one) President Commissioner, 1 (one) Independent Commissioner, and 1 (one) Deputy Commissioner.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Aribowo	Komisaris Utama President Commissioner	22 Mei 2017 Akta No.11 24 Oktober 2019 Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Penjaminan Jamkrindo Syariah No.19 22 May 2017 Deed No.11 24 October 2019 Deed of Statement of Decision Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah No. 19	Oktober 2019 – Oktober 2024 October 2019 – October 2024



Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Edy Utomo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Diangkat melalui Akta Pernyataan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jamkrindo Syariah No. 42 tanggal 25 Juli 2023. Appointed through Deed of Statement Outside the General Meeting of Shareholders of PT. Jamkrindo Syariah No. 42 dated July 25, 2023.	Periode Jabatan: Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Akta No. 42 tanggal 25 Juli 2023 belum definitif dan akan berlaku setelah memperoleh persetujuan OJK melalui Fit and Proper Test Term of Office: The appointment stated in Deed No. 42 dated July 25, 2023 is not yet definitive and will take effect upon OJK approval through the Fit and Proper Test.
Alie Basya Syamsudin	Komisaris Commissioner	Diangkat melalui Akta Pernyataan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jamkrindo Syariah No. 42 tanggal 25 Juli 2023. Appointed through Deed of Statement Outside the General Meeting of Shareholders of PT. Jamkrindo Syariah No. 42 dated July 25, 2023.	Periode Jabatan: Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Akta No. 42 tanggal 25 Juli 2023 belum definitif dan akan berlaku setelah memperoleh persetujuan OJK melalui Fit and Proper Test Term of Office: The appointment stated in Deed No. 42 dated July 25, 2023 is not yet definitive and will take effect upon OJK approval through the Fit and Proper Test.

Apresiasi dan Penutup

Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan kepada Direksi atas upaya dan pencapaian yang telah diraih sepanjang 2023. Dewan Komisaris juga meyakini bahwa PT Jamkrindo Syariah telah berada pada jalur yang sehat dan stabil. Namun, penguatan pada area pengendalian risiko, digitalisasi, dan inovasi layanan sangat diperlukan untuk mempertahankan daya saing dan menjamin keberlanjutan di tengah lanskap industri yang terus berkembang. Laporan ini kami susun sebagai panduan strategis untuk mendukung Direksi dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja perusahaan.

Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan Jamkrindo Syariah yang telah menunjukkan dedikasi, profesionalisme, dan kerja keras dalam menjaga keberlanjutan operasional Perusahaan. Komitmen seluruh karyawan menjadi kekuatan yang memungkinkan Jamkrindo Syariah terus tumbuh dan memperkuat kehadirannya di industri penjaminan syariah nasional. Dewan Komisaris juga menegaskan komitmen penuh untuk mendukung transformasi yang diinisiasi Direksi melalui tiga pilar utama: Rejuvenasi Segmen Bisnis, Risk Culture, dan Digitalisasi. Kami percaya bahwa sinergi antara pengawasan yang kuat dan pelaksanaan strategi transformasi akan membawa pencapaian yang lebih baik di tahun 2024, sekaligus memperkuat posisi Jamkrindo Syariah sebagai perusahaan penjaminan syariah terdepan dan terpercaya di Indonesia.

Appreciation and Closing Remarks

The Board of Commissioners expresses its appreciation to the Board of Directors for the efforts and achievements accomplished throughout 2023. The Board is of the view that PT Jamkrindo Syariah has remained on a sound and stable growth path. Nevertheless, continuous strengthening in the areas of risk control, digitalization, and service innovation is essential to maintain competitiveness and ensure sustainability amid the evolving dynamics of the guarantee industry. This report is presented as a strategic reference to support the Board of Directors in enhancing the quality of corporate governance and overall performance.

The Board of Commissioners also conveys its sincere appreciation to all employees of Jamkrindo Syariah for their dedication, professionalism, and hard work in safeguarding the Company's operational sustainability. The collective commitment and contributions of all employees serve as a key driving force that enables Jamkrindo Syariah to continue growing and reinforcing its presence within the national Sharia guarantee industry. Furthermore, the Board of Commissioners reaffirms its full commitment to supporting the transformation initiatives undertaken by the Board of Directors through the three main pillars, namely Business Segment Rejuvenation, Risk Culture, and Digitalization. The Board believes that strong synergy between effective oversight and the consistent implementation of these transformation strategies will lead to improved performance in 2024, while further strengthening Jamkrindo Syariah's position as a leading and trusted Sharia guarantee company in Indonesia.


Aribowo
Komisaris Utama
President Commissioner
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

LAPORAN DIREKSI

Board of Director's Report

*Hari
Purnomo*

Direktur Utama
President Director



LAPORAN DIREKSI

Board of Director's Report

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga PT Jamkrindo Syariah dapat menjalankan kegiatan usaha sepanjang tahun 2023 dengan kinerja yang terjaga serta pengelolaan perusahaan yang senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian. Direksi menyampaikan Laporan Direksi ini kepada Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan strategi, pengelolaan risiko, serta kinerja operasional Perusahaan selama tahun buku 2023.

Tahun 2023 ditandai dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global yang masih diwarnai oleh ketidakpastian, termasuk tekanan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, serta penyesuaian kebijakan moneter di berbagai negara. Dalam konteks tersebut, industri penjaminan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung perluasan akses pembiayaan, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Jamkrindo Syariah merespons kondisi tersebut dengan terus memperkuat kualitas pengelolaan risiko, efektivitas proses bisnis, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Melalui Laporan Direksi ini, kami menyampaikan evaluasi kinerja Perusahaan sepanjang tahun 2023 secara komprehensif, yang mencakup capaian utama, tantangan yang dihadapi, langkah-langkah strategis yang ditempuh, serta arah pengembangan Perusahaan ke depan. Seluruh upaya tersebut merupakan wujud komitmen Direksi dalam memastikan Jamkrindo Syariah tumbuh secara sehat dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekosistem keuangan syariah nasional, sebagai anak perusahaan PT Jamkrindo yang merupakan bagian dari holding Indonesia Financial Group.

Refleksi Kinerja dan Kondisi Ekonomi 2023

Sepanjang tahun 2023, PT Jamkrindo Syariah menjalankan kegiatan usahanya di tengah dinamika perekonomian global dan nasional yang masih diwarnai oleh berbagai ketidakpastian. Berlanjutnya konflik geopolitik, tekanan inflasi global, serta pengetatan kebijakan moneter di sejumlah negara menjadi tantangan eksternal yang turut memengaruhi stabilitas pasar keuangan dan iklim usaha. Dalam kondisi tersebut, Jamkrindo Syariah terus beradaptasi dengan memperkuat ketahanan bisnis, menjaga kehati-hatian dalam pengelolaan risiko, serta memastikan seluruh aktivitas usaha tetap selaras dengan prinsip syariah dan ketentuan regulator, guna mendukung keberlanjutan kinerja perusahaan.

To the esteemed Shareholders and Stakeholders,

All praise and gratitude are due to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His blessings and guidance, enabling PT Jamkrindo Syariah to carry out its business activities throughout 2023 with well-maintained performance and sound corporate management grounded in prudence. The Board of Directors hereby presents this Directors' Report to the Shareholders and Stakeholders as a form of accountability for the implementation of strategies, risk management, and the Company's operational performance during the 2023 financial year.

The year 2023 was marked by the continued recovery of the national economy amid global economic dynamics that remained subject to uncertainty, including geopolitical tensions, volatility in financial markets, and adjustments to monetary policies across various countries. Within this context, the guarantee industry plays a strategic role in safeguarding financial system stability and supporting broader access to financing, particularly for micro, small, and medium enterprises. Jamkrindo Syariah responded to these conditions by continuously strengthening risk management quality, enhancing business process effectiveness, and maintaining compliance with Sharia principles and prevailing regulations.

Through this Directors' Report, we present a comprehensive evaluation of the Company's performance throughout 2023, encompassing key achievements, challenges encountered, strategic initiatives undertaken, and the Company's future development direction. These efforts reflect the Board of Directors' commitment to ensuring that Jamkrindo Syariah continues to grow in a healthy and sustainable manner, while contributing meaningfully to the strengthening of the national Sharia financial ecosystem, as a subsidiary of PT Jamkrindo within the Indonesia Financial Group holding.

Performance Reflection and Economic Conditions in 2023

Throughout 2023, PT Jamkrindo Syariah conducted its business activities amid dynamic global and domestic economic conditions marked by persistent uncertainty. Ongoing geopolitical tensions, elevated global inflationary pressures, and monetary tightening policies implemented in several major economies posed external challenges that affected financial market stability and the overall business environment. In response, Jamkrindo Syariah continued to adapt by strengthening business resilience, enhancing prudent risk management, and ensuring that all operations remained aligned with sharia principles and prevailing regulatory requirements, thereby supporting the



Tekanan ekonomi global pada tahun 2023 tercermin dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, di mana Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,1%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan suku bunga tinggi yang diterapkan negara maju untuk meredam inflasi memicu volatilitas pasar keuangan dan arus keluar modal dari negara berkembang. Di tengah kondisi tersebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,05% meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Stabilitas ekonomi nasional turut didukung oleh inflasi yang terkendali pada level 2,61% serta kebijakan moneter Bank Indonesia yang menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan ketahanan pasar keuangan. Dalam konteks ini, peran industri penjaminan menjadi semakin strategis dalam mendukung akses pembiayaan dan menjaga kesinambungan kegiatan usaha.

Sejalan dengan kondisi ekonomi tersebut, industri penjaminan nasional mencatatkan pertumbuhan yang positif sepanjang tahun 2023. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset industri penjaminan meningkat menjadi Rp46,41 triliun, tumbuh signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penerbitan Roadmap Lembaga Penjamin 2023–2027 oleh OJK menjadi landasan strategis bagi penguatan industri penjaminan ke depan, termasuk dalam aspek tata kelola, pengembangan produk, serta pengelolaan risiko. Bagi Jamkrindo Syariah, dinamika ini menjadi momentum untuk terus memperkuat peran perusahaan sebagai lembaga penjaminan syariah yang adaptif, prudent, dan berkontribusi nyata dalam mendukung ekosistem keuangan syariah nasional.

Capaian dan Kinerja Perusahaan Tahun 2023

Dengan berakhirnya program Penjaminan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2022, Manajemen PT Jamkrindo Syariah secara proaktif melakukan penyesuaian strategi bisnis untuk menjaga kesinambungan kinerja Perusahaan. Upaya tersebut dilakukan dengan mendiversifikasi sumber pendapatan penjaminan ke berbagai produk lainnya, baik pada segmen Penjaminan Cash Loan maupun penjaminan Non Cash Loan. Pada segmen penjaminan cash loan, fokus diarahkan pada penjaminan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sementara pada segmen non cash loan, Perusahaan mengandalkan produk penjaminan surety bond dan penjaminan kontra bank garansi sebagai penopang aktivitas usaha.

Sepanjang tahun 2023, kinerja penjaminan cash loan menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Total volume penjaminan cash loan tercatat sebesar Rp13,99 triliun, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp6,93 triliun. Penjaminan FLPP memberikan kontribusi terbesar dengan volume sebesar Rp7,79 triliun atau sekitar 55,7% dari total penjaminan cash loan, sementara penjaminan KUR berkontribusi sebesar Rp4,85 triliun atau setara dengan 34,7%. Peningkatan

sustainability of the Company's performance.

Global economic pressures in 2023 were reflected in a slowdown in world economic growth. According to the International Monetary Fund (IMF), global economic growth was projected at 3.1%, lower than the previous year. High interest rate policies adopted by advanced economies to contain inflation resulted in increased market volatility and capital outflows from emerging markets. Despite these conditions, Indonesia's economy remained resilient, recording growth of 5.05%, albeit slightly lower than in 2022. Economic stability was supported by well-managed inflation at 2.61% and the monetary policy stance of Bank Indonesia, which maintained a balance between price stability and financial market resilience. In this context, the role of the guarantee industry became increasingly strategic in supporting financing access and sustaining business activities.

In line with these economic developments, the national guarantee industry recorded positive growth throughout 2023. Based on data from the Financial Services Authority (OJK), total assets of the guarantee industry increased to IDR 46.41 trillion, reflecting significant growth compared to the previous year. The issuance of the Guarantee Institution Roadmap 2023–2027 by OJK provides a strategic framework for the future development of the guarantee industry, encompassing governance enhancement, product development, and risk management. For Jamkrindo Syariah, these developments serve as momentum to further strengthen its role as a sharia-based guarantee institution that is adaptive, prudent, and capable of delivering meaningful contributions to the national sharia financial ecosystem.

Company Performance and Achievements in 2023

Following the conclusion of the National Economic Recovery (PEN) Guarantee Program in 2022, the Management of PT Jamkrindo Syariah proactively adjusted its business strategy to maintain the sustainability of the Company's performance. These efforts were carried out by diversifying guarantee revenue sources across various products, both in the financing guarantee (cash loan) segment and the non-financing guarantee (non-cash loan) segment. In the cash loan segment, the Company focused on guarantees for the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) and People's Business Credit (KUR), while in the non-cash loan segment, surety bonds and counter bank guarantees remained key products supporting business activities.

Throughout 2023, the cash loan guarantee segment recorded very strong growth. Total cash loan guarantee volume reached Rp13.99 trillion, more than doubling compared to Rp6.93 trillion in 2022. FLPP guarantees contributed the largest portion, amounting to Rp7.79 trillion or approximately 55.7% of total cash loan guarantees, while KUR guarantees accounted for Rp4.85 trillion or around 34.7%. This performance reflects the Company's strengthened role in supporting housing financing and MSME

ini mencerminkan keberhasilan Perusahaan dalam memperkuat perannya dalam mendukung pembiayaan sektor perumahan dan UMKM melalui skema penjaminan syariah.

Di sisi lain, volume penjaminan non cash loan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Total volume penjaminan non cash loan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp17,17 triliun, menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang mencapai Rp35,18 triliun. Penurunan ini merupakan langkah strategis yang secara sadar diambil oleh Manajemen sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penjaminan serta penguatan mitigasi risiko. Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas portofolio, mengendalikan potensi klaim, serta memastikan keberlanjutan kinerja Perusahaan dalam jangka panjang.

Menyikapi dinamika kinerja tersebut, Direksi secara aktif mengimplementasikan berbagai inisiatif strategis yang berfokus pada penguatan fondasi bisnis dan penciptaan pertumbuhan yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui optimalisasi proses bisnis penjaminan syariah guna meningkatkan efisiensi operasional dan kecepatan layanan kepada terjamin dan mitra bisnis. Selain itu, Perusahaan juga terus mendorong inovasi produk dan pengembangan layanan berbasis digital sebagai bagian dari transformasi berkelanjutan, dengan tujuan memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat daya saing Jamkrindo Syariah di industri penjaminan syariah nasional.

Tantangan dan Respons Perusahaan

Sepanjang tahun 2023, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari faktor eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, dinamika perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian, fluktuasi suku bunga, serta perubahan kebijakan fiskal dan moneter memberikan pengaruh terhadap iklim usaha secara umum. Di samping itu, tingkat literasi dan penetrasi produk penjaminan syariah di sejumlah segmen pasar masih memerlukan penguatan, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses keuangan. Tantangan lainnya adalah kebutuhan untuk melakukan peralihan (switching) dari portofolio penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke berbagai produk penjaminan lainnya, guna menjaga kesinambungan kinerja dan pendapatan Perusahaan pasca berakhirnya program tersebut.

Dari sisi internal, Perusahaan dihadapkan pada tantangan adaptasi transformasi digital di tengah proses bisnis yang sebelumnya telah berjalan dengan sistem dan pola kerja konvensional. Rejuvenasi bisnis menjadi kebutuhan penting, khususnya dalam membangun pemahaman dan kesiapan sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan perubahan sistem, proses, dan cara kerja baru. Selain itu, pembentukan budaya risiko (risk culture) yang kuat menjadi prioritas untuk memastikan setiap aktivitas penjaminan dilakukan secara prudent, terukur, dan selaras dengan ketentuan regulator, sekaligus untuk memitigasi potensi risiko dan klaim di masa mendatang.

development through sharia-based guarantee schemes.

Conversely, the non-cash loan guarantee segment experienced a significant decline in volume. Total non-cash loan guarantee volume in 2023 amounted to Rp17.17 trillion, down from Rp35.18 trillion in 2022. This decrease was a deliberate and strategic decision by Management, following a comprehensive evaluation of governance practices and the reinforcement of risk mitigation measures. The adjustment aimed to improve portfolio quality, control potential claims, and ensure the long-term sustainability of the Company's performance.

In response to these performance dynamics, the Board of Directors actively implemented various strategic initiatives focused on strengthening business fundamentals and fostering sustainable growth. These initiatives included optimizing sharia guarantee business processes to enhance operational efficiency and accelerate service delivery to guaranteed parties and business partners. In addition, the Company continued to prioritize product innovation and the development of digital-based services as part of its ongoing transformation efforts, with the objective of expanding market reach, improving service quality, and strengthening Jamkrindo Syariah's competitiveness within the national sharia guarantee industry.

Challenges and the Company's Response in 2023

Throughout 2023, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah faced various challenges arising from both external and internal factors. From an external perspective, ongoing global economic uncertainty, interest rate fluctuations, and changes in fiscal and monetary policies influenced the overall business climate. In addition, the level of literacy and market penetration of sharia guarantee products in certain segments still requires strengthening, particularly in regions with limited access to financial services. Another challenge was the need to transition (switch) the Company's guarantee portfolio from the National Economic Recovery (PEN) program to other guarantee products, in order to maintain the continuity of the Company's performance and revenue following the conclusion of the program.

From an internal perspective, the Company encountered challenges related to adapting to digital transformation amid business processes that had previously been conducted using conventional systems and workflows. Business rejuvenation became an essential requirement, particularly in building the understanding and readiness of human resources to adapt to new systems, processes, and ways of working. Furthermore, the establishment of a strong risk culture became a priority to ensure that guarantee activities are carried out prudently, in a measurable manner, and in alignment with regulatory requirements, while also mitigating potential risks and claims in the future.



Menjawab berbagai tantangan tersebut, Jamkrindo Syariah menetapkan strategi transformasi yang berfokus pada keberlanjutan dan peningkatan daya saing melalui tema “Transform To Be Better & Sustainable.” Strategi ini dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu Rejuvenasi Segmen Bisnis, Risk Culture, dan Digitalisasi. Ketiga pilar tersebut menjadi fondasi dalam memperkuat kinerja operasional, meningkatkan kualitas tata kelola, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Melalui Rejuvenasi Segmen Bisnis, Perusahaan berupaya memperkuat daya saing dan meningkatkan kualitas layanan dengan mengoptimalkan setiap lini bisnis penjaminan, menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar, serta memperbaiki pengalaman pelanggan melalui layanan yang lebih cepat, transparan, dan berbasis teknologi. Penguatan basis data pipeline berbasis risiko juga dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat, meminimalkan potensi klaim, dan menjaga profitabilitas Perusahaan.

Dalam pilar Risk Culture, Jamkrindo Syariah menanamkan kesadaran risiko secara menyeluruh di seluruh lini organisasi. Penguatan penerapan Three Lines of Defense, peningkatan risk awareness melalui pelatihan dan pengawasan berkelanjutan, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan menjadi bagian integral dalam memastikan pengelolaan risiko yang efektif dan berkelanjutan. Sementara itu, Digitalisasi menjadi motor penggerak efisiensi dan inovasi Perusahaan. Transformasi digital dilakukan melalui penguatan sistem informasi manajemen yang terintegrasi secara real-time, guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Di sisi lain, Perusahaan juga mendorong perubahan mindset dari proses manual menuju digital melalui penyederhanaan alur kerja, automasi proses, serta integrasi antar sistem, sehingga mampu meningkatkan kecepatan layanan, akurasi data, dan efektivitas operasional secara keseluruhan.

Melalui implementasi strategi transformasi tersebut, Direksi meyakini bahwa Jamkrindo Syariah berada pada jalur yang tepat untuk memperbaiki kualitas iklim bisnis dan memperkuat tata kelola perusahaan secara menyeluruh, tanpa kehilangan relevansi dan daya saing di tengah dinamika pasar yang terus berkembang. Transformasi ini dirancang tidak hanya untuk menjawab tantangan jangka pendek, tetapi juga untuk membangun fondasi pertumbuhan yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga Perusahaan mampu merespons kebutuhan pasar secara cepat sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, kepatuhan regulasi, dan nilai-nilai syariah. Keyakinan ini menjadi landasan Direksi dalam memastikan bahwa Jamkrindo Syariah terus tumbuh sejalan dengan ekspektasi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya.

In response to these challenges, Jamkrindo Syariah implemented a transformation strategy focused on sustainability and enhanced competitiveness under the theme “Transform To Be Better & Sustainable.” This strategy is built upon three main pillars: Business Segment Rejuvenation, Risk Culture, and Digitalization. These pillars serve as the foundation for strengthening operational performance, improving the quality of corporate governance, and creating sustainable value for all stakeholders.

Through Business Segment Rejuvenation, the Company seeks to enhance competitiveness and service quality by optimizing each guarantee business line, aligning products with market needs, and improving customer experience through faster, more transparent, and technology-based services. The strengthening of a risk-based pipeline database is also undertaken to support more accurate business decision-making, minimize potential claims, and maintain the Company’s profitability.

Under the Risk Culture pillar, Jamkrindo Syariah instills comprehensive risk awareness across all levels of the organization. The reinforcement of the Three Lines of Defense, enhancement of risk awareness through continuous training and supervision, and strict compliance with standard operating procedures and regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) form an integral part of ensuring effective and sustainable risk management. Meanwhile, Digitalization serves as the driving force behind the Company’s efficiency and innovation. Digital transformation is carried out through the strengthening of real-time integrated management information systems to support data-driven decision-making. In parallel, the Company promotes a shift in mindset from manual processes toward digital approaches through workflow simplification, process automation, and system integration, thereby improving service speed, data accuracy, and overall operational effectiveness.

Through the implementation of this transformation strategy, the Board of Directors believes that Jamkrindo Syariah is on the right path to improving the quality of its business climate and strengthening overall corporate governance, without losing relevance and competitiveness amid continuously evolving market dynamics. This transformation is designed not only to address short-term challenges, but also to build a foundation for healthy, adaptive, and sustainable growth. Accordingly, the Company remains capable of responding swiftly to market needs while consistently upholding prudence, regulatory compliance, and sharia principles. This confidence forms the basis of the Board of Directors’ commitment to ensuring that Jamkrindo Syariah continues to grow in line with the expectations of Shareholders and other stakeholders.

Prospek dan Arah Bisnis 2024

Memasuki tahun 2024, perekonomian Indonesia diperkirakan masih akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersumber dari dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil. Ketidakpastian geopolitik, pengetatan kebijakan moneter global, serta volatilitas pasar keuangan masih menjadi faktor yang memengaruhi keyakinan pelaku usaha. Selain itu, pelaksanaan agenda demokrasi nasional pada tahun 2024 turut memberikan dinamika tersendiri terhadap iklim investasi dan ekspansi bisnis. Kendati demikian, Pemerintah Indonesia tetap optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga pada level yang solid, dengan target pertumbuhan sebesar 5,2% pada tahun 2024.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi dan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, serta penguatan pembiayaan inovatif. Reformasi perpajakan dan pemberian insentif fiskal yang tepat sasaran diharapkan mampu mendorong investasi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional, sehingga upaya peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM terus diperkuat. Kondisi tersebut membuka peluang pertumbuhan yang berkelanjutan bagi industri penjaminan, termasuk penjaminan berbasis syariah.

Jamkrindo Syariah memandang prospek bisnis tahun 2024 dengan optimisme yang terukur, seiring dengan telah dibangunnya fondasi transformasi Perusahaan melalui penguatan budaya risiko (risk culture), rejuvenasi segmen bisnis, dan digitalisasi. Dengan landasan tersebut, Perusahaan berencana untuk kembali meningkatkan kinerja segmen penjaminan non-cash loan secara selektif dan prudent, sejalan dengan penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Selain itu, Jamkrindo Syariah akan terus memperkuat sinergi dengan induk perusahaan serta IFG Group, sekaligus memperluas kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan penetrasi produk penjaminan, termasuk melalui pemanfaatan platform digital. Dengan fondasi operasional yang semakin kuat, tata kelola yang sehat, serta dukungan ekosistem keuangan syariah yang terus berkembang, Direksi optimistis Jamkrindo Syariah dapat melanjutkan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta menjaga dan memperkuat kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

Prospects and Business Direction 2024

Entering 2024, Indonesia's economic outlook is expected to remain challenging amid ongoing global uncertainties. Geopolitical tensions, continued monetary tightening in advanced economies, and volatility in global financial markets are anticipated to influence business confidence. In addition, the national democratic agenda in 2024 is expected to create a dynamic environment that may affect investment decisions and business expansion. Nevertheless, the Government of Indonesia remains optimistic that economic growth will be maintained at a solid level, with a targeted growth rate of 5.2% in 2024.

In response to these conditions, the Government continues to pursue comprehensive economic transformation and fiscal reform through the optimization of state revenues, enhancement of expenditure quality, and promotion of innovative financing. Tax reform and well-targeted fiscal incentives are expected to support investment and sustain economic momentum. Within this context, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) remain a key pillar of the national economy, prompting continued efforts to expand access to financing for this segment. These developments present sustainable growth opportunities for the guarantee industry, including sharia-based guarantee services.

Jamkrindo Syariah views the business outlook for 2024 with measured optimism, supported by the strengthening of its transformation foundation through the establishment of a robust risk culture, business segment rejuvenation, and digitalization. Building on these initiatives, the Company plans to selectively and prudently enhance its non-cash loan guarantee segment, in line with strengthened governance and risk management. Furthermore, Jamkrindo Syariah will continue to reinforce synergies with its parent company and IFG Group, while expanding collaboration with Islamic financial institutions to increase the penetration of guarantee products, including through digital platforms. With a solid operational foundation, sound governance, and the continued development of the Islamic financial ecosystem, the Board of Directors is confident that Jamkrindo Syariah will be able to sustain its growth trajectory, enhance its contribution to the national economy, and maintain the trust of all stakeholders.



Komposisi dan Susunan Direksi

Selama tahun 2023, komposisi anggota Direksi berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Operasional, dan 1 (satu) orang Direktur Keuangan, SDM & Umum.

Composition and Structure of the Board of Directors

During 2023, the composition of the Board of Directors will be 3 (three) people, consisting of 1 (one) President Director, 1 (one) Operational Director, and 1 (one) Director of Finance, HR & General Affairs.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Hari Purnomo	Direktur Utama President Director	Diangkat melalui Akta Pernyataan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jamkrindo Syariah No. 42 tanggal 25 Juli 2023. Appointed through Deed of Statement Outside the General Meeting of Shareholders of PT. Jamkrindo Syariah No. 42 dated July 25, 2023.	Periode Jabatan: Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Akta No. 42 tanggal 25 Juli 2023 belum definitif dan akan berlaku setelah memperoleh persetujuan OJK melalui Fit and Proper Test Term of Office: The appointment stated in Deed No. 42 dated July 25, 2023 is not yet definitive and will take effect upon OJK approval through the Fit and Proper Test.
Loesdarwanto	Direktur Operasional Director of Operations	Diangkat melalui Akta Pernyataan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jamkrindo Syariah No. 42 tanggal 25 Juli 2023. Appointed through Deed of Statement Outside the General Meeting of Shareholders of PT. Jamkrindo Syariah No. 42 dated July 25, 2023.	Periode Jabatan: Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Akta No. 42 tanggal 25 Juli 2023 belum definitif dan akan berlaku setelah memperoleh persetujuan OJK melalui Fit and Proper Test Term of Office: The appointment stated in Deed No. 42 dated July 25, 2023 is not yet definitive and will take effect upon OJK approval through the Fit and Proper Test.
Endang Sri Winarni	Direktur Keuangan, SDM & Umum Director of Finance, Human Resource, and General Affairs	Akta Notaris Nomor 19 tanggal 24 Oktober 2019 Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP2808/ NB.1/2014 tanggal 22 Oktober 2014. Deed No. 19 24 October 2019 Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-2808/NB.1/2014 dated 22 October 2014	Juni 2019 – Juni 2024 June 2019 – June 2024

Apresiasi dan Penutup

Direksi menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, regulator, mitra perbankan dan lembaga keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungan, kepercayaan, dan sinergi yang terjalin sepanjang tahun 2023. Penguatan kinerja Perusahaan tidak terlepas dari kolaborasi strategis yang terbangun serta kepercayaan yang diberikan kepada Jamkrindo Syariah untuk terus berperan dalam memperluas akses pembiayaan syariah, khususnya bagi sektor UMKM dan masyarakat luas.

Direksi juga menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh Insan Jamkrindo Syariah atas dedikasi, profesionalisme, dan semangat kebersamaan yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2023. Komitmen dan kerja keras seluruh karyawan menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas operasional serta mendorong pertumbuhan Perusahaan di tengah dinamika dan tantangan yang dihadapi.

Appreciation and Closing

The Board of Directors extends its highest appreciation and gratitude to the Shareholders, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, regulators, banking partners and financial institutions, as well as all stakeholders for their continued support, trust, and collaboration throughout 2023. The strengthening of the Company's performance would not have been possible without the strategic partnerships and confidence entrusted to Jamkrindo Syariah in carrying out its role to expand access to sharia-based financing, particularly for MSMEs and the wider community.

The Board of Directors also conveys its sincere appreciation to all Jamkrindo Syariah employees for their dedication, professionalism, and strong sense of togetherness demonstrated throughout 2023. The commitment and hard work of all employees remain a vital foundation in maintaining operational stability and driving the Company's growth amid an increasingly dynamic and challenging business environment.

Menatap tahun 2024, Direksi optimistis bahwa melalui penguatan proses bisnis, integrasi data, peningkatan kapabilitas digital, serta sinergi yang semakin erat di lingkungan IFG Group, Jamkrindo Syariah mampu mencapai target-target strategis yang telah ditetapkan dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan memohon rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Direksi meyakini bahwa Jamkrindo Syariah akan terus tumbuh secara berkelanjutan, memperluas kebermanfaatannya, serta menjaga amanah dan integritas dalam setiap langkah perjalanan Perusahaan ke depan.

Looking ahead to 2024, the Board of Directors remains optimistic that through the strengthening of business processes, data integration, enhancement of digital capabilities, and closer synergy within the IFG Group, Jamkrindo Syariah will be able to achieve its strategic targets and deliver greater added value to all stakeholders. By seeking the grace and guidance of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Board firmly believes that the Company will continue to grow sustainably, expand its positive impact, and uphold its mandate with integrity in every step of its journey forward.

Hari Purnomo
Direktur Utama
President Director
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah



PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT STATEMENT OF RESPONSIBILITY

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Tentang Tanggung Jawab atas Kebenaran Isi Laporan
Tahunan PT Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan
bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan
PT Jamkrindo Syariah tahun 2023 telah dimuat secara
lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran
isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini
dibuat dengan sebenarnya.

Statement of Responsibility from the members of Board of
Directors and Board of Commissioners on the correctness of
the content of PT Jamkrindo Syariah's Annual Report in 2023

We, the undersigned, state that all information in the
Annual Report of PT Jamkrindo Syariah of 2023 contains
complete information and we are fully responsible for the
correctness of the content of the Company's Annual Report.
This statement is made truthfully and consciously.

Jakarta, 24 Juni 2024

Jakarta, June 24, 2024

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Edy Utomo
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Aribowo
Komisaris Utama
President Commissioner

Alie Basya Syamsudin
Komisaris
Commissioner

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Loesdarwanto
Direktur Operasional
Director of Operations

Hari Purnomo
Direktur Utama
President Director

Endang Sri Winarni
Direktur Keuangan, SDM & umum
Director of Finance, Human Resource, &
General Affairs



3

PROFIL PERUSAHAAN *Company Profile*

INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

GENERAL INFORMATION AND CORPORATE IDENTITY

Nama Perusahaan

Company Name



Syariah
Jamkrindo

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah disingkat PT Jamkrindo Syariah

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah or abbreviated to PT Jamkrindo Syariah

Bentuk dan Status Badan Usaha

Form and Status of Business Entity

Perseroan Terbatas (PT)
Limited Liability Company

Tanggal Pendirian

Date of Establishment

19 September 2014
September 19, 2014

Dasar Hukum Pendirian

Legal Basis of Establishment

Dasar Hukum Pendirian PT Jamkrindo Syariah Akta Pendirian No 68 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 26462.40.10.2014.

Legal Basis of PT Jamkrindo Syariah's Establishment: Notarial Deed No. 68 dated September 18, 2014 and Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU-26462.40.10.2014.



Jaringan Usaha

Business Network

15 Kantor Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia

15 Branch Offices spread throughout Indonesia

Kepemilikan

Ownership

- Saham Seri A
PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) (99,93%)
- Saham Seri B
Koperasi Warga Jamkrindo Syariah (0,07%)
- Series A Shares
PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) (99,93%)
- Series B Shares
Jamkrindo Syariah Residents' Cooperative (0.07%)

Karyawan Tetap 187 orang di tahun 2023
Permanent Employees 187 employees in 2023

Media Sosial Facebook : Jamkrindo Syariah
Social Media

Instagram : jamkrindosyariah

Youtube: PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

Linkedin : PT Jamkrindo Syariah

Bidang Usaha

Line of Business

Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, serta Koperasi (UMKMK), Penjaminan bagi BUMN, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya

Guarantee for Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives (UMKMK), Guarantee for SOEs, Guarantee for Warehouse Receipt System, and other guarantees.

Penyertaan Modal Negara

Addition of State Capital

Rp 1.000.000.000.000
(satu triliun rupiah)

IDR 1,000,000,000,000
(one trillion Rupiah)

Alamat dan Informasi Perusahaan

Company Address and Information

Gedung Jamkrindo Syariah
Jl Letjend Suprpto No 20, Cempaka Putih
Timur, Jakarta Pusat 10510
Telp. 021 – 212 42 777
Website: www.jamkrindosyariah.co.id
Email : info@jamkrindosyariah.co.id
Jamsyar Building
Jl Letjend Suprpto No 20, Cempaka Putih
Timur, Jakarta Pusat 10510
Telp. 021 – 212 42 777
Website: www.jamkrindosyariah.co.id
Email : info@jamkrindosyariah.co.id

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN BRIEF HISTORY OF THE COMPANY



Sekilas tentang Jamkrindo Syariah

Awal berdirinya PT Jamkrindo Syariah dimulai dengan kerjasama penjaminan Perum Jamkrindo dengan bank syariah pada 1997 melalui ditandatanganinya kerjasama penjaminan pembiayaan syariah dengan PT Bank Mu'amalat Indonesia. Kemudian pada tahun 2003, Perum Jamkrindo bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri dan kemudian diikuti dengan beberapa mitra bank syariah maupun lembaga non-bank.

Seiring perkembangan bisnis syariah, utamanya Perbankan Syariah, maka dibentuk unit usaha Syariah Perum Jamkrindo dalam bentuk Divisi Penjaminan Syariah, berdasarkan rekomendasi DSN Nomor U-217/ DSN-MUI/IX/2006 tanggal 15 September 2006. Divisi Penjaminan Syariah beroperasi sejak 13 Februari 2007, melayani Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah, baik Bank maupun Non Bank.

Overview of Jamkrindo Syariah

The establishment of PT Jamkrindo Syariah began with Perum Jamkrindo's guarantee cooperation with Islamic banks in 1997 through the signing of a sharia financing guarantee cooperation with PT Bank Mu'amalat Indonesia. Then in 2003, Perum Jamkrindo cooperated with Bank Mandiri Syariah and then followed by several Islamic bank partners and non-bank institutions.

Along with the development of sharia business, especially Sharia Banking, the Sharia business unit of Perum Jamkrindo was established in the form of Sharia Guarantee Division, based on DSN recommendation Number U-217/ DSN-MUI/IX/2006 dated September 15, 2006. The Sharia Guarantee Division has been operating since February 13, 2007, serving the Financing Guarantee (Kafalah) of Sharia Financial Institutions, both banks and non-banks.



Untuk memurnikan kegiatan usahanya, maka Perum Jamkrindo membentuk PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yang resmi didirikan pada tanggal 19 September 2014 berdasarkan Akta Notaris Nomor 68 oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. tanggal 19 September 2014. Di tahun yang sama, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah secara resmi telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-26462.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Pada tanggal 7 November 2014, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah mendapatkan izin perusahaan penjaminan dari OJK melalui Surat Izin OJK No. Kep-134/D.05/2014. Untuk menjalankan bisnis penjaminan syariah, PT Jamkrindo Syariah mendapatkan izin produk Suretyship dari OJK No.S- 489/2014 Tanggal 19 Desember 2014 dan pencatatan produk Surety Bond, Customs Bond, dan Kontra Bank Garansi melalui surat OJK No. S-34/2015 tanggal 15 Januari 2015.

Awal tahun 2015 juga menjadi momentum bagi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dalam memperluas jangkauan layanan penjaminan syariah. Melalui surat nomor S-27/ NBB.223/2015 tanggal 23 Januari 2015, PT Jamkrindo Syariah diberi izin membuka kantor cabang di Kota Medan, Bandung, dan Surabaya. Dalam menjalankan bisnis, PT Jamkrindo Syariah didukung oleh Kantor Unit Pelayanan. Pada tahun 2020, Perseroan memiliki 3 kantor unit pelayanan naik status menjadi cabang yaitu Lampung, Balikpapan dan Mataram, sehingga Perseroan memiliki 11 kantor cabang dan 3 kantor unit pelayanan.

Dengan produk dan jasa layanan keuangan syariah yang terus berkembang, Perusahaan Penjaminan harus mampu memenuhi kebutuhan melalui produk-produk penjaminan sesuai kebutuhan pasar dengan semangat untuk senantiasa mewujudkan visi Perusahaan untuk menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah Terpercaya dan Terdepan dalam Pertumbuhan Bisnis di Indonesia, Insya Allah. PT Jamkrindo Syariah siap menjembatani entitas bisnis berbasis syariah, mengakses pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah dan menyediakan produk-produk sesuai dengan kebutuhan pasar.

sama, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah secara resmi telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-26462.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

To refine its business activities, Perum Jamkrindo established PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, which was officially founded on September 19, 2014, pursuant to Notarial Deed Number 68 executed by Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. dated September 19, 2014. In the same year, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah was officially registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Ministerial Decree Number AHU-26462.40.10.2014 regarding the Ratification of the Establishment of Limited Liability Company PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

On November 7, 2014, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah obtained a guarantee company license from the Financial Services Authority (OJK) through OJK License Letter No. Kep-134/D.05/2014. To conduct syariah guarantee business operations, PT Jamkrindo Syariah secured product licensing for Suretyship from OJK No. S-489/2014 dated December 19, 2014, and product registration for Surety Bond, Customs Bond, and Counter Bank Guarantee through OJK letter No. S-34/2015 dated January 15, 2015.

The beginning of 2015 marked a significant milestone for PT Penjaminan Jamkrindo Syariah in expanding its syariah guarantee service network. Through letter number S-27/ NBB.223/2015 dated January 23, 2015, PT Jamkrindo Syariah was authorized to establish branch offices in Medan, Bandung, and Surabaya. In its business operations, PT Jamkrindo Syariah is supported by Service Unit Offices. In 2020, three service unit offices were elevated to branch status—namely Lampung, Balikpapan, and Mataram—bringing the company's network to 11 branch offices and 3 service unit offices.

With continuously evolving syariah financial products and services, the Guarantee Company must meet market demands through guarantee products that align with market requirements, driven by the commitment to realize the Company's vision of becoming the Most Trusted and Leading Syariah Guarantee Company in Business Growth in Indonesia, God willing. PT Jamkrindo Syariah stands ready to bridge syariah-based business entities, facilitate financing access to Syariah Financial Institutions, and provide products tailored to market needs.

In the same year, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah was officially registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Ministerial Decree Number AHU-26462.40.10.2014 regarding the Ratification of the Establishment of Limited Liability Company PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA

LINE OF BUSINESS AND PRODUCTS AND SERVICES

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perusahaan sebagaimana disebutkan pada Akta Pendirian PT Jamkrindo Syariah No. 68 pasal 3 tanggal 19 September 2014 adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha yang Dijalankan dan Kesesuaiannya dengan Anggaran Dasar Perusahaan

Dalam upaya mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat menyelenggarakan beberapa kegiatan usaha dan kebijakan pengembangan usaha untuk mendukung pembiayaan. Berikut disampaikan pelaksanaan kegiatan usaha dan kebijakan pengembangan usaha yang telah dilakukan.

Business Activities Based on the Articles of Association

Business activities outlined by the Company in accordance with its Articles of Association and/or Law No. 18 paragraph 3 dated September 19, 2014 include:

Business Activities That Are Conducted and Developed in Accordance with the Articles of Association

In an effort to achieve its goals and objectives, the Company may conduct several business activities and business development policies to increase competitiveness in a complete and integrated manner. The business activities that have been conducted include:

No	Kegiatan Activities	Telah/Belum Dijalankan Has/Has not been Implemented
1.	Penjaminan atas Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan dan di luar Lembaga Keuangan; Provision of Sharia-based financing facilities that provide funds or bills equivalent to financial transactions in the form of leasing	✓
2.	Penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atau pembiayaan atau pinjaman berdasarkan Prinsip Syariah baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang disalurkan antara lain oleh Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, antara lain Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Koperasi Jasa Keuangan Syariah, koperasi lainnya yang menjalankan usaha dengan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung (channeling maupun executing); Provision of Sharia-based financing facilities that provide funds or bills equivalent to transactions in the form of partnership in a business with profit sharing based on an agreement between the Company and another party that requires the financed party to return the funds or bills after a certain period in exchange for profit sharing (including mudharabah/capital financing)	✓
3.	Penjaminan atas Pembiayaan atau Pinjaman berdasarkan Prinsip Syariah program Kemitraan yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka Program Kemitraan; Provision of Sharia-based financing facilities that provide funds or bills equivalent to transactions in the form of multilateral finance that conduct financing activities;	✓
4.	Penjaminan atas Surat Utang Provision of credit card services	✓
5.	Penjaminan Anjak Piutang/Factoring Syariah; Provision of Sharia leasing/financing services	✓
6.	Penjaminan Transaksi Dagang; Issuance of Transaction Guarantees	✓
7.	Penjaminan Distribusi; Issuance of Distribution Guarantees;	✓
8.	Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Surety Bond); Issuance of Procurement of Goods and/or Services (Surety Bond) Guarantees;	✓
9.	Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi); Issuance of Bank Guarantees (Contra Bank Guarantee);	✓



No	Kegiatan Activities	Telah/Belum Dijalankan Has/Has not been Implemented
10.	Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN); Issuance of Credit Guarantees Related to Export (SKBDN);	✓
11.	Penjaminan Letter of Credit (L/C); Issuance of Letter of Credit (L/C);	✓
12.	Penjaminan Kepabeanan (Customs Bond); Issuance of Customs Bond Guarantees;	✓
13.	Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan Syariah; Management Consulting Services Related to Sharia Financing Activities;	✓
14.	Penyediaan informasi/database Terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan Provision of Information/Database Related to Financing Business Activities;	✓

Kegiatan usaha utama Perusahaan dapat dilakukan dalam bentuk Penjaminan Bersama (*co-guarantee*) kecuali kegiatan usaha utama dalam hal Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan dan Pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi.

The Company's main business activities can be conducted in the form of a Co-Guarantee, except for the main business activity in terms of providing management consulting services related to guarantee and financing business activities, management consulting, management services, mentoring/improvement, as well as other services for Micro Enterprises, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives.

Produk dan Jasa yang Dijalankan Perusahaan

Berikut adalah jasa yang dijalankan Perseroan: Hingga 31 Desember 2023, jasa yang telah dijalankan Perseroan dan telah disesuaikan segmentasinya pada pengungkapan laporan keuangan Perseroan meliputi:

Products and Services Operated by the Company

The following are the services operated by the Company: As of December 31, 2023, the services that have been operated by the Company and have been adjusted in their segmentation for disclosure in the Company's financial statements include:

Jenis Produk Type of Product	Keterangan Description
Kafalah Pembiayaan Umum. General Financing Kafala.	Penjaminan Pembiayaan yang diajukan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha/ proyek atau kegiatan investasi yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan atau koperasi dengan tujuan untuk mendapat hasil/return dari kegiatan tersebut. General Financing Kafala provided by the Company aimed at meeting the borrower's working capital needs, either directly or indirectly, to maintain and enhance business operations in accordance with the business plan..
Kafalah Pembiayaan Multiguna. Multipurpose Financing Kafala.	Kafalah Pembiayaan Multiguna adalah Penjaminan atas Pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) kepada Terjamin (Makfuul 'Anhu) dengan sumber pengembalian adalah penghasilan tetap/gaji dan pendapatan lain perbulan yang sah dari tempat Terjamin (Makfuul 'Anhu) bekerja. Multipurpose Financing Kafala provided to fulfill various financing needs of borrowers according to their business activities, for both productive and consumptive purposes, in a comprehensive manner..
Kafalah Pembiayaan Mikro. Micro Financing Kafala.	Kafalah Pembiayaan Mikro adalah Penjaminan atas Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk keperluan modal kerja dan/atau investasi dengan Plafond maksimum sebesar Rp250.000.000,- atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) atau sesuai kesepakatan tertulis antara Jamsyar dan Penerima Jaminan (Makfuul Lahu). Micro Financing Kafala provided to micro business operators, either for productive or consumptive purposes, with simple verification procedures. (Portfolio Sale) data requirement verification refers to the documents required by the Banking partner.
Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa. Kafala Construction and Procurement of Goods/Services	Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa adalah penjaminan atas Pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) kepada Terjamin (Makfuul 'Anhu) untuk keperluan tambahan Modal Kerja, usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin (Makfuul 'Anhu) dengan Bouwheer (pemilik proyek). Kafala Construction and Procurement of Goods/Services is a guarantee of Financing provided by the Guarantee Receiver (Makfuul Lahu) to Guaranteed (Makfuul 'Anhu) for additional work capital needs, business construction services and procurement of goods / services in accordance with the employment contract between Guaranteed (Makfuul 'Anhu) with Bouwheer (project owner).

Jenis Produk Type of Product	Keterangan Description
Kafalah Kontra Bank Garansi. Kafala Against Bank Guarantee.	Kafalah Kontra Bank Garansi (KBG) adalah Pemberian Jaminan kepada Penerima Jaminan (Lembaga Keuangan Bank) atas penerbitan Bank Garansi yang diterbitkan Penerima Jaminan (Lembaga Keuangan Bank) untuk kepentingan Obligee (Pemilik Proyek). Kafala Against Bank Guarantee
Surety Bond Surety Bond	Suatu perjanjian 3 (tiga) pihak antara Penjamin atas dasar keyakinannya kepada Terjamin/Principal secara bersama-sama berjanji kepada Penerima Jaminan/Obligee/Bouwheer bahwa apabila Terjamin/Principal oleh sebab suatu hal menjadi halal atau gagal melaksanakan pekerjaan atau mengalami kegagalan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan dengan Penerima Jaminan/Obligee/Bouwheer, maka Penjaminan akan bertanggung jawab terhadap Penerima Jaminan/Obligee/Bouwheer untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Terjamin/Principal tersebut. A guarantee service provided by the Company for the implementation of construction (physical) projects, procurement of goods/services, and other contractual obligations. This enables the service recipient to fulfill their obligations to the beneficiary and serves as a guarantee to the beneficiary that the service recipient will fulfill their obligations appropriately.
Customs Bond Customs Bond	Perikatan penjaminan antara tiga pihak, Penjamin (Kafail) terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam rangka kepabeanan yang timbul dari Principal/Terjamin (Makfuul 'Anhu) terhadap Pemilik Proyek (Obligee) dalam hal Principal/Terjamin (Makfuul 'Anhu) tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. A guarantee service provided by the Company to the Customs Office for the release of goods, which ensures that the service recipient (importer) has completed all customs and import duty obligations on goods being imported.
Kafalah Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP. Kafala KPR Sejahtera Financing	Kafalah Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP adalah adalah penjaminan pembiayaan dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diberikan kepada Terjamin (Makfuul 'Anhu) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Tapak atau Susun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kafala KPR Sejahtera FLPP Financing is a financing guarantee with the support of the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) which is given to the Guaranteed (Makfuul 'Anhu) Low Income Society (MBR) in the context of Tapak or Prosperous Flats Housing as stipulated in the Minister of Public Works and Housing People.
Kafalah Distribusi Barang. Kafala Goods Distribution.	Kafalah dari Penjamin atas Distribusi Barang sesuai dengan dokumen perjanjian antara Penerima Jaminan dengan Terjamin Guarantees from the Guarantor for the Distribution of Goods is based on the agreement between the Guaranteed and Guaranteed Recipients.
Kafalah KUR-Ib. Guarantee	Kredit/Pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Guarantee
Kafalah Pembiayaan Invoice. Guarantee	Pembiayaan melalui pemberian dana talangan (qardh) untuk pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari Terjamin kepada Penerima Jaminan yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang/Obligee sesuai dengan prinsip syariah.. Guarantee

Dalam menjalankan aktivitas penjaminan, akad yang digunakan adalah Kafalah Bil Ujrah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No.74/DSN-MUI/I/2009 tanggal 15 Januari 2009 tentang Penjaminan Syariah dan POJK Nomor 6/ POJK.05/2014. Adapun akad-akad Pembiayaan yang dapat dijamin adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dari Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) berupa jual beli barang antara Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dengan Terjamin (Makfuul 'Anhu) dengan harga asal (pokok pembiayaan) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

2. Pembiayaan Salam

Pembiayaan dari Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) berupa jual beli barang antara Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dengan Terjamin (Makfuul 'Anhu) dimana barang yang dibeli Terjamin (Makfuul 'Anhu) akan diserahkan di kemudian hari sedangkan pembiayaan dilakukan di muka.

3. Pembiayaan Istishna'

Pembiayaan dari Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) berupa jual beli barang antara Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dengan Terjamin (Makfuul 'Anhu) dimana jual beli tersebut berupa pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan

In carrying out guarantee activities, the contract used is Kafalah Bil Ujrah as regulated in the DSN MUI Fatwa No.74/ DSN-MUI/I/2009 dated January 15, 2009 concerning Shariah Guarantee and POJK Number 6/POJK.05/2014. The financing contracts that can be guaranteed are as follows:

1. Murabahah Financing

Financing from the Guarantee Receiver (Makfuul Lahu) in the form of buying and selling goods between the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) and Guaranteed (Makfuul 'Anhu) with the original price (principal of financing) plus the agreed profit margin.

2. Salam Financing

Financing from the Guarantee Receiver (Makfuul Lahu) in the form of buying and selling goods between the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) and Guaranteed (Makfuul 'Anhu) where the goods purchased Guaranteed (Makfuul 'Anhu) will be delivered later while financing is carried out in advance.

3. Istishna Financing

Financing from the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) in the form of buying and selling goods between the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) and Guaranteed (Makfuul 'Anhu) where the sale is in the form of ordering certain items with certain criteria and



tertentu yang disepakati antara Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dan Terjamin (Makfuul 'Anhu), sedangkan Pembiayaan dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan pada masa yang akan datang.

4. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan berupa kerja sama usaha antara Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dengan Terjamin (Makfuul 'Anhu) dimana Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) menyediakan seluruh modal, sedangkan Terjamin (Makfuul 'Anhu) mengelola Usaha tersebut dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang timbul dari usaha tersebut akan dibagi kepada Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dan Terjamin (Makfuul 'Anhu) sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati.

5. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan berupa kerja sama usaha antara Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dan Terjamin (Makfuul 'Anhu) untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi kepada Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dan Terjamin (Makfuul 'Anhu) sesuai nishbah bagi hasil yang disepakati dan risiko ditanggung sesuai dengan kontribusi dana masing-masing.

6. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan berupa Hak Guna (Manfaat) suatu barang atau jasa dari Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dalam waktu tertentu melalui Pembayaran Sewa dari Terjamin (Makfuul 'Anhu) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

7. Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamliik

Pembiayaan berupa Hak Guna (Manfaat) suatu barang atau jasa dari Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dalam waktu tertentu melalui Pembayaran Sewa dari Terjamin (Makfuul 'Anhu), dengan disertai opsi untuk membeli/ tidak membeli barang pada akhir perjanjian Pembiayaan.

requirements agreed between the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) and Guaranteed (Makfuul 'Anhu), while Financing can be carried out in advance, installments or deferred in the future.

4. Mudharabah Financing

Financing in the form of business cooperation between the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) and Guaranteed (Makfuul 'Anhu) where the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) provides all capital, while Guaranteed (Makfuul 'Anhu) manages the Business with an agreement that the profits arising from the business will be shared with the Guarantee Receiver (Makfuul Lahu) and Guaranteed (Makfuul 'Anhu) according to the agreed profit sharing ratio.

5. Musyarakah Financing

Financing in the form of business cooperation between the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) and Guaranteed (Makfuul 'Anhu) for a particular business, where each party contributes funds with an agreement that profits will be shared with the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) and Guaranteed (Makfuul 'Anhu) according to the agreed nishbah for the results and the risks borne in accordance with the contributions of each fund.

6. Ijarah Financing

Financing in the form of Right of Use (Benefit) of an item or service from the Guarantee Receiver (Makfuul Lahu) within a certain time through Lease Payment from Guaranteed (Makfuul 'Anhu) without the transfer of ownership of the item itself.

7. Ijarah Muntahiyah Bit Tamliik

Financing Financing in the form of Right to Use (Benefits) of an item or service from a Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) at a certain time through Guaranteed Rental Payment (Makfuul 'Anhu), accompanied by an option to buy/not buy goods at the end of the Financing agreement

KOMPETENSI INTI CORE COMPETENCY

Untuk mencapai tujuan perusahaan, tidak hanya dibutuhkan strategi yang baik tetapi juga diperlukan metode untuk mengoptimalkan kemampuan perusahaan agar memiliki lebih dari kompetitornya. Hal ini lah yang disebut dengan kompetensi inti. Dengan mengoptimalkan *core competency*, Perusahaan mampu menghubungkan nilai-nilai dari inti bisnis dengan kompetensi utama bisnisnya. Sehingga perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif dan siap untuk menghadapi tantangan bisnis di masa depan.

To achieve company goals, good strategies and methods are needed so that the Company can offer more than its competitors. This is referred to as core competency. By optimizing the core competency, the Company is able to connect the values of its core business with its main business competencies. As a result, the Company will have a competitive advantage and will be ready to face future business challenges.

Kriteria Identifikasi Identification Criteria	<i>Accessibility</i>	Perluasan pasar melalui kolaborasi BUMN dan peningkatan efisiensi melalui kolaborasi <i>Holding</i> . Market expansion through the collaboration of SOEs and increased efficiency through the collaboration of Holding.
	Unik/Langka Unique/Rare	Salah satu cucu perusahaan BUMN yang bergerak dibidang penjaminan syariah khususnya untuk UMKM One of the state-owned company's grandchildren which operates in the field of sharia guarantees, especially for MSMEs.
	<i>Value Creation</i>	Mengoptimalkan reputasi dan citra terpercaya sebagai anggota Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan Syariah untuk membentuk <i>brand preference</i> di mata pelanggan Optimizing reputation and trusted image as a member of SOE's Holding in Insurance and sharia Guarantee to establish brand preference in the eyes of customers.
Risiko Risk	1. Target bisnis tidak tercapai; 2. Kualitas layanan yang dinilai kurang baik oleh pelanggan/mitra seperti layanan penjaminan dan klaim yang melebihi SLA; 3. Pelaksanaan kegiatan operasional yang tidak efisien; 4. Implementasi IT kurang sesuai dengan persyaratan <i>best practice</i> IT yang berlaku. 1. Business target not achieved; 2. Service quality that is considered poor by customers/partners, such as guarantee and claims services that exceed the SLA; 3. Inefficient implementation of operational activities; 4. IT implementation is not in accordance with applicable IT best practice requirements.	
Kendala Constraint	1. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap keberlangsungan usaha debitur UMKM Terjamin; 2. Keterbatasan ekspansi produk-produk yang <i>profitable</i> sebagai dampak dari pandemi COVID-19; 3. Persaingan usaha yang semakin ketat. 1. The impact of the COVID-19 pandemic on the business continuity of Guaranteed MSME debtors; 2. Limited expansion of profitable products as a result of the COVID-19 pandemic; 3. Business competition is getting tighter.	

Sesuai dengan kriteria identifikasi di atas dan hasil pengembangan model bisnis Perusahaan, maka kompetensi inti Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Salah satu perusahaan penjaminan syariah terbesar di Indonesia.;
2. Kapasitas penjaminan untuk UMKM sangat besar;
3. Jamkrindo Syariah lebih memahami UMKM;
4. Memiliki keahlian dan reputasi yang baik di bidang penjaminan pembiayaan UMKM, kecepatan pembayaran klaim jaminan pembiayaan, dan melayani produk sesuai kebutuhan mitra (customized product);
5. Sistem informasi yang terintegrasi secara internal dan eksternal dengan mitra bisnis;
6. Memperkuat model bisnis dengan bergabung dalam Asuransi dan Penjaminan *Holding*.

In accordance with the above identification criteria and the results of the development of the Company's business model, the Company's core competencies are as follows:

1. One of the largest sharia guarantee companies in Indonesia.;
2. The guarantee capacity of MSMEs is very large;
3. Jamkrindo syariah better understands MSMEs;
4. Having expertise and a good reputation in the field of MSME financing guarantees, speed of payment of financing guarantee claims, and providing products according to partner needs (customized products);
5. Information systems that are integrated internally and externally with partners;
6. Strengthening the business model by joining to the Insurance and Guarantee Holding.



VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan usaha yang profesional berdasarkan Risalah Rapat No. B.002/EKT/DIRUT/RUPS/1/2022 tentang Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, maka Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan Visi, Misi dan Budaya Perusahaan sebagai berikut:

In accordance with the Decision of the Directors and Board of Commissioners following the Minutes of Meeting No. 8/DRT/DEW/RUPSLB/2022 concerning the ratification of the Company's Long-Term Plan (RJPP) from 2020 to 2024, the Board of Commissioners and the Board of Directors have established the Company's vision and mission as follows:



Visi Vision

Menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah Terpercaya dan Terdepan dalam Pertumbuhan Bisnis di Indonesia.
To be a Trusted and Leading Sharia Guarantee Company in Business Growth in Indonesia.

Mision Misi



Amanah 1: Melakukan kegiatan penjaminan Syariah bagi pengembangan entitas bisnis berbasis syariah di Indonesia.

Conduct Sharia guarantee activities for the development of business entities in Indonesia.

Amanah 2: Memberikan layanan yang luas dan berkualitas tinggi.

Provide extensive and high-quality service

Amanah 3: Memberikan manfaat kepada stakeholder sesuai prinsip bisnis yang sehat dan berlandaskan syariah.

Provide benefits to stakeholders according to sound business principles and based on sharia.

Budaya Perusahaan

Budaya Perusahaan merupakan intangible asset yang sangat menentukan pencapaian Visi dan Misi Perusahaan. PT Jamkrindo Syariah mengimplementasikan Budaya Perusahaan menjadi sebuah akronim AKHLAK sesuai arahan Menteri BUMN yang dituangkan dalam keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 06/Per-Dir/X/2020 - Kep-34/DK-Jamsyar/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Nilai-nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Sesuai dengan arahan Menteri BUMN kepada seluruh Perusahaan BUMN, maka budaya perusahaan Jamkrindo terdiri dari 6 (enam) butir nilai-nilai budaya yang dianut Perusahaan, yaitu budaya "AKHLAK".

Corporate Culture

Corporate Culture is an intangible asset that significantly determines the achievement of the Company's Vision and Mission. PT Jamkrindo Syariah implements the Corporate Culture in an acronym AKHLAK in accordance with the direction of the Minister of State-Owned Enterprises as outlined in the Joint Decision of the Board of Directors and Board of Commissioners Number 06/Per-Dir/X/2020 - Kep-34/DK-Jamsyar/X/2020 dated October 9, 2020 regarding Core Values of Human Resources of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

In accordance with the direction of the Minister of State-Owned Enterprises to all State-Owned Enterprises, Jamkrindo's corporate culture consists of 6 (six) cultural values embraced by the Company, namely the "AKHLAK" culture.

AKHLAK

Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

Trusted

Uphold the given trust

Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

Competent

Continuously learn and develop capabilities

Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan

Harmonious

Care to each other and respect differences

Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

Loyal

Prioritize dedication for Nation and Country

Adaptif

Terus berinovasi dan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

Adaptive

Continuously innovate to respond and make change

Kolaboratif

Membangun kerja sama yang sinergis

Collaborative

Build strategic alliance



MAKNA LOGO MEANING OF LOGO



Ikon Grafis
The Graphic Icon

Ikon grafis pada logo membentuk konfigurasi huruf "J" yang tegas dan bersudut, yang melambangkan ketegasan Perusahaan, orientasi yang fokus pada tujuan, serta konsistensi pada visi. Merupakan huruf awal Jamkrindo Syariah Menyerupai medali dengan bintang delapan yang melambangkan keberhasilan dan kemenangan sebagaimana visi Jamkrindo Syariah, yaitu: "Menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah Terpercaya dan Terdepan dalam Pertumbuhan Bisnis di Indonesia."

Visual logo "J" juga disematkan frasa "Bintang" maknanya sebagai penegasan bahwa Jamkrindo Syariah adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjaminan berbasis syariah.

The graphic icon on the logo forms a bold and angular "J" letter configuration, symbolizing the Company's firmness, goal-oriented focus, and consistency in vision. It is the initial letter of Jamkrindo Syariah resembling a medal with an eight-pointed star symbolizing success and victory as reflected in Jamkrindo Syariah's vision: "To Become the Most Trusted and Leading Sharia Guarantee Company in Business Growth in Indonesia."

The visual "J" logo also incorporates the phrase "Star" emphasizing that Jamkrindo Syariah is a company engaged in sharia-based guarantee services.



Akronim Perusahaan
The Company's Acronym

Akronim Perusahaan yaitu "Jamkrindo Syariah" merupakan singkatan dari PT Jamkrindo syariah. Akronim ini terucap sangat familiar, dengan tujuan membangun "Brand Awareness" dan identitas melalui pengucapannya, yang secara psikologis akan terekam dalam otak manusia dan memungkinkan adanya pengucapan berulang-ulang. Pemilihan huruf yang tegas, jelas, kokoh, namun sederhana dan dinamis didasari pada visi Perusahaan, yang melambangkan kepemimpinan dengan ketangguhan dan ketegasan. Jenis *bold* atau cetak tebal bertujuan untuk memperkuat makna simbolisasi nama Perusahaan dan konotasi yang relevan terhadap *core* bisnis Perusahaan.

The Company's acronym "Jamkrindo Syariah" stands for PT Jamkrindo Syariah. This acronym is pronounced in a familiar manner, with the aim of building "Brand Awareness" and identity through its pronunciation, which will psychologically be recorded in the human mind and enable repetitive mention. The selection of bold, clear, sturdy, yet simple and dynamic typography is based on the Company's vision, symbolizing leadership with resilience and assertiveness. The bold typeface aims to strengthen the symbolic meaning of the Company's name and connotations relevant to the Company's core business.

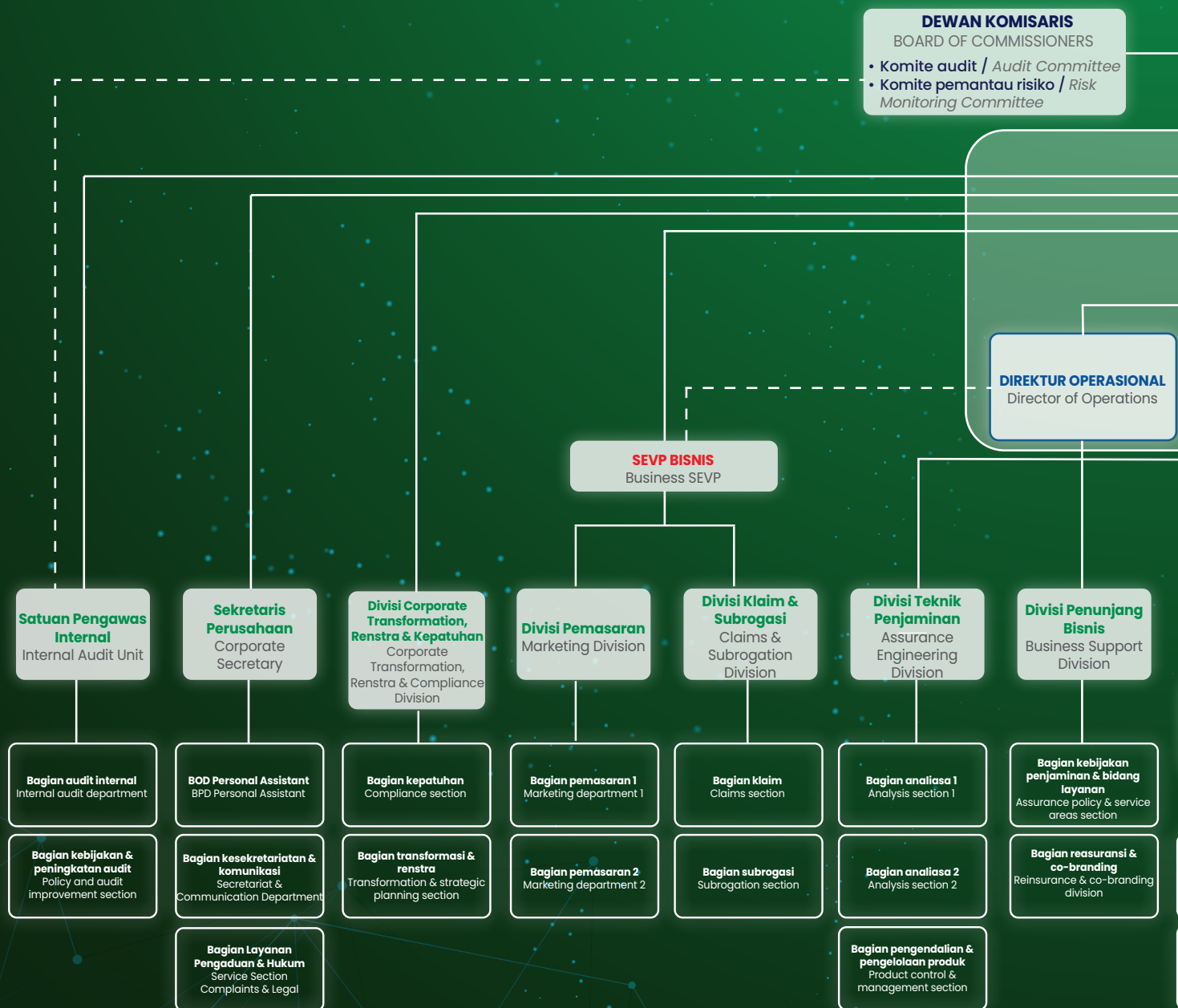


- Warna Hijau maknanya melambangkan kesuburan, dimana Jamkrindo Syariah berharap perusahaan dan seluruh stakeholder dapat senantiasa bertumbuh. The Green color symbolizes fertility, where Jamkrindo Syariah hopes the company and all stakeholders can continuously grow.
- Biru melambangkan kepercayaan, profesionalisme, dan ketenangan, menunjukkan kepercayaan kepada pelanggan. Hal ini sejalan dengan bidang usaha Perusahaan, yaitu pelayanan dan kemitraan. Komposisi kedua warna tersebut memberikan nuansa kesuburan dan kepercayaan jasa pelayanan yang terbentuk karena keteguhan memegang budaya Perusahaan. Blue symbolizes trust, professionalism, and tranquility, indicating trust to customers. This aligns with the Company's business field, namely service and partnership. The composition of these two colors provides nuances of fertility and trust in service delivery formed by steadfastness in upholding the Company's culture.
- Orange mencerminkan kehangatan dan rasa nyaman, menggambarkan semangat pelayanan yang bersahabat dan inklusif. Orange reflects warmth and a sense of comfort, depicting a friendly and inclusive spirit of service.



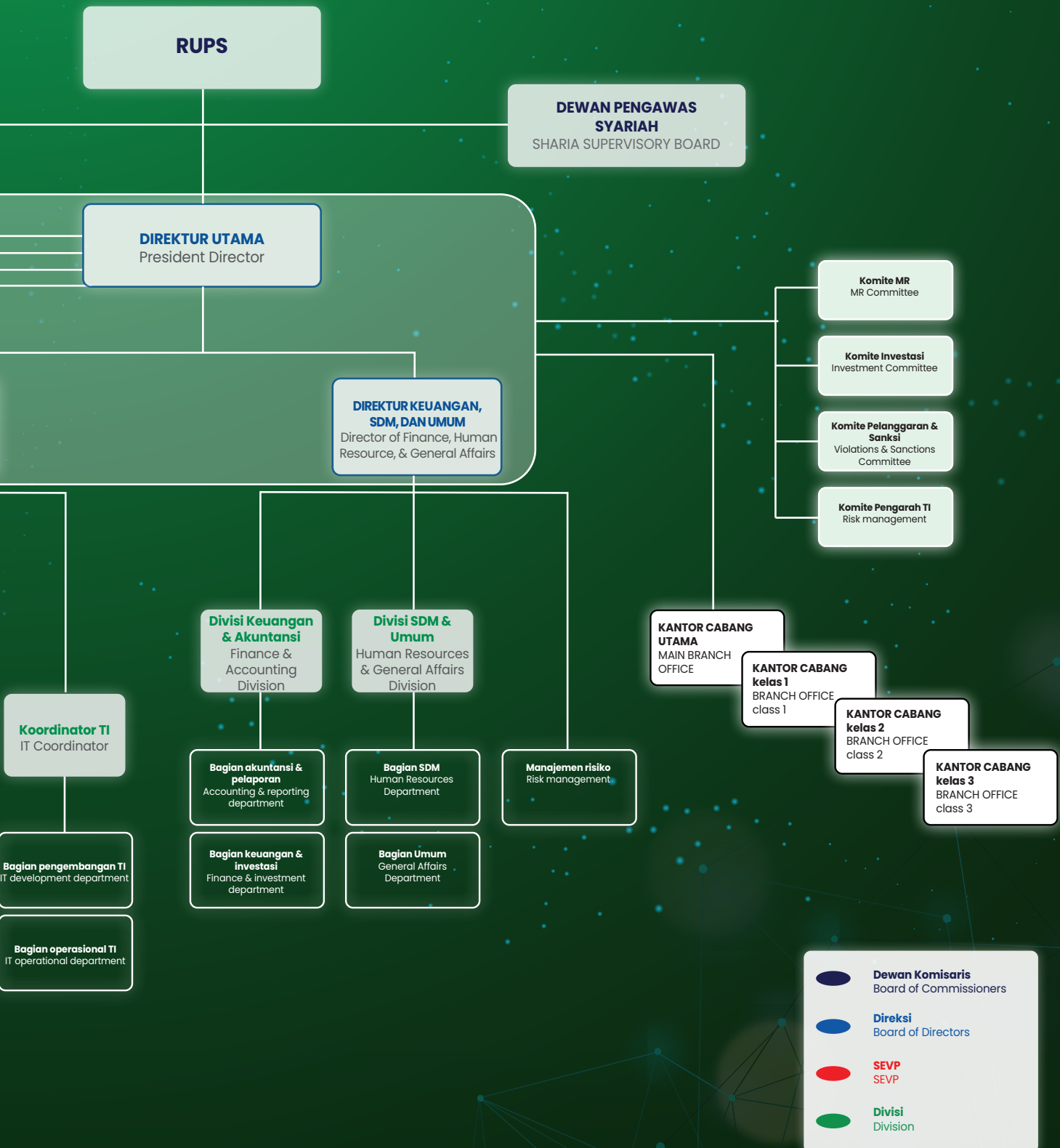
Bagi Perusahaan salah faktor terpenting dalam kesuksesan pengelolaan operasional adalah bagaimana memiliki strategi dalam mengembangkan dan mendesain struktur organisasinya agar efektif dan efisien. Perusahaan senantiasa membuat strategi pengembangan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Pengembangan yang dilakukan Perusahaan berfokus untuk membangun organisasi sesuai dengan fungsinya saat ini dan menyesuaikan untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan.

For the Company, one of the most important factors in successful operational management is how to have a strategy in developing and designing their organizational structure so that it is effective and efficient. The Company always creates organizational development strategies that are tailored to the needs and challenges it faces. The development carried out by the Company focuses on building the organization according to its current function and adapting it to achieve sustainable goals.



STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE



PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

EDY UTOMO

Komisaris Independen
Independent Commissioner

ARIBOWO

Komisaris Utama
President Commissioner

ALIE BASYA SYAMSUDIN

Komisaris
Commissioner





Aribowo

Komisaris Utama

President Commissioner

Periode Jabatan
2019-2024,
Term of Office
2019-2024,





Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	57 tahun 57 years old
Kelahiran Birth	:	Probolinggo, 6 Juni 1966 Probolinggo, June 6, 1966
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta DKI Jakarta
Pendidikan Education	:	• S2 2002 Universitas Andalas Padang Indonesia • S1 1990 Universitas Airlangga Indonesia • Masters 2002 Andalas University Padang Indonesia • Bachelor's Degree 1990 Airlangga University Indonesia
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Beliau ditunjuk sebagai Anggota Komisaris berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 22 Mei 2017, Notaris Andalia Farida, S.H., M.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Penjaminan Jamkrindo Syariah disingkat Jamsyar. He was appointed as Commissioner based on Notarial Deed No. 11 dated May 22, 2017, Notary Andalia Farida, S.H., M.H. regarding the Statement of Meeting Resolutions of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah abbreviated as jamsyar. Beliau diangkat kembali dengan akta no 19 tanggal 24 oktober 2019. He was reappointed by deed no. 19 dated 24 October 2019.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK	:	Beliau telah dinyatakan lulus fit & proper test berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep- KEP-53/NB.22/2020 tanggal 17 Juli 2020. He has been declared to have passed the fit & proper test based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No: Kep-KEP-53/NB.22/2020 dated July 17, 2020.
Riwayat Profesi Professional History	:	Sebelum menjadi komisaris Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, beliau juga pernah menjabat sebagai : • sebagai, Kepala Kantor Wilayah II Palembang PT Jamkrindo (2016), • Kepala Kantor Wilayah I Jakarta PT Jamkrindo (2015), dan • Kepala Kantor Cabang Khusus Jakarta PT Jamkrindo (2014). • Kepala Divisi Keuangan dan Investasi (2016-2023) • Sekretaris Perusahaan (2023- sekarang) Before becoming President Commissioner of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, he also served as: • Head of Regional Office II Palembang, PT Jamkrindo (2016), • Head of Regional Office I Jakarta, PT Jamkrindo (2015), and • Head of the Special Branch Office Jakarta, PT Jamkrindo (2014). • Head of the Finance and Investment Division (2016-2023). • Corporate Secretary (2023-present).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	Saat ini, beliau menjabat sebagai : • Komisaris Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. • Sekretaris Perusahaan PT Jamkrindo (2023-Sekarang). Currently, he serves as : • President Commissioner of PT Jamkrindo Syariah Guarantee Fund • Corporate Secretary of PT Jamkrindo (2023-Present).
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Aribowo tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan dan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi. Aribowo has no financial or family affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.





Eddy Atomo

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Periode Jabatan

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Akta No. 42 tanggal 25 Juli 2023 belum definitif dan akan berlaku setelah memperoleh persetujuan OJK melalui Fit and Proper Test.

Term of Office

The appointment stated in Deed No. 42 dated July 25, 2023 is not yet definitive and will take effect upon OJK approval through the Fit and Proper Test.





Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	59 tahun 59 years old
Kelahiran Birth	:	Lamongan , 03 Februari 1964 Lamongan, February 03, 1964
Domisili Domicile	:	Bekasi Bekasi
Pendidikan Education	:	• S2 2002 Institut Pertanian Bogor Manajemen Agribisnis • S1 1988 Universitas Brawijaya Ekonomi Akuntansi • Master's Degree in Agribusiness Management, 2002 Bogor Agricultural University • Bachelor's Degree in Economics and Accounting, 1988 Brawijaya University
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Diangkat melalui Akta Pernyataan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jamkrindo Syariah No. 42 tanggal 25 Juli 2023. Appointed through Deed of Statement Outside the General Meeting of Shareholders of PT. Jamkrindo Syariah No. 42 dated July 25, 2023.
Riwayat Profesi Professional History	:	Sebelum menjadi komisaris Independen PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, beliau juga pernah menjabat sebagai : • Kepala Audit Intern-Bandung BRI (2019-2020) dan • Kepala Audit Intern-Kantor Pusat BRI (2016-2019) Before becoming an Independent Commissioner of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, he also served as : • Head of Internal Audit - Bandung BRI (2019-2020) and • Head of Internal Audit - BRI Head Office (2016-2019).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	Tidak ada riwayat merangkap jabatan. There is no history of holding concurrent positions.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Edy Utomo tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan dan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi. Edy Utomo has no financial or family affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.





Atie
Basya
Syamsudin

Komisaris

Commissioner

Periode Jabatan

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Akta No. 42 tanggal 25 Juli 2023 belum definitif dan akan berlaku setelah memperoleh persetujuan OJK melalui Fit and Proper Test .

Term of Office

The appointment stated in Deed No. 42 dated July 25, 2023 is not yet definitive and will take effect upon OJK approval through the Fit and Proper Test.





Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	60 tahun 60 years old
Kelahiran Birth	:	Garut, 12 November 1963 Garut, November 12, 1963
Domisili Domicile	:	Tangerang Selatan South Tangerang
Pendidikan Education	:	- Universitas Islam Nusantara – SI- Ekonomi Manajemen (1988) - Nusantara Islamic University – Bachelor's Degree in Management Economics (1988)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Diangkat melalui Akta Pernyataan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jamkrindo Syariah No. 42 tanggal 25 Juli 2023. Appointed through Deed of Statement Outside the General Meeting of Shareholders of PT. Jamkrindo Syariah No. 42 dated July 25, 2023.
Riwayat Profesi Professional History	:	Sebelum menjadi Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, beliau juga pernah menjabat sebagai : - Direktur Kepesertaan dan Pelayanan Dana Pensiun BRI (BoD) (2020-2022) - Direktur Operasional PT Bringin Rancang Sejahtera (BoD) (2020) - Kepala Audit Intern Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (BoD-1) (2019) - Kepala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa, Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (BoD-1) (2017-2019) Before becoming Commissioner of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, he also served as: - Director of Membership and Services of the BRI Pension Fund (BoD) (2020-2022) - Director of Operations at PT Bringin Rancang Sejahtera (BoD) (2020) - Head of Internal Audit for the Yogyakarta Region at PT Bank Rakyat Indonesia (Board of Directors-1) (2019) - Head of Goods and Services Procurement Division, Head Office of PT Bank Rakyat Indonesia (BoD-1) (2017-2019)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	Tidak ada riwayat merangkap jabatan. There is no history of holding concurrent positions.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Alie Basya Syamsudin tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan dan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi. Alie Basya Syamsudin has no financial or family affiliation with the Board of Commissioners or other Directors.



PROFIL DIREKSI

PROFILES OF DIRECTORS

LOESDARWANTO

Direktur Operasional
Director of Operations

HARI PURNOMO

Direktur Utama
President Director

ENDANG SRI WINARNI

Direktur Keuangan, SDM, & Umum
Director of Finance, Human Resource,
& General Affairs





Hari
Purnomo

Direktur Utama

President Director

Periode Jabatan

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Akta No. 42 tanggal 25 Juli 2023 belum definitif dan akan berlaku setelah memperoleh persetujuan OJK melalui Fit and Proper Test.

Term of Office

The appointment stated in Deed No. 42 dated July 25, 2023 is not yet definitive and will take effect upon OJK approval through the Fit and Proper Test.





Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	57 tahun 57 years old
Kelahiran Birth	:	Pekalongan, 4 Juni 1966 Pekalongan, June 4, 1966
Domisili Domicile	:	Bogor Bogor
Pendidikan Education	:	- Sarjana Pertanian – Universitas Jenderal Soedirman (1990) - Bachelor of Agriculture – Jenderal Soedirman University (1990)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Diangkat melalui Akta Pernyataan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jamkrindo Syariah No. 42 tanggal 25 Juli 2023. Appointed through Deed of Statement Outside the General Meeting of Shareholders of PT. Jamkrindo Syariah No. 42 dated July 25, 2023.
Riwayat Profesi Professional History	:	Sebelum Menjabat Direktur Utama PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, beliau juga pernah menjabat sebagai : - Direktur Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia (2022-2023) - Direktur PT. Bringin Karya Sejahtera (2022) - Regional CEO Lampung Bank Rakyat Indonesia (2021-2022) Before becoming President Director of PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, he also served as : - Director of Fund Management Bank Syariah Indonesia (2022-2023) - Director of PT. Bringin Karya Sejahtera (2022) - Regional CEO Lampung Bank Rakyat Indonesia (2021-2022)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	Tidak ada riwayat merangkap jabatan. There is no history of holding concurrent positions.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Hari Purnomo tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan dan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi. Hari Purnomo has no financial or family affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.





Loesdarwanto

Direktur Operasional

Director of Operations

Periode Jabatan

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Akta No. 42 tanggal 25 Juli 2023 belum definitif dan akan berlaku setelah memperoleh persetujuan OJK melalui Fit and Proper Test.

Term of Office

The appointment stated in Deed No. 42 dated July 25, 2023 is not yet definitive and will take effect upon OJK approval through the Fit and Proper Test.





Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	53 tahun 53 years old
Kelahiran Birth	:	Bojonegoro, 13 Juni 1970 Bojonegoro, June 13 1970
Domisili Domicile	:	Surabaya, Indonesia Surabaya, Indonesia
Pendidikan Education	:	- S2 2007 Universitas Udayana Manajemen Pemasaran - SI 1995 Universitas Airlangga Ekonomi Pembangunan - Master's Degree in Marketing Management, 2007, Udayana University - Bachelor's Degree in Development Economics, 1995, Airlangga University
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Diangkat melalui Akta Pernyataan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jamkrindo Syariah No. 42 tanggal 25 Juli 2023. Appointed through Deed of Statement Outside the General Meeting of Shareholders of PT. Jamkrindo Syariah No. 42 dated July 25, 2023.
Riwayat Profesi Professional History	:	Sebelum menjadi Direktur Operasional PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, beliau juga pernah menjabat sebagai : - Direktur Operasional PT Penjaminan Jamkrindo Syariah 2023 – Sekarang - Pemimpin Wilayah V Semarang PT Jamkrindo 2022 – 2023 - Pemimpin Wilayah VI Surabaya PT Jamkrindo 2017 – 2021 - Kepala Kantor Wilayah I Medan Perum Jamkrindo 2016 – 2017 Before becoming the Operational Director of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, he also served as : - Director of Operations PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, 2023 – Present - Head of Region V Semarang, PT Jamkrindo, 2022 – 2023 - Head of Region VI Surabaya, PT Jamkrindo, 2017 – 2021 - Head of Regional Office I Medan, Perum Jamkrindo, 2016 – 2017
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	Tidak ada riwayat merangkap jabatan. There is no history of holding concurrent positions.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Loesdarwanto tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan dan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi. Loesdarwanto has no financial or family affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.





Endang
Sri
Winarni

**Direktur Keuangan, SDM
& Umum**

Director of Finance, Human
Resource, & General Affairs

Periode Jabatan
2019-2024,
Term of Office
2019-2024,





Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	52 tahun 52 years old
Kelahiran Birth	:	Boyolali, 12 Maret 1971 Boyolali, March 12, 1971
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta, Indonesia DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	:	• S2 2001 – 2003 Universitas Indonesia, Magister Manajemen Program Manajemen Risiko • S1 1989 – 1994 Universitas Gadjah Mada, Teknologi Industri Pertanian • Master's Degree (2001–2003), University of Indonesia, Master of Management, Risk Management Program • Bachelor's Degree (1989–1994), Agroindustrial Technology (1994–2003)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Akta Notaris Nomor 19 tanggal 24 Oktober 2019 dan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep- 2808/ NB.1/2014 tanggal 22 Oktober 2014. Board of Directors Decree No. KEP/504/24 October 2019 and Board of Commissioners Decree Board of Directors Decree No. KEP/504/19 2019 dated 21 October 2019
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan OJK: Kep- 2808/ NB.1/2014 tanggal 22 Oktober 2014. Insurance Board Certificate from Board of Commissioners
Riwayat Profesi Professional History	:	Sebelum menjadi Direktur Keuangan, SDM & Umum PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, beliau juga pernah menjabat sebagai : • Direktur Keuangan, SDM dan Umum PT. Jamkrindo Syariah (2014 – 2019) • Pejabat Pranata Utama Direktorat SDM dan Umum PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014) • Kepala Divisi Teknik Penjaminan Non Bank Perum Jamkrindo (2014) • Kepala Divisi Manajemen Risiko Perum Jamkrindo (2012–2014). Before becoming Director of Finance, Human Resource, & General Affairs at PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, she held several professional positions: • Director of Finance, Human Resources, and General Affairs at PT. Jamkrindo Syariah Guarantee (2014–2019) • Chief Executive Officer, Directorate of Human Resources and General Affairs at PT. Jamkrindo Syariah Guarantee (2014) • Head of the Non-Bank Guarantee Fund Technical Division at Perum Jamkrindo (2014) • Head of Risk Management Division of Perum Jamkrindo (2012–2014)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	Tidak ada riwayat merangkap jabatan. There is no history of holding concurrent positions.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Endang Sri Winarni tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan dan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi. Endang Sri Winarni has no financial or family affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.



PROFIL DEWAN PENGAWAS

BOARD OF SUPERVISORY PROFILE

ABDUL AZIEM

Dewan Pengawas Syariah
Board of Sharia Supervisors





Abdul
Azizem

**Dewan Pengawas
Syariah**

Board of Sharia Supervisors

Periode Jabatan
2019-2024,
Term of Office
2019-2024,





Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	50 tahun 50 years old
Kelahiran Birth	:	Jakarta, 31 Desember 1973 Jakarta, 31 December 1973
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta, Indonesia DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	:	• Sarjana Hukum dari Universitas Borobudur Jakarta pada 1997, • Magister Pendidikan dalam bidang Teknologi Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta pada 2005, • Doktor dalam bidang Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Institut PTIQ Jakarta pada 2020, • Bachelor's degree in Law from Borobudur University Jakarta, 1997 • Master's in Islamic Law Education from Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta, 2005 • Doctorate in Islamic Law from Imam Bonjol State Islamic University, 2015
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT Penjaminan Jamkrindo Syariah No. 08 tanggal 10 Juli 2015. Appointed as a Member of the Sharia Supervisory Board based on the Deed of Statement of Decision of the GMS of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah No. 08 dated July 10, 2015.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan OJK: KEP-84/NB.1/2015. Insurance Board Certificate OJK-KEP-84/NB/12/2015.
Riwayat Profesi Professional History	:	Sebelum menjadi Dewan Pengawas Syariah PT Penjaminan Jamkrindo Syariah beliau juga pernah menjabat sebagai : • Anggota KTKT (Komite Tata Kelola Terintegrasi) PT Jamkrindo (2023 – Sekarang) • Anggota Dewan Pengawas Syariah, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2015 – Sekarang) • sekarang Kepala Bidang Pendidikan Perguruan Islam Miftahul Huda Perguruan Islam Miftahul Huda Jakarta (2022) Before becoming the Sharia Supervisory Board of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, he also served as: • Member of the Integrated Governance Committee (KTKT) of PT Jamkrindo (2023 – Present) • Member of the Sharia Supervisory Board of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2015 – Present) • Currently Head of Education at Miftahul Huda Islamic School, Miftahul Huda Islamic School, Jakarta (2022)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	Saat ini beliau juga menjabat sebagai : • Kepala Bidang Pendidikan Perguruan Islam Miftahul Huda, Jakarta (2002 – sekarang) dan • Pembimbing Haji dan Umrah KBIH Maslakul Huda (2001 – Sekarang). Currently he also serves as: • Head of Islamic Education Division at Miftahul Huda Islamic University, Jakarta (2002-present) • Development and General Affairs Division at Masjid Huda (2001-present)
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Abdul Aziem tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan dan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi. Abdul Aziem has no financial or family affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.





PROFIL KEPALA DIVISI

Profile of Division Head



Nama Name	Indra Perwira Anggara Kusuma
Menjabat Sejak Served Since	: 20 Desember 2023 December 20, 2023
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	: Jakarta, 16 Januari 1979 Jakarta, Januari 16, 1979
Usia Age	: 44 tahun 44 years old
Domisili Domicile	: Jakarta, Indonesia Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	: S2 Magister Manajemen Master of Management
Sekilas Jabatan di Jamsyar Job Position at Jamsyar at a Glance	: • Kepala Divisi Teknik Penjaminan • Head of Assurance Engineering Division



Nama Name	Maria Ulfah
Menjabat Sejak Served Since	: 3 Januari 2022 January 3, 2022
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	: Malang, 10 Juli 1980 Malang, July 10, 1980
Usia Age	: 43 tahun 43 years old
Domisili Domicile	: Jakarta, Indonesia Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	: S2 Manajemen & Bisnis Master of Management & Business
Sekilas Jabatan di Jamsyar Job Position at Jamsyar at a Glance	: • Kepala Bagian Klaim dan Hukum • Kepala KUP Lampung • Wakil Kepala Divisi SDM dan Umum • Sekretaris Perusahaan • Head of Claims and Legal Affairs • Head of Lampung KUP • Deputy Head of Human Resources and General Affairs • Corporate Secretary



Nama Name	Iswahyudi Raharjo
Menjabat Sejak Served Since	: 17 November 2023 November 17, 2023
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	: Yogyakarta, 25 Desember 1966 Yogyakarta, December 25, 1966
Usia Age	: 56 tahun 56 years old
Domisili Domicile	: Jakarta, Indonesia Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	: S2 Hukum Bisnis Master of Business Law
Sekilas Jabatan di Jamsyar Job Position at Jamsyar at a Glance	: • Kepala Divisi Corporate Transformation, Renstra dan Kepatuhan • Head of Corporate Transformation, Strategic Plan and Compliance Division



Nama Name	Antoro Asih
Menjabat Sejak Served Since	: 27 November 2023 November 27, 2023
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	: Kulon Progo, 21 Juli 1984 Kulon Progo, 21 July 1984
Usia Age	: 40 tahun 40 years old
Domisili Domicile	: Jakarta, Indonesia Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	: S1 Komunikasi Bachelor of Communication
Sekilas Jabatan di Jamsyar Job Position at Jamsyar at a Glance	: • Kepala Divisi Pemasaran • Head of Marketing Division



Nama Name	Bambang Hendraman
Menjabat Sejak Served Since	: 06 November 2023 November 06, 2023
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	: Tasikmalaya, 19 April 1971 Tasikmalaya, April 19, 1971
Usia Age	: 52 tahun 52 years old
Domisili Domicile	: Jakarta, Indonesia Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	: S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Bachelor of Economics and Development Studies
Sekilas Jabatan di Jamsyar Job Position at Jamsyar at a Glance	: • Kepala Cabang Utama • Kepala Divisi Penunjang Bisnis • Kepala Cabang Bandung • Kepala Divisi Teknik Penjaminan • Main Branch Manager • Head of Business Support Division • Bandung Branch Manager • Head of Technical Assurance Division



Nama Name	Dadang Ary Aviyanto
Menjabat Sejak Served Since	: 27 November 2023 November 27, 2023
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	: Mojokerto, 16 Oktober 1971 Mojokerto, October 16, 1971
Usia Age	: 51 tahun 51 years old
Domisili Domicile	: Jakarta, Indonesia Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	: S1 Manajemen Bachelor of Management
Sekilas Jabatan di Jamsyar Job Position at Jamsyar at a Glance	: • Kepala Satuan Pengawas Internal • Head of Internal Audit Unit



Nama Name	Iwan Hermawan
Menjabat Sejak Served Since	: 31 Desember 2019 December 31, 2019
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	: Yogyakarta, 9 Februari 1971 Yogyakarta, February 9, 1971
Usia Age	: 52 tahun 52 years old
Domisili Domicile	: Jakarta, Indonesia Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	: S2 Manajemen Master of Management
Sekilas Jabatan di Jamsyar Job Position at Jamsyar at a Glance	: • Kepala Divisi Subrogasi & Klaim • Divisi Penunjang Bisnis • Divisi Pemasaran • Head of Subrogation and Claims Division • Business Support Division • Marketing Division



Nama Name	Arry Risaf Arisandi	
Menjabat Sejak Served Since	:	12 November 2014 November 12, 2014
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Garut, 30 Juni 1973 Garut, Juny 30, 1973
Usia Age	:	50 tahun 50 years old
Domisili Domicile	:	Jakarta, Indonesia Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S1 Akuntansi Bachelor of Accounting
Sekilas Jabatan di Jamsyar Job Position at Jamsyar at a Glance	:	• Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi • Head of Finance & Accounting Division



Nama Name	Erna Zubaida	
Menjabat Sejak Served Since	:	27 November 2023 November 27, 2023
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Purwerjo, 27 Februari 1971 Purwerjo, February 27, 1971
Usia Age	:	52 tahun 52 years old
Domisili Domicile	:	Jakarta, Indonesia Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S1 Ekonomi Bachelor of Economics
Sekilas Jabatan di Jamsyar Job Position at Jamsyar at a Glance	:	• Kepala Divisi Sumber Daya Manusia & Umum • Head of Human Resources & General Affairs Division



DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND HUMAN RESOURCES COMPETENCY DEVELOPMENT

"187 karyawan organik yang berkarya di Jamkrindo syariah mendedikasikan dirinya kepada dunia UMKM Syariah melalui 15 Kantor Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia."

"187 permanent employees working at Jamkrindo syariah dedicate themselves to the world of Sharia SMEs through 15 branch offices spread across Indonesia." "

Demografi Karyawan

Jamkrindo Syariah memiliki karyawan dengan budaya kerja unggul yang merupakan aset paling berharga dalam memberikan produk dan layanan jasa penjaminan kredit Syariah. Per akhir tahun 2023, Jamkrindo Syariah memiliki 187 karyawan mengalami kenaikan sebanyak 31 orang atau 19,87% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2022 yaitu 156 orang. Kenaikan tersebut dikarenakan rekrutmen pada tahun 2023.

Profil demografi karyawan Jamkrindo Syariah dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini:

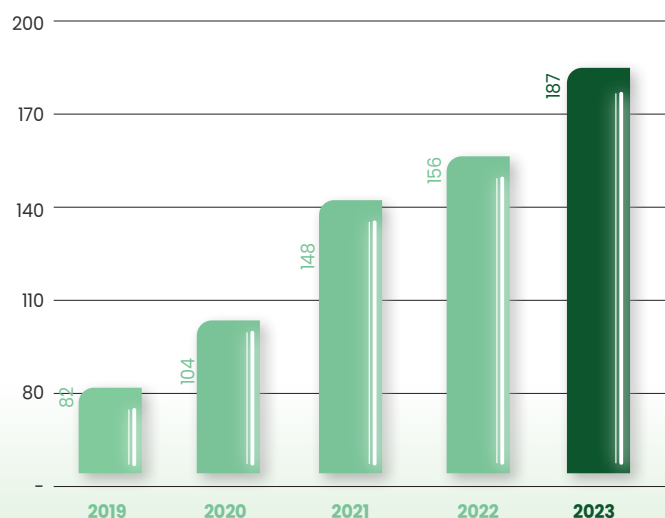
Employee Demographics

Jamkrindo Syariah has employees with superior work culture who are the most valuable asset in delivering Sharia credit guarantee products and services. As of the end of 2023, Jamkrindo Syariah had 187 employees, representing an increase of 31 people or 19.87% compared to the number of employees as of December 31, 2022, which was 156 people. This increase was due to recruitment activities in 2023.

The demographic profile by education level shows an increasing trend in the coming fiscal year.

Pergerakan Jumlah Keseluruhan Karyawan dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir 2019–2023

Growth of Number of Employees in the Last 5 (five) Years
2018–2023





Demografi Karyawan Dan Pengembangan Kompetensi Sdm (Orang)

Demographic of Permanent Employees by Organization Level (people)

Level Organisasi Organization Level	2022		2023	
	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
Kepala Divisi Division Head	8	5%	8	4%
Kepala Cabang Kelas 1 Deputy Division Head	5	3%	5	3%
Kepala Cabang Kelas 2 Head of Regional Office	4	2%	4	2%
Kepala Cabang Kelas 3 Deputy Head of Regional Office	6	4%	6	3%
Kepala Bagian Unit Head	40	23%	42	22%
Kepala Seksi & Kepala KUP Head of Section & Head of KUP	0	0%	0	0%
Staf Staff	100	57%	111	63%
Pelaksana	10	6%	11	3%
Jumlah Total	173	100%	187	100%

Komposisi Jumlah Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Composition of Permanent Employees by Education Level

Jenjang Pendidikan Education Level	2022		2023	
	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
Strata-3 (S3) Doctorate	0	0%	0	0%
Strata-2 (S2) Master	7	4%	9	5%
Strata-1 (S1)/Diploma-4 (D4) Bachelor/Diploma 4 (D4)	156	90%	166	94%
Diploma 1-2-3 (D1/D2/D3) Diploma 1-2-3 (D1/D2/D3)	10	6%	12	3%
SLTA Sederajat Senior High School/Equivalent	0	0%	0	0%
SLTP Sederajat Junior High School/Equivalent	0	0%	0	0%
SD Elementary School	0	0%	0	0%
Jumlah Total	173	100%	187	100,00%

Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)

Demographic of Permanent Employees by Employment Status (people)

Status Kepegawaian Employment Status	2022		2023	
	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
Tetap Permanent				
Permanen (PKWTT) Permanent (PKWTT)	173	62%	187	59%
Tidak Tetap Non-Permanent			93	30%
Kontrak Outsourcing Outsourced Contracts	108	38%	35	11%
Jumlah Total	281	100%	315	100%

Berdasarkan status kepegawaian, komposisi karyawan Perseroan terdiri atas karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Karyawan tetap adalah karyawan yang bekerja secara tetap merupakan karyawan yang bekerja untuk jangka waktu tidak tertentu sedangkan karyawan tidak tetap merupakan karyawan yang bekerja untuk jangka waktu tertentu sesuai pada kebutuhan pada unit kerja/proyek terkait dimana para pihak menandatangani surat perjanjian kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu (PKWT). Di tahun 2023, jumlah karyawan tetap sebesar 67% dan karyawan tidak tetap sebesar 33%.

Based on employment status, the composition of employees in 2022 and 2023 remained stable. Permanent employees are personnel who work permanently, while outsourced employees are personnel who work for a specific period according to their position at the work unit/project. This approach is specifically used to manage costs while maintaining service quality in handling work in business units. In the composition, permanent employees account for 67% while outsourced employees account for 33%.

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Penempatan/Wilayah Kerja (orang)

Demographic of Permanent Employees by Placement/Operating Area (people)

Penempatan/Wilayah Kerja Placement/Operating Area	2022		2023	
	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
Kantor Pusat Head Office	78	46%	84	45%
Kantor Cabang Branch Office	95	54%	103	55%
Jumlah Total	173	100%	187	100%



Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Masa Kerja (orang) Demographic of Permanent Employees by Serving Period (people)

Masa Kerja Serving Period	2022		2023	
	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
≥ 30 tahun ≥ 30 years	0	0%	0	0%
21-30 tahun 21-30 years	0	0%	0	0%
11-20 tahun 11-20 years	0	0%	0	0%
2-10 tahun 2-10 years	153	77%	170	90%
≤ 1 tahun ≤ 1 years	20	13%	17	10%
Jumlah Total	173	100%	187	100%

Pengembangan Kompetensi

Pengelolaan SDM yang profesional menjadi salah satu fokus utama Jamsyar dalam menghadirkan produk dan layanan jasa penjaminan kredit yang berkualitas. Perencanaan dan strategi pengembangan SDM merupakan fungsi utama yang dilaksanakan Jamsyar untuk menjamin SDM yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat.

Tujuan perencanaan dan strategi pengembangan SDM adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam Perusahaan;
2. Menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan dapat terselesaikan;
3. Menghindari terjadinya *miss management* dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
4. Mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga diharapkan produktivitas kerja meningkat;
5. Menjadi pedoman dalam menetapkan program rekrutmen, pengembangan, kompensasi, penilaian kinerja, manajemen karir, dan kedisiplinan hingga pensiun/pemberhentian karyawan;

Competency Development

Human Resources professional development is one of the main focuses in producing qualified and competent outputs. The selection process and HR development strategy involve specific functions carried out by each unit to manage SDM (Human Resources) which are specifically aimed at filling various job positions and placements that match a particular competence.

The objectives of HR development planning and strategy are:

1. Improving the quality and quantity of employees who will fill all positions in the Company;
2. Ensuring the availability of current and future workforce, so that every task can be completed;
3. Avoiding miss-management and overlapping in the execution of duties;
4. Facilitating coordination, integration, and synchronization to increase work productivity;
5. Serving as a guideline in establishing recruitment programs, development, compensation, performance assessment, career management, and discipline until retirement/termination of employees;

Biaya Pengembangan Kompetensi

Secara keseluruhan anggaran Pembelajaran dan Pengembangan SDM yang telah digunakan sampai dengan Desember 2023 adalah 1,135 miliar.

Competency Development Costs

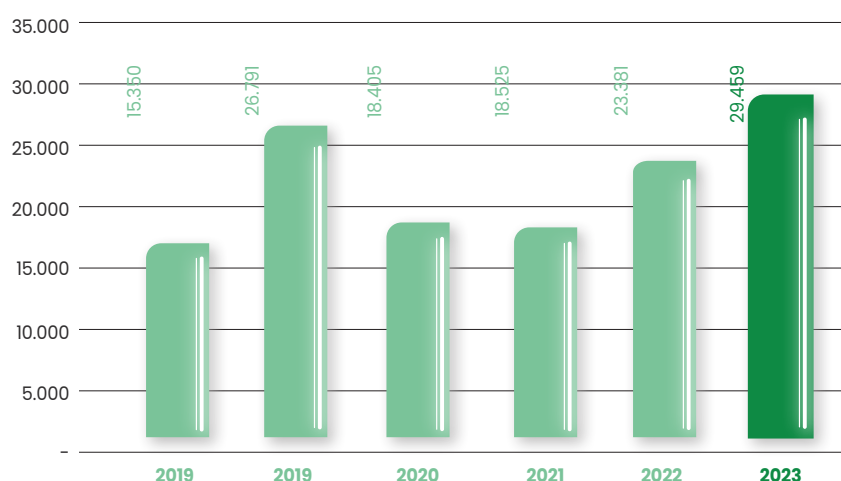
Overall, the HR Learning and Development budget that has been utilized up to December 2023 is 1,135 billion.

	Realisasi 2023 (Rp-juta) 2023 Realization (IDR-million)	Anggaran 2023 (Rp-juta) 2023 Budget (IDR- million)	Realisasi 2022 (Rp-juta) 2022 Realization (IDR-million)	Anggaran 2022 (Rp-juta) 2022 Budget (IDR- million)	Realisasi 2023 Terhadap Anggaran 2023 2023 Realization to 2023 Budget (%)	Realisasi 2023 Terhadap Realisasi 2022 2023 Realization to 2022 Realization (%)
	(1)	(2)	(3)	(3)	(1:2)	(1:3)
Biaya Pengembangan Kompetensi Competency Development Costs	1.860	3.412	2.181	2.327	54,51%	85,27%

Berdasarkan data tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 terkait dengan realisasi anggaran Pembelajaran dan Pengembangan SDM, terjadi kenaikan anggaran sebesar 0% pada dari tahun 2022 ke tahun 2023. Besaran biaya pengembangan kompetensi karyawan secara total dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Based on data from 2018 through 2023 related to budget realization for development and training, there has been an increase in employee development costs. The comparison between 2022 and 2023 total development costs can be seen in the graph below:

GRAFIK REALISASI ANGGARAN PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN SDM
REALIZATION OF HR LEARNING AND DEVELOPMENT BUDGET





KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

Struktur Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Notaris tentang Perubahan Anggaran dasar PT Jamkrindo Syariah tanggal desember 2023, dijelaskan pemegang saham Jamkrindo Syariah sebagai berikut:

1. Saham Seri A sebanyak 1.410.241 (satu juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh satu) lembar saham milik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jamkrindo; dan
2. Saham Seri B sebanyak 1.000 (satu ribu) saham milik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kowajasa.

Shareholder Structure

Based on the Notarial Deed regarding Amendment to the Articles of Association of PT Jamkrindo Syariah dated December 2023, the shareholders of Jamkrindo Syariah are described as follows:

1. Series A Shares amounting to 1,410,241 (one million four hundred ten thousand two hundred forty-one) shares owned by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jamkrindo; and
2. Series B Shares amounting to 1,000 (one thousand) shares owned by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kowajasa.

Kepemilikan Saham Jamkrindo Syariah per 31 Desember 2023

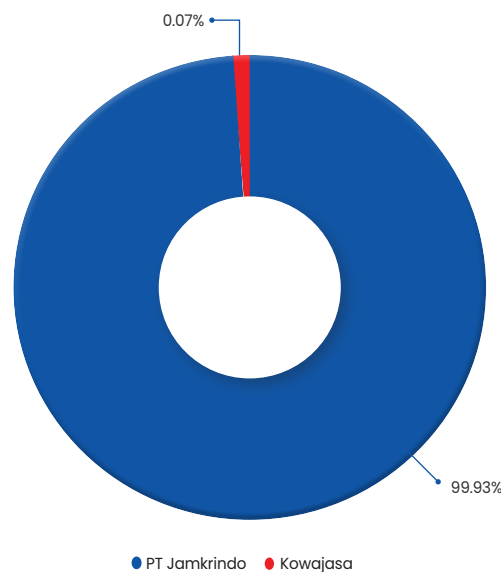
Jamkrindo Syariah Share Ownership as of December 31, 2023

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (Sheet)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Paid-Up and Issued Capital (IDR)	Presentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
PT Jamkrindo	1.410.241	705.120.500.000	99,93%
Kowajasa	1.000	500.000.000	0,07%
Jumlah Total	1.411.241	755.120.500.000	100,00%

1 Lembar Saham = Rp 1.000.000
1 Sheet of Share = Rp 1.000.000

Komposisi Pemegang Saham Jamkrindo syariah per 31 Desember 2023

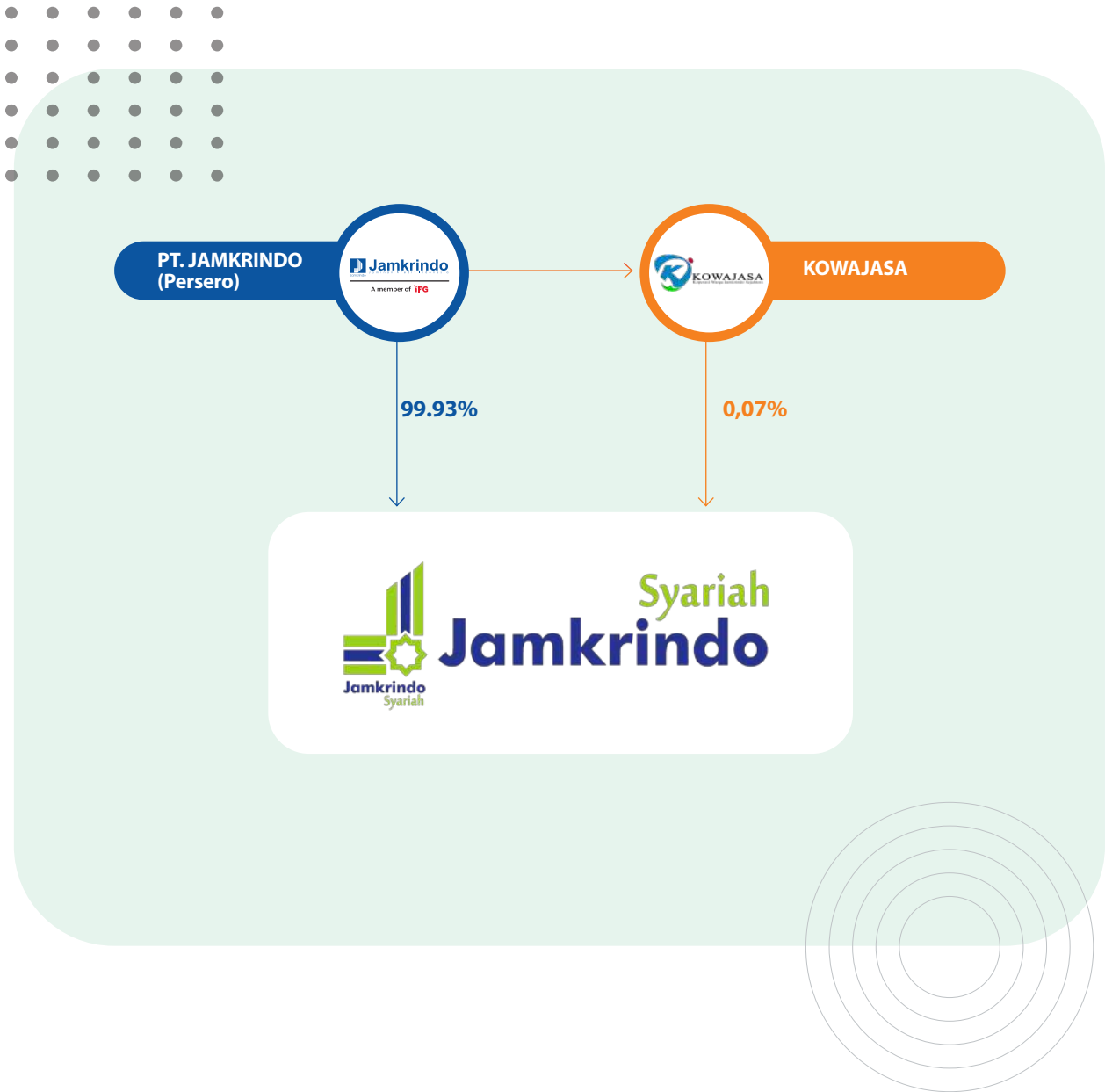
Composition of Jamkrindo Syariah Shareholders as of December 31, 2023





Komposisi Pemegang Saham Jamkrindo syariah per 31 Desember 2023

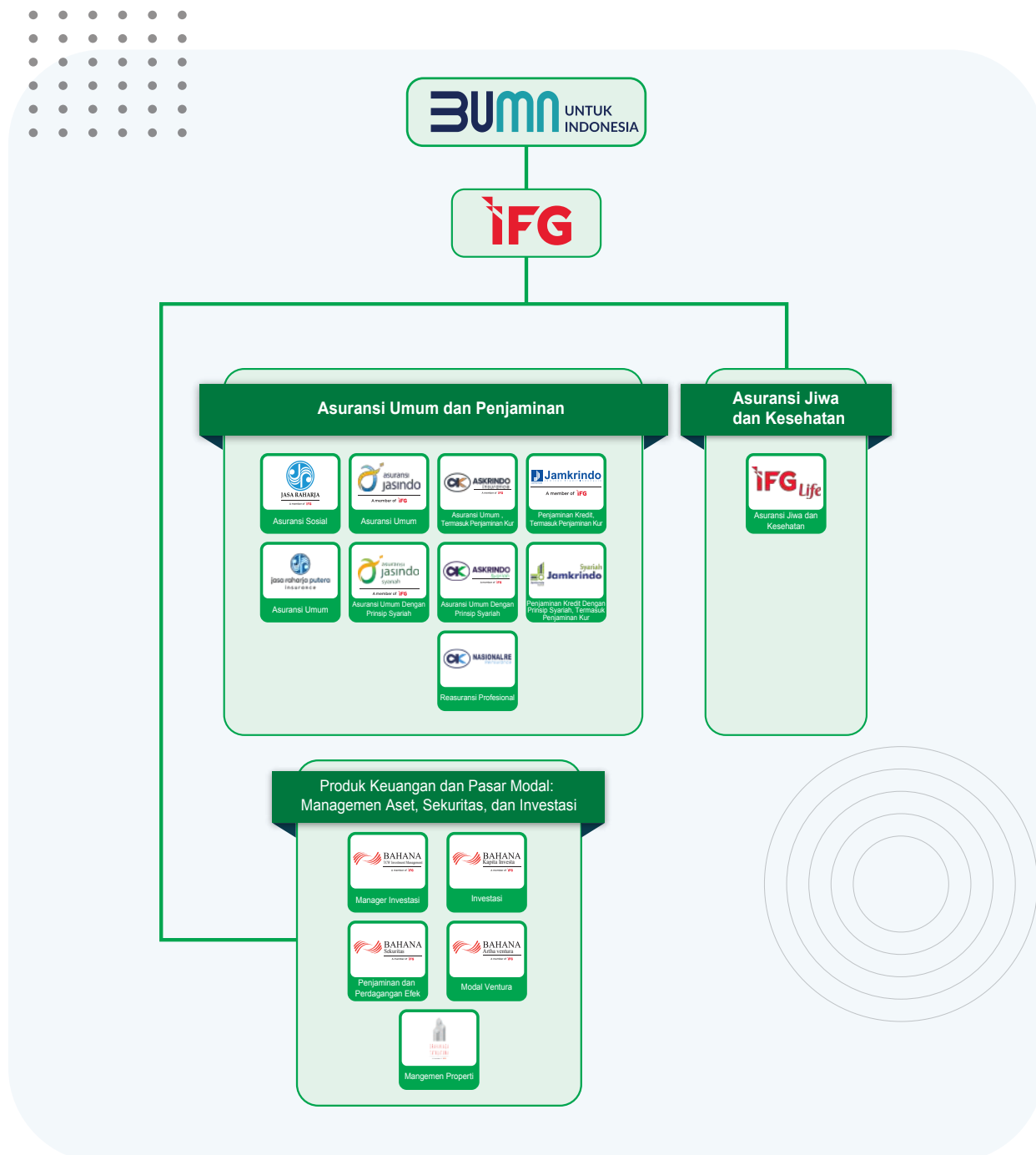
Composition of Jamkrindo Syariah Shareholders as of December 31, 2023





STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA GRUP

Group Structure and Group Business Groups





LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS

Nama dan Alamat Kontak Lengkap Name and Address		Jenis dan Bentuk Jasa Types and Forms of Services	Periode
Reasuransi / Penjaminan Ulang Reinsurance / Re-underwriting	1. PT Reasuransi Nasional Indonesia Unit Usaha Syariah (UUS)	Penyediaan layanan reasuransi berbasis prinsip syariah. Jasa yang diberikan meliputi fasilitas reasuransi untuk produk penjaminan syariah, peningkatan kapasitas penjaminan risiko agar perusahaan dapat menjamin pembiayaan bernilai besar, serta dukungan teknis dan konsultasi terkait pengelolaan risiko, penyusunan akad reasuransi, dan kepatuhan terhadap regulasi OJK. Selain itu, Nasional Re UUS membantu diversifikasi risiko melalui penempatan sebagian risiko ke pasar reasuransi, sehingga mendukung stabilitas keuangan dan keberlanjutan bisnis Jamkrindo Syariah. Providing reinsurance services based on sharia principles. Services provided include reinsurance facilities for sharia-compliant underwriting products, increasing risk underwriting capacity to enable companies to guarantee large-value financing, as well as technical support and consulting related to risk management, reinsurance contract preparation, and compliance with OJK regulations. Furthermore, Nasional Re UUS supports risk diversification by placing a portion of its risk in the reinsurance market, thereby supporting the financial stability and business sustainability of Jamkrindo Syariah.	2023
	2. PT Reasuransi Syariah Indonesia	Perlindungan risiko melalui reasuransi syariah untuk berbagai produk penjaminan pembiayaan, kerja sama dalam pengembangan produk sesuai prinsip syariah termasuk penyusunan akad, serta dukungan finansial dan teknis untuk meningkatkan kapasitas penjaminan dan memperluas jangkauan bisnis. Reindo Syariah juga berperan dalam manajemen risiko yang profesional, sehingga Jamkrindo Syariah dapat menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Risk protection through Sharia-compliant reinsurance for various financing guarantee products, collaboration in product development in accordance with Sharia principles, including contract preparation, and financial and technical support to increase underwriting capacity and expand business reach. Reindo Syariah also plays a role in professional risk management, enabling Jamkrindo Syariah to maintain business sustainability and enhance customer trust.	2023
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	1. Tanudiredja, Wibisana, Rintis, Dan Rekan atau	Jenis bentuk jasa: Audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 oleh Akuntan Publik merupakan pemeriksaan independen yang dilakukan untuk memberikan opini profesional mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Melalui serangkaian prosedur audit seperti penilaian risiko salah saji material, pengujian pengendalian internal, verifikasi bukti transaksi, serta evaluasi estimasi dan kebijakan akuntansi yang digunakan manajemen, auditor memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan secara wajar. Hasil audit ini dituangkan dalam Laporan Auditor Independen sebagai dasar bagi manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan, sekaligus menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Type of service: The audit of the 2023 Financial Statements by a Public Accountant is an independent examination conducted to provide a professional opinion regarding the fairness of the presentation of the company's financial statements in accordance with Financial Accounting Standards (SAK). Through a series of audit procedures such as assessing the risk of material misstatement, testing internal controls, verifying transaction evidence, and evaluating accounting estimates and policies used by management, the auditor ensures that the financial statements fairly reflect the company's financial condition, performance, and cash flows. The results of this audit are outlined in the Independent Auditor's Report as a basis for management, shareholders, and other stakeholders in decision-making, while also demonstrating the company's commitment to transparency, accountability, and good governance.	2023
	1. YAR Law Firm	Jenis dan bentuk jasa: Pemberian jasa hukum rutin sebagai corporate lawyer, yang mencakup pemberian advis dan nasehat hukum terkait transaksi bisnis dan kegiatan usaha, review dan revisi draft perjanjian dengan pihak ketiga, drafting atau revisi dokumen standar seperti perjanjian kerja, pembuatan dokumen korporasi sesuai anggaran dasar dan peraturan, pemberian legal opinion atas permasalahan hukum, advis terkait peraturan baru, pendapat hukum mengenai general corporate matters, serta penanganan kasus di luar pengadilan seperti pembuatan somasi, surat teguran, dan pendampingan negosiasi. Selain itu, YAR Law Firm juga menangani jasa hukum berdasarkan perkara (kasus per kasus), termasuk penanganan perkara khusus seperti pembuatan laporan pidana ke kepolisian, Kejaksaan, atau lembaga lain, serta mewakili Jamkrindo Syariah di badan peradilan seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tata Usaha Negara, lembaga arbitrase, dan pelaksanaan eksekusi putusan. YAR Law Firm berkewajiban memberikan legal opinion tertulis atas permintaan, menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen, serta menyediakan layanan konsultasi melalui telepon, email, atau aplikasi daring sesuai kebutuhan. Types and forms of services: Provision of routine legal services as a corporate lawyer, which includes providing legal advice and counsel related to business transactions and business activities, reviewing and revising draft agreements with third parties, drafting or revising standard documents such as employment agreements, preparing corporate documents in accordance with articles of association and regulations, providing legal opinions on legal issues, advice regarding new regulations, legal opinions on general corporate matters, and handling cases outside the court such as preparing summons, warning letters, and assisting in negotiations. In addition, YAR Law Firm also handles legal services on a case-by-case basis, including handling special cases such as preparing criminal reports to the police, prosecutors, or other institutions, as well as representing Jamkrindo Syariah in judicial bodies such as the District Court, High Court, Supreme Court, Industrial Relations Court, State Administrative Court, arbitration institutions, and implementing the execution of decisions. YAR Law Firm is obliged to provide written legal opinions upon request, maintain the confidentiality of information and documents, and provide consultation services via telephone, email, or online applications as needed.	2023
Jasa Hukum Legal Services	2. Mulyana & Daroe Law Office	Pemberian jasa hukum rutin berupa konsultasi dan advis hukum terkait ketentuan badan usaha, analisis risiko dan tanggung jawab, identifikasi isu hukum dalam struktur transaksi, serta rekomendasi penyelesaian; pembuatan dan jawaban surat somasi atau teguran terkait operasional bisnis; serta jasa legal review berupa penyusunan dan penilaian bukti hukum, saran dokumen pendukung, review kontrak atau perjanjian, dan kajian dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan usaha. Selain itu, jasa hukum non-rutin dilakukan secara kasus per kasus, mencakup penanganan penagihan subrogasi melalui somasi, negosiasi, dan upaya hukum non-litigasi, pengaturan subrogasi melalui perjanjian tersendiri, serta penanganan perkara di badan peradilan dengan mewakili Jamkrindo Syariah di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tata Usaha Negara, lembaga arbitrase, termasuk pengajuan permohonan dan pelaksanaan eksekusi putusan. M&D Law Office juga berkewajiban memberikan legal opinion tertulis atas permintaan, menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen, serta menyediakan layanan konsultasi melalui telepon, email, atau aplikasi daring sesuai kebutuhan. Provision of routine legal services in the form of consultation and legal advice related to business entity provisions, risk and liability analysis, identification of legal issues in transaction structures, and recommendations for resolution; preparation and response to letters of warning or warning related to business operations; and legal review services in the form of preparation and assessment of legal evidence, suggestions for supporting documents, review of contracts or agreements, and review of documentation related to the implementation of business activities. In addition, non-routine legal services are carried out on a case-by-case basis, including handling subrogation collections through summons, negotiations, and non-litigation legal efforts, subrogation arrangements through separate agreements, and handling cases in judicial bodies by representing Jamkrindo Syariah in the District Court, High Court, Supreme Court, Industrial Relations Court, State Administrative Court, arbitration institutions, including filing applications and implementing the execution of decisions. M&D Law Office is also obliged to provide written legal opinions upon request, maintain the confidentiality of information and documents, and provide consultation services via telephone, email, or online applications as needed.	2023



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI AWARDS AND CERTIFICATIONS

Penghargaan pada tahun 2023 Awards in 2023

Tanggal	Deskripsi	Dokumentasi
21 Maret, 2023 March 21, 2023	PT Jamkrindo Syariah memenangkan penghargaan BAZNAS AWARDS 2023 Perusahaan Pembayar Zakat Badan Teladan BAZNAS RI 2023 PT Jamkrindo Syariah won the BAZNAS AWARDS 2023 as the Exemplary Corporate Zakat Payer of the National Zakat Agency of the Republic of Indonesia 2023	
19 Mei, 2023 May 19, 2023	PT Jamkrindo Syariah meraih penghargaan Indonesia Corporate Secretary & Corporate Award 2023 – Economic Review. The Best Indonesia CORPORATE "SECRETARY & COMMUNICATION" Award PT Jamkrindo Syariah received the Indonesia Corporate Secretary & Corporate Award 2023 – Economic Review. The Best Indonesia CORPORATE "SECRETARY & COMMUNICATION" Award	
7 Juni, 2023 June 7, 2023	PT Jamkrindo Syariah meraih penghargaan TOP BUSINESS : A. PEMENANG TOP CSR B. Bapak GATOT SUPRABOWO sebagai TOP LEADER ON CSR COMMITMENT 2023 PT Jamkrindo Syariah received the TOP BUSINESS award: A. TOP CSR WINNER B. Mr. GATOT SUPRABOWO as TOP LEADER ON CSR COMMITMENT 2023	
5 Juli, 2023 July 5, 2023	PT Jamkrindo Syariah meraih penghargaan HUMAN CAPITAL ON RESILIENCE AWARD 2023 : A. The Most Innovative HR – 5 Juli 2023 B. The Best Company of Culture and Employee Experience – 5 Juli 2023 C. The Best Labor Relation – 5 Juli 2023 D. The Best Leadership Development Focus on HC – 5 Juli 2023 PT Jamkrindo Syariah received the HUMAN CAPITAL ON RESILIENCE AWARD 2023: A. The Most Innovative HR – July 5, 2023 B. The Best Company of Culture and Employee Experience – July 5, 2023 C. The Best Labor Relation – July 5, 2023 D. The Best Leadership Development Focus on HC – July 5, 2023	

Penghargaan pada tahun 2023 Awards in 2023

Tanggal	Deskripsi	Dokumentasi
10 Agustus, 2023 Agust 10, 2023	PT Jamkrindo Syariah memenangkan penghargaan TJSL & CSR AWARD 2023 : A.IBU ENDANG SRI WINARNI sebagai THE MOST COMITTERD BOD of BUMN on TJSL Pilar Ekonomi B.PILAR EKONOMI. PT Jamkrindo Syariah won the TJSL & CSR AWARD 2023: A. MRS. ENDANG SRI WINARNI as THE MOST COMMITTED BOD of BUMN on TJSL Economic Pillar B. ECONOMIC PILLAR.	
10 Agustus, 2023 Agust 10, 2023	PT Jamkrindo Syariah meraih penghargaan GRC AWARD 2023 : A.THE BEST GRC FOR CORPORATE RISK MANAGEMENT 2023 (FINANCIAL SERVICE) B.THE BEST GRC FOR CORPORATE FINANCE 2023 (FINANCIAL SERVICE) PT Jamkrindo Syariah received the GRC AWARD 2023: A. THE BEST GRC FOR CORPORATE RISK MANAGEMENT 2023 (FINANCIAL SERVICE) B. THE BEST GRC FOR CORPORATE FINANCE 2023 (FINANCIAL SERVICE).	

KEANGGOTAAN ASOSIASI ASSOCIATION MEMBERSHIP

Dalam rangka untuk memperkuat bisnisnya, Jamkrindo Syariah telah tergabung dalam keanggotaan organisasi, sebagai berikut:

In order to strengthen its business, Jamkrindo Syariah has joined membership organizations, the following membership organizations as follows:

Informasi Tentang Entitas Asosiasi / Information About Associated Entities

Hingga akhir tahun 2023, Perseroan tercatat tergabung dalam ASIPPINDO (Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia).
Until the end of 2023, the Company was registered as a member of ASIPPINDO (Association of Indonesian Guarantee Companies)..





DAFTAR ALAMAT ENTITAS KANTOR CABANG ADDRESS LIST OF BRANCH OFFICES



- | | | | |
|--|---|--|---|
| A Kantor Cabang Aceh
Branch Offices | ★ Kantor Cabang Utama
Branch Offices | L Kantor Cabang Pontianak
Branch Offices | O Kantor Cabang Makassar
Branch Offices |
| B Kantor Cabang Medan
Branch Offices | H Kantor Cabang Bandung
Branch Offices | M Kantor Cabang Banjarmasin
Branch Offices | |
| C Kantor Cabang Padang
Branch Offices | I Kantor Cabang Semarang
Branch Offices | N Kantor Cabang Balikpapan
Branch Offices | |
| D Kantor Cabang Pekanbaru
Branch Offices | J Kantor Cabang Surabaya
Branch Offices | | |
| E Kantor Cabang Palembang
Branch Offices | K Kantor Cabang Mataram
Branch Offices | | |
| F Kantor Cabang Lampung
Branch Offices | | | |



**Kantor Pusat /Head Office
PT Jamkrindo Syariah**

:

Gedung Jamkrindo Syariah
Jl Letjend Suprpto No 20, Cempaka Putih Timur,
Jakarta Pusat 10510, Indonesia
Telp: +62 21 21242777
Website: www.jamkrindosyariah.co.id
Email : info@jamkrindosyariah.co.id

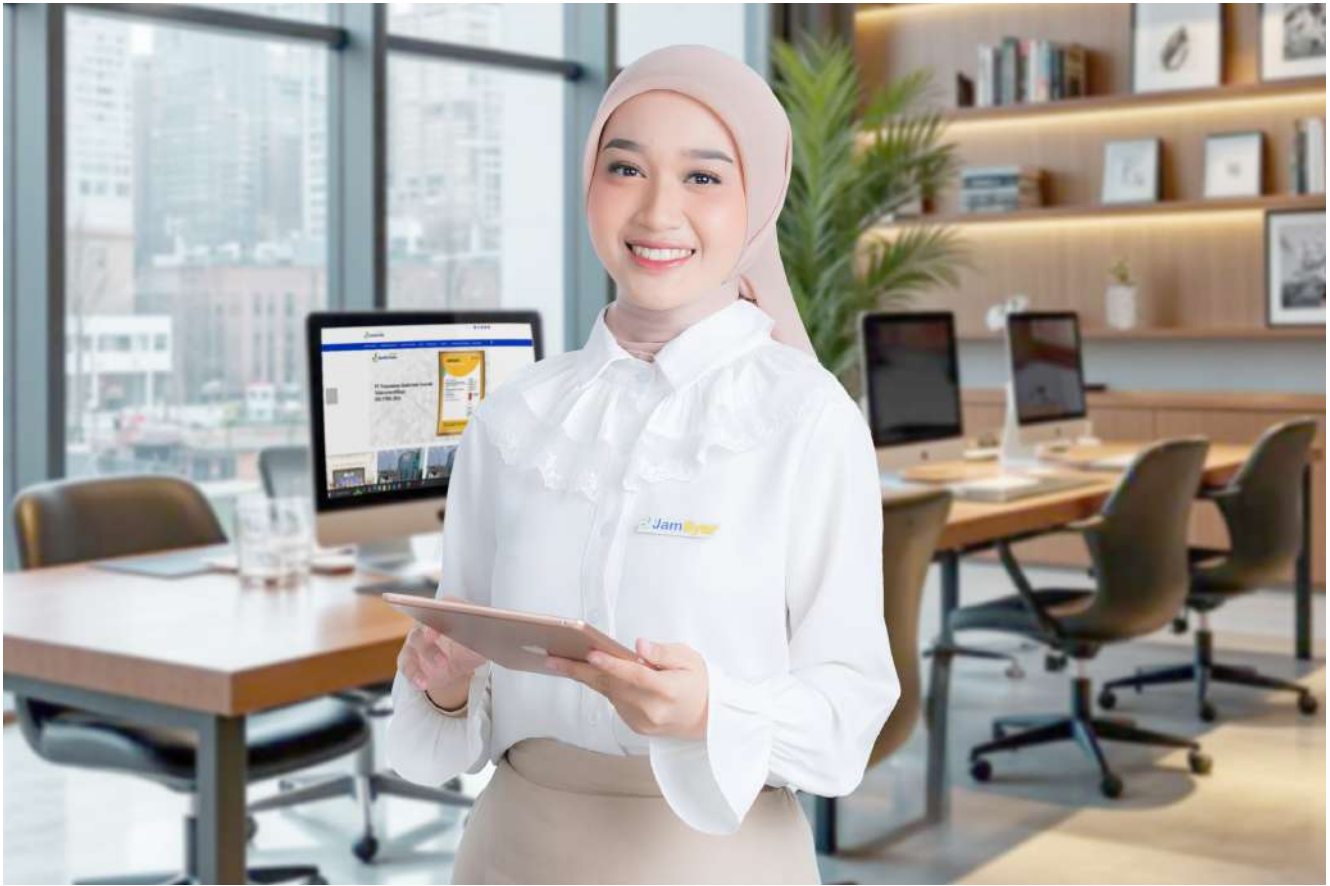


Kantor Cabang Branch Offices

Kantor Cabang Branch Office		Alamat Address
1	Aceh	Jl. Sultan Malikul Saleh No. 7 Lhong Raya Banda Aceh Kode Pos: 23238 Telp. 0651- 8087175 e-mail: aceh@jamsyar.id
2	Medan	Jl. K.H. Wahid Hasyim No 32, Medan Kode Pos: 20154 Telp. 061-88817121 e-mail: medan@jamsyar.id
3	Padang	Jalan Veteran No. 75, Kel. Purus, Kec. Padang Barat, Padang Kode Pos: 40115 Telp. 0751-8959005 e-mail: padang@jamsyar.id
4	Pekan Baru	Komplek Perkantoran Mutiara Asri Garden Jalan Arifin Ahmad No. 6 Kec. Marpoyan Damai, Kel. Sidomulyo Timur, Pekanbaru- Riau Kode Pos: 28289 Telp. 0761- 6709906 e-mail: pekanbaru@jamsyar.id
5	Palembang	Jl. Residen A. Rozak No 27, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni, Palembang Kode Pos: 30114 Telp. 0711-813546 e-mail: palembang@jamsyar.id
6	Lampung	Jl. Jend Sudirman No.75B Tanjung Raya, Kedamaian, Bandar Lampung Kode Pos: 35128 Telp. 0721-5609283 e-mail: lampung@jamsyar.id
7	Jakarta	Gedung Jamkrindo Syariah Lt. 2 Jl. Letjend Suprpto No. 20 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat Kode Pos : 10510 Telp. 021 21242666
8	Bandung	Jl. Karapitan No. 84, Kel. Paledang, Kec. Lengkong, Bandung Kode Pos: 40261 Telp. 022-20508568 / Fax. 022-20508569 e-mail: bandung@jamsyar.id
9	Semarang	Jl. Dr. Wahidin No. 45 Kaliwiro, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50253 Telp.024-76422421 e-mail: semarang@jamsyar.id
10	Surabaya	Jl. Bogowonto No. 51, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya Kode Pos: 60241 Telp. 031-5618799, 031-5683099 e-mail: surabaya@jamsyar.id
11	Mataram	Jl. Pejanggik No.49, Cakranegara Barat, Mataram Kode Pos: 83239 Telp. 0370-7847691 e-mail: mataram@jamsyar.id
12	Pontianak	Jl. Jenderal Ahmad Yani Komplek Town House No. A7, Pontianak Kode Pos: 78122 Telp. 0561-8179112 e-mail: pontianak@jamsyar.id
13	Banjarmasin	Jl. A. Yani KM 7, 9 Ruko D Kel. Manarap, Kertak Hanyar Banjarmasin Kode Pos: 70654 Telp. 0511-6782405 e-mail: banjarmasin@jamsyar.id
14	Balikpapan	Jl. Marsma R. Iswahyudi No.124 Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Kode Pos: 76114 Telp.00542-8709532 e-mail: Balikpapan@jamsyar.id
15	Makassar	Jl. Sungai Saddang Lama No. 23C, Kota Makassar Telp. 0411-894 4555 e-mail: makassar@jamsyar.id

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

INFORMATION ON THE COMPANY'S WEBSITE



Situs web merupakan salah satu sarana dalam memenuhi keterbukaan informasi yang diperlukan oleh segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum sesuai dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi bagi publik. Perusahaan memiliki situs web resmi dengan alamat www.jamkrindosyariah.co.id, disajikan secara komunikatif dan dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perusahaan kepada khalayak luas.

Situs resmi Perusahaan telah menyajikan informasi umum tentang Perusahaan, informasi bagi Pemodal atau Investor berupa informasi tentang Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, serta informasi Tata Kelola Perusahaan. Pada situs web Perusahaan juga disajikan informasi penting lainnya seperti informasi tentang kegiatan Perusahaan serta informasi tentang produk dan layanan Perseroan.

Website is a means of fulfilling the information disclosure required by all stakeholders and the general public in accordance with the principles of transparency and openness of information to the public. The Company has an official website, www.jamkrindosyariah.co.id, presented communicatively and openly accessible, with the aim of providing comprehensive information about the Company to a wide audience.

The Company's official website provides general information about the Company, information for Investors in the form of information about Financial Reports and Annual Reports, as well as information about Corporate Governance. The Company's website also provides other important information such as information about the Company's activities and information about the Company's products and services.



Perseroan memiliki situs web sebagai sumber informasi mengenai kinerja yang disajikan secara transparan bagi investor serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Situs web Perusahaan dapat diakses melalui www.jamkrindosyariah.co.id. Pada situs web tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi mengenai:

The Company has a website as a source of information regarding performance that is presented transparently for investors and all other stakeholders. The Company's website can be accessed through www.jamkrindosyariah.co.id. On that website, all stakeholders can obtain information regarding:

Perusahaan menyediakan akses informasi pada website resmi www.jamkrindosyariah.co.id yang menyediakan data seperti;

The Company provides access to information on its official website www.jamkrindosyariah.co.id which provides data such as:

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Information
• Laporan Tahunan; Annual Reports	v	
• Laporan keuangan tahunan terpisah (3 tahun terakhir); Annual Financial Statements (last 3 years)	v	
• Profil Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi; dan Profiles of Board of Commissioners, Board of Directors, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit	v	
• Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, dan Unit Audit Internal. Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Internal Audit Unit	v	
• Izin usaha dari OJK Business license from OJK (Financial Services Authority)	v	
• Struktur organisasi dan nama pejabat Organizational structure and names of officials	v	
• Dekom, direksi, dan pejabat satu tingkat dibawah direksi Board of Commissioners, Board of Directors, and officials one level below the Board of Directors	v	www.jamkrindosyariah.co.id
• Alamat kantor cabang dan nama pejabat kantor cabang Branch office addresses and names of branch office officials	v	
• Ringkasan informasi produk Product information summary	v	
• Prosedur dan mekanisme penjaminan Guarantee procedures and mechanisms	v	
• Informasi tata cara dan penyelesaian pengaduan Information on procedures and complaint resolution	v	
• Penerapan Tata kelola Perusahaan Implementation of Corporate Governance	v	
• Laporan Keuangan Tahunan Audited Audited Annual Financial Reports	v	

v = tersedia pada situs web Jamkrindo | x = belum tersedia pada situs web Jamkrindo Syariah
v = available on Jamkrindo syariah website | x = not yet available on Jamkrindo website



4

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN
MANAJEMEN**
Management Discussion and Analysis



TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI ECONOMIC AND INDUSTRIAL REVIEW

Kondisi Ekonomi Tahun 2023

Konflik geopolitik yang berkepanjangan di Eropa dan Timur Tengah memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian global di tahun 2023. Kendati sudah mengalami penurunan, namun tingkat inflasi global masih relatif tinggi.

Untuk mengendalikan laju inflasi, The Fed mengambil kebijakan untuk mempertahankan *Federal Funds Rate* (FFR) pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (*higher for longer*). Di 2023, The Fed tercatat beberapa kali menaikkan tingkat suku bunga acuan dari 4,25%-4,50% di akhir tahun 2022 menjadi 5,25%-5,50% di akhir tahun 2023. Demikian juga dengan Bank Sentral Eropa (ECB) yang tercatat menaikkan tingkat suku bunga pinjaman hingga ke level tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 4,75%.

Fenomena *higher for longer* memicu *capital outflow* dari pasar keuangan di emerging market dan penguatan nilai tukar dolar amerika serikat terhadap hampir seluruh mata uang lainnya.

Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF), dalam laporan *World Economics Outlook* yang diterbitkan pada Januari 2024 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 sebesar 3,1%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 3,4%.

Di tengah kondisi ekonomi global yang melambat, ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh solid meski juga mengalami tren perlambatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tahun 2023 ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% atau melambat dari 5,31% di 2022. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia utamanya disebabkan nilai ekspor yang turun menjadi USD258,82 miliar dari USD291,90 miliar di tahun 2022, sejalan dengan normalisasi harga komoditas di sepanjang 2023. Kendati demikian, neraca perdagangan Indonesia tahun 2023 masih mencatatkan surplus sebesar USD36,93. Capaian tersebut menunjukkan kinerja perdagangan Indonesia yang terjaga di tengah perlambatan ekonomi global.

Di samping penurunan ekspor, konsumsi rumah tangga juga melambat menjadi 4,82%. Hal ini disebabkan oleh penurunan konsumsi transportasi akibat kenaikan harga BBM subsidi sejak akhir kuartal 3-2022 dan penurunan konsumsi makanan dan minuman akibat kenaikan harga beberapa bahan pokok.

Economic Conditions in 2023

The prolonged geopolitical conflicts in Europe and the Middle East had a significant impact on the global economy in 2023. Despite experiencing a decline, global inflation rates remained relatively high.

To control inflation, the Federal Reserve implemented a policy of maintaining the Federal Funds Rate (FFR) at a high level for an extended period (*"higher for longer"*). In 2023, the Fed raised its benchmark interest rate multiple times from 4.25%-4.50% at the end of 2022 to 5.25%-5.50% by the end of 2023. Similarly, the European Central Bank (ECB) increased its lending rate to the highest level in its history at 4.75%.

The *"higher for longer"* phenomenon triggered capital outflows from emerging market financial markets and strengthened the US dollar against almost all other currencies.

The International Monetary Fund (IMF), in its World Economic Outlook report published in January 2024, projected global economic growth for 2023 at 3.1%, lower than the previous year's growth of 3.4%.

Amid slowing global economic conditions, Indonesia's economy continued to grow solidly despite following the deceleration trend. According to the Central Statistics Agency, Indonesia's economy grew by 5.05% in 2023, slowing from 5.31% in 2022. The deceleration in Indonesia's economic growth was primarily due to a decrease in export value to USD258.82 billion from USD291.90 billion in 2022, in line with the normalization of commodity prices throughout 2023. Nevertheless, Indonesia's trade balance in 2023 still recorded a surplus of USD36.93 billion. This achievement demonstrates Indonesia's sustained trade performance amid the global economic slowdown.

In addition to declining exports, household consumption also slowed to 4.82%. This was caused by reduced transportation consumption due to subsidized fuel price increases since the end of Q3 2022 and decreased food and beverage consumption due to rising prices of several essential commodities.



Kendati pertumbuhan ekonomi sedikit melambat, namun ekonomi Indonesia relatif stabil di 2023. Hal tersebut tak lepas dari keberhasilan upaya yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga tingkat inflasi pada level yang rendah. Berdasarkan data BPS, inflasi nasional 2023 tercatat sebesar 2,61%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya 5,51%. Hal tersebut salah satunya juga karena kebijakan BI yang menaikkan tingkat suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) menjadi 6,00% dari posisi akhir tahun lalu sebesar 5,50% untuk memastikan inflasi inti tetap terjaga. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas pasar keuangan Indonesia dengan menetapkan suku bunga acuan yang lebih tinggi dibandingkan suku bunga global.

Di pasar keuangan, dana asing tercatat masuk ke pasar keuangan Indonesia sebesar Rp49,24 triliun. Dana tersebut sebagian besar disumbangkan oleh dana asing yang masuk ke pasar utang yaitu sebesar Rp62,56 triliun. Sedangkan di pasar saham mencatatkan dana keluar sebesar Rp13,32 triliun. Masuknya dana asing tersebut mendorong perbaikan nilai tukar rupiah sebesar 1,14% menjadi Rp15.390.

Industri Penjaminan Tahun 2023

Industri penjaminan kredit memainkan peran penting dalam menjamin risiko penyaluran kredit lembaga perbankan. Beberapa sektor seperti UMKM, misalnya, dinilai sangat membutuhkan peran lembaga penjaminan untuk membantu proses penyaluran pembiayaan dari perbankan berjalan lancar melalui jasa penjaminan risiko kredit.

Walaupun berperan penting dalam menopang perekonomian, industri penjaminan di Tanah Air masih memiliki beragam rintangan dalam menjalankan perannya, mulai dari kurangnya pemahaman dari masyarakat dan lembaga jasa keuangan terkait peran industri penjaminan hingga terbatasnya SDM di bidang penjaminan, telah menghambat industri ini dalam menjalankan fungsinya.

Tahun 2023, industri penjaminan mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset industri penjaminan meningkat 18,63% dari Rp39,12 triliun di tahun 2022 menjadi Rp46,41 triliun di tahun 2023. Di tahun 2023, OJK menerbitkan *Roadmap* Lembaga Penjamin 2023–2027. *Roadmap* ini disusun sebagai peta jalan pengembangan Lembaga Penjamin di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Penyusunan *roadmap* lembaga penjamin diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan penguatan industri lembaga penjamin sehingga mampu menyediakan jasa yang efisien dan berdaya saing. Lebih lanjut, *roadmap* diharapkan akan menjadi panduan strategis bagi lembaga penjamin di Indonesia dalam mengembangkan produk dan layanannya, merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan investasi dan perluasan bisnis, serta menjaga kesehatan dan tata kelola di masa yang akan datang.

Despite experiencing a slight economic slowdown, Indonesia's economy remained relatively stable throughout 2023. This stability can be attributed to the successful efforts of the government and Bank Indonesia (BI) in maintaining inflation at low levels. According to Statistics Indonesia (BPS) data, national inflation in 2023 was recorded at 2.61%, significantly lower than the previous year's 5.51%. This achievement was partly due to BI's policy of raising the benchmark interest rate or BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) to 6.00% from last year's end position of 5.50% to ensure core inflation remained controlled. This measure was implemented to maintain stability in Indonesia's financial markets by establishing benchmark interest rates higher than global interest rates.

In the financial markets, foreign funds flowing into Indonesia's financial market totaled IDR 49.24 trillion. The majority of these funds were contributed by foreign capital entering the debt market, amounting to IDR 62.56 trillion. Meanwhile, the stock market recorded an outflow of IDR 13.32 trillion. This influx of foreign funds drove an improvement in the rupiah exchange rate by 1.14% to IDR 15,390.

Credit Guarantee Industry in 2023

The credit guarantee industry plays a crucial role in securing risk in bank lending. Certain sectors, such as MSMEs, are considered particularly reliant on guarantee institutions to facilitate smooth financing distribution from banks through credit risk guarantee services.

Despite its important role in supporting the economy, the guarantee industry in Indonesia still faces various obstacles in carrying out its functions, ranging from a lack of understanding from the public and financial service institutions regarding the role of the guarantee industry to limited human resources in the guarantee sector, which have hindered this industry from fulfilling its function effectively.

In 2023, the guarantee industry experienced favorable growth. Based on data from the Financial Services Authority (OJK), assets in the guarantee industry increased by 18.63% from IDR 39.12 trillion in 2022 to IDR 46.41 trillion in 2023. In 2023, OJK issued the Guarantor Institution Roadmap 2023–2027. This roadmap was developed as a development framework for Guarantor Institutions in Indonesia to support economic growth toward Golden Indonesia 2045.

The formulation of the guarantor institution roadmap is expected to drive growth and strengthen the guarantor institution industry, enabling it to provide efficient and competitive services. Furthermore, the roadmap is intended to serve as a strategic guide for guarantor institutions in Indonesia in developing their products and services, planning and implementing investment activities and business expansion, and maintaining financial health and governance in the future.



Strategi Pengembangan Usaha

"Enhance Competitiveness to Strengthen the Business" – fokus pada peningkatan daya saing untuk memperkuat bisnis.

Aspirasi & Sasaran

Aspirasi 2023:

Pengembangan dan perluasan pasar penjaminan berbasis teknologi informasi serta penguatan penerapan Enterprise Risk Management (ERM).

Sasaran Strategis:

Menjadi leader di industri penjaminan syariah. Double profit kinerja keuangan dengan prinsip kehati-hatian. Menjaga tingkat kesehatan perusahaan dengan pencadangan kuat dan gearing ratio produktif maksimal 20x.

Isu Strategis

Restrukturisasi portofolio untuk mengurangi potensi kerugian, Perubahan model bisnis agar fokus pada produk yang memberi solusi, bukan sekadar komoditas, Penguatan fokus bisnis pada produk core competence, Tata kelola berbasis risiko dan manajemen risiko yang robust, Peningkatan kompetensi SDM dan sinergi antar anggota holding, Peningkatan daya saing melalui inovasi dan teknologi.

Fokus Utama

Penguatan sistem IT melalui pengembangan roadmap TI untuk meningkatkan layanan konsumen. Optimalisasi sinergi dengan holding dan mitra strategis.

Strategic Imperatives & Initiatives

Pengembangan produk:

Fokus pada produk champion (Kontra Bank Garansi, Surety Bond, Custom Bond) dan diferensiasi produk.

Perluasan pasar:

Menambah mitra baru, meningkatkan pangsa pasar eksisting, dan konsinyering dengan mitra.
Investasi: Alokasi ke deposito dan SBSN dengan expected yield 4,48%.

Pengembangan SDM:

Talent mapping, career path, pelatihan, dan internalisasi budaya kerja AKHLAK.

Penguatan manajemen risiko:

Integrasi ke proses bisnis dan peningkatan risk control.

Digitalisasi:

Implementasi aplikasi MyJamSyar dan sistem Host-to-Host untuk percepatan layanan.

Business Development Strategy

"Enhance Competitiveness to Strengthen the Business" – focus on increasing competitiveness to strengthen the business.

Aspirations and Goals

2023 Aspirations:

Development and expansion of the information technology-based guarantee market and strengthening the implementation of Enterprise Risk Management (ERM).

Strategic Goal:

To become a leader in the Sharia guarantee industry. To double financial performance profits with prudent principles. To maintain corporate health with strong reserves and a maximum productive gearing ratio of 20x.

Strategic Issues

Portfolio restructuring to reduce potential losses, changing the business model to focus on products that provide solutions, not just commodities, strengthening business focus on core product competencies, implementing risk-based governance and robust risk management, improving human resource competency and synergy among holding company members, and enhancing competitiveness through innovation and technology.

Main Focus

Strengthening IT systems through developing an IT roadmap to improve customer service. Optimizing synergies with holding companies and strategic partners.

Strategic Imperatives & Initiatives

Product development:

Focus on champion products (Contra Bank Guarantees, Surety Bonds, Custom Bonds) and product differentiation.

Market expansion:

Adding new partners, increasing existing market share, and consigning with partners.
Investment: Allocation to deposits and SBSN with an expected yield of 4.48%.

Human Resource Development:

Talent mapping, career paths, training, and internalization of the AKHLAK work culture.

Strengthening risk management:

Integration into business processes and improving risk control.

Digitization:

Implementation of the MyJamSyar application and a Host-to-Host system to accelerate service delivery.



Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Sepanjang tahun 2023, aktivitas operasional PT Jamkrindo Syariah terus berfokus pada penyediaan layanan penjaminan berbasis prinsip syariah sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 2/POJK.05/2017. Dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha utama mencakup pemberian penjaminan atas berbagai jenis pembiayaan melalui produk-produk kafalah yang dikembangkan sejak Perseroan mulai beroperasi secara aktif pada tahun 2015. Seluruh layanan ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan akses pembiayaan syariah bagi masyarakat, UMKM, sektor konstruksi, hingga proyek-proyek strategis nasional.

Dalam laporan ini, Perseroan mengelompokkan kinerja usaha berdasarkan dua segmen utama, yaitu Penjaminan Cash Loan dan Penjaminan Non Cash Loan, yang merepresentasikan struktur internal pendapatan penjaminan Perseroan. Pengelompokan ini dilakukan sejalan dengan kebijakan bahwa laporan keuangan tidak menerapkan PSAK 108 tentang Segmen Operasi, sehingga tinjauan usaha disusun berdasarkan kontribusi aktual masing-masing produk terhadap perolehan Imbal Jasa Kafalah (IJK) selama tahun berjalan.

DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang Penjaminan Syariah Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009 Tentang Penjaminan Syariah, dimana definisi Penjaminan Syariah adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah. Akad yang digunakan dalam Penjaminan Syariah adalah Kafalah bil Ujroh dengan ketentuan :

1. Obyek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari:
 - Kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi syariah.
 - Hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip syariah.
2. Pernyataan Ijab & Qobul harus dinyatakan para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (Akad).
3. Besaran fee harus ditetapkan dalam Akad berdasarkan kesepakatan.
4. Kafalah bil Ujroh bersikap mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak

Prinsip-prinsip Transaksi Syariah yang membedakan dengan Transaksi konvensional antara lain adalah :

1. Tidak ada unsur bunga (riba).
2. Tidak mengandung unsur judi (maisyr).
3. Tidak mengandung unsur ketidakjelasan dalam akad (gharar).
4. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain (dharar).
5. Tidak mengandung unsur kedzaliman.
6. Tidak ada unsur penipuan.
7. Tidak mengandung materi yang diharamkan.

Operational Review By Business Segment

Throughout 2023, PT Jamkrindo Syariah's operational activities continued to focus on providing sharia-based guarantee services as regulated in POJK Number 2/POJK.05/2017. Referring to the Company's Articles of Association, the main business activities include providing guarantees for various types of financing through kafalah products developed since the Company began active operations in 2015. All of these services are designed to support the growth of access to sharia financing for the community, MSMEs, the construction sector, and national strategic projects.

In this report, the Company categorizes its business performance based on two main segments: Cash Loan Guarantee and Non-Cash Loan Guarantee, which represent the internal structure of the Company's guarantee income. This grouping is in line with the policy that the financial statements do not apply PSAK 108 concerning Operating Segments, so the business review is compiled based on the actual contribution of each product to the acquisition of Kafalah Service Fees (IJK) during the current year.

The National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI) issued a fatwa on Sharia Guarantees Number: 74/DSN-MUI/I/2009 Concerning Sharia Guarantees, where the definition of Sharia Guarantee is a guarantee between parties based on Sharia principles. The contract used in Sharia Guarantees is Kafalah bil Ujroh with the following provisions:

1. The guaranteed object can be all or part of:
 - Payment obligations (dayn) arising from sharia transactions.
 - Other matters that can be guaranteed based on sharia principles.
2. The declaration of Ijab & Qobul must be stated by the parties to show their intention in entering into a contract (Akad).
3. The amount of the fee must be stipulated in the Contract based on agreement.
4. Kafalah bil Ujroh is binding and may not be canceled unilaterally.

The principles of Sharia Transactions that distinguish them from conventional transactions include:

1. No element of interest (riba).
2. No element of gambling (maisyr).
3. No element of uncertainty in the contract (gharar).
4. Does not harm oneself or other parties (dharar).
5. No element of injustice.
6. No element of fraud.
7. Does not contain prohibited materials.



Penjaminan Pembiayaan diperlukan oleh Penerima Jaminan pada saat permohonan pembiayaan dari Terjamin dinyatakan layak oleh Penerima Jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi pembiayaan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan kecukupan agunan (Unbankable).

KEGIATAN USAHA PT JAMKRINDO SYARIAH

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perusahaan sebagaimana disebutkan pada Akta Pendirian Jamsyar No. 68 pasal 3 tanggal 19 September 2014 adalah sebagai berikut:

1. Penjaminan atas Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan dan di luar Lembaga Keuangan;
2. Penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atau pembiayaan atau pinjaman berdasarkan Prinsip Syariah baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang disalurkan antara lain oleh Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, antara lain Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Koperasi Jasa Keuangan Syariah, koperasi lainnya yang menjalankan usaha dengan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung (channeling maupun executing);
3. Penjaminan atas Pembiayaan atau Pinjaman berdasarkan Prinsip Syariah program Kemitraan yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan atau
4. Penjaminan atas Surat Utang;
5. Penjaminan Anjak Piutang/Factoring Syariah;
6. Penjaminan Transaksi Dagang;
7. Penjaminan Distribusi;
8. Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Surety Bond);
9. Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi);
10. Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
11. Penjaminan Letter of Credit (L/C);
12. Penjaminan Kepabeaan (Customs Bond);
13. Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan Syariah; dan
14. Penyediaan informasi/database Terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan.

Berikut adalah jasa yang dijalankan Perseroan: Hingga 31 Desember 2023, jasa yang telah dijalankan Perseroan dan telah disesuaikan segmentasinya pada pengungkapan laporan keuangan Perseroan meliputi:

Financing Guarantees are required by the Guarantee Recipient when the financing application from the Guaranteed party is declared eligible by the Guarantee Recipient but has not met the banking financing administrative requirements, particularly in terms of meeting the adequacy of collateral (Unbankable).

BUSINESS ACTIVITIES OF PT JAMKRINDO SYARIAH

The business activities carried out by the Company as stated in the Jamsyar Deed of Establishment No. 68 article 3 dated September 19, 2014 are as follows:

1. Guarantees for Financing based on Sharia Principles distributed by Financial Institutions and non-Financial Institutions;
2. Guarantees for the fulfillment of financial obligations or financing or loans based on Sharia Principles for individuals, business entities, limited liability companies, business units of foundations, cooperatives, and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) distributed by, among others, Savings and Loan Cooperatives, Sharia Microfinance Institutions, including Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Sharia Financial Services Cooperatives, and other cooperatives operating with Sharia Principles, either directly or indirectly (channeling or executing);
3. Guarantees for Financing or Loans based on Sharia Principles for Partnership programs distributed by State-Owned Enterprises within the framework of the Partnership and Community Development Program (PKBL); and/or
4. Guarantees for Debt Securities;
5. Sharia Factoring Guarantees;
6. Trade Transaction Guarantees;
7. Distribution Guarantees;
8. Goods and/or Services Procurement Guarantees (Surety Bond);
9. Bank Guarantee Guarantees (Counter Bank Guarantees);
10. Domestic Documentary Credit Guarantees (SKBDN);
11. Letter of Credit (L/C) Guarantees;
12. Customs Guarantees (Customs Bond);
13. Management Consulting Services related to Sharia Guarantee business activities; and
14. Provision of information/database of Guaranteed parties related to Guarantee business activities.

The following are the services operated by the company: As of December 31, 2023, the services that have been operated by the Company and have had their segmentation adjusted in the Company's financial statement disclosures include:



PRODUK PERSEROAN		
Jasa	Uraian	Turunan Produk
Kafalah Pembiayaan Umum General Financing Kafalah	Penjaminan Pembiayaan yang diajukan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha/ proyek atau kegiatan investasi yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan atau koperasi dengan tujuan untuk mendapat hasil/return dari kegiatan tersebut Financing guarantee implemented to support the smooth running of business activities and/or small legitimate investment activities carried out by individuals, companies, or cooperatives with the aim of obtaining results/returns from these activities	-
Kafalah Pembiayaan Multiguna Multi-purpose Financing Kafalah	Kafalah Pembiayaan Multiguna adalah Penjaminan atas Pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) kepada Terjamin (Makfuul 'Anhu) dengan sumber pengembalian adalah penghasilan tetap/gaji dan pendapatan lain perbulan yang sah dari tempat Terjamin (Makfuul 'Anhu) bekerja Kafalah Pembiayaan Multiguna is a guarantee for financing extended by the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) to the Guaranteed (Makfuul Anhu) with a source of repayment being fixed income (salary) and other income that is not from the Guaranteed's (Makfuul Anhu) place of work	-
Kafalah Pembiayaan Mikro Micro Financing Kafalah	Kafalah Pembiayaan Mikro adalah Penjaminan atas Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk keperluan modal kerja dan/atau investasi dengan Plafond maksimum sebesar Rp250.000.000,- atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) atau sesuai kesepakatan tertulis antara Jamsyar dan Penerima Jaminan (Makfuul Lahu). Kafalah Pembiayaan Mikro is a Guarantee or Financing provided by Financial Institutions for micro or small businesses intended for working capital and/or investment with a maximum amount of IDR 15,000,000, carried out according to applicable provisions at each Guarantor. The financing (Makfuul bihi) may result from an agreement between the Guarantor and Guarantee Recipient.	-
Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa Working Capital and Goods/ Services Procurement Financing Kafalah	Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa adalah penjaminan atas Pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) kepada Terjamin (Makfuul 'Anhu) untuk keperluan tambahan Modal Kerja, usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin (Makfuul 'Anhu) dengan Bouwheer (pemilik proyek) Kafalah Pembiayaan Konstruktual dan Pengadaan Barang/Jasa is a guarantee for financing provided by the Guarantee Recipient (Lembaga Keuangan) to the Guaranteed (Makfuul Anhu) for Working Capital needs, business services for individuals or legal entities in carrying out a work agreement with a third party.	-
Kafalah Kontra Bank Garansi / Kafalah Contra Bank Guarantee	Kafalah Kontra Bank Garansi (KBG) adalah Pemberian Jaminan kepada Penerima Jaminan (Lembaga Keuangan Bank) atas penerbitan Bank Garansi yang diterbitkan Penerima Jaminan (Lembaga Keuangan Bank) untuk kepentingan Obligee (Pemilik Proyek). Jaminan Kontra Bank Garansi (KBG) is the provision of guarantees to the Guarantee Recipient (Financial Institution/Bank) who issues guarantees (Bank Guarantee) to the Guarantee Recipient (Financial Institution/Bank) for guarantee obligations (Principal/ Third Party).	Kafalah Kontra BG untuk: 1. Jaminan Penawaran 2. Jaminan Pelaksanaan 3. Jaminan Uang Muka 4. Jaminan Pemeliharaan 5. Jaminan khusus atau SP2D Kafalah contra BG for: 1. Tender Guarantee 2. Advance Payment Guarantee 3. Performance Bond 4. Maintenance Bond 5. Special guarantee or SP2D
Surety Bond	Suatu perjanjian 3 (tiga) pihak antara Penjamin atas dasar keyakinannya kepada Terjamin/ Principal secara bersama-sama berjanji kepada Penerima Jaminan/Obligee/Bouwheer bahwa apabila Terjamin/Principal oleh sebab suatu hal menjadi halat atau gagal melaksanakan pekerjaan atau mengalami kegagalan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan dengan Penerima Jaminan/Obligee/Bouwheer, maka Penjaminan akan bertanggung jawab terhadap Penerima Jaminan/Obligee/Bouwheer untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Terjamin/Principal tersebut. A guarantee agreement is a three-party legal relationship where the Guarantor (Principal) issues a guarantee in the name of Surety with direct responsibility to the Guarantee Recipient (Obligee) in case the Guaranteed (Principal) fails to implement a contract or agreement with the Guarantee Recipient (Obligee/Beneficiary). In accordance with the laws and regulations, the Surety acts as an entity to replace the obligations of the Guaranteed (Principal).	Jenis Jaminan Surety Bond: 1. Jaminan Penawaran 2. Jaminan Pelaksanaan 3. Jaminan Uang Muka 4. Jaminan Pemeliharaan 5. Jaminan Pembayaran Types of Surety Bond Guarantee: 1. Bid Bond 2. Performance Bond 3. Down Payment Bond 4. Maintenance Bond 5. Payment Bond
Customs Bond	Perikatan penjaminan antara tiga pihak, Penjamin (Kafili) terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam rangka kepabeanaan yang timbul dari Principal/Terjamin (Makfuul 'Anhu) terhadap Pemilik Proyek (Obligee) dalam hal Principal/Terjamin (Makfuul 'Anhu) tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. A three-party legal guarantee, with the Guarantor (Kafil) acting to fulfill the guarantee obligations in accordance with applicable provisions of the Principal (Terjamin/Makfuul Anhu) to the Customs Office (Obligee) determined by the Principal (Terjamin/Makfuul Anhu) in accordance with applicable customs provisions.	Jenis Customs Bond: 1. KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) 2. Kaber (Kawasan Berikat) 3. Vooruitslag 4. SPKPB (Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk) 5. TPS (Tempat Penimbunan Sementara) 6. Angkut Lanjut 7. PJT (Perusahaan Jasa Titipan) 8. PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan d/h OB 23 (Impor Sementara)
Kafalah Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP KPR Subsidy Financing Guarantee (FLPP)	Kafalah Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP adalah penjaminan pembiayaan dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diberikan kepada Terjamin (Makfuul 'Anhu) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Tapak atau Susun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kafalah Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP is a financing guarantee with the support of the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) provided to the Guaranteed (Makfuul 'Anhu) Low-Income Communities (MBR) in the context of ownership of Tread or Flat Prosperous Houses as stipulated in the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing.	-

PRODUK PERSEROAN		
Jasa	Uraian	Turunan Produk
Kafalah Distribusi Barang Goods Distribution Kafalah	Kafalah dari Penjamin atas Distribusi Barang sesuai dengan dokumen perjanjian antara Penerima Jaminan dengan Terjamin. Kafalah Jaminan Distribusi Barang is in accordance with distribution agreement documents and/or ongoing distribution agreements.	-
Kafalah KUR-Ib KUR-Ib Kafalah	Kredit/Pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi kepada debitur individu/ perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Credit/Financing for working capital and/or investment for individual debtors/customers who are productive and feasible businesses but do not yet have additional collateral or insufficient additional collateral.	-
Kafalah Pembiayaan Invoice Invoice Financing Kafalah	Pembiayaan melalui pemberian dana talangan (qardh) untuk pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari Terjamin kepada Penerima Jaminan yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang/ Obligees sesuai dengan prinsip syariah. Financing through the provision of bailout funds (agent) for management of loan/financing distribution or other private debt facilities from the Guarantor to the Guarantor Recipient in order to be distributed to the related party/Obligee in accordance with sharia principles.	-

Dalam menjalankan aktivitas penjaminan, akad yang digunakan adalah Kafalah Bil Ujrah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No.74/DSN-MUI/I/2009 tanggal 15 Januari 2009 tentang Penjaminan Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 Tahun 2017. Adapun akad-akad Pembiayaan yang dapat dijamin adalah sebagai berikut:

In carrying out guarantee activities, the contract used is Kafalah Bil Ujrah as regulated in DSN MUI Fatwa No.74/DSN-MUI/I/2009 dated January 15, 2009, concerning Sharia Guarantees and Financial Services Authority Regulation Number 2/POJK.05/2017 of 2017. The financing contracts that can be guaranteed are as follows:

- Pembiayaan Murabahah Pembiayaan dari Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) berupa jual beli barang antara Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dengan Terjamin (Makfuul 'Anhu) dengan harga asal (pokok pembiayaan) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
- Pembiayaan Salam Pembiayaan dari Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) berupa jual beli barang antara Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dengan Terjamin (Makfuul 'Anhu) dimana barang yang dibeli Terjamin (Makfuul 'Anhu) akan diserahkan di kemudian hari sedangkan pembiayaan dilakukan di muka.
- Pembiayaan Istishna' Pembiayaan dari Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) berupa jual beli barang antara Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dengan Terjamin (Makfuul 'Anhu) dimana jual beli tersebut berupa pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dan Terjamin (Makfuul 'Anhu), sedangkan Pembiayaan dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan pada masa yang akan datang.
- Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan berupa kerja sama usaha antara Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dengan Terjamin (Makfuul 'Anhu) dimana Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) menyediakan seluruh modal, sedangkan Terjamin (Makfuul 'Anhu) mengelola Usaha tersebut dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang timbul dari usaha tersebut akan dibagi kepada Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dan Terjamin (Makfuul 'Anhu) sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati.
- Murabahah Financing Financing from the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) in the form of sale and purchase of goods between the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) and the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) at the original price (principal financing) plus an agreed profit margin.
- Salam Financing Financing from the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) in the form of sale and purchase of goods between the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) and the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) where the goods purchased by the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) will be delivered at a later date while the financing is provided upfront.
- Istishna' Financing Financing from the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) in the form of sale and purchase of goods between the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) and the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) where the transaction involves ordering the manufacturing of specific goods with certain criteria and requirements agreed upon between the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) and the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu), while the Financing can be provided upfront, in installments, or deferred to a future date.
- Mudharabah Financing Financing in the form of a business partnership between the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) and the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) where the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) provides all the capital, while the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) manages the Business with an agreement that the profits arising from the business will be distributed to the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) and the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) according to the agreed profit-



5. Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan berupa kerja sama usaha antara Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dan Terjamin (Makfuul 'Anhu) untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi kepada Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dan Terjamin (Makfuul 'Anhu) sesuai nishbah bagi hasil yang disepakati dan risiko ditanggung sesuai dengan kontribusi dana masing-masing.
6. Pembiayaan Ijarah Pembiayaan berupa Hak Guna (Manfaat) suatu barang atau jasa dari Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dalam waktu tertentu melalui Pembayaran Sewa dari Terjamin (Makfuul 'Anhu) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
7. Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamliik Pembiayaan berupa Hak Guna (Manfaat) suatu barang atau jasa dari Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) dalam waktu tertentu melalui Pembayaran Sewa dari Terjamin (Makfuul 'Anhu), dengan disertai opsi untuk membeli/ tidak membeli barang pada akhir perjanjian Pembiayaan.

Mekanisme Penjaminan Syariah

Dalam menjalankan proses penjaminan syariah, Jamsyar selalu menerapkan mekanisme dan alur operasi yang transparan serta sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas bisnis sesuai dengan kepentingan yang melibatkan, yaitu Badan usaha penyalur pembiayaan atau yang menerima jaminan yang disebut Penerima Jaminan (Makfuul Lahu), debitur yang menerimapembiayaan/jaminan disebut Terjamin (makfuul 'anhu), dan Perusahaan Penjamin pembiayaan/ pemberi jaminan disebut Penjamin (Kafii).

Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Adapun mekanisme serta alur operasi penjaminan sebagai berikut :

sharing ratio.

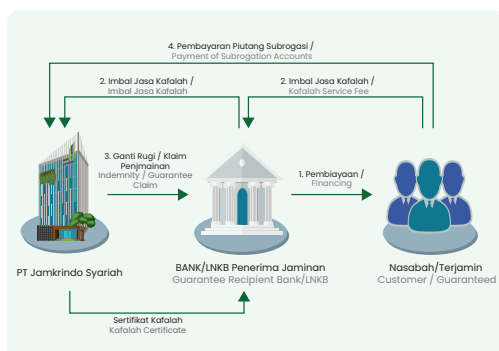
5. Musyarakah Financing Financing in the form of a business partnership between the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) and the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) for a specific business, where each party contributes capital with an agreement that profits will be distributed to the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) and the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) according to the agreed profit-sharing ratio, and risks are borne according to each party's capital contribution.
6. Ijarah Financing Financing in the form of Right of Use (Benefit) of a good or service from the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) for a certain period through Rental Payments from the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) without the transfer of ownership of the good itself.
7. Ijarah Muntahiyah Bit Tamliik Financing Financing in the form of Right of Use (Benefit) of a good or service from the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) for a certain period through Rental Payments from the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu), with an option to purchase/not purchase the good at the end of the Financing agreement.

Sharia Guarantee Mechanism

In carrying out the sharia guarantee process, Jamkrindo consistently implements transparent mechanisms and operational procedures as guidelines for conducting business activities in accordance with the interests of the involved parties, namely: the financing provider entity referred to as the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu), the debtor receiving financing/guarantee referred to as the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu), and the Financing Guarantee Company that provides the guarantee called the Guarantor (Kafil).

The Guarantor is the party that provides guarantees as defined in Law Number 1 of 2016 concerning Guarantees. The guarantee mechanism and operational procedures are as follows:

PROSES BISNIS PENJAMINAN SYARIAH SHARIA GUARANTEE BUSINESS PROCESS



Proses Penjaminan Pembiayaan melibatkan sekurang-sekurangnya tiga pihak, yaitu:

The Financing Guarantee process involves at least three parties, namely:

1. Badan usaha pemberi pembiayaan yang di dalam hal ini disebut Penerima Jabatan (Makfuul Lahu) / Business entities providing financing in this is called Position Recipient (Makfuul Lahu)
2. Debitur Pembiayaan yang dalam hal ini disebut Terjamin (Makfuul Anhu) / Financing Debtor which in this case is called Guaranteed (Makfuul Anhu)
3. Perusahaan Penjamin Pembiayaan yang dalam hal ini disebut Penjamin (Kafil) / Financing Guarantee Company which in this case is called Guarantor (Kafil)

Mekanisme Proses Penjamin dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Penjaminan Langsung
- b. Penjaminan Tidak Langsung

The Guarantee Process Mechanism is divided into two, namely:

- a. Direct Guarantee
- b. Indirect Guarantee



PERBEDAAN PENJAMINAN LANGSUNG / DIFFERENCE OF DIRECT GUARANTEE		
No	PENJAMINAN TIDAK LANGSUNG / INDIRECT GUARANTEE	PENJAMINAN TIDAK LANGSUNG / INDIRECT GUARANTEE
1.	Calon Terjamin melakukan permohonan langsung kepada Penjamin / Guaranteed Candidates apply directly to the Guarantor	Permohonan penjaminan melalui Penerima Jaminan / Application for guarantee through Guarantee Beneficiary
2.	Tidak harus ada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Penjamin dengan Penerima Jaminan / There is no need for a Cooperation Agreement (PKS) between the Guarantor and the Beneficiary	Terdapat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Penjamin dengan Penerima Jaminan / There is a Cooperation Agreement (PKS) between the Guarantor and the Beneficiary
3.	IJK dibayarkan secara langsung oleh Terjamin kepada Penjamin / IJK is paid directly by the Guaranteed to the Guarantor	IJK dibayarkan oleh Terjamin melalui Penerima Jaminan / IJK is paid by the Guaranteed through the Guarantee Beneficiary
4.	Analisa terhadap Calon Terjamin dapat dilakukan secara simultan oleh Penjamin dan Penerima Penjamin / Analysis of the Guaranteed Candidate can be carried out simultaneously by the Guarantor and the Beneficiary of the Guarantor	Analisa terhadap Calon Terjamin dilakukan oleh Penerima Jaminan terlebih dahulu. Analisa dilakukan Penjamin terhadap Calon Terjamin dituntut cepat / Analysis of the Guaranteed Candidate is carried out by the Guarantee Beneficiary first. The analysis is carried out by the guarantor against the guaranteed candidate, it is demanded to be fast
5.	Penjamin telah mengenal Calon Terjamin, sehingga Lembaga Penjamin berfungsi sebagai lembaga yang memberikan "Pasar Pembiayaan" bagi Perbankan/Lembaga keuangan lainnya/ The Guarantor already knows the Guaranteed Candidate, so that the Guarantor Institution functions as an institution that provides a "Financing Market" for Banking/other financial institutions	Lembaga Penjamin berfungsi sebagai Pelengkap Pembiayaan karena kebutuhan jaminan pembiayaan biasanya hal terakhir yang masih belum dimiliki untuk pemenuhan persyaratan pembiayaan / The Guarantee Institution functions as a Financing Complementary because the need for financing guarantees is usually the last thing that is still not owned to fulfill financing requirements

1	- Terjamin (Makfuul 'Anhu) mengajukan permohonan Pembiayaan/Penjaminan. - Terjamin (Makfuul 'Anhu) mengajukan persyaratan pengajuan Pembiayaan/ Penjaminan. - Terjamin (Makfuul 'Anhu) memenuhi kewajiban Pembiayaan/Penjaminan yang ditetapkan oleh Penerima Jaminan (Makfuul Lahu)	1	- The Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) submits a Financing/Guarantee application. - The Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) fulfills the Financing/Guarantee application requirements. - The Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) fulfills the Financing/Guarantee obligations set by the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu).
2	- Terjamin (Makfuul 'Anhu) mengajukan permohonan Kafalah Penjaminan secara langsung kepada Penjamin (Kafail) - Pola Langsung - Terjamin (Makfuul 'Anhu) mengajukan Kafalah permohonan Pembiayaan/Penjaminan melalui Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) - Pola Tidak Langsung	2	- The Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) submits a Guarantee application directly to the Guarantor (Kafil) - Direct Path - The Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu) submits a Guarantee application through the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) - Indirect Path
3	- Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) mengajukan permohonan Penjaminan - Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) menyampaikan laporan nominative Pembiayaan secara periodik. - Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) menyampaikan angsuran piutang subrogasi dalam hal terdapat angsuran dari Terjamin (Makfuul 'Anhu).	3	- The Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) submits a Guarantee application. - The Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) declares and includes the Financing Credit Agreement and reviews the subrogation claim rights in case of default. - Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) pays guarantee fees
4	- Jamkrindo Syariah memberikan persetujuan penjaminan dan menerbitkan Sertifikat Kafalah kepada Penerima Jaminan (Makfuul Lahu). - Jamkrindo Syariah membayar klaim apabila Pembiayaan mengalami kemacetan sesuai kriteria Bank Indonesia sepanjang semua persyaratan klaim terpenuhi. - Jamkrindo Syariah menjamin Pembiayaan atau Penjaminan Pekerja Terjamin (Makfuul 'Anhu) yang dinilai layak.	4	- Jamkrindo Syariah provides guarantee approval and accepts Kafalah certificates to the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu). - Jamkrindo Syariah pays claims if the Financing experiences default according to Indonesian Sharia insurance principles. - Jamkrindo Syariah manages subrogation rights and Financing Guarantee claim payments..
5	- Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) menyetujui dan mencairkan Pembiayaan kepada Terjamin (Makfuul 'Anhu). - Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) menerima dan melakukan angsuran Pembiayaan Terjamin (Makfuul 'Anhu).	5	- The Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) disburses and channels Financing to the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu). - The Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) receives and monitors the Financing installment from the Guaranteed Party (Makfuul 'Anhu).



Proses Penjaminan

Proses Penjaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara Jamsyar (Penjamin) dan Penerima Jaminan, yang tertuang dalam Perjanjian kerja sama Penjaminan Pembiayaan dan/atau Surat persetujuan Prinsip Kafalah (SP2K). Secara umum mekanisme proses penjaminan yang berlaku di Jamsyar adalah sebagai berikut:

- A. Penjaminan Kasus Per Kasus (Case By Case/CBC)
- Penjaminan Kasus Per Kasus (Case By Case/CBC) adalah penjaminan yang proses persetujuannya dilakukan secara kasus per kasus atas kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan, di mana Jamsyar melakukan evaluasi kelayakan usaha calon Terjamin terlebih dahulu atas setiap pengajuan penjaminan sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Kafalah (SP2K). sebagai bentuk persetujuan penjaminan. Dalam hal ini, Jamsyar dapat menyetujui atau tidak menyetujui pengajuan penjaminan tersebut.

Penjaminan kasus per kasus diberikan untuk produk penjaminan Pembiayaan Umum, Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang atau Jasa, pembiayaan KPR Sejahtera FLPP Kontra Bank Garansi, dan Pembiayaan Multiguna.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penjaminan kasus per kasus adalah sebagai berikut:

1. Terjamin dan Penerima Jaminan (mitra kerja bank atau non bank) mengajukan permohonan penjaminan kepada penjamin dengan melampirkan beberapa dokumen, antara lain proposal usaha, identitas dan legalitas usaha pemohon sebagaimana permohonan dari Terjamin kepada Penerima Jaminan.
2. Setelah melakukan analisis kelayakan penjaminan, Penjamin menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Kafalah (SP2K) kepada Penerima Jaminan yang berisi tentang ketentuan dan persyaratan penjaminan, atau menyampaikan surat penolakan apabila Penjamin tidak menyetujui permohonan penjaminan tersebut.
3. Penerima Jaminan menyampaikan surat persetujuan atas seluruh ketentuan dalam SP2K Penjamin, apabila menyetujui ketentuan dalam SP2K tersebut.
4. Penerima Jaminan (mitra kerja bank atau non bank) dapat melakukan perjanjian (akad) dan merealisasikan Pembiayaan kepada nasabah (Terjamin).
5. Penerima Jaminan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Kafalah (SK) kepada Penjaminan dengan melampirkan beberapa dokumen, antara lain copy Perjanjian (akad) pembiayaan beserta Addendum-nya dan bukti pembayaran Imbal Jasa Kafalah (IJK).

Guarantee Process

The Guarantee Process is implemented in accordance with the terms agreed upon between Jamsyar (Guarantor) and the Guarantee Recipient, as stipulated in the Financing Guarantee Cooperation Agreement and/or the Kafalah Principle Approval Letter (SP2K). The general guarantee process mechanism applicable at Jamsyar is as follows:

- A. Case by Case Guarantee (CBC)
- Case by Case Guarantee (CBC) is a guarantee where the approval process is conducted on a case-by-case basis for credit provided by the Guarantee Recipient, where Jamsyar evaluates the business feasibility of the prospective Guaranteed Party first for each guarantee application before issuing a Kafalah Principle Approval Letter (SP2K) as a form of guarantee approval. In this case, Jamsyar may approve or reject the guarantee application.

Case by case guarantees are provided for General Financing guarantee products, Construction and Goods or Services Procurement Financing, KPR Sejahtera FLPP Counter Bank Guarantee financing, and Multipurpose Financing.

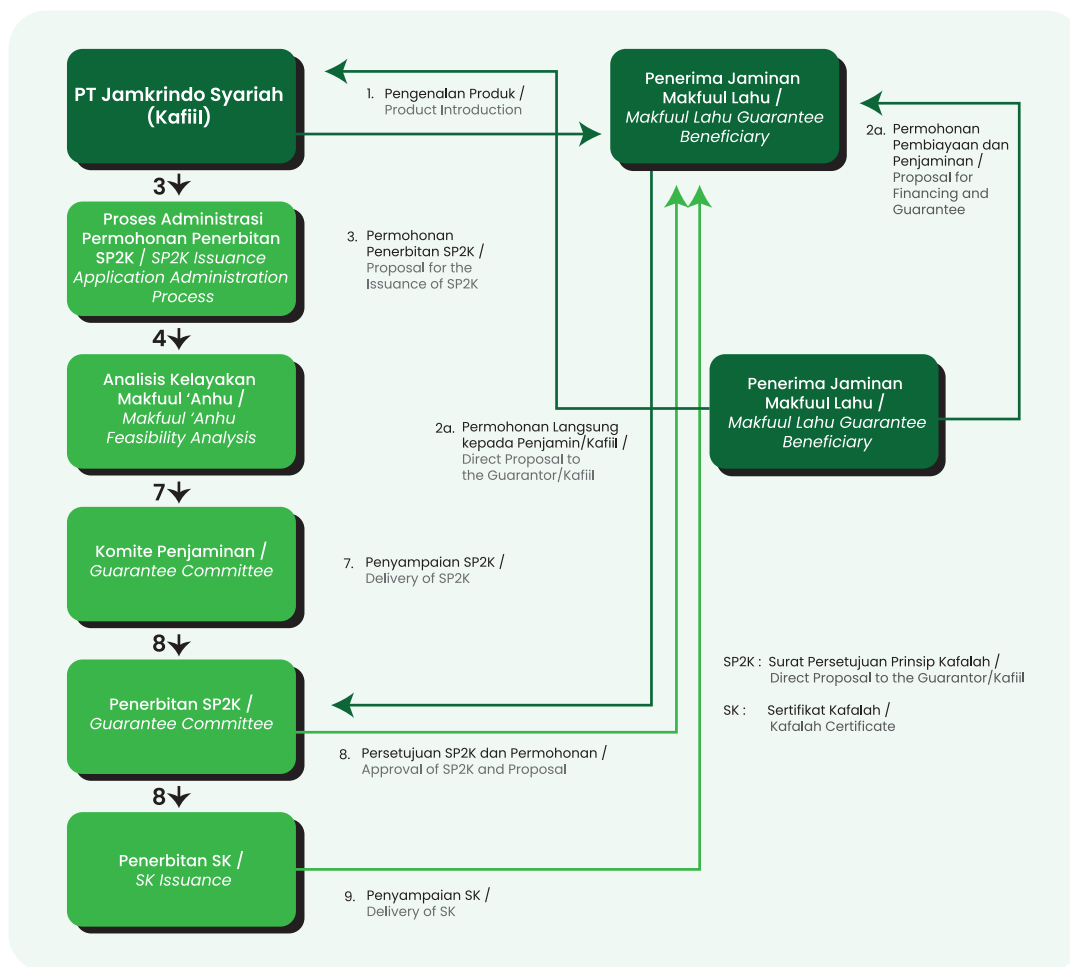
The steps taken in the case by case guarantee process are as follows:

1. The Guaranteed Party and the Guarantee Recipient (bank or non-bank partner) submit a guarantee application to the guarantor by attaching several documents, including business proposals, identity and business legality of the applicant as per the application from the Guaranteed Party to the Guarantee Recipient.
2. After conducting a guarantee feasibility analysis, the Guarantor issues a Kafalah Principle Approval Letter (SP2K) to the Guarantee Recipient containing the terms and conditions of the guarantee, or submits a rejection letter if the Guarantor does not approve the guarantee application.
3. The Guarantee Recipient submits a letter of approval for all provisions in the Guarantor's SP2K, if they agree with the provisions in the SP2K.
4. The Guarantee Recipient (bank or non-bank partner) may enter into an agreement (akad) and disburse Financing to the customer (Guaranteed Party).
5. The Guarantee Recipient submits an application for the issuance of a Kafalah Certificate (SK) to the Guarantor by attaching several documents, including a copy of the financing Agreement (akad) along with its Addendum and proof of payment of the Kafalah Service Fee (IJK).



6. Penjamin menerbitkan Sertifikat Kafalah (SK) kepada Penerima Jaminan.

6. The Guarantor issues a Kafalah Certificate (SK) to the Guarantee Recipient.



- B. Penjaminan Otomatis Bersyarat Penjaminan Otomatis Bersyarat adalah penjaminan yang diberikan secara otomatis oleh Jamkrindo Syariah atas Pembiayaan yang direalisasikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah disepakati yang tertuang dalam Perjanjian kerja sama Penjaminan, antara Jamsyar dengan Penerima Jaminan. Penjaminan kasus per kasus diberikan untuk produk penjaminan Pembiayaan Umum, Pembiayaan Mikro, Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang atau Jasa, Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP, Kontra Bank Garansi, dan Pembiayaan Multiguna.
- C. Penjaminan Otomatis Bersyarat diberikan untuk produk penjaminan KUR iB sesuai ketentuan. Syarat yang maksud yaitu calon terjamin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinasi Perekonomian Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

- B. Conditional Automatic Guarantee is a guarantee automatically provided by Jamkrindo Syariah for Financing disbursed by the Guarantee Recipient to the Guaranteed Party, taking into account the agreed terms stipulated in the Guarantee Cooperation Agreement between Jamsyar and the Guarantee Recipient. Case-by-case guarantees are provided for guarantee products including General Financing, Micro Financing, Construction and Procurement of Goods or Services Financing, KPR Sejahtera FLPP Financing, Counter Bank Guarantees, and Multipurpose Financing.
- C. Conditional Automatic Guarantee is provided for Sharia Business Credit (KUR iB) products in accordance with the specified regulations. The conditions refer to prospective guaranteed parties as outlined in the Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia, specifically the Second Amendment to the Regulation of the Coordinating Minister of Economic Affairs Acting as the Chair of the Financing Policy Committee for Micro, Small, and Medium Enterprises, Number 8 of 2015 Concerning Guidelines for the Implementation of People's Business Credit.



SEGMENT USAHA

Segmentasi usaha perusahaan berdasarkan produk, yaitu:

1. Produk Penjaminan Non Cash Loan

A. Surety Bond

Pemberian jaminan kepada Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) atas risiko kegagalan/wanprestasi Terjamin (makfuul 'anhu) dalam melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan kepada Penerima Jaminan (Makfuul Lahu).

Surety Bond terdiri dari :

- Surety Bond Penawaran (Jaminan Tender).
- Surety Bond Uang Muka (Jaminan Uang Muka)
- Surety Bond Pelaksanaan (Jaminan Pelaksanaan)
- Surety Bond Pemeliharaan (Jaminan Pemeliharaan)

B. Customs Bond

Perikatan penjaminan antara tiga pihak, Penjamin (Kafiil) terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari Principal/Terjamin (makfuul 'anhu) terhadap Pemilik Proyek (Obligee) dalam hal Principal/ Terjamin (makfuul 'anhu) tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya.

C. Kontra Bank Garansi/Kafalah Bank Garansi (KBG)

Pemberian Jaminan sebagai kontra garansi atas fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank kepada Terjamin (makfuul 'anhu) KBG terdiri dari Kafalah BG untuk:

- KBG Penawaran (Jaminan Tender).
- KBG Uang Muka (Jaminan Uang Muka)
- KBG Pelaksanaan (Jaminan Pelaksanaan)
- KBG Pemeliharaan (Jaminan Pemeliharaan)
- KBG khusus atau BG-SP2D

D. Penjaminan Keagenan Kargo

Penjaminan diberikan kepada Penerima jaminan/Obligee (Perusahaan Penyedia Jasa Pengangkutan) atas kewajiban Terjamin/ Principal (Agen Kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada Penerima Jaminan/Obligee.

2. Produk Penjaminan Cash Loan

A. Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Umum

Penjaminan Pembiayaan yang diajukan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha/ proyek atau kegiatan investasi yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan atau koperasi dengan tujuan untuk mendapat hasil/return dari kegiatan tersebut. Kafalah Pembiayaan Umum terdiri dari Kafalah Pembiayaan Modal Kerja dan Kafalah Pembiayaan Investasi.

BUSINESS SEGMENTS

Business Segmentation by Product:

1. Non-Cash Loan Guarantee Products

A. Surety Bond

- guarantee provided to the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) against the risk of failure or default by the Guaranteed Party (Makfuul 'anhu) in executing a project as agreed. Surety Bond categories include:
- Surety Bond Offer (Tender Guarantee)
- Surety Bond Down Payment (Down Payment Guarantee)
- Surety Bond Implementation (Performance bond)
- Surety Bond Maintenance (Maintenance Guarantee)

B. Customs Bond

tripartite guarantee where the Guarantor (Kafiil) is obligated to fulfill the financial obligations of the Principal/Guaranteed Party (Makfuul 'anhu) to the Project Owner (Obligee) in cases where the Principal fails to meet its contractual commitments.

C. Counter Bank Guarantee/Bank Guarantee

Kafalah (KBG) Provision of a counter-guarantee for Bank Guarantee facilities issued by a bank to the Guaranteed Party (Makfuul 'anhu). KBG types include:

- Tender Guarantee Bond
- Advance Payment Guarantee Bond
- Performance Guarantee Bond
- Maintenance Guarantee Bond
- Special Guarantee or SP2D Bank Guarantee

C. Cargo Agency Guarantee

Recipient/Obligee (Transportation Service Provider) covering the Guaranteed Party/Principal's (Cargo Agent) obligation to pay transportation costs to the Guarantee Recipient/Obligee.

2. Cash Loan Guarantee Products

A. General Financing Guarantee (Kafalah)

financing guarantee designed to support the smooth operation of business activities, projects, or investment initiatives undertaken by individuals, companies, or cooperatives with the aim of generating returns. General Financing Kafalah comprises: • Working Capital Financing Kafalah • Investment Financing Kafalah



- B. Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Multiguna
Penjaminan atas Pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) kepada Terjamin (makfuul 'anhu) dengan sumber pengembalian adalah penghasilan tetap/gaji dan pendapatan lain perbulan yang sah dari tempat Terjamin (Makfuul 'Anhu) bekerja.
- C. Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Mikro
Penjaminan atas Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk keperluan modal kerja dan/atau investasi dengan Plafond maksimum sebesar Rp250.000.000,- atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) atau sesuai kesepakatan tertulis antara Penjamin (Kafail) dan Penerima Jaminan (Makfuul Lahu).
- D. Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa
Penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) kepada Terjamin (makfuul 'anhu) untuk keperluan tambahan Modal Kerja, usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin (makfuul 'anhu) dengan Bouwheer (pemilik proyek).
- E. Penjaminan SCF (Supplier Chain Financing)
Penjaminan pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan dari Terjamin (makfuul 'anhu) kepada Penerima Jaminan (Makfuul Lahu) yang kemudian menagih piutang tersebut kepada oblige sesuai prinsip Syariah.
- F. Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penjaminan pembiayaan dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diberikan kepada Terjamin Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Tapak atau Susun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- G. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR iB)
Pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi kepada UMKMK untuk usaha produktif sesuai prinsip syariah dan layak, namun belum bankable. Penjaminan Jamsyar untuk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR iB) dengan plafond sampai dengan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) termasuk dalam kategori KUR Mikro sedangkan untuk plafond pembiayaan lebih dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) termasuk dalam kategori KUR Ritel.
- B. Multi-Purpose Financing Guarantee (Kafalah)
guarantee for financing provided by the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) to the Guaranteed Party (Makfuul 'anhu), with repayment sources consisting of fixed income/salary and other legitimate monthly earnings from the Guaranteed Party's place of employment.
- C. Micro Financing Guarantee (Kafalah)
guarantee for financing provided to business actors for working capital and/or investment purposes, with a maximum credit limit of IDR 250,000,000 or as specified by individual Guarantee Recipients (Makfuul Lahu), or as mutually agreed in writing between the Guarantor (Kafail) and the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu).
- D. Construction and Goods/Services Procurement Financing Guarantee (Kafalah)
guarantee for financing provided by the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu) to the Guaranteed Party (Makfuul 'anhu) for additional working capital, construction services, and goods/services procurement in accordance with the contract between the Guaranteed Party and the Bouwheer (project owner).
- E. Supply Chain Financing (SCF) Guarantee
guarantee for the transfer of accounts receivable or claims from the Guaranteed Party (Makfuul 'anhu) to the Guarantee Recipient (Makfuul Lahu), who subsequently collects the receivables from the obligee in compliance with Sharia principles.
- F. Sejahtera Mortgage Financing Guarantee (Kafalah) - Housing Liquidity Facility (FLPP)
financing guarantee supported by the Housing Liquidity Financing Facility (FLPP), provided to Low-Income Community (MBR) Guaranteed Parties for the acquisition of Landed or Vertical Affordable Housing, as regulated by the Minister of Public Works and Public Housing.
- G. People's Business Credit Guarantee (KUR iB)
Financing for working capital and/or investment for Micro, Small, Medium, and Cooperative Enterprises (UMKMK) for productive enterprises that are Sharia-compliant and viable but not yet bankable. Jamsyar's guarantee for People's Business Credit (KUR iB) is categorized as follows:
Micro KUR: Credit facilities up to IDR 20,000,000 (twenty million rupiah) Retail KUR: Credit facilities above IDR 20,000,000 (twenty million rupiah) up to IDR 500,000,000 (five hundred million rupiah)



KINERJA OPERASI PER SEGMENT USAHA

OPERATIONAL PERFORMANCE PER BUSINESS SEGMENT

No	Imbal Jasa Kafalah (Accrue) / Rewards for Kafalah Services (Accrue)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)
1.	Customs Bond	5.946	2.962
2.	Distribusi Barang Distribution of Goods	0	0
3.	FLPP	14.624	14.764
4.	KUR	63.055	103.123
5.	Konstruksi construction	7.498	6.903
6.	Kontra Bank Garansi Cons of Bank Guarantee	163.973	125.635
7.	Mikro Micro	15.975	9.119
8.	Multiguna Multipurpose	58.860	59.045
9.	Umum General	18.163	7.794
10.	KMK PEN	273.349	76.592
11.	Supply Chain Financing	189	295
12.	Surety Bond	53.306	30.861
Total		674.939	437.091

Pendapatan Imbal Jasa Kafalah (IJK) adalah premi yang diterima oleh perusahaan dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya IJK dihitung dari tarif IJK, plafond kredit dan jangka waktu kredit.

Besarnya tarif IJK ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: produk penjaminan, risiko yang dijamin dan jangka waktu penjaminan. IJK kredit umum dibayar sekaligus dimuka.

Berdasarkan SE OJK No. 11/SEOJK.05/2013, IJK yang diakui secara akrual selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya sertifikat kafalah (SK).

Kapasitas Penjaminan

Kapasitas penjaminan PT Jamkrindo Syariah telah mempertimbangkan indikator pengukuran kesehatan keuangan. Indikator mengacu pada SE OJK No. 18 /2017 Tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin adalah sebagai berikut:

Pengukuran Kesehatan Keuangan

- Lembaga Penjamin wajib menjaga kondisi Kesehatan Keuangannya.
- Pengukuran Kesehatan Keuangan bagi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - Rasio Likuiditas;

Kafalah Service Fee (Imbal Jasa Kafalah or IJK) is the premium received by the company from the guaranteed party in the context of guarantee business activities. The IJK amount is calculated based on the IJK tariff, credit facility limit, and credit tenure.

The IJK tariff is determined by considering factors including: guarantee products, guaranteed risks, and the Rentability of the guarantee period. IJK for general credit is paid in a lump sum in advance.

Based on OJK Circular Letter No. 11/SEOJK.05/2013, IJK is recognized on an accrual basis throughout the guarantee period and allocated according to the month of issuance of the Kafalah Certificate (SK).

Guarantee Capacity

The guarantee capacity of PT Jamkrindo Syariah has considered financial health measurement indicators. The indicators refer to POJK No. 18/SEOJK.05/2018 Concerning the Financial Health of Guarantee Institutions as follows:

Financial Health Measurement

- Guarantee Institutions are obligated to maintain their Financial Health Condition.
- Financial Health Measurement for Guarantee Institutions as referenced in point 1 encompasses:
 - Liquidity Ratio;



- Gearing Ratio;
 - Rentabilitas; dan
 - Penilaian sendiri (self assessment) tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin.
3. Kewajiban pemenuhan kondisi Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 bagi UUS dilakukan secara terpisah dengan komponen meliputi:
- Rasio Likuiditas;
 - Rentabilitas; dan/penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS.
3. Financial Health Condition Obligations for UUS shall be implemented separately and comprise the following components:
- Liquidity Ratio
 - Rentability; and/or Profitability Scoring
 - Guarantees and Feasibility Assessment of Financially Sound Business Entities

Rasio Likuiditas

1. Lembaga Penjamin wajib menjaga tingkat likuiditasnya.
2. Lembaga Penjamin wajib menjaga Rasio Likuiditas paling rendah 120% (seratus dua puluh per seratus).
3. Rasio Likuiditas sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihitung dengan menggunakan current ratio.
4. Current ratio sebagaimana dimaksud pada angka 3 dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dengan utang lancar.
5. Rincian akun dalam perhitungan aset lancar dan utang lancar sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam perhitungan current ratio mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan lembaga penjamin.

Liquidity Ratio

1. Guarantee Institutions must maintain their liquidity level.
2. Guarantee Institutions must maintain a Liquidity Ratio of at least 120% (one hundred twenty percent).
3. Liquidity Ratio shall be calculated using current ratio methodology.
4. Current ratio shall be calculated by using current ratio method.
5. Account details in current asset and current liability calculations shall refer to the monthly institution report guidelines as stipulated in the Financial Services Authority regulations.

Gearing Ratio

1. Lembaga Penjamin wajib menjaga Gearing Ratio untuk penjaminan bagi usaha produktif paling tinggi 20 (dua puluh) kali.
2. Lembaga Penjamin wajib menjaga total Gearing Ratio paling tinggi 40 (empat puluh) kali.

Gearing Ratio

1. Lembaga Penjamin wajib menjaga Gearing Ratio untuk penjaminan bagi usaha produktif paling tinggi 20 (dua puluh) kali.
2. Lembaga Penjamin wajib menjaga total Gearing Ratio paling tinggi 40 (empat puluh) kali.

Rentabilitas

1. Penilaian terhadap komponen Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 2 huruf c dan romawi II angka 3 huruf b dilakukan terhadap rasio sebagai berikut:
 - a. Rasio return on asset
Rasio return on asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Lembaga Penjamin dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan untuk mendukung operasional dan permodalan Lembaga Penjamin atau UUS.
 - b. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan Lembaga Penjamin dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.
 - c. Rasio klaim terhadap Imbal Jasa
Rasio klaim terhadap Imbal Jasa merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja penjamin

Rentability

1. Assessment of Rentability components shall be conducted normatively and numerically through the following aspects:
 - a. Return on Asset Ratio
Return on Asset is a ratio used to measure the institution's ability to generate earnings from total assets, utilized to support operational requirements and assess overall institutional performance. Operational Expense Ratio to Income An operational expenditure ratio relative to income that indicates the efficiency of institutional operational management.
 - b. Operational Cost Ratio to Operational Revenue ratio measuring operational expenditure against operational revenue to evaluate institutional operational efficiency.
 - c. Claim Ratio to Operating Revenues ratio used to measure the institution's performance level in managing guarantee claims relative to operational revenues.



2. Perhitungan rasio Rentabilitas ditetapkan sebagai berikut:

a. Rasio return on asset:

1. Rasio return on asset dihitung dari perbandingan antara laba atau rugi sebelum pajak terhadap total aset.
2. Untuk perhitungan laba atau rugi sebelum pajak menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: $(\text{laba atau rugi sebelum pajak per posisi Maret}/3) \times 12$.
3. Laba atau rugi sebelum pajak per posisi bulan pelaporan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban sebelum dikurangi taksiran pajak penghasilan.
4. Untuk perhitungan total aset menggunakan rata-rata aset sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: $(\text{Penjumlahan total aset dari Januari s.d. Maret})/3$.

b. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional:

1. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dihitung dari perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional.
2. Rincian akun dalam perhitungan pendapatan operasional dan beban operasional dalam perhitungan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan lembaga penjamin.

c. Rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa

1. Rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa dihitung dari perbandingan antara beban klaim neto terhadap Imbal Jasa neto.
2. Rincian akun dalam perhitungan beban klaim neto dan Imbal Jasa neto dalam perhitungan rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan lembaga penjamin.

2. Calculation of Profitability ratios is established as follows:

a. Return on asset ratio:

1. Return on asset ratio is calculated from the comparison between profit or loss before tax to total assets.
2. For the calculation of profit or loss before tax, an annualized calculation is used. For example, for the March report position, the calculation method is as follows: $(\text{profit or loss before tax as of March position}/3) \times 12$.
3. Profit or loss before tax as of the reporting month position is calculated based on the total revenue minus total expenses before deducting estimated income tax.
4. For the calculation of total assets, the average assets throughout the year are used. For example, for the March report position, the calculation method is as follows: $\text{Sum of total assets from January to March}/3$.

b. Operational expense to operational income ratio:

1. Operational expense to operational income ratio is calculated from the comparison between operational expenses to operational income.
2. Details of accounts in the calculation of operational income and operational expenses in calculating the operational expense to operational income ratio refer to the Financial Services Authority Circular Letter regarding monthly reports of guarantor institutions.

c. Claims to Service Fee income ratio:

1. Claims to Service Fee income ratio is calculated from the comparison between net claim expenses to net Service Fees.
2. Details of accounts in the calculation of net claim expenses and net Service Fees in calculating the claims to Service Fee income ratio refer to the Financial Services Authority Circular Letter regarding monthly reports of guarantor institutions.



No	Uraian Description	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Persentase (%) Percentage (%)
1.	Volume Penjaminan Guarantee Volume	44.549.244	34.128.831	77%
2.	IJK Cash Basis	408.035	503.297	123%
3.	IJK Accrual Basis	674939	473.091	70%

Pada 2023 Perseroan berhasil mencapai target volume penjaminan sebesar 77% dari RKAP, dengan pencapaian IJK Cash Basis dan Accrual Basis masing-masing sebesar 123% dan 70% dari RKAP.

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari seluruh modal yang dioperasikan Perseroan. Profitabilitas Perusahaan dapat dilihat dari tingkat pengembalian aset (Return on Asset, ROA) dan tingkat pengembalian ekuitas (Return on Equity, ROE).

In 2023, the Company successfully achieved its guarantee volume target of 77% of the Corporate Work Plan and Budget (RKAP), with achievement of Guarantee Service Fees on Cash Basis and Accrual Basis at 123% and 70% of the RKAP respectively.

Profitability

Profitability is the company's ability to generate profit from all capital operated by the Company. The Company's profitability can be seen from the Return on Asset (ROA) and Return on Equity (ROE).

No	Uraian Description	2022	2023	Persentase (%) Percentage (%)
1.	Return on Assets	18%	3%	17%
2.	Return on Equity	10%	2%	17%

RoA adalah seberapa efisien Perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode dan RoE adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di Perseroan. Pada tahun 2023, tingkat pengembalian aset Perseroan adalah 3% naik dari tahun lalu sebesar 18%. Sementara, tingkat pengembalian ekuitas Perseroan pada 2023 adalah 2% naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 10%.

ROA is how efficiently the Company manages its assets to generate profit during a period, and ROE is a measure of the company's ability to generate profit from shareholders' investment in the Company. In 2023, the Company's return on assets was 3%, an increase from last year's 18%. Meanwhile, the Company's return on equity in 2023 was 3%, an increase compared to 2022's 10%.



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Pembahasan tinjauan keuangan berikut berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan dengan opini wajar dalam semua hal yang material disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dan revisi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan mempengaruhi laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023.

The following financial review discussion is based on the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2023, and has been audited by the Accounting Firm with a fair opinion in all material respects, adjusted to the Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia and revisions issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants that are considered relevant to its operational activities and affect the financial statements as of December 31, 2023.

Laporan Posisi Keuangan

Statement of Financial Position

Uraian Description	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR- million)	Presentase % Percentage %
Jumlah Aset Total Assets	2.449.452	2.452.095	2.643	0,11%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.303.627	1.257.974	-45.653	-3,50%
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.145.825	1.194.121	48.296	4,21%

Posisi keuangan Jamkrindo Syariah tahun 2023 cukup baik, dimana jumlah aset dan ekuitas Perusahaan mengalami peningkatan, namun demikian jumlah liabilitas Perusahaan sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jamkrindo Syariah's financial position in 2023 was quite good, where the Company's assets and equity increased, however, the Company's liabilities decreased slightly compared to the previous year.

Aset

Assets

Uraian Description	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR- million)	Presentase % Percentage %
Kas dan Kas di Bank Cash and Cash in Banks	21.781	25.877	4.096	18,81%
Deposito – bersih Deposits – Net	430.257	223.130	-207.127	-48,14%
Investasi – bersih Investment – Net	1.216.880	1.397.985	181.105	14,88%
Aset Penjaminan Ulang – bersih Re-guarantee Assets – Net	428.727	354.324	-74.403	-17,35%



Aset
Assets

Uraian Description	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR- million)	Presentase % Percentage %
Piutang IJK – bersih IJK Co Guarantee Receivables – Net	53.067	9.402	-43.665	-82,28%
Piutang Penjaminan Ulang – bersih Repayment Guarantee Receivables – net	92.376	186.384	94.008	101,77%
Piutang lain-lain – bersih Investment Income Receivables – Net	157	78	-79	-50,32%
Biaya Dibayar di Muka – bersih Prepaid Expenses – Net	3.226	3.554	328	10,17%
Aset Tetap – bersih Fixed Assets – Net	74.280	83.497	9.217	12,41%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets – Net	49.147	51.537	2.390	4,86%
Aset Lain-Lain – bersih Other Assets – Net	79.554	116.327	36.773	46,22%
Jumlah Aset Total Assets	2.449.452	2.452.095	2.643	0,11%

Jumlah aset Jamkrindo Syariah per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2,452 triliun, meningkat Rp 0,002 triliun atau 0,11% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp2,449 triliun.

Jamkrindo Syariah's total assets as of December 31, 2023, were recorded at Rp. 2,452 trillion, an increase of Rp. 0,002trillion or 0,11% compared to the same period in 2022 of Rp. 2,449 trillion.

Liabilitas
Liabilities

Uraian Description	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR- million)	Presentase % Percentage %
Utang klaim – bersih Claim debt – Net	5.456	5.110	-346	-6%
Utang pajak tax debt – Net	1.671	4.507	2.836	170%
Utang penjaminan ulang – bersih Re-guarantee debt– Net	48.315	53.857	5.542	11%
Imbal jasa kafalah ditangguhkan – bersih Kafalah service fee is suspended – Net	715.196	686.139	5.542	-4%
Pendapatan komisi ditangguhkan – bersih Deferred commission income – Net	42.863	30.573	-12.290	-29%
Estimasi klaim – bersih Claim estimate – Net	366.887	358.504	-8.383	-2%
Liabilitas imbalan kerja – bersih Employee benefit liabilities – Net	6.241	6.137	-104	-2%
Akrual dan utang lain-lain – bersih Accruals and other liabilities – Net	116.998	113.147	-3.851	-3%
Total Liabilitas – bersih Total Liabilities – Net	1.303.627	1.257.974	-45.653	-4%



LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT (LOSS) AND COMPREHENSIVE INCOME

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	2021 (Rp-juta) (IDR-million)	2020 (Rp-juta) (IDR-million)	2019 (Rp-juta) (IDR-million)
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH GUARANTEE INCOME					
Pendapatan Penjaminan – Bersih Gross guarantee fee income	80.220	292.959	264.536	73.717	38.523
KOMISI BERSIH GUARANTEE EXPENSES					
Pendapatan Investasi – Bersih Investment Income – Net	85.822	68.229	56.865	56.451	44.872
Beban Usaha – Bersih Operating expenses– Net	-128.258	-113.972	-101.345	-70.497	-55.433
Pendapatan Lain-Lain Bersih Net Other Income	-9.770	-7.176	-6.859	-370	-472
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	28.014	240.040	213.197	49.464	13.117
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	33.889	189.630	168.157	45.137	17.204
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	14.407	-20.852	77	7.208	7.597
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Current Year	48.296	168.778	168.234	50.460	22.937



STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY

Rincian Struktur Modal

Struktur modal Perusahaan per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

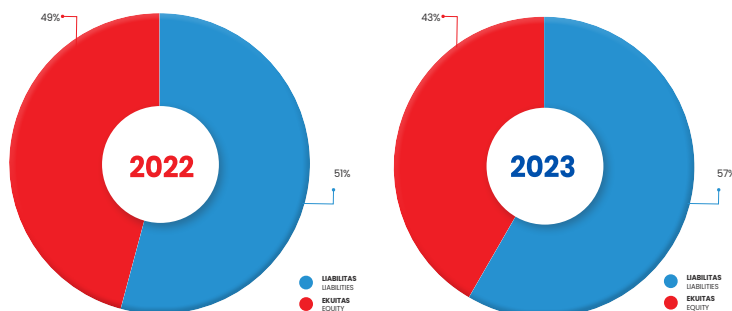
Uraian Description	2022		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Rp-juta IDR (Million)	%	Rp-juta IDR (Million)	%	Rp-juta IDR (Million)	%
Liabilitas Liabilities	1.303.627	53%	1.257.974	51%	-45.653	-3,50%
Ekuitas Equity	1.145.825	47%	1.194.121	49%	48.296	4,21%
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas Total Liabilities, Temporary Syirkah Funds and Equity	2.449.452	100%	2.452.095	100%	2.643	0,11%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) Debt to Equity Ratio (DER)		113,77%		105,35%		-8,42%

Capital Structure Details

The Company's capital structure as of December 31, 2023 can be explained in the following table:

Komposisi struktur modal Perusahaan tahun 2023 adalah 51% berasal dari liabilitas dan 49% berupa ekuitas. Komposisi ini relatif tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

The Company's capital structure in 2023 is 51% liabilities and 49% equity, a relatively unchanged composition compared to the previous year.



Kebijakan Manajemen Atas Struktur Permodalan

Sesuai dengan POJK No. 2/POJK.05/2017 Pasal 30, Lembaga Penjamin dilarang memberikan pinjaman maupun menerima pinjaman dari pihak mana pun. Dengan ketentuan tersebut, seluruh kebutuhan permodalan Perseroan wajib dipenuhi sepenuhnya dari modal sendiri. Kebijakan ini menjadi dasar bagi manajemen dalam menjaga kemandirian, kesehatan struktur modal, serta memastikan kegiatan operasional tidak bergantung pada sumber pendanaan eksternal. Dalam pelaksanaan penjaminan, termasuk penjaminan atas pembiayaan produktif, Perseroan menetapkan kelonggaran penjaminan yang disesuaikan dengan kapasitas modal, profil risiko, serta ketentuan manajemen risiko internal. Penetapan kelonggaran penjaminan dilakukan secara prudensial dan mempertimbangkan kecukupan modal agar setiap ekspansi penjaminan

Capital Management Policy on Capital Structure

In accordance with Article 30 of POJK No. 2/POJK.05/2017, the Guarantee Institution is prohibited from providing loans or receiving loans from any party. Under this provision, all of the Company's capital requirements must be met entirely from its own capital. This policy serves as the basis for management to maintain independence, maintain a healthy capital structure, and ensure that operational activities are not dependent on external funding sources. In implementing guarantees, including guarantees for productive financing, the Company establishes guarantee leniency adjusted to its capital capacity, risk profile, and internal risk management provisions. The determination of guarantee leniency is carried out prudentially and takes into account capital adequacy to ensure that any expansion guarantees remain within the Company's capabilities and in line with prudent principles.



tetap berada dalam batas kemampuan Perseroan serta sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, struktur modal dan kapasitas penjaminan Perseroan dikelola secara berkesinambungan untuk mendukung stabilitas keuangan sekaligus memenuhi ketentuan regulator terkait kecukupan permodalan.

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Kebutuhan permodalan Perusahaan senantiasa direncanakan, dibahas dan dipantau secara rutin pada rapat Komite Permodalan dengan didukung oleh analisis data yang lengkap dan memadai. Dasar penetapan kebijakan atas struktur modal Perusahaan senantiasa berlandaskan pada beberapa pertimbangan, di antaranya estimasi ekonomi, potensi pertumbuhan bisnis, *risk appetite*, dan target rasio permodalan.

Kebijakan manajemen atas struktur modal didasarkan untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga dapat tetap memberikan imbal hasil bagi Pemegang Saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Perusahaan mematuhi peraturan pajak yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015, dimana rasio maksimum untuk *Debt to Equity* (DER) yang diperbolehkan untuk tujuan pajak adalah 4:1. Pada tahun 2023, DER yang dimiliki oleh Perusahaan adalah 141,36%. Dengan kondisi tersebut, rasio hutang terhadap modal Perusahaan masih berada pada kategori yang baik.

Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal

Sepanjang tahun 2023, Jamkrindo Syariah tidak melakukan ikatan dengan pihak manapun terkait investasi barang modal.

Therefore, the Company's capital structure and guarantee capacity are managed sustainably to support financial stability while complying with regulatory requirements regarding capital adequacy.

Basis for Management Policy on Capital Structure

The Company's capital requirements are consistently planned, discussed, and monitored routinely in Capital Committee meetings, supported by comprehensive and adequate data analysis. The basis for establishing the Company's capital structure policy is always grounded on several considerations, including economic estimates, business growth potential, risk appetite, and capital ratio targets.

The management policy on capital structure is designed to protect the Company's ability to maintain business continuity, thereby ensuring continued returns for Shareholders and benefits for other stakeholders, while maintaining an optimal capital structure to reduce capital costs.

The Company complies with applicable tax regulations, specifically the Minister of Finance Regulation No. 169/PMK.010/2015, which sets the maximum Debt to Equity (DER) ratio permitted for tax purposes at 4:1. In 2023, the Company's DER was 141.36%. Under these conditions, the Company's debt-to-equity ratio remains in a favorable category.

Material Commitments for Capital Investments

Throughout 2023, Jamkrindo Syariah did not enter into any binding agreements with any parties related to capital investments.

Investasi Barang Modal Yang Direalisasikan Pada Tahun Buku Realized Capital Goods Investment in The Fiscal Year

Jenis Investasi Types of Investment	Tujuan Investasi Investment Purposes	Nilai Investasi (Rp juta) Investment Value (IDRmillion)
Tanah Land	Relokasi unit kerja ke tempat yang lebih strategis dan lebih <i>representative</i> Relocation of work units to a more strategic and more representative location	35,493
Bangunan Kantor Office Building	Optimalisasi aset yang telah dimiliki melalui Pembangunan dan Renovasi Gedung Kantor Optimization of assets that are already owned through the Construction and Renovation of Office Buildings	30,565
Inventaris Kantor Office Equipment	Menggantikan aset yang sudah tidak layak pakai/habis masa umur ekonomisnya dan beberapa aset yang belum ada/dimiliki oleh kantor Replacing assets that are no longer suitable for use/expired their economic life and some assets that do not yet exist/are owned by the office	26,108
Perlengkapan Lainnya Other Equipment	Tujuan Investasi adalah Pengadaan perlengkapan pendukung yang diperlukan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Termasuk di dalamnya perlengkapan yang belum tersedia maupun perlengkapan yang perlu ditambah untuk meningkatkan efektivitas dan kelancaran aktivitas kerja di berbagai unit. The purpose of the investment is to procure the necessary supporting equipment to support the company's operational activities. This includes equipment that is not yet available and equipment that needs to be added to improve the effectiveness and smoothness of work activities in various units.	981
Jumlah Investasi Total Investment		93,154



PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2023

TARGET ACHIEVEMENT IN 2023

Pencapaian Target Tahun 2023

Pada Tahun Buku 2023 PT Jamkrindo Syariah membukukan volume penjaminan sebesar Rp 34.128,831 triliun atau mencapai sebesar 52,83% dari target 2023, realisasi volume ini didukung oleh volume penjaminan Imbal Jasa Kafalah sebesar Rp 437.091 miliar atau mencapai sebesar 54,47% dari target dan Pendapatan Ujrah sebesar Rp 18.719 miliar atau mencapai 41,32% dari target 2023.

Laba Tahun Buku 2023 tercatat sebesar Rp34,944 triliun atau mencapai sebesar 89,86% dari target 2023 hal ini dikarenakan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang dihasilkan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah beban usaha yaitu sebesar Rp-128.258 miliar atau mencapai 9,58% sedangkan beban klaim sebesar Rp 285,922 miliar, sehingga penjaminan bersih sebesar Rp 80.220 miliar. Dengan pendapatan Penjaminan yang mencapai 89,86% dan beban usaha yang diatas target 2023 atau sebesar 9,58%, Perusahaan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 40,701 triliun atau mencapai sebesar 14,25%.

Target Achievement in 2023

In the 2023 Financial Year, PT Jamkrindo Syariah recorded a guarantee volume of IDR 34.128,831 trillion, achieving 52,83% of the 2023 target. This volume realization was supported by Kafalah Service Reward Guarantee volume of IDR 437.091 million, reaching 54,47% of the target, and Ujrah Income volume of Rp18.719 million, reaching 41,32% of the 2023 target.

Profit for the 2023 Fiscal Year was recorded at IDR 34.944 trillion or reaching 89.86% of the 2023 target. This was because the Guarantee Fee (IJP) income generated was greater than the total operating expenses, which was IDR -128,258 billion or reaching 9.58% while the claim expense was IDR 285.922 billion, so that the net guarantee was IDR 80,220 billion. With Guarantee income reaching 89.86% and operating expenses exceeding the 2023 target or by 9.58%, the Company recorded a profit before tax of IDR 40.701 trillion or reaching 14.25%.

Laporan Laba Rugi Statement of Profit or Loss	Realisasi 2023 2023 Realization	Target 2023 2023 Target	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2023 (%) Achievement of Realization Against the 2023 Target (%)
	Rp-Juta/IDR -Million	Rp-Juta/IDR -Million	
	Volume	Volume	
Volume Penjaminan Guarantee Volume	34.128.831	64.600.727	52,83%
IJK Bruto Gross IJK	408.035	503.297	81,07%
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit or Loss and Other Comprehensive Income			
Pendapatan Kafalah Kafalah Income	333.437	567.962	58,71%
Beban Penjaminan Guarantee Burden	-253.217	-253.513	99,88%
Penjaminan Bersih Clean Guarantee	80.220	314.449	25,51%
Pendapatan Investasi Investment Income	85.822	94.814	90,52%
Beban Usaha Operating expenses	-128.258	-125.065	102,55%



Laporan Laba Rugi Statement of Profit or Loss	Realisasi 2023 2023 Realization	Target 2023 2023 Target	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2023 (%) Achievement of Realization Against the 2023 Target (%)
	Rp-Juta/IDR -Million	Rp-Juta/IDR -Million	
Pendapatan (Beban) lain-lain Other income (expenses)	-10.470	-71.006	14,75%
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Income Tax Benefits (Burdens)	6.575	9.725	67,61%
Laba Tahun Berjalan Current year profit	33.889	222.917	15,20%
Posisi Keuangan Financial Position			
Jumlah Aset Total Assets	2.452.095	3.010.146	81,46%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.257.974	1.614.416	77,92%
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.194.121	1.395.729	85,56%
Pendapatan Penjaminan Guarantee Income			
Imbal Jasa Kafalah Kafalah Service Rewards	437.091	802.435	54,47%
Pendapatan Ujrah Ujrah Income	18.719	45.302	41,32%
Jumlah Pendapatan Penjaminan (Rp-juta/IDR-million)	455.810	847.737	53,76%
Beban Penjaminan Guarantee Expenses			
Beban Ujrah Pembiayaan Bank Bank Financing Ujrah Burden	4.054	3.764	107,70%
Beban Ujrah Agen Agent Ujrah Expenses	11.332	10.191	111,19%
Biaya Manajemen Management Fee	762	-	-
Beban Re Guarantee Premi Re Guarantee	102.266	4.055	2.522%
Beban IJK Loss Limit IJK Loss Limit Burden	1.388	1.591	87,24%
Beban Klaim Claim Expenses	285.922	298.694	95,72%
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim Increase (Decrease) in Claim Reserves	12.751	56.159	22,70%
Pendapatan Subrogasi Subrogation Income	-42.885	-69.993	62,15%
Jumlah Beban Penjaminan Amount of Guarantee Burden	375.590	533.288	70,42%
Beban Usaha Operating Expenses			
Beban Operasional Operating Expenses	17.217	18.912	91,03%
Beban SDM HR Burden	62.159	70.483	88,19%
Beban Administrasi dan Umum Administrative and General Expenses	25.330	28.742	88,12%
Beban Sistik dan Pengembangan Profit Before Income Tax	6.212	6.928	89,66%
Jumlah Beban Usaha Amount of operating expenses	110.918	125.065	88,68%



Kebijakan Akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2018, Perusahaan menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan ("PSAK") dan interpretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Laporan keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2011), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 71, 72, 73, 63.

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Amandemen PSAK 71 : Pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang berupa piutang, pinjaman, atau kredit
- Amandemen PSAK 72 : Pengakuan pendapatan kontrak yang tadinya rigid (rule based) menjadi berbasis prinsip (principle based).
- Amandemen PSAK 73 : pembukuan transaksi sewa dari sisi penyewa (lessee)
- Amandemen PSAK 63 : Pernyataan ini diterapkan untuk laporan keuangan, termasuk laporan keuangan konsolidasian, dari setiap entitas yang mata uang fungsionalnya adalah mata uang dari suatu ekonomi yang mengalami hiperinflasi.

Alasan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Penyusunan laporan keuangan harus mengikuti Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kepatuhan Pajak

Pada tahun 2023 Perseroan telah melakukan kewajiban perpajakan berupa pemungutan dan penyetoran berbagai jenis pajak dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Tahun 2023 Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan kewajiban PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 sedangkan untuk PPh badan belum ada kewajiban membayar PPh Badan dikarenakan secara fiskal perusahaan masih rugi.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tidak ada kewajiban menerbitkan PPN karena bukan PKP. Atas PPN yang diterima dari rekanan akan dibiayakan pada bulan berjalan.

Accounting Policy

As of January 1, 2018, the Company implemented new and revised financial accounting standard statements ("PSAK") and interpretations of financial accounting standards ("ISAK") effective from that date. Changes to the Company's accounting policies have been made as required, in accordance with the transition provisions in each standard and interpretation.

The financial statements of PT Jamkrindo Syariah are prepared based on Indonesian Financial Accounting Standards, including Financial Accounting Standard Statement (PSAK) No. 101 (2011 Revision), "Presentation of Sharia Financial Statements", PSAK 71, 72, 73, 63.

The application of the following new standards and interpretations did not cause substantial changes to accounting policies and did not have a significant impact on the amounts reported in the current or previous years:

- Amendment to PSAK 71: Provisioning for impairment of financial assets in the form of receivables, loans, or credits
- Amendment to PSAK 72: Revenue recognition from contracts, transitioning from a rule-based to a principle-based approach
- Amendment to PSAK 73: Accounting for lease transactions from the lessee perspective
- Amendment to PSAK 63: This statement is applied to financial statements, including consolidated financial statements, of entities with a functional currency from an economy experiencing hyperinflation

Reasons for Accounting Policy Changes

The preparation of financial statements must adhere to Financial Accounting Standards in Indonesia.

Tax Compliance

In 2023, the Company fulfilled its tax obligations through the collection and remittance of various tax types as follows:

a. Income Tax (PPh) In 2023,

Jamkrindo Syariah fulfilled its obligations for Income Tax Article 21 and Income Tax Article 23. However, no Corporate Income Tax was payable as the company remains in a fiscal loss position.

b. Value Added Tax (PPN)

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah has no obligation to issue VAT as it is not a Taxable Enterprise (PKP). VAT received from partners will be expensed in the current month.



Tingkat Kesehatan Perusahaan

Total aset 2023 mengalami pertumbuhan menjadi sebesar 0,11% dari tahun 2022. Untuk total liabilitas tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar -3,50% dari tahun 2022 sedangkan total ekuitas tumbuh menjadi sebesar 4,21% dari tahun 2022. Tingginya pertumbuhan liabilitas disebabkan oleh tingginya pendapatan ditangguhkan.

Pendapatan ditangguhkan merupakan Imbal Jasa Kafalah yang akan menjadi pendapatan di tahun mendatang. Pendapatan ditangguhkan akan diakui sebagai pendapatan selama sisa jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Kafalah (SK). Pendapatan ditangguhkan Per 31 Desember 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 54,47%.

Selain itu, tingkat kesehatan perusahaan juga dalam kategori "SANGAT SEHAT" berdasarkan perhitungan beberapa indikator keuangan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2018 tentang kesehatan keuangan lembaga penjamin, sebagai berikut;

Berdasarkan perhitungan tingkat kesehatan Perseroan, dengan total skor 85,51 maka PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berada pada kategori "SANGAT SEHAT" dan jauh dari risiko pailit.

Company Health Status

Total assets in 2023 grew by 0.11% compared to 2022. Total liabilities in 2023 decreased by -3.50% compared to 2022, while total equity grew by 4.21% compared to 2022. The high growth in liabilities was due to high deferred revenue.

Deferred income represents Kafalah service fees that will become income in the coming year. Deferred income will be recognized as income over the remaining guarantee term and allocated based on the month of issuance of the Kafalah Certificate (SK). Deferred income grew by 54.47% as of December 31, 2023.

Furthermore, the company's health status is categorized as "EXTREMELY HEALTHY" based on calculations of several financial indicators in accordance with the Financial Services Authority Circular Letter Number 18/SEOJK.05/2018 concerning the financial health of guarantee institutions, as follows:

Calculations are in accordance with the overall health assessment calculation with a total of 8.5% modification for the Company's financial parameters system and calculations per the specified standardized assessment guidelines.

Indikator Indicator	Capaian Achievement	Bobot Weight	Kriteria Nilai Value Criteria	Nilai Valuet
Likuiditas Liquidity	312,92%	10%	1	0,10
Gearing ratio	21,05	35%	1	0,35
Rentabilitas Profitability	1,60	35%	1	0,35
ROA	1,66%	30%	3	0
BOPO	26,71%	35%	1	0
Rasio Klaim Claim Ratio	65,41%	35%	1	0
GCG	Sangat Baik	20%	1	0,20
Jumlah Total				1,00



LIABILITAS

Liabilities

Liabilitas Liabilities

Uraian Description	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage
Utang Klaim Claim Payables	5.456	5.110	-346	-6%
Utang Penjaminan Ulang Amounts due to reinsurers	48.315	53.857	5.542	11%
Akrual dan Utang Lain-Lain Accruals and other payables	116.998	113.147	-3.851	-3%
Utang Pajak Taxes payables	1.671	4.507	2.836	170%
Pendapatan Komisi Ditangguhkan Deferred commission income	42.863	30.573	-12.290	-29%
Estimasi Liabilitas Klaim Estimated claim liabilities	366.887	358.504	-8.383	-2%
Imbal Jasa Kafalah Ditangguhkan Unearned kafalah fees	715.196	686.139	-29.057	-4%
Liabilitas Imbalan Kerja Employee benefits liabilities	6.241	6.137	-104	-2%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.303.627	1.257.974	-45.653	-4%

Jumlah liabilitas Jamkrindo Syariah per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1,257 triliun, turun Rp0,045 triliun atau -4% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp1,303 triliun.

Jamkrindo Syariah's total liabilities as of December 31, 2023, were recorded at IDR 1,257 trillion, an increase of IDR 0,045 trillion or -4% compared to the same period in 2022 at IDR 1,303 trillion.



Utang Penjaminan Ulang Amounts due to reinsurers

Uraian Description	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage
Pihak Berelasi Related Parties	48.315	53.857	5.542	11%
Pihak Ketiga Third Parties	-	-	-	-
Jumlah Utang Penjaminan Ulang Total amounts due to reinsurers	48.315	53.857	5.542	11%

Jumlah utang penjaminan ulang Jamkrindo Syariah per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp53,857 miliar, naik Rp5,542 miliar atau 11% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp48,315 miliar.

Jamkrindo Syariah's reinsurance liability as of December 31, 2023, was recorded at IDR 53,857 million, an increase of IDR 5,542 million or 11% compared to the same period in 2022 at IDR 48,315 million.

Akrual dan Utang Lain-Lain Accruals and other payables

Uraian Description	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage
IJP Belum Teridentifikasi Unidentified guarantee fees	28.926	21.537	-7.389	-26%
Beban Pegawai Accrued employee expenses	19.522	19.559	37	0%
Beban Operasional Operational expenses	3.961	2.615	-1.346	-34%
Beban Sistem dan Teknologi Accrued system and technology expenses	222	652	430	194%
Beban Administrasi dan Umum Administrative and general expenses	12.120	8.693	-3.427	-28%
Lainnya Others	52.247	60.091	7.844	15%
Jumlah Akrual dan Utang Lain-lain Total Accruals and other payables	116.998	113.147	-3.851	-3%

Jumlah akrual dan utang lain-lain Jamkrindo Syariah per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 113,147 triliun, turun Rp 3,850 miliar atau 3% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp116,998 miliar.

Jamkrindo Syariah's accruals and other liabilities as of December 31, 2023, were recorded at IDR 113,147 trillion, an increase of IDR 3,850 million or 3% compared to the same period in 2022 at IDR 116,998 million.



5

TATA KELOLA PERUSAHAAN *Good Corporate Governance*



PRINSIP UMUM GENERAL PRINCIPLES

Prinsip Umum

PT Jamkrindo Syariah memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip Governansi Perusahaan atau tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dalam kegiatan usahanya sehari-hari. Komitmen Perusahaan ini ditegaskan di dalam Anggaran Dasar dan berbagai kebijakan GCG. Segenap insan Jamkrindo Syariah menerapkan praktik-praktik GCG dalam pengelolaan dengan menggunakan parameter yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan. Ruang lingkup self assessment meliputi aspek-aspek GCG dalam pengelolaan Perusahaan untuk periode tahun 2023..

Bagi Jamkrindo Syariah, GCG menjadi salah satu pilar utama konsep pembangunan berkelanjutan, atau *sustainability development*, yang diharapkan mampu membentuk fondasi iklim investasi yang sehat. Lebih jauh, GCG telah menjadi salah satu faktor fundamental bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan yang berkelanjutan hingga masa mendatang.

Bagi Perusahaan, governansi perusahaan didefinisikan sebagai suatu pola pikir dan pola kerja yang diterapkan di seluruh jajaran Perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya sistem manajemen yang efisien dan efektif. Komitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dapat menjadi landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya (pegawai, konsumen, regulator, mitra kerja, dan lain lain) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Perusahaan harus menempatkan GCG sebagai landasan bagi terbentuknya sistem, struktur dan budaya Perusahaan yang kuat dalam menunjang keberhasilan dan keberlanjutan usaha Lembaga Penjaminan Syariah serta perubahan lingkungan bisnis dalam mencapai nilai-nilai Perusahaan bagi stakeholders. Oleh karena itu, Perusahaan meyakini penerapan GCG perlu dilakukan secara berkesinambungan dan bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap standar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penerapan GCG yang kuat di Perusahaan dapat diukur serta tercermin dalam laporan self assessment penerapan GCG.

General Principles

PT Jamkrindo Syariah is committed to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) in its daily business activities. The Company's commitment is affirmed in the Articles of Association and various GCG policies. All personnel of Jamkrindo Syariah implement GCG practices in management using parameters established by the Financial Services Authority through Financial Services Authority Circular Letter Number (Surat Edaran OJK) 54/SEOJK.05/2017 concerning Reports on the Implementation of Good Corporate Governance for Guarantee Institutions. The scope of self-assessment covers GCG aspects in Company management for the 2023 period.

For Jamkrindo Syariah, GCG has become one of the main pillars of the sustainable development concept, which is expected to form the foundation of a healthy investment climate. Furthermore, GCG has become a fundamental factor for investors in assessing sustainable company performance into the future.

For the Company, corporate governance is defined as a mindset and work pattern implemented across all levels of the Company to enhance transparency and accountability for the creation of an efficient and effective management system. Full commitment to implementing GCG principles can serve as the foundation for creating sustainable added value for the interests of shareholders, society at large, and various other stakeholders (employees, consumers, regulators, business partners, and others) both in the short and long term.

The company must place GCG as the foundation for the formation of strong Company systems, structures, and culture in supporting the success and sustainability of the Sharia Guarantee Institution's business as well as changes in the business environment in achieving Company values for stakeholders. Therefore, the Company believes that GCG implementation needs to be carried out continuously and not merely as compliance with applicable standards and Legislation. Strong GCG implementation in the Company can be measured and reflected in the GCG implementation self-assessment report.



Tujuan self assessment penerapan GCG ini adalah untuk:

- a. Mengukur kualitas penerapan GCG di Perusahaan melalui penilaian atau evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di Perusahaan melalui pemberian nilai komposit atas penerapan GCG;
- b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan GCG di Perusahaan serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah antara kriteria GCG dengan pelaksanaan GCG di Perusahaan;
- c. Memonitor konsistensi penerapan GCG di Perusahaan dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG Perusahaan.

Penerapan GCG yang dinilai dalam self assessment ini adalah periode tahun 2023. Pelaksanaan self assessment ini merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di Perusahaan.

Aspek Pengujian dalam Self Assesment GCG meliputi 10 indikator pengujian yakni :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS),
2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit bagi Lembaga Penjamin yang Memiliki Lingkup Wilayah Operasional Nasional atau Provinsi, atau terdapat Kepemilikan Asing dalam Memantau dan Memastikan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal,
3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, Auditor Eksternal,
4. Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Tata Kelola Informasi,
5. Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain,
6. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin,
7. Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan,
8. Pengungkapan Kepemilikan Saham,
9. Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, dan atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi dan Anggota

Berdasarkan hasil penilaian assessment penerapan GCG di Perusahaan tahun 2023, nilai komposit yang diperoleh adalah sebesar 90.88 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG di Perusahaan pada tahun 2023 memiliki predikat Sangat Baik. Selanjutnya hasil assessment penerapan GCG di Perusahaan dapat diikhtisarkan pada tabel berikut:

The objectives of this GCG implementation self-assessment are to:

- a. Measure the quality of GCG implementation in the Company through assessment or evaluation of the level of fulfillment of GCG criteria against the actual conditions applied in the Company through the provision of a composite score on GCG implementation;
- b. Identify strengths and weaknesses in GCG implementation in the Company and propose improvement recommendations to reduce the gap between GCG criteria and GCG implementation in the Company;
- c. Monitor the consistency of GCG implementation in the Company and obtain input for improvement and development of the Company's GCG policies.

The GCG implementation assessed in this self-assessment covers the period of 2023. The execution of this self-assessment is part of the ongoing GCG implementation process in the Company.

The GCG Self-Assessment testing aspects include 10 indicators, namely:

1. Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board (SSB);
2. Completeness and Implementation of Duties of the Audit Committee for Guarantee Institutions with National or Provincial Operational Areas, or with Foreign Ownership in Monitoring and Ensuring the Effectiveness of the Internal Control System;
3. Implementation of the Compliance Function, Internal Auditors, and External Auditors;
4. Implementation of Risk Management, Internal Control Systems, and Information Governance;
5. Implementation of Remuneration Policies and Other Facilities;
6. Transparency of the Guarantee Institution's Financial and Non-Financial Condition;
7. Long-Term Plans and Annual Work Plans and Budgets;
8. Share Ownership Disclosure;
9. Disclosure of Financial and Family Relationships of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners with Other Members of the Board of Directors and/or Shareholders of the Guarantee Institution Where the Members of the Board of Directors and/or Members of the Board of Commissioners Work.

Based on the results of the GCG implementation assessment in the Company for 2023, the composite score obtained is 90.88, indicating that the implementation of GCG in the Company in 2023 has a Very Good rating. Furthermore, the results of the GCG implementation assessment in the Company can be summarized in the following table:



Hasil Penilaian / Assessment Results			Laporan 2023 2023 Report	
Faktor Factor	Uraian / Description	Bobot % Weight %	Nilai 2023 2023 Score	Pencapaian 2023 / 2023 Achievement
A	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board (SSB)	35.00%	31.20	89.14%
B	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit bagi Lembaga Penjamin yang Memiliki Lingkup Wilayah Operasional Nasional atau Provinsi, atau terdapat Kepemilikan Asing dalam Memantau dan Memastikan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Completeness and Implementation of Audit Committee Duties for Guarantee Institutions with National or Provincial Operational Area, or with Foreign Ownership in Monitoring and Ensuring Internal Control System Effectiveness	5.00%	4.54	90.83%
C	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, Auditor Eksternal Implementation of Compliance Function, Internal Auditor, External Auditor	7.50%	6.92	92.22%
D	Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Tata Kelola Informasi Implementation of Risk Management, Internal Control System, and Information Governance Implementation	10.00%	8.40	84.00%
E	Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Implementation of Remuneration Policy and Other Facilities	2.50%	2.23	89.09%
F	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin Transparency of Financial and Non-Financial Conditions of the Guarantee Institution	15.00%	13.50	90.00%
G	Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Long-Term Plan and Annual Work Plan and Budget	7.50%	7.50	100.00%
H	Pengungkapan Kepemilikan Saham Disclosure of Share Ownership	2.50%	2.50	100.00%
I	Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, dan atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tersebut Menjabat Disclosure of Financial Relationships and Family Relationships of Board of Directors Members and Board of Commissioners Members with Other Board of Directors Members, and/or Shareholders of the Guarantee Institution where the Board of Directors Members and Board of Commissioners Members Hold Positions	5.00%	5.00	100.00%
J	Pengungkapan Hal-hal Penting Lainnya Disclosure of Other Important Matters	10.00%	9.10	91.00%
Total Nilai		100%	90.88	90.88%
Predikat			Sangat Baik	

Tabel di atas menggambarkan kondisi pelaksanaan GCG di Perusahaan dengan praktik terbaik penerapan GCG. Beberapa aspek penilaian telah mendekati standar dan praktik terbaik, namun pada faktor tertentu masih perlu untuk ditingkatkan.

The table above illustrates the implementation of GCG in the Company compared to best practices in GCG application. Several assessment aspects are approaching the standards and best practices; however, certain factors still require improvement.



LATAR BELAKANG

PT. Jamkrindo Syariah merupakan anak Perusahaan dari PT. Jaminan Kredit Indonesia (PT. Jamkrindo) tergabung dalam holding PT. Bahana Pembina Usaha Indonesia (Persero). Perusahaan adalah perusahaan penjaminan berbasis syariah sehingga dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik harus mengacu kepada Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik/Good Corporate Governance (untuk selanjutnya disebut "GCG") merupakan unsur penting yang harus diterapkan Perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis dalam jangka panjang untuk menentukan keputusan dan pengelolaan Perusahaan dengan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

Implementasi GCG menjadi fondasi strategis bagi pencapaian keunggulan daya saing berkelanjutan. Penerapan prinsip GCG menjadi landasan bagi Perusahaan dalam membentuk sistem, struktur, dan budaya Perusahaan yang fleksibel serta adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis yang kompetitif sehingga terbentuk sebuah sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal. Evaluasi secara berkala terus dilakukan untuk memastikan terwujudnya prinsip-prinsip GCG secara komprehensif.

Dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 penerapan GCG bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai lembaga penjamin bagi pemangku kepentingan;
2. Meningkatkan pengelolaan lembaga penjamin secara profesional, efektif, dan efisien;
3. Meningkatkan kepatuhan organ lembaga penjamin dan jajaran dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-USndangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial lembaga penjamin terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
4. Mewujudkan lembaga penjamin yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
5. Meningkatkan kontribusi lembaga penjamin dalam perekonomian nasional.

Dalam rangka mendorong penerapan GCG, Perusahaan menerapkan Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif). Core Values AKHLAK diatur dalam Surat Edaran Nomor SE- 7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Nilai-nilai AKHLAK di lingkungan Perusahaan sudah diterapkan dari Direksi, Dewan Komisaris/Dewan

BACKGROUND

PT Jamkrindo Syariah is a subsidiary of PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo), which is part of the holding company PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (Persero). The Company is a sharia-based guarantee company; therefore, in implementing good corporate governance, it must refer to Regulation No. 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions.

Good Corporate Governance (hereinafter referred to as "GCG") is an essential element that must be implemented by the Company to conduct long-term business activities, guiding decision-making and company management based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

The implementation of GCG serves as a strategic foundation for achieving sustainable competitive advantage. The application of GCG principles forms the basis for the Company in establishing systems, structures, and a corporate culture that are flexible and adaptive to changes in the competitive business environment, thereby creating a reliable internal control system and risk management. Periodic evaluations are continuously conducted to ensure the comprehensive implementation of GCG principles.

As stated in Article 3 of the Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.05/2017, the objectives of GCG implementation are to:

1. Optimize the value of the guarantee institution for stakeholders;
2. Improve the management of the guarantee institution in a professional, effective, and efficient manner;
3. Enhance the compliance of the guarantee institution's governing bodies and their subordinates in making decisions and taking actions based on high ethical standards, adherence to prevailing laws and regulations, and awareness of the institution's social responsibility to stakeholders and environmental sustainability;
4. Establish a healthier, more reliable, trustworthy, and competitive guarantee institution; and
5. Increase the contribution of the guarantee institution to the national economy.

To promote the implementation of GCG, the Company applies the Core Values of Human Resources known as AKHLAK (Amanah [Trustworthy], Kompeten [Competent], Harmonis [Harmonious], Loyal, Adaptif [Adaptive], and Kolaboratif [Collaborative]). The AKHLAK Core Values are regulated in Circular Letter No. SE-7/MBU/07/2020 concerning Core Values of Human Resources for State-Owned Enterprises. These AKHLAK values have been



Pengawas, hingga Manajemen/Pegawai dengan merujuk pada Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT. Jamkrindo Syariah Nomor 06/Per-Dir/X/2020 dan Nomor Kep-34/DK-Jamsyar/X/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia.

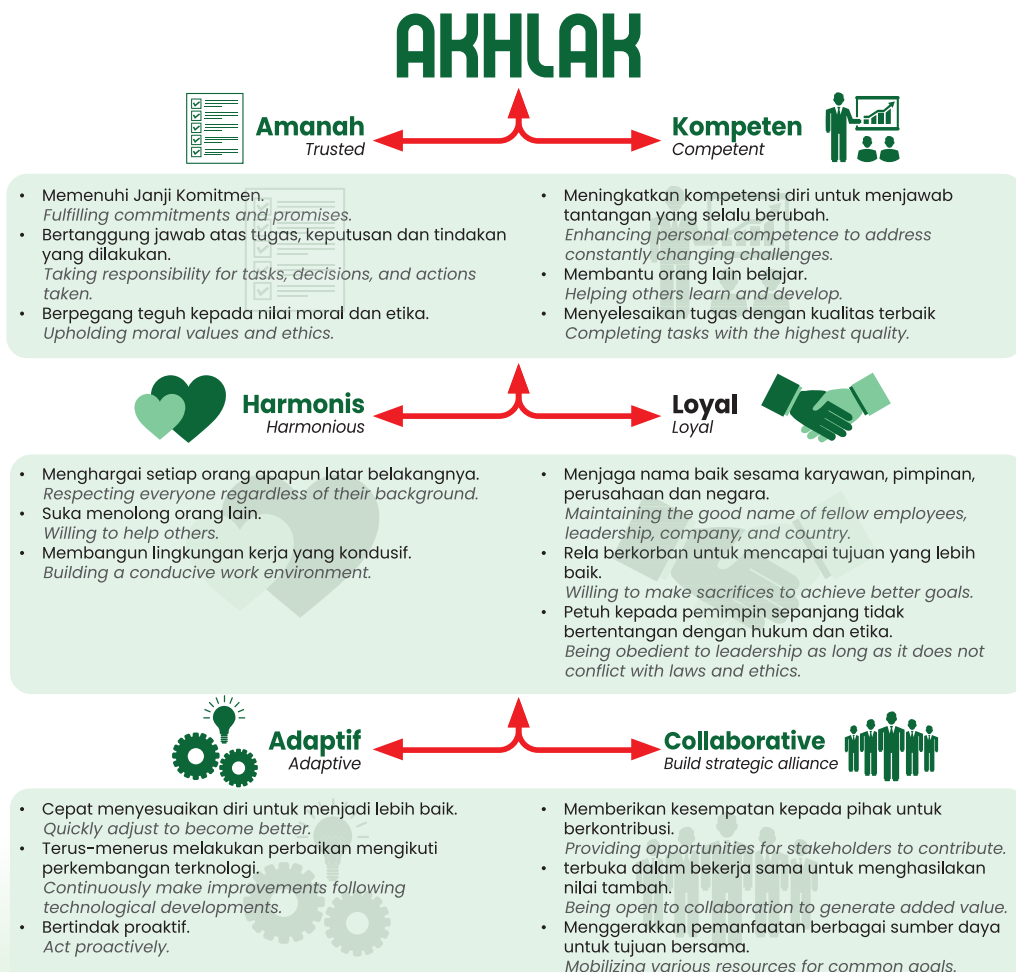
implemented within the Company, from the Board of Directors, Board of Commissioners/Supervisory Board, to Management/Employees, referring to the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Jamkrindo Syariah No. 06/Per-Dir/X/2020 and No. Kep-34/DK-Jamsyar/X/2020 on Core Values of Human Resources.

Nilai Nilai AKHLAK
Core Values AKHLAK



Selain tertuang pada Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris, Core Values **AKHLAK** tertuang dalam Surat Edaran PT. Jamkrindo Syariah Nomor 29/SE/3/XII/2021 tentang Penerapan Core Values **AKHLAK** sebagai berikut:

In addition to being stated in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners, the AKHLAK Core Values are stated in the Circular Letter of PT. Jamkrindo Syariah Number 29/SE/3/XII/2021 concerning the Implementation of the AKHLAK Core Values as follows:





Sebagai lembaga penjaminan yang berlandaskan syariah, Perusahaan dipandang perlu untuk memberikan Pedoman Perilaku Core Values AKHLAK yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nilai-nilai syariah dilandaskan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagaimana berikut:

1. AMANAH (Memegang Teguh Amanah yang Diberikan) Panduan Perilaku:

a. Memenuhi janji dan komitmen

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ١

Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji... (Al-Quran, Surah Al-Mā'idah/5:1).

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ٣٤ ...

...dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintakan pertanggungjawaban (Al-Quran, Surah Al-Isrā'/17:34).

b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ٣٨

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya (Al-Quran, Surah Al-Muddathir/74:38).

c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Al-Quran, Surah Al-Anfāl/8:27).

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ٧ ...

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri... (Al-Quran, Surah Al-Isrā'/17:7).

2. KOMPETEN (Terus Belajar dan Mengembangkan Kapabilitas)

Panduan Perilaku:

a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ١١٤ ...

.. dan ucapkanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku". (Al-Quran, Surah Tāhā/20:114).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan (Al-

As a sharia-based guarantee institution, the Company deems it necessary to provide a Behavioral Guideline for the AKHLAK Core Values that align with sharia principles. These sharia values are grounded in the Qur'an and Hadith, as follows:

1. AMANAH (Upholding the Trust Given) Behavioral Guidelines:

a. Fulfilling promises and commitments

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ١

O believers! Honour your obligations... (Qur'an, Surah Al-Mā'idah/5:1). ...

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ٣٤ ...

Honour your pledges, for you will surely be accountable for them. (Qur'an, Surah Al-Isrā'/17:34)

b. Taking responsibility for tasks, decisions, and actions

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ٣٨

Every soul will be detained for what it has done. (Qur'an, Surah Al-Muddathir/74:38).

c. Holding firmly to moral and ethical values

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

believers! Do not betray Allah and the Messenger, nor betray your trusts knowingly. (Qur'an, Surah Al-Anfāl/8:27)

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ٧ ...

If you act rightly, it is for your own good, but if you do wrong, it is to your own loss... (Qur'an, Surah Al-Isrā'/17:7)

2. KOMPETEN (Continuously Learning and Developing Capabilities)

Behavioral Guidelines:

a. Improving personal competence to respond to ever-changing challenges

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ١١٤ ...

...and pray, "My Lord! Increase me in knowledge." (Qur'an, Surah Tāhā/20:114).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

believers! Be mindful of Allah and let every soul look to what deeds it has sent forth for tomorrow. And fear Allah, for certainly Allah is All-Aware of what you do. (Qur'an, Surah Al-Hasr/59:18).



Quran, Surah Al-Hasyr/59:18).

b. Membantu orang lain belajar

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

Barangsiapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia mendapatkan ganjaran kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut (Hadits Riwayat Muslim Nomor 1893).

c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتِمَّهُ

Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia mengerjakannya secara profesional". (Hadits, Riwayat At-Thabrani nomor 891 dan Al-Baihaqi nomor 334).

3. HARMONIS (Saling Peduli dan Menghargai Perbedaan)
Panduan perilaku:

a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ١١

Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (Al-Quran, Surah Al-Hujurat/49: 11).

b. Suka menolong orang lain

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Barangsiapa yang memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya pula. Barangsiapa yang meringankan satu beban seorang Muslim (di dunia), maka Allah akan meringankan beban-bebannya di Hari Kiamat. (Hadits, riwayat Bukhari nomor 2442).

c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara,

b. Helping others to learn

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

One who guides to something good has a reward similar to that of its doer. (Hadith, narrated by Muslim No. 1893).

c. Completing tasks with the highest quality

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتِمَّهُ

"Verily, Allah loves that when anyone of you does something, he does it perfectly". (Hadith, narrated by At-Thabrani No. 891 and Al-Baihaqi No. 334).

3. HARMONIS (Caring for and Respecting Differences)
Behavioral Guidelines:

a. Respecting all individuals regardless of background

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ١١

O believers, let not a people make fun of another people (because) it may be that they (who are made fun of) are better than those (who make fun of) and do not let women (make fun of) other women (because) it may be that the women (who are made fun of) are better than the women (who make fun). Do not criticize each other and do not call each other with bad names. The worst calling is (calling) that is bad (ungodly) after believing. And whoever does not repent, then they are the wrongdoers (Al-Quran, Surah Al-Hujurat/49: 11).

b. Being helpful to others

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Whoever fulfilled the needs of his brother, Allah will fulfill his needs; whoever brought his (Muslim) brother out of a discomfort, Allah will bring him out of the discomforts of the Day of Resurrection, and whoever screened a Muslim, Allah will screen him on the Day of Resurrection. (Hadith, narrated by Bukhari No. 2442).

c. Creating a conducive work environment

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

The believers are but one brotherhood, so make peace



karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat (Al-Quran, Surah al-Hujurat/49:10).

between your brothers. And be mindful of Allah so you may be shown mercy. (Qur'an, Surah Al-Hujurat/49:10).

4. LOYALITAS (Berdedikasi dan Mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara)

Panduan perilaku:

- a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, perusahaan dan negara.

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ... وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Dia tidak akan menzalimi saudaranya, tidak menyerahkannya kepada pihak yang zalim kepadanya... barangsiapa yang menutupi keburukan seorang Muslim (di dunia), maka Allah akan menutupi keburukannya di Hari Kiamat (Hadits, Riwayat Bukhari nomor 2442).

- b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ... ٩ ...

...dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga membutuhkan...(Al-Quran, Surah Al-Hashr/59:9).

- c. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ... ٥٩

Wahai orang-orang beriman, patuhilah Allah dan patuhilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...(Al-Quran, Surah An-Nisa'/4:59).

الَسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Bagi seorang Muslim wajib mendengar dan patuh terhadap apa yang disukai dan dibenci, sepanjang tidak diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Jika diperintahkan melakukan kemaksiatan, maka tidak wajib mendengar dan patuh (Hadits, Riwayat Bukhari nomor 7144 dan Muslim nomor 1839).

5. ADAPTIF (Terus Berinovasi dan Antusias Menggerakkan ataupun Menghadapi Perubahan)

Panduan Perilaku:

- a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤١

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Al-Quran

4. LOYALITAS (Dedicated and Prioritizing the Interests of the Nation and State)

Behavioral Guidelines:

- a. Preserving the good name of fellow employees, leaders, the company, and the nation.

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ... وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

A Muslim is a brother of another Muslim, so he should not oppress him, nor should he hand him over to an oppressor. Whoever fulfilled the needs of his brother, Allah will fulfill his needs; whoever brought his (Muslim) brother out of a discomfort, Allah will bring him out of the discomforts of the Day of Resurrection, and whoever screened a Muslim, Allah will screen him on the Day of Resurrection. (Hadith, narrated by Bukhari No. 2442).

- b. Willing to sacrifice for a greater purpose

وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ... ٩ ...

...They give the emigrants preference over themselves even though they may be in need... (Qur'an, Surah Al-Hashr/59:9).

- c. Obeying leadership as long as it does not contradict laws and ethics.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ... ٥٩

O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger and those in authority among you... (Qur'an, Surah An-Nisa' 4:59).

الَسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

A Muslim has to listen to and obey (the order of his ruler) whether he likes it or not, as long as his orders involve not one in disobedience (to Allah), but if an act of disobedience (to Allah) is imposed one should not listen to it or obey it. (Hadith, narrated by Bukhari No. 7144 and Muslim No. 1839).

5. ADAPTIF (Continuously Innovating and Enthusiastically Embracing or Driving Change)

Behavioral Guidelines:

- a. Quickly adapting to become better

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤١

O believers! March forth whether it is easy or difficult for you, and strive with your wealth and your lives in the cause of Allah. That is best for you, if only you knew. (Qur'an, Surah At-Taubah/9:41)



Surah At-Taubah/9:41).

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ ...

... dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung (Al-Quran, Surah Al-Hajj/22: 77)

- b. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿١١﴾ ...

...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (Al-Quran, Surah Ar-Ra'd/13: 11).

- c. Bertindak produktif

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠٥﴾ ...

Dan katakanlah, "Berkaryalah kamu, maka Allah akan melihat karyamu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin"... (al-Quran, Surah at-Taubah/9: 105)

اْعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ... ﴿١٣٥﴾ ...

... Berkaryalah sesuai posisimu... (Al-Quran, Surah Al-An'ām/6:135).

6. KOLABORATIF (Membangun Kerjasama yang Sinergis) Panduan Perilaku:

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴿١٤٨﴾ ...

Dan setiap pihak mempunyai arah (kecenderungan) di mana dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan... (Al-Quran, Surah Al-Baqarah/2:148).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴿٧١﴾ ...

Dan orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sesama mereka saling membantu... (Al-Quran, Surah At-Taubah/9:71).

- b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (Al-Quran, Surah Al-Mā'idah/5:2).

- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Sesama orang beriman laksana sebuah bangunan yang saling menguatkan di antara sesamanya... (Hadits, riwayat Bukhari nomor 6026 dan Muslim nomor 2585).

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ ...

...and do what is good so that you may be successful. (Qur'an, Surah Al-Hajj/22:77)

- b. Continuously making improvements in line with technological developments

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿١١﴾ ...

...Indeed, Allah would never change a people's state of favour until they change their own state of faith... (Qur'an, Surah Ar-Ra'd/13:11).

- c. Acting productively

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠٥﴾ ...

Tell them, O Prophet, "Do as you will. Your deeds will be observed by Allah, His Messenger, and the believers..." (Qur'an, Surah At-Taubah 9:105)

اْعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ... ﴿١٣٥﴾ ...

...O my people! Persist in your ways, for I too will persist in mine... (Qur'an, Surah Al-An'ām 6:135).

6. KOLABORATIF (Building Synergistic Cooperation) Behavioral Guidelines:

- a. Providing opportunities for various parties to contribute

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴿١٤٨﴾ ...

Everyone turns to their own direction of prayer. So compete with one another in doing good... (Qur'an, Surah Al-Baqarah 2:148).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴿٧١﴾ ...

The believers, both men and women, are guardians of one another... (Qur'an, Surah At-Taubah 9:71).

- b. Being open to collaboration to generate added value

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

...Cooperate with one another in goodness and righteousness, and do not cooperate in sin and transgression... (Qur'an, Surah Al-Mā'idah 5:2).

- c. Mobilizing various resources toward a common goal

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

A believer to another believer is like a building whose different parts enforce each other... (Hadith, narrated by Bukhari No. 6026 and Muslim No. 2585). (Hadith, narrated by Bukhari No. 6026 and Muslim No. 2585).



...الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، اِحْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ

Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguhsungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah engkau merasa lemah... (Hadits, riwayat Muslim nomor 2664).

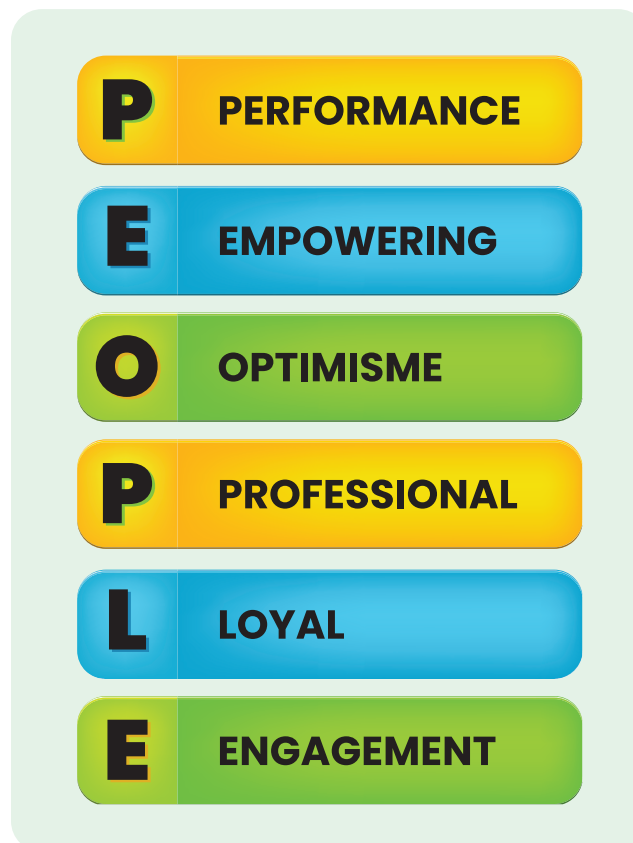
...الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، اِحْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ

A strong believer is better and is more lovable to Allah than a weak believer, and there is good in everyone, (but) cherish that which gives you benefit (in the Hereafter) and seek help from Allah and do not lose heart... (Hadith, narrated by Muslim No. 2664). (Hadith, narrated by Muslim No. 2664).

Untuk menerapkan Core Values AKHLAK, pada tanggal 19 September 2023 Direksi PT. Jamkrindo Syariah menetapkan Culture Activation yang menjadi dasar transformasi Perusahaan. Culture Activation tersebut adalah PEOPLE yang dijabarkan sebagai berikut:

To implement the AKHLAK Core Values, on September 19, 2023, the Board of Directors of PT Jamkrindo Syariah established the Culture Activation as the foundation for the Company's transformation. This Culture Activation is referred to as PEOPLE, which is described as follows:

Aktivasi Budaya PEOPLE Culture Activation PEOPLE



PEOPLE	MAKNA	KEY BEHAVIOURS
Performance	Akan mempersembahkan performa terbaik Will deliver the best performance	1. Melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mendapatkan kualitas terbaik 2. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik 3. Memberikan kontribusi terbaik bagi Perusahaan 1. Perform work effectively and efficiently to achieve the best quality 2. Complete tasks with the best quality 3. Provide the best contribution to the Company
Empowering	Selalu mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam bekerja Continuously develop oneself, enhance skills and capacity at work	1. Selalu antusias terhadap hal baru 2. Terus menumbuhkembangkan potensi diri ke arah lebih baik 3. Mempersiapkan diri untuk menjadi talenta terbaik 1. Always enthusiastic about new things 2. Continuously grow one's potential to work even better 3. Prepare oneself to deliver the best performance



PEOPLE	MAKNA	KEY BEHAVIOURS
Optimisme	Tahu masalah, tahu Solusi dan mampu menjalankan solusi Know the problems, know the solutions, and able to implement them	- Memahami akar permasalahan untuk menemukan Solusi - Memberikan solusi dengan memperhatikan risiko, prinsip kehati-hatian, dan tata kelola perusahaan yang baik - Mampu menjalankan solusi dengan tetap memperhatikan kepentingan konsumen - Understand the root of the problem to find a solution - Provide solutions by considering risks, principles of prudence, and good corporate governance - Able to implement solutions while still prioritizing consumer interests
Profesional	Berpikir, bertindak secara Profesional untuk mendapatkan performa dan value perusahaan Think and act professionally to deliver company performance and value	- Bertanggung jawab terhadap kinerja dan pencapaian target Perusahaan - Menjunjung tinggi integritas dan mengutamakan kepentingan Perusahaan - Berpegang teguh terhadap nilai moral, etika, dan spiritual - Take responsibility for performance and achievement of company targets - Uphold integrity and prioritize the Company's interests - Adhere to moral, ethical, and spiritual values
Look Around	Selalu mencermati perkembangan dan tuntutan pasar Always observe market developments and demands	- Peka terhadap perubahan - Paham dan tanggap akan kebutuhan pasar - Menyesuaikan diri mengikuti perkembangan Pasar - Be sensitive to changes - Understand and respond to market needs - Adapt oneself to follow market developments
Engagement	Siap untuk berkolaborasi, siap untuk bersinergi dalam rangka menciptakan mutual trust Ready to collaborate, ready to synergize in order to build mutual trust	- Bertanggung jawab terhadap kinerja dan pencapaian target Perusahaan - Menjunjung tinggi integritas dan mengutamakan kepentingan Perusahaan - Berpegang teguh terhadap nilai moral, etika, dan spiritual - Take responsibility for performance and achievement of company targets - Uphold integrity and prioritize the Company's interests - Adhere to moral, ethical, and spiritual values

Logo Transformasi dan maskot Perusahaan pada Gambar berikut:

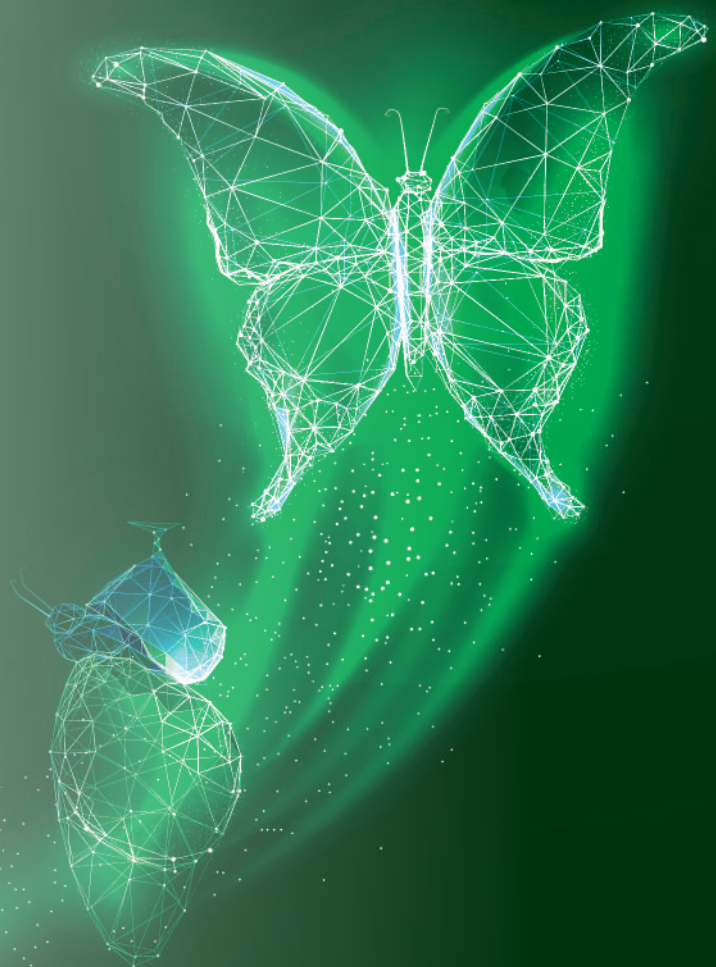
The Company's Transformation Logo and Mascot are shown in the following image:

Logo transformasi 1.0
Transformation Logo 1.0



Maskot Perusahaan
Company Mascot







TRANSPARANSI PENERAPAN GCG TRANSPARENCY OF IMPLEMENTATION GCG

Transparansi sebagai bentuk keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, mengemukakan informasi materiil dan relevan tentang Perusahaan secara akurat dan tepat waktu dengan memperhatikan prinsip - prinsip GCG.

A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, Dan DPS

Berdasarkan Akta PT. Jamkrindo Syariah Nomor 15 tanggal 11 Oktober 2021, Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang diawasi oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal berikut :

- Pasal 11 ayat (1) bahwa:
"Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama."
- Pasal 14 bahwa :
"Perseroan diawasi oleh suatu Dewan Komisaris yang terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama."
- Pasal 17 ayat (1) bahwa :
"Didalam menjalankan kegiatan usaha Penjaminan Pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, Perseroan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang anggotanya diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari seorang, maka salah satu diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah"

Selama tahun pelaporan 2023 terdapat perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. Susunan Direksi semula adalah sebagai berikut :

Transparency is a form of openness in carrying out the decision-making process, disclosing material and relevant information about the Company accurately and in a timely manner while taking into account the principles of GCG.

A. Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors, Board of Commissioners, and DPS

Based on Deed of PT Jamkrindo Syariah Number 15 dated October 11, 2021, the Company is managed by a Board of Directors which is supervised by a Board of Commissioners and a Sharia Supervisory Board (DPS) appointed by the General Meeting of Shareholders. This is in accordance with the following Articles:

- Article 11 paragraph (1) states that:
"The Company shall be managed and led by a Board of Directors consisting of at least 3 (three) members, one of whom may be appointed as President Director."
- Article 14 states that:
"The Company shall be supervised by a Board of Commissioners consisting of at least 3 (three) members, one of whom may be appointed as President Commissioner."
- Article 17 paragraph (1) states that:
"In carrying out the business activities of financing guarantees based on Sharia principles, the Company shall have a Sharia Supervisory Board whose members are appointed at the General Meeting of Shareholders upon the recommendation of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council. If the Sharia Supervisory Board consists of more than one member, one of them may be appointed as the Chairman of the Sharia Supervisory Board."

During the 2023 reporting year, there were changes in the composition of the Board of Directors, Board of Commissioners, and DPS. The previous composition of the Board of Directors was as follows:



Tabel 3 Susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan pengawas Syariah Sebelum RUPS 21 Juli 2023
Table 3 Composition of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board Prior to the GMS on July 21, 2023

No	NAMA	JABATAN	TANGGAL PENGANGKATAN OLEH RUPS
1	Gatot Suprabowo, S.E, CRGP	Direktur Utama President Director	18 September 2019 yang diaktakan dengan Nomor 19 tanggal 24 Oktober 2019 18 September 2019 as notarized in Deed Number 19 dated 24 October 2019
2	Achmad Sonhadji, Ak, MM,	Direktur Operasional Operational Director	
3	Endang Sri Winarni, STP, MM, CRGP, CHRP	Direktur Keuangan, SDM & umum Director of Finance, Human Resource, & General Affairs	
4	Drs. Aribowo, Ak, MM. CRGP	Komisaris Utama President Commissioner	18 September 2019 yang diaktakan dengan Nomor 19 tanggal 24 Oktober 2019 18 September 2019 as notarized in Deed Number 19 dated 24 October 2019
5	Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, QIP, CRGP, CRMS	Komisaris Commissioner	
6	Drs. Wildan, Ak.	Komisaris Independen Independent Commissioner	
7	Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA.	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board	
8	Dr. H. Abdul Aziem, S.H, M.Pd	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of the Sharia Supervisory Board	

Pada tanggal 21 Juli 2023 diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk pemberhentian beberapa Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut :

On July 21, 2023, an Extraordinary General Meeting of Shareholders was held for the dismissal of several members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board as follows:Syariah sebagai berikut :

Tabel 4 Tanggal Pemberhentian Beberapa Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS oleh RUPS
Table 4 Date of Dismissal of Several Directors, Board of Commissioners, and DPS by GMS

No	NAMA	JABATAN	TANGGAL PENGANGKATAN OLEH RUPS
1	Gatot Suprabowo, S.E, CRGP	Direktur Utama President Director	21 Juli 2023 yang diaktakan dengan Nomor 42 tanggal 25 Juli 2023 21 July 2023 as notarized in Deed Number 42 dated 25 July 2023
2	Achmad Sonhadji, Ak, MM,	Direktur Operasional Operational Director	
3	Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, QIP, CRGP, CRMS	Komisaris Commissioner	
4	Drs. Wildan, Ak.	Komisaris Independen Independent Commissioner	
5	Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA.	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board	

Bersamaan dengan pemberhentian tersebut, RUPS LB juga mengangkat beberapa Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah menjadi sebagai berikut :

Along with the dismissal, the EGMS also appointed several members to the Board of Directors and Board of Commissioners, resulting in the following composition of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board:



1. Jumlah, Nama Jabatan, Tanggal Lulus, dan Nomor Fit and Proper Test, Tanggal Pengangkatan Oleh RUPS, Masa Jabatan, Kewarganegaraan, dan Domisili Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

1. Number, Position Title, Graduation Date, and Fit and Proper Test Number, Appointment Date by the GMS, Term of Office, Nationality, and Domicile of Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board.

a. Direksi



Hari Purnomo, S.P, CRGP, CREL

- **Direktur Utama**
President Director
- Diangkat melalui Akta Pernyataan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jamkrindo Syariah No. 42 tanggal 25 Juli 2023.
Appointed through Deed of Statement Outside the General Meeting of Shareholders of PT. Jamkrindo Syariah No. 42 dated July 25, 2023.
- WNI
Indonesian Citizen

Pengalaman Kerja (5 Tahun Terakhir)

Work Experience (Last 5 Years)

Waktu	Jabatan
1 Sep 2019 s.d 31 Jan 2020	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Head of Corporate Secretary Division
1 Feb 2020 s.d 31 Jan 2021	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kepala Audit Intern Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Head of Regional Internal Audit
1 Feb 2021 s.d 31 Mei 2022	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional CEO Lampung PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional CEO Lampung
1 Jun 2022 s.d 1 Nov 2022	Direktur PT. Bringin Karya Sejahtera Director of PT. Bringin Karya Sejahtera
1 Des 2022	Direktur Keuangan, SDM dan Teknologi Informasi Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia Director of Finance, Human Resources, and Information Technology Bank Rakyat Indonesia Pension Fund
21 Jul 2023 s.d Sekarang 21 Jul 2023 to Present	Direktur Utama PT. Jamkrindo Syariah President Director of PT Jamkrindo Syariah

Endang Sri Winarni, STP, MM, CRGP, CHRP



- **Direktur Keuangan, SDM, dan Umum**
- **Director of Finance, Human Resource, & General Affairs**
- Diangkat melalui Akta Pernyataan Diluar Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Jamkrindo Syariah No. 19 tanggal 24 Oktober 2019.
Appointed through Deed of Statement Outside the Decision of Extraordinary GMS of PT. Jamkrindo Syariah No. 19 dated October 24, 2019.
- WNI
Indonesian Citizen

Pengalaman Kerja (5 Tahun Terakhir)

Work Experience (Last 5 Years)

Waktu	Jabatan
19 Sept 2014 s.d Sekarang 19 Sept 2014 to Present	Direktur SDM, Umum, dan Keuangan PT. Jamkrindo Syariah Director of Finance, Human Resource, & General Affairs

**Loesdarwanto, S.E., M.M**

- **Direktur Operasional**
Operations Director
- Diangkat melalui Akta Pernyataan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jamkrindo Syariah No. 42 tanggal 25 Juli 2023.
Appointed through Deed of Statement Outside the General Meeting of Shareholders of PT. Jamkrindo Syariah No. 42 dated July 25, 2023.
- WNI
Indonesian Citizen

Pengalaman Kerja (5 Tahun Terakhir)**Work Experience (Last 5 Years)**

Waktu	Jabatan
08 Mar 2017 – 21 Mar 2021	Pemimpin Wilayah VI Surabaya PT. Jamkrindo Regional Head VI Surabaya of PT. Jamkrindo
21 Mar 2021 – 23 Jul 2023	Pemimpin Wilayah V Semarang PT. Jamkrindo Regional Head V Semarang of PT. Jamkrindo
23 Jul 2023 s.d Sekarang 23 Jul 2023 to Present	Direktur Operasional PT. Jamkrindo Syariah Director of Operations of PT. Jamkrindo Syariah

b. Komisaris**Drs. Aribowo, Ak, MM. CRGP**

- **Komisaris Utama**
President Commissioner
- Diangkat melalui Akta Pernyataan Diluar Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Jamkrindo Syariah No. 19 tanggal 24 Oktober 2019.
Appointed through Deed of Statement Outside the Decision of Extraordinary GMS of PT. Jamkrindo Syariah No. 19 dated October 24, 2019
- WNI
Indonesian Citizen

Pengalaman Kerja (5 Tahun Terakhir)**Work Experience (Last 5 Years)**

Waktu	Jabatan
01 Agust 2016 – 16 Jul 2023	Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Head of Finance and Investment Division
16 Jul 2023 s.d Sekarang 16 Jul 2023 to Present	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary



Edy Utomo, S.E., Ak. MM.

- **Komisaris Independen**
Independent Commissioner
- Diangkat melalui Akta Pernyataan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jamkrindo Syariah No. 42 tanggal 25 Juli 2023
Appointed through Deed of Statement Outside the General Meeting of Shareholders of PT. Jamkrindo Syariah No. 42 dated July 25, 2023
- WNI
Indonesian Citizen

Pengalaman Kerja (5 Tahun Terakhir)

Work Experience (Last 5 Years)

Waktu	Jabatan
01 Agust 2019 s.d 29 Feb 2020	Kepala Audit Intern Wilayah BRI Bandung Head of Internal Audit for BRI Bandung Region
03 Mei 2021 s.d 30 Apr 2022	Ketua Tim Pembinaan Aktiva Tetap PT. BRI Head of Fixed Asset Recovery Team of PT. BRI
21 Jul 2023 s.d Sekarang 21 Jul 2023 to Present	Komisaris Independen PT. Jamkrindo Syariah Independent Commissioner of PT. Jamkrindo Syariah



Alie Basya Syamsudin, S.E.

- **Komisaris**
Commissioner
- Diangkat melalui Akta Pernyataan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jamkrindo Syariah No. 42 tanggal 25 Juli 2023.
Appointed through Deed of Statement Outside the General Meeting of Shareholders of PT. Jamkrindo Syariah No. 42 dated July 25, 2023
- WNI
Indonesian Citizen

Pengalaman Kerja (5 Tahun Terakhir)

Work Experience (Last 5 Years)

Waktu	Jabatan
01 Feb 2019 s.d 30 Nov 2019	Kepala Audit Intern Wilayah Yogyakarta BRI Head of Internal Audit for Yogyakarta Region BRI
01 Agust 2020 s.d. 30 Nov 2020	Direktur PT. Bringin Rancang Sejahtera Director of PT. Bringin Rancang Sejahtera
20 Nov 2020 s.d 30 Nov 2022	Direktur Dana Pensiun BRI Director of BRI Pension Fund
21 Juli 2023 s.d Sekarang 21 July 2023 to Present	Komisaris PT Jamkrindo Syariah Commissioner of PT Jamkrindo Syariah



c) Dewan Pengawas Syariah



Dr. H. Abdul Aziem, S.H, M.Pd,

• **Dewan Pengawas Syariah**
Sharia Supervisory Board

• Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT Penjaminan Jamkrindo Syariah No. 08 tanggal 10 Juli 2015.

Appointed as a Member of the Sharia Supervisory Board based on the Deed of Statement of Decision of the GMS of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah No. 08 dated July 10, 2015.

• WNI
Indonesian Citizen

Pengalaman Kerja (5 Tahun Terakhir)

Work Experience (Last 5 Years)

Waktu	Jabatan
2022 s.d Sekarang	Ketua Dewan Pengarah Chairman of the Board of Trustees
2022 s.d Sekarang	Kepala Bidang Pendidikan Head of Education Division
21 Jul 2023 s.d Sekarang	Komisaris Independen PT. Jamkrindo Syariah

Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah di Perusahaan berkewarganegaraan Indonesia, sehingga data perizinan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah berkewarganegaraan asing tidak ada.

All members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board in the Company are Indonesian citizens, therefore there is no permit data for Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board of foreign citizenship.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

2. Duties and Responsibilities of Each Director, Commissioner, and Sharia Supervisory Board

A) Direksi

Tugas dan Tanggung jawab Direksi PT. Jamkrindo Syariah Nomor 15 tanggal 11 Oktober 2021, disebutkan antara lain:

1. Tugas Pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Persero
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan
2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan

A) Board of Directors

The duties and responsibilities of the Board of Directors of PT. Jamkrindo Syariah Number 15 dated October 11, 2021, which states, among others:

1. The Main Duties of the Board of Directors are:
 - a. To lead and manage the Company in accordance with the aims and objectives of the Company and to continuously strive to improve the efficiency and effectiveness of the Company
 - b. To control, maintain and manage the Company's assets
2. The Board of Directors is fully responsible for carrying out its duties for the benefit of the Company in achieving its aims and objectives.
3. Each member of the Board of Directors must carry out their duties in good faith and with full responsibility for the interests and business of the Company with due observance of the applicable laws and regulations.
4. Each member of the Board of Directors is personally fully responsible for the Company's losses if the person concerned is guilty or negligent in carrying out their



tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan sesuai ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas.

5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan atau Pihak lain dengan Perseroan dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat Persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau Lembaga Keuangan lain
 - b. Memberikan pinjaman jangka pendek atas nama Perseroan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud.
 - c. Mengagunkan aktiva tetap yang di perlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek.
 - d. Melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun dan menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Perbuatan Hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan (yang bukan merupakan barang dagangan) baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang Saham yang memiliki skurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikelurakan Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud.
8. Direksi dengan dalih apapun tidak dibenarkan untuk memberikan pinjaman kepadapemegang saham.
9. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud ini wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
10. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang saham dan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu:
 - a. Mengambil bagian, baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan lain atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru
 - b. Melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan

duties for the interests and business of the Company in accordance with the provisions of the Limited Liability Company Law.

5. The Board of Directors has the right to represent the Company inside and outside the court and to take all actions and deeds both regarding the management and ownership of the Company's assets and to bind the Company with other parties and or other parties with the Company with the limitations set out of this Article.
6. The following acts of the Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners to:
 - a. Receive short-term loans from banks or other Financial Institutions
 - b. Provide short-term loans on behalf of the Company with due observance of the provisions as referred to in paragraph (10) letter c of this Article.
 - c. Collateralize fixed assets required in implementing short-term credit withdrawals.
 - d. Release and write off movable assets with an economic life that is commonly applicable in the industry in general for up to 5 (five) years and write off bad debts, dead stock inventory up to a certain value determined by the General Meeting of Shareholders.
7. Legal actions to transfer, relinquish rights or make debt guarantees for all or most of the Company's assets (which are not trading goods) either in one transaction or several transactions that stand alone or are related to each other must obtain approval from the General Meeting of Shareholders attended or represented by shareholders who own at least $\frac{3}{4}$ (three-quarters) of the total shares issued by the Company with valid voting rights and approved by at least $\frac{3}{4}$ (three-quarters) of the total votes validly cast at the meeting with due observance of the provisions as referred to in paragraph (6) letters c and d and paragraph (10) letter d of this Article.
8. The Board of Directors under any pretext is not allowed to provide loans to shareholders.
9. Legal actions to transfer or make as collateral for debt or relinquish rights to the Company's assets as referred to in paragraph (7) of this Article must also be announced in 2 (two) Indonesian language daily newspapers published and circulated widely/nationally in the territory of the Republic of Indonesia no later than 30 (thirty) days from the date of such legal action.
10. The following actions can only be carried out by the Board of Directors after obtaining approval from the General Meeting of Shareholders and such approval is given after hearing the opinions and suggestions from the Board of Commissioners with due observance of the applicable provisions, namely:
 - a. Taking part, either partially or wholly or participating in other Companies or other entities or establishing new companies
 - b. Releasing part or all of the Company's participation



Perseroan dalam Perseroan lain atau badan badan lain.

- c. Menerima dan/atau memberikan pinjaman jangka menengah/Panjang serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional/melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham..
 - d. Melepaskan dan/atau menghapuskan aktiva tetap atau mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka menengah/panjang.
 - e. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan menghapuskan persediaan barang mati yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.
 12. Baik Direktur Utama maupun Direktur lain berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama maupun Direktur lainnya tersebut, telah disetujui dalam rapat Direksi.
 13. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawab sendiri, berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
 14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 15. Dalam hubungannya dengan tugas pokok Direksi sebagaimana dimaksud maka Direksi berhak untuk :
 - a. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan
 - b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama sama atau kepada orang atau badan lain.
 - e. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurusan maupun pemilihan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan

in other Companies or other entities.

- c. Receiving and/or providing medium/long-term loans and providing short-term loans that are not operational in nature/exceeding a certain amount determined by the General Meeting of Shareholders.
 - d. Releasing and/or writing off fixed assets or collateralizing fixed assets in the context of withdrawing medium/long-term credit.
 - e. Binding the Company as guarantor (borg or avalist) which has financial consequences exceeding a certain amount determined by the General Meeting of Shareholders.
 - f. To no longer collect and write off bad debts from the books and write off dead stock inventory that exceeds a certain value determined by the General Meeting of Shareholders with due observance of the provisions.
11. the General Meeting of Shareholders may determine other restrictions and/or conditions.
 12. Both the President Director and other Directors have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company provided that all actions of the President Director and other Directors have been approved in the Board of Directors meeting.
 13. The Board of Directors for certain actions on its own responsibility, also has the right to appoint one or more persons as representatives or proxies by giving them the power for such certain actions as regulated in the power of attorney.
 14. The division of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined by the General Meeting of Shareholders and can be delegated to the Board of Commissioners.
 15. In relation to the main duties of the Board of Directors as referred of Association, the Board of Directors has the right to:
 - a. Establish policies in leading and managing the Company
 - b. Regulate provisions regarding the Company's employment including the determination of salaries, pensions or old-age security and other income for the Company's employees based on the applicable laws and regulations and the General Meeting of Shareholders.
 - c. Appoint and dismiss Company employees based on the company's employment regulations and applicable laws and regulations
 - d. Regulate the delegation of authority of the Board of Directors to represent the Company inside and outside the Court to one or several members of the Board of Directors who are specifically appointed for that purpose or to one or several Company employees either individually or jointly or to other persons or entities.
 - e. Carry out other actions both regarding management and ownership in accordance with the provisions regulated in this Articles of Association and those determined by the General Meeting of Shareholders based on the applicable laws and regulations.



Perundang-undangan yang berlaku.

16. Direksi berkewajiban untuk:
- Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan dan serta kegiatan usahanya
 - Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat pengesahan.
 - mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan.
 - Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan
 - Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham.
 - Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya
 - Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
 - Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

16. The Board of Directors is obligated to:
- Strive for and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with its aims and objectives and business activities
 - Prepare in a timely manner the Company's development plan, Annual Work Plan and Budget, including other plans related to the implementation of the Company's business and activities and submit them to the Board of Commissioners and Shareholders to be subsequently submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.
 - Establish and maintain the Company's books and administration in accordance with the customary practices applicable to a Company.
 - Develop an accounting system in accordance with financial accounting standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, recording, storage and supervision
 - Provide accountability and all information about the condition and operation of the Company in the form of an Annual Report to the General Meeting of Shareholders.
 - Provide periodic reports according to the manner and time in accordance with applicable regulations and other reports whenever requested by the Shareholders.
 - Prepare the organizational structure of the Company complete with details of its duties
 - Each member of the Board of Directors is personally fully responsible if the person concerned is guilty or negligent in carrying out their duties for the interests and business of the Company which causes losses to the Company unless the member of the Board of Directors concerned can prove that:
 - The losses are not due to his/her fault or negligence
 - Has conducted management in good faith and with prudence for the interests and in accordance with the aims and objectives of the Company
 - Does not have a conflict of interest, either directly or indirectly, over management actions that result in losses; and
 - Has taken action to prevent the occurrence or continuation of such losses
 - Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in this Articles of Association and those determined by the General Meeting of Shareholders based on the applicable laws and regulations.



B. Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Komisaris PT. Jamkrindo Syariah Nomor 15 tanggal 11 Oktober 2021, antara lain:

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
 - c. Untuk melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
2. Para anggota Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi surat berharga dan lainlain, serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Jika dianggap perlu Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan
4. Para anggota Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan kepada Direksi dan Direksi Wajib memberikan penjelasan.
5. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak bisa setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau mereka bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.- Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula sedangkan yang diberhentikan sementara itu diberikan kesempatan untuk hadir dan membela diri.
6. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum.

B. Commissioners

The duties and responsibilities of the Commissioners of PT. Jamkrindo Syariah Number 15 dated October 11, 2021, include:

1. The Board of Commissioners has the duty to:
 - a. Supervise the management policies of the Company carried out by the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors including regarding the Company's development plans, Annual Work Plan and Budget of the Company, implementation of the provisions of the Articles of Association and Decisions of the General Meeting of Shareholders and applicable laws and regulations.
 - b. Perform duties, authorities and responsibilities in accordance with the provisions in the Company's articles of association and Decisions of the General Meeting of Shareholders
 - c. To carry out the interests of the Company by taking into account the interests of the shareholders and be accountable to the General Meeting of Shareholders.
 - d. Examine and review the Annual Report prepared by the Board of Directors and sign the report.
2. The members of the Board of Commissioners, both jointly and individually, at any time have the right to enter buildings and premises or other places used or controlled by the Company and have the right to examine books, evidence documents, inventory of goods, examine and match the state of cash for verification purposes of securities and others, as well as to know all actions that have been carried out by the Board of Directors.
3. If deemed necessary, the Board of Commissioners has the right to request expert assistance in carrying out its duties for a limited period of time at the expense of the Company
4. The members of the Board of Commissioners have the right to request explanations about all matters stated to the Board of Directors and the Board of Directors is obliged to provide explanations.
5. The Board of Commissioners by majority vote may at any time have the right to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors, if they act contrary to this articles of association or neglect their obligations or there are urgent reasons for the Company. The temporary dismissal must be notified in writing to the person concerned along with the reasons that led to the action. Within 30 (thirty) days after the temporary dismissal, an Extraordinary General Meeting of Shareholders must be held which will decide whether the member of the Board of Directors concerned will be dismissed permanently or returned to his/her original position while the person who is temporarily dismissed is given the opportunity to be present and defend himself/herself.
6. If the Extraordinary General Meeting of Shareholders is not held within 30 (thirty) days after the temporary dismissal, then the temporary dismissal is null and void by law.



7. Jikalau karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota komisaris, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.
8. Dalam hubungannya dengan tugas baru Komisaris sebagaimana dimaksud maka Dewan Komisaris berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta perubahan dan tambahannya, laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi
 - b. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham
 - c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.
 - e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

C. Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah PT. Jamkrindo Syariah Nomor 15 tanggal 11 Oktober 2021, antara lain:

1. Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan yang dilakukan dalam bentuk:
 - a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Perseroan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
 - b. Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Perseroan Menjaga dan melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat umum Pemegang Saham
2. Dewan Pengawas Syariah berhak meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi memberikan Penjelasan
3. Jikalau karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun Dewan Pengawas Syariah, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengangkat Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

7. If for any reason the Company does not have a single member of the board of commissioners, then within 30 (thirty) days at the latest after the vacancy occurs, an Extraordinary General Meeting of Shareholders must be held to appoint a new Board of Commissioners.
8. In relation to the new duties of the Commissioners as referred to the Board of Commissioners is obliged to:
 - a. Provide opinions and suggestions to Shareholders regarding the Company's development plans, Annual Work Plan and Budget of the Company as well as amendments and additions thereto, periodic reports and other reports from the Board of Directors
 - b. Supervise the implementation of the Company's Work Plan and budget and submit the results of assessment and opinion to the General Meeting of Shareholders
 - c. Follow the development of the Company's activities, in the event that the Company shows signs of decline, immediately report to the General Meeting of Shareholders accompanied by suggestions regarding corrective measures that must be taken.
 - d. Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding any other issues deemed important for the management of the Company.
 - e. Perform other supervisory duties determined by the General Meeting of Shareholders.

C. Sharia Supervisory Board

Duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board are regulated of PT. Jamkrindo Syariah Number 15 dated October 11, 2021, including:

1. The Sharia Supervisory Board carries out supervisory duties and provides advice to the Board of Directors of the Company in the form of:
 - a. Ensuring and supervising the conformity of the Company's operational activities to the fatwas established by the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council
 - b. Assessing the Sharia aspects of operational guidelines and products issued by the Company Maintaining and implementing the interests of the Company by taking into account the interests of the shareholders and being accountable to the General Meeting of Shareholders
2. The Sharia Supervisory Board has the right to request explanations about all matters asked to the Board of Directors and the Board of Directors provides If
3. for any reason the Company does not have a single Sharia Supervisory Board member, then within 30 (thirty) days at the latest after the vacancy occurs, an Extraordinary General Meeting of Shareholders must be held to appoint a Sharia Supervisory Board based on the recommendation from the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council



3. Rangkap Jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

a) Direksi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Lembaga Penjamin melarang Anggota Direksi Lembaga Penjaminan untuk melakukan rangkap jabatan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal berikut:

- Pasal 14 ayat (1) bahwa:

"Anggota Direksi Lembaga Penjaminan dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Penjaminan atau Badan Usaha lain".

Larangan rangkap jabatan tersebut juga terdapat pada Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT. Jamkrindo Syariah Nomor: 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep- 05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) PT. Jamkrindo Syariah. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Bab berikut:

- Bab II huruf D nomor 5 bahwa:

"Direksi dilarang merangkap jabatan lain sebagai:

- Anggota Direksi atau anggota Komisaris pada BUMN atau anggota Direksi perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan,
- Jabatan struktur dan/atau fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau Daerah,
- Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan perbenturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan dan/atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Atas hal tersebut di atas, hingga saat ini tidak terdapat rangkap jabatan Direksi pada Perusahaan seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

3. Concurrent Positions of Board of Directors, Board of Commissioners, and DPS

a) Board of Directors

Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.05/2017 concerning Governance of Guarantee Institutions prohibits Members of the Board of Directors of Guarantee Institutions from holding concurrent positions. This is in accordance with the following article:

- Article 14 paragraph (1) states that:

"Members of the Board of Directors of Guarantee Institutions are prohibited from holding concurrent positions at other Guarantee Institutions or Business Entities."

The prohibition on concurrent positions is also contained in the Joint Decree of the Directors and Board of Commissioners of PT. Jamkrindo Syariah Number: 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 concerning Guidelines for Implementation of Good Corporate Governance of PT. Jamkrindo Syariah. This is in accordance with the following Chapter:

- Chapter II letter D number 5 states that:

"Directors are prohibited from holding other concurrent positions as:

- Members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners in SOEs or members of the Board of Directors of private companies or other positions related to company management,
- Structural and/or functional positions in central and/or regional government agencies/institutions,
- Other positions that may cause conflicts of interest directly or indirectly with the Company and/or that are contrary to the applicable laws and regulations".

Based on the above, currently there are no concurrent positions of Directors in the Company as shown in the table below.

Tabel 5. Rangkap Jabatan yang Dimiliki Direksi

No.	Nama/Name	Posisi Di Lembaga/ Position in the Institution	Posisi di Perusahaan Lain/Position in Other Companies	Nama Perusahaan Lain dimaksud/Name of Other Companies	Bidang Usaha/ Business Field
1	Hari Purnomo	Direktur Utama President Director	-	-	-
2	Loesdarwanto	Direktur Operasional Operations Director	-	-	-
3	Endang Sri Winarni	Direktur Keuangan, SDM & Umum Director of Finance, Human Resource, & General Affairs	-	-	-



b) Dewan Komisaris

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin melarang Anggota Dewan Komisaris untuk melakukan rangkap jabatan lebih dari tiga lembaga penjamin ataupun lembaga lain. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal berikut:

- Pasal 19 ayat (3) bahwa:

"Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain".

diatur pula yang tidak termasuk sebagai rangkap jabatan Dewan Komisaris pada Pasal berikut:

- Pasal 19 ayat (4) bahwa:

"Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:

- Anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau*
- Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin. Sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin".*

Atas hal tersebut di atas, hingga saat ini tidak terdapat rangkap jabatan Direksi pada Perusahaan seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

b) Board of Commissioners

Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions prohibits Members of the Board of Commissioners from holding concurrent positions in more than three guarantee institutions or other institutions. This is in accordance with the following article:

- Article 19 paragraph (3) states that:

"Members of the Board of Commissioners of a Guarantee Institution are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners in more than 3 (three) Guarantee Institutions or other business entities".

it is also regulated what is not included as concurrent positions of the Board of Commissioners in the following Article:

- Article 19 paragraph (4) states that:

"Not included in concurrent positions as referred to in paragraph (3) if:

- Members of the Board of Commissioners who are not Independent Commissioners carry out functional duties from shareholders of the Guarantee Institution that is a legal entity in its business group; and/or*
- Members of the Board of Commissioners hold positions in non-profit organizations or institutions, as long as the person concerned does not neglect the implementation of duties and responsibilities as a member of the Board of Commissioners of the Guarantee Institution. As long as the person concerned does not neglect the implementation of duties and responsibilities as a member of the Board of Commissioners of the Guarantee Institution"*

Based on the above, currently there are no concurrent positions of Directors in the Company as shown in the table below.

Tabel 6. Rangkap Jabatan yang Dimiliki Dewan Komisaris

No.	Nama/name	Posisi Di Lembaga/Position in the Institution	Posisi di Perusahaan Lain/Position in Other Companies	Nama Perusahaan Lain dimaksud/Name of Other Companies	Bidang Usaha/Business Field
1	Aribowo	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-
2	Edy Utomo	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-
3	Alie Basya Syamsudin	Komisaris Commissioner	-	-	-

c) Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, menyatakan bahwa:

"Anggota DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS yang sama"

c) Sharia Supervisory Board

Based on Article 35 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, it states that:

"Members of the Sharia Supervisory Board are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners in the same Sharia Guarantee Company, Sharia Reinsurance Company, and Guarantee Company that has a Sharia Business Unit"



serta diatur pula pada Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Anggota DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya”.

Sebagaimana profil Dewan Pengawas Syariah tidak terdapat rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan sebagaimana tabel berikut.

and it is also regulated in Article 35 paragraph (2) which states that:

“Members of the Sharia Supervisory Board are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or members of the Sharia Supervisory Board in more than 4 (four) other sharia financial institutions”.

As per the profile of the Sharia Supervisory Board, there are no concurrent positions of the Sharia Supervisory Board in the Company as shown in the following table.

Tabel 7. Rangkap Jabatan yang Dimiliki Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama/Name	Posisi Di Lembaga/ Position in the Institution	Posisi di Perusahaan Lain/Position in Other Companies	Nama Perusahaan Lain dimaksud/Name of Other Companies	Bidang Usaha/ Business Field
1	Abdul Aziem	Anggota DPS DPS Member	-	-	-

4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Perusahaan selama 2022-2023 adalah sebagai berikut:

4. Training for the Board of Directors, Board of

Training related to competency improvement of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board in achieving the Company's vision and mission during 2022-2023 is as follows:

a. Direksi

Tabel 8. Pelatihan yang Dilakukan Direksi Tahun 2022-2023.

No.	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara Tempat
1	Hari Purnomo	• Certified Risk Governance Professional (CRGP) • Sertifikat Kompetensi –Manajemen Risiko • Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Direktur Bisnis • Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Direktur Investasi • Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Executive Leader • Sertifikat Kompetensi- Direktur Bisnis • Sertifikat Kompetensi- Direktur Investasi • Sertifikat Webinar – Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah dalam Pengembangan Umum. • Sertifikasi Certified Risk Executive Leader • Sertifikat- Konferensi Nasional Professional Manajemen Risiko IX	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	RAPINDO BNSP Bintang Cahaya Gempita Bintang Cahaya Gempita BPKP BNSP BNSP BCG BPKP LSPMR
2	Loesdarwanto	• Sertifikat- Pemantapan Nilai- Nilai Kebangsaan Bagi SMANDEL Jakarta Business Network (SBN), Asosiasi CEO Mastermind Indonesia (ACMI), dan Indonesia Financial Group (IFG) 2023 • Sertifikat Kompetensi- Direktur Bisnis • Sertifikat – Program Webinar Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung program Pemerintah Dalam Pengembangan Umum. • Sertifikat – Program Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Direktur Bisnis	2023 2023 2023 2023	Lembaga Ketahanan Nasional RI BNSP BCG BCG
3	Endang Sri Winarni	• Sertifikat – Program Webinar Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung program Pemerintah dalam Pengembangan Umum • Sertifikat – The Role of Governance Risk and Compliance in Supporting Financial Sector Performance • Sertifikat – Outlook Industri Jasa Keuangan di Tahun 2023 • Sertifikat- Pemantapan Nilai- Nilai Kebangsaan Bagi SMANDEL Jakarta Business Network (SBN), Asosiasi CEO Mastermind Indonesia (ACMI), dan Indonesia Financial Group (IFG) 2023 • Sertifikat Kompetensi – Direktur Investasi • Leadership Excellence Acceleration and Development Program (LEAD-1): Personal Leadership Workshop Journey & Pelatihan Wawasan Kebangsaan dan PemantapanNilai • Webinar Risk & Governance Summit 2023 Sustainable Governance: Digital Transformation as a Game Changer Ethical Culture as a Value Keeper	2023 2023 2023 2023 2023 2023	BCG OJK OJK Lembaga Ketahanan Nasional RI BNSN Indonesia Financial Group (IFG) OJK



No.	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara Tempat
3	Endang Sri Winarni	• Classical Session Program Jamkrindo Leaders Academy (JLA-1) Meet The Expert	2023	PT Jamkrindo
		• Pelatihan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA)	2023	YPIA
		• Webinar "Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM"	2023	Bintang Cahaya Gempita
		• Pelatihan Pajak atas Natura dan/atau Kenikmatan	2023	PT Jamkrindo
		• Leadership Series "Meningkatkan Kinerja Operasional BUMN Pasca Transformasi"	2023	PwC Indonesia
		• Webinar "Memperkuat Ketahanan Nasional di Industri Jasa Keuangan"	2023	OJK
		• Webinar: Strategi Meningkatkan Nilai Jual Produk UMKM dengan Sertifikasi Halal	2023	KADIN
		• Seminar: Kesiapan Menghadapi Tantangan dalam Transformasi BUMN"	2023	PwC
		• Webinar: The Role of Governance, Risk, and Compliance (GRC) in Supporting Financial Sector Performance	2023	OJK
		• Sharing Session Dashboard Keuangan	2023	PT Jamkrindo
		• Webinar "Outlook Industri Jasa Keuangan di Tahun 2023"	2023	OJK

b. Dewan Komisaris

Tabel 9. Pelatihan yang Dilakukan Dewan Komisaris Tahun 2022-2023.

No.	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara Tempat
1	Aribowo	• Sertifikat – Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Executive Leader (CREL)	2023	BPKP
2	Edy Utomo	• Sertifikat – Program Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Komisaris	2023	BCG
		• Sertifikat – Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM	2023	BCG
		• Seminar Risk & Governance Summit 2023	2023	OJK
		• International Conference Shaping the Foundations for Sustainable & Resilient Insurance and Pensiun Fund.	2023	IFG
3	Alie Basya Syamsudin	• Sertifikat – Program Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Komisaris	2023	BCG
		• Sertifikat – Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah Dalam	2023	BCG
		• Seminar Risk & Governance Summit 2023	2023	OJK
		• International Conference Shaping the Foundations for Sustainable & Resilient Insurance and Pensiun Fund	2023	IFG

c. Dewan Pengawas Syariah

Tabel 10. Pelatihan yang Dilakukan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022-2023.

No.	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara Tempat
1	Abdul Aziem	• Workshop Ijtima Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah IX, "Meningkatkan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah di Era Disrupsi Ekonomi".	2023	DSN-MUI
		• Workshop Pra Ijtima Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah VIII Bidang Peransuransian, Dana Pensiun, dan Penjaminan Syariah, DSN-MUI.	2023	DSN-MUI
		• Workshop Ijtima Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah XVIII, "Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional".	2022	DSN-MUI
		• Webinar Sosialisasi Fatwa DSN-MUI Terbaru Tahun 2022	2022	DSN-MUI
		• 3rd International Fiqh Conference on Contemporary Transaction in Digital Finance from Islamic Jurisprudence Perspective	2022	BI, Kemenag, ISEF, DSN-MUI, & MES
		• Webinar Strategi Memenangkan Perkara dalam Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Keadilan.	2022	Iqtishad Consulting



5. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

a. Dewan Komisaris

Pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 meliputi:

1. Aspek Pengawasan dan Pengarahan Pengawasan dan Pengarahan oleh Dewan Komisaris dilakukan dalam kegiatankegiatan:
 - a. Rapat Internal Dewan Komisaris Telah dilakukan Internal Dewan Komisaris sebanyak 12 kali pada tabel 1.11.
 - b. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, Telah dilakukan Rapat Bulanan antara Dewan Komisars dan Direksi sebanyak 12 kali.
 - c. Rapat Pembahasan Kinerja Perusahaan, Telah dilakukan rapat pembahasan kinerja perusahaan pada Rapat Bulanan sebanyak 12 kali.
 - d. Pemberian Saran dan Masukan Kepada Direksi Dalam Pengurusan Perusahaan, Telah dilakukan dalam pemberian saran dan masukan kepada Direksi dalam Pengurusan Perusahaan dalam Rapat Bulanan sebanyak 12 kali
 - e. Evaluasi Kinerja Audit Yang Dilakukan Oleh Auditor Eksternal. Evaluasi kinerja audit yang dilakukan oleh auditor eksternal disampaikan melalui Surat Jamkrindo Syariah Nomor 2594/P/1/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023.
 - f. Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal. Telah dilakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal melalui Rapat Komite Audit sebanyak 14 kali.
2. Aspek Pelaporan Kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun Buku 2023.
 - b. Menyusun Laporan Tugas Pengawasan Tahun Buku 2023.
 - c. Melakukan Pengesahan RKAP Perusahaan dan pengusulan Auditor Eksternal yang ditetapkan oleh Holding untuk Penugasan Audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.

b. Dewan Pengawas Syariah

Risalah Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2023 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberian opini dan pengawasan
Dalam tahun 2023 Dewan Pengawas Syariah memberikan saran dan pengawasan terhadap beberapa hal dan tertuang dalam risalah rapat dewan pengawas syariah. Adapun saran dan pengawasan yang dilakukan diantaranya :
 - a. Usulan mitigasi risiko penjaminan syariah melalui Perusahaan Reasuransi Non-Syariah yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2023.
 - b. Penjaminan Syariah untuk Proyek Pembangunan

5. Implementation of Activities and Recommendations of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board

a. Board of Commissioners

Implementation of the Board of Commissioners' activities for Fiscal Year 2023 includes:

1. Supervision and Direction Aspects Supervision and Direction by the Board of Commissioners are carried out in the following activities:
 - a. Internal Board of Commissioners Meeting Internal Board of Commissioners meetings have been conducted 12 times as shown in table 1.11.
 - b. Board of Commissioners and Board of Directors Meeting, Monthly meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors have been conducted 12 times.
 - c. Company Performance Discussion Meeting, Company performance discussion meetings have been conducted in Monthly Meetings 12 times.
 - d. Provision of Advice and Input to the Board of Directors in Company Management, Provision of advice and input to the Board of Directors in Company Management has been conducted in Monthly Meetings 12 times
 - e. Evaluation of Audit Performance Conducted by External Auditors. Evaluation of audit performance conducted by external auditors was submitted through Jamkrindo Syariah Letter Number 2594/P/1/VII/2023 dated July 25, 2023.
 - f. Evaluation of the Internal Control System. Evaluation of the internal control system has been conducted through Audit Committee Meetings 14 times.
2. Reporting Aspect Reporting activities carried out by the Board of Commissioners are as follows:
 - a. Prepare the Board of Commissioners' Work Plan and Budget for the 2023 Fiscal Year.
 - b. Prepare the Supervisory Report for the 2023 Fiscal Year.
 - c. Approve the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and propose the External Auditor appointed by the Holding Company for the Audit Assignment of the 2023 Financial Statements.

b. Sharia Supervisory Board

The Minutes of the Sharia Supervisory Board during 2023 carried out the following activities:

1. Provision of opinions and supervision
In 2023, the Sharia Supervisory Board provided advice and supervision on several matters and these are contained in the minutes of the sharia supervisory board meetings. The advice and supervision carried out include:
 - a. Proposal for sharia guarantee risk mitigation through Non-Sharia Reinsurance Companies conducted on January 17, 2023.
 - b. Sharia Guarantee for House of Worship Construction



Rumah Ibadah yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2023.

- c. Co-Guarantee dengan PT. Jamkrindo yang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2023.
- d. Co-Guarantee dengan PT. Jamkrindo yang dilakukan pada tanggal 6 Desember 2023.

2. Peningkatan kompetensi Dewan Pengawas Syariah Pada tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah mengikuti Webinar Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2023 dengan tema "Meningkatkan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah di Era Disrupsi Ekonomi" yang diselenggarakan oleh DSN – MUI pada tanggal 14 November 2023 di Jakarta.

3. Uji Petik Dewan Pengawas Syariah Uji Petik Dewan Pengawas Syariah pada Tahun 2023 dilakukan sebanyak 1 kali pada Tanggal 09 s.d 10 Maret 2023 di Kantor Cabang Medan terhadap Penjaminan Kontra Bank Garansi PT. Bank Aceh.

Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah lebih detail terdapat pada tabel 1.13.

6. Pelaksanaan Tugas Komisaris Independen

Merujuk pada Pasal 26 jo. 27 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin disebutkan:

- Pasal 26 bahwa:

"Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarkan kepentingan Terjamin, Penerima Jaminan dan Pemangku Kepentingan lainnya".

- Pasal 27 ayat (1) bahwa:

"Komisaris Independen wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:

- a. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan; dan/atau
- b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan usaha Lembaga Penjamin".

Selama tahun 2023 tidak terdapat kejadian terkait dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atau keadaan yang dapat membahayakan usaha lembaga penjamin. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komisaris Independen Perusahaan berperan dalam memberikan rekomendasi terhadap kepengurusan Perusahaan melalui Rapat Dewan Komisaris.

Projects conducted on May 23, 2023.

- c. Co-Guarantee with PT. Jamkrindo conducted on June 7, 2023.
- d. Co-Guarantee with PT. Jamkrindo conducted on December 6, 2023.

2. Competency Enhancement of the Sharia Supervisory Board In 2023, the Sharia Supervisory Board participated in the Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Webinar for Sharia Supervisory Boards (DPS) 2023 with the theme "Enhancing Collaboration for Sharia Economic and Financial Development in the Era of Economic Disruption" organized by DSN-MUI on November 14, 2023, in Jakarta.

3. Sharia Supervisory Board Spot Checks The Sharia Supervisory Board Spot Check in 2023 was conducted once from March 9 to 10, 2023, at the Medan Branch Office for the Counter Guarantee of Bank Guarantees from PT. Bank Aceh.

More detailed implementation of Activities and Recommendations of the Sharia Supervisory Board can be found in table 1.13

6. Implementation of Independent Commissioner Duties

Referring to Article 26 in conjunction with Article 27 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, it is stated:

- Article 26 that:

"The Independent Commissioner has the main duty of carrying out supervisory functions to voice the interests of the Guaranteed Party, Guarantee Recipient, and other Stakeholders."

- Article 27 paragraph (1) that:

"The Independent Commissioner must report to the Financial Services Authority no later than 10 (ten) calendar days from the discovery of:

- a. a. Violations of legislative provisions in the guarantee sector; and/or
- b. b. Circumstances or estimated circumstances that could endanger the business of the Guarantee Institution."

Throughout 2023, there were no incidents related to violations of Legislative Regulations and/or circumstances that could endanger the business of the guarantee institution. In carrying out its duties and obligations, the Company's Independent Commissioner plays a role in providing recommendations regarding the Company's management through Board of Commissioners Meetings.



7. Frekuensi Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat DPS yang Diselenggarakan Selama Tahun 2023

a. Rapat Direksi

Frekuensi rapat Direksi Perusahaan diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin pada pasal berikut:

- Pasal 17 Ayat (1) bahwa:

"Direksi Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan",

- Pasal 17 Ayat (2) bahwa:

"Direksi Lembaga Penjamin wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun".

Adapun selama tahun 2023 Direksi Perusahaan telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

7. Frequency of Board of Directors Meetings, Board of Commissioners Meetings, and Sharia Supervisory Board Meetings Held During 2023

a. Board of Directors Meetings

The frequency of the Company's Board of Directors meetings is regulated based on the Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions in the following articles:

- Article 17 Paragraph (1) that:

"The Board of Directors of the Guarantee Institution must hold Board of Directors meetings periodically at least 1 (one) time in 1 (one) month."

- Article 17 Paragraph (2) that:

"The Board of Directors of the Guarantee Institution must attend Board of Directors meetings at least 50% (fifty percent) of the total Board of Directors meetings in a period of 1 (one) year."

During 2023, the Company's Board of Directors has held meetings as follows:

Tabel 11. Risalah Rapat Direksi Perusahaan Tahun 2023
Table 11. Company Board of Directors Meeting Schedule in 2023

No.	Periode Rapat/ Meeting Periode	Tanggal Pelaksanaan/ Implementation Date	Kehadiran/Attendance	Agenda Rapat/Meeting Agenda
1	Januari	16 Januari 2023	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang Sri Winarni	• Pembahasan Kinerja Bulan Desember 2022 • Pembahasan terkait Perhitungan CKPN atas piutang Re-Asuransi.
2	Februari	07 Februari 2023	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang Sri Winarni	• Pembahasan Kinerja Bulan Januari 2023 • Pembahasan Risiko Likuiditas.
3	Maret	13 Maret 2023	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang Sri Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan Februari 2023 • Pembahasan Permintaan Data Oleh KAP PwC
4	April	11 April 2023	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang Sri Winarni	• Pembahasan Kinerja Periode Bulan Maret 2023 • Pembahasan Lanjutan Temuan Audit PwC
5	Mei	19 Mei 2023	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang Sri Winarni	• Pembahasan Kinerja Bulan April 2023 • Pembahasan Penjaminan Suretyship Dan Permasalahannya.
6	Juni	14 Juni 2023	• Gatot Suprabowo • Achmad Sonhadji • Endang Sri Winarni	• Pembahasan Kinerja Bulan Mei 2023 • Pembahasan Persiapan Agenda RUPS.
7	Juli	14 Juli 2023	• Hari Purnomo • Loesdarwanto • Endang Sri Winarni	• Pembahasan Kinerja Bulan Juni 2023 • Pembahasan Penegakan Atas Semua Keputusan Pada Agenda RUPS
8	Agustus	16 Agustus 2023	• Hari Purnomo • Loesdarwanto • Endang Sri Winarni	• Pembahasan Kinerja Bulan Juli 2023 • Pembahasan terkait Transformasi Perusahaan dengan membawa Corporate Culture P.E.O.P.L.E dan Rencana Launching Logo di Bulan September 2023
9	September	13 September 2023	• Hari Purnomo • Loesdarwanto • Endang Sri Winarni	• Pembahasan Kinerja Bulan Agustus 2023 • Pengadaan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2023 dan rencanapengerjaan Proses Fit and Proper Test Direksi dan Dewan Komisaris
10	Oktober	18 Oktober 2023	• Hari Purnomo • Loesdarwanto • Endang Sri Winarni	• Pembahasan Kinerja Bulan September 2023 • Pembahasan terkait Kinerja Penjaminan, Kondisi Bisnis Penjaminan, KPI Perusahaan, Tingkat Kesehatan Perusahaan, dan untuk memastikan apakah RKAP 2024 telah ditelaah oleh Dewan Komisaris.



No.	Periode Rapat/ Meeting Periode	Tanggal Pelaksanaan/ Implementation Date	Kehadiran/Attendance	Agenda Rapat/Meeting Agenda
11	November	14 November 2023	• Hari Purnomo • Loesdarwanto • Endang Sri Winarni	• Pembahasan Kinerja Bulan Oktober 2023 • Pembahasan lanjutan terkait Pencapaian KPI di Bulan Oktober 2023, Pemantauan kegiatan audit PwC dan Meminta kepada Divisi SDM dan Umum untuk melakukan sosialisasi Struktur Organisasi dan Job Description yang telah ditetapkan.
12	Desember	15 Desember 2023	• Hari Purnomo • Loesdarwanto • Endang Sri Winarni	• Pembahasan Kinerja Bulan November 2023 • Pembahasan penyampaian surat DSN MUI perihal rekomendasi usulan formasi Anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris.

Frekuensi rapat Direksi dan kehadiran anggota Direksi sebelumnya adalah sebagai berikut:

The frequency of Board of Directors meetings and the attendance of previous Board of Directors members are as follows:

Tabel 12. Frekuensi Rapat Direksi Tahun 2023
Table 12. Board of Directors Meeting Frequency in 2023

No.	Nama/Name	Jumlah Kehadiran / Attendance Count		(%) Kehadiran/(%) Attendance
		Fisik/Physical	Sarana Media/ Media	
1	Gatot Suprabowo	6	-	100%
2	Achmad Sonhadji	6	-	100%
3	Endang Sri Winarni	12	-	100%
4	Hari Purnomo	6	-	100%
5	Loesdarwanto	6	-	100%

b. Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin yang berbunyi :

- Pasal 31 Ayat (1)

"Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan."

- Pasal 31 Ayat (2)

"Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun."

Ketentuan internal Perusahaan diatur pada Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT. Jamkrindo Syariah Nomor: 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DKJamSyar/VIII/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) PT. Jamkrindo Syariah, khususnya pada Bab tentang Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

b. Board of Commissioners Meetings

Based on Article 31 of the Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, which states:

- Article 31 Paragraph (1)

"The Board of Commissioners of a Guarantee Institution must hold Board of Commissioners meetings at least once every 3 (three) months."

- Article 31 Paragraph (2)

"Members of the Board of Commissioners of a Guarantee Institution must attend at least 75% (seventy-five percent) of the total Board of Commissioners meetings within a period of 1 (one) year."

The Company's internal provisions are regulated in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT. Jamkrindo Syariah Number: 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DKJamSyar/VIII/2015 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance at PT. Jamkrindo Syariah, specifically in the Chapter on the Implementation of Board of Commissioners Meetings, which is regulated as follows:



- Bab III Huruf A Nomor 1 (a) bahwa:

"Dewan Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi."

- Chapter III Letter A Number 1 (a) that:

"The Board of Commissioners holds meetings at least 1 (one) time every month and in such meetings, the Board of Commissioners may invite the Board of Directors."

Adapun selama tahun 2023 Dewan Komisaris Perusahaan telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

Adapun selama tahun 2023 Dewan Komisaris Perusahaan telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

Tabel 13. Risalah Rapat Dewan Komisaris Perusahaan Tahun 2023
Table 13. Minutes of Company's Board of Commissioners Meetings in 2023

No.	Periode Rapat/ Meeting Periode	Tanggal Pelaksanaan/ Implementation Date	Kehadiran/Attendance	Agenda Rapat/Meeting Agenda
1	Januari	17 Januari 2023	Dewan Komisaris • Aribowo • Wildan • Muh Syakir Sula Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	- Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah s/d Desember 2022. - Pembahasan mitigasi pengelolaan risiko melalui reasuransi, kondisi hubungan dengan BSI, dan prospek penjaminan Tahun 2023
2	Februari	23 Februari 2023	Dewan Komisaris • Aribowo • Wildan • Muh Syakir Sula Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	- Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Januari 2023. - Pembahasan hubungan Jamkrindo Syariah dengan BSI, penerapan manajemen risiko dalam proses bisnis, dan update progress audit laporan keuangan Tahun 2022.
3	Maret	28 Maret 2023	Dewan Komisaris • Aribowo • Wildan • Muh Syakir Sula Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	- Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Februari 2023. - Pembahasan hubungan Jamkrindo Syariah dengan BSI, pembahasan evaluasi atas bisnis dan proses bisnis yang telah dan akan diimplementasikan manajemen risiko.
4	April	17 April 2023	Dewan Komisaris • Aribowo • Wildan • Muh Syakir Sula Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	- Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Maret 2023. - Pembahasan perkembangan hubungan dengan BSI dan pembahasan tindak lanjut dari audit laporan keuangan Jamkrindo Syariah Tahun 2022
5	Mei	30 Mei 2023	Dewan Komisaris • Aribowo • Wildan • Muh Syakir Sula Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	- Monitoring Dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan April 2023. - Pembahasan perkembangan hubungan dengan BSI dan penjelasan tentang penerapan
6	Juni	27 Juni 2023	Dewan Komisaris • Aribowo • Wildan • Muh Syakir Sula Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	- Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Mei 2023. - Pembahasan perkembangan hubungan dengan BSI dan Reindo Syariah
7	Juli	31 Juli 2023	Dewan Komisaris • Aribowo • Wildan • Muh Syakir Sula Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	- Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Juni 2023 - Pembahasan update peraturan dan ketentuan pengawasan perusahaan penjaminan, dan pembahasan transformasi Perusahaan



No.	Periode Rapat/ Meeting Period	Tanggal Pelaksanaan/ Implementation Date	Kehadiran/Attendance	Agenda Rapat/Meeting Agenda
8	Agustus	31 Agustus 2023	Dewan Komisaris •Aribowo • Wildan • Muh Syakir Sula Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	• Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Juli 2023 • Pembahasan Penerapan GCG
9	September	25 September 2023	Dewan Komisaris •Aribowo • Wildan • Muh Syakir Sula Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	• Monitoring Dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Agustus 2023 • Pembahasan Transformasi Jamkrindo Syariah
10	Oktober	31 Oktober 2023	Dewan Komisaris •Aribowo • Wildan • Muh Syakir Sula Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	• Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan September 2023 • Update hubungan bisnis dengan BSI dan penyesuaian peraturan dan kebijakan dengan induk.
11	November	29 November 2023	Dewan Komisaris •Aribowo • Wildan • Muh Syakir Sula Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	• Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Oktober 2023 • Pembahasan berkenaan dengan kondisi penjaminan yang terus menurun untuk dapat dilakukan evaluasi segera.
12	Desember	22 Desember 2023	Dewan Komisaris •Aribowo • Wildan • Muh Syakir Sula Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	• Monitoring Dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan November 2023 • Pembahasan perkembangan kinerja bisnis dan upaya kolaborasi transformasi perusahaan.

Frekuensi rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The frequency of Board of Commissioners meetings is as follows:

Tabel 14. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Tahun 2023
Table 14. Frequency of Board of Commissioners Meetings in 2023

No.	Nama/Name	Jumlah Kehadiran / Attendance Count		(%) Kehadiran/(%) Attendance
		Fisik/Physical	Sarana Media/ Media	
1	Aribowo	4	8	100%
2	Wildan	1	5	100%
3	M. Syakir Sula	1	5	100%
4	Edy Utomo	3	3	100%
5	Alie Basya Syamsudin	3	3	100%
6	Diana Mayawati	4	8	100%
7	Siti Maesaroh	4	8	100%



c. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin pada Pasal berikut:

- Pasal 40 Ayat (1) bahwa :
"DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun".
- Pasal 40 Ayat (2) bahwa :
"Hasil rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik."

Selama tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

c. Sharia Supervisory Board Meetings

Based on Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions in the following Articles:

- Article 40 Paragraph (1) that:
"The Sharia Supervisory Board must hold periodic meetings at least 4 (four) times in 1 (one) year."
- Article 40 Paragraph (2) that:
"The results of the Sharia Supervisory Board meetings as referred to in paragraph (1) must be documented in the minutes of the Sharia Supervisory Board meetings and properly documented."

During 2023, the Sharia Supervisory Board has held meetings as follows:

Tabel 15. Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Tahun 2023
Table 15. Minutes of Company's Sharia Supervisory Board Meetings in 2023

No.	Tanggal	Tema	Peserta
1	17 Januari 2023	Pembahasan Usulan Mitigasi Risiko Penjaminan Syariah melalui Perusahaan Reasuransi Non-Syariah	1. Abdul Aziem (DPS) 2. Gatot Suprabowo (Dirut) 3. Achmad Sonhadji (Dirops) 4. Maria Ulfah (Sekper) 5. Iwan Hermawan (Kadiv Klaim dan Subrogasi) 6. Edy Susanto (Kabag Reas, Portfolio dan Co-Branding) 7. Adi Pranawira (Kabag Sekper)
2	23 Mei 2023	Pembahasan terkait PT. Jamkrindo Syariah untuk Proyek Pembangunan Rumah Ibadah	1. Abdul Aziem (DPS) 2. Achmad Sonhadji (Dirops) 3. Maria Ulfah (Sekper) 4. Bambang Hendraman (Kacab KCU)
3	07 Juni 2023	Pembahasan terkait Co-Guarantee dengan PT. Jamkrindo	1. Abdul Aziem (DPS) 2. Achmad Sonhadji (Dirops) 3. Maria Ulfah (Sekper) 4. Bambang Hendraman (Kabag KCU)
4	06 Desember 2023	Pembahasan terkait Co-Guarantee dengan PT. Jamkrindo (2)	1. Abdul Aziem (DPS) 2. Bambang Hendraman (Kacab KCU) 3. Parvesh Putren (Kabag. Teknik Penjaminan) 4. Deni Yanuar Rakhman (Plh. Sekper)

Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah dan kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

The frequency of Sharia Supervisory Board meetings and attendance of Sharia Supervisory Board members are as follows:

Tabel 16. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023
Table 16. Frequency of Sharia Supervisory Board Meetings in 2023

No.	Nama/Name	Jumlah Kehadiran / Attendance Count		(% Kehadiran/ (%) Attendance
		Fisik/Physical	Sarana Media/Media	
1	Abdul Aziem	4	-	100%



B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT

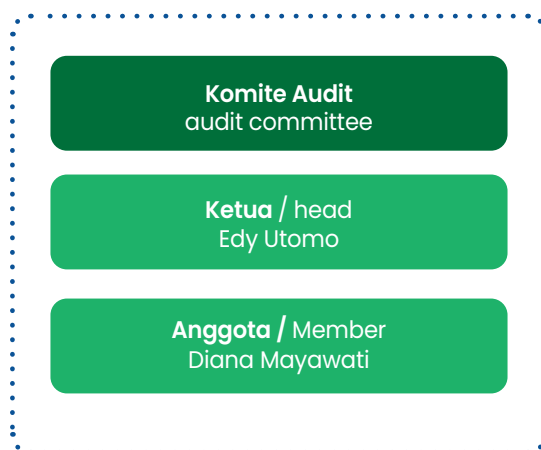
Perusahaan memiliki Komite Audit yang terdiri atas :

- Ketua Komite Audit yang sekaligus merupakan Komisaris Independen.
- Anggota Komite Audit.

Saat ini Ketua Komite Audit dipimpin oleh Edy Utomo selaku Komisaris Independen. Sementara itu, untuk anggota komite audit dijabat oleh Diana Mayawati melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-02/DK-JAMSYAR/IX/2021 tanggal 06 September 2021. Ketua dan anggota Komite Audit Perusahaan sudah memiliki keahlian yang memadai di Bidang Penjaminan dan Keuangan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai Pasal 29 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)



Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan berunyi:

"Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan."

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit PT. Jamkrindo Syariah berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT. Jamkrindo Syariah Nomor KEP-04/DK-JAMSYAR/II/2020 tentang Penetapan Komite Audit PT. Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh Perusahaan kepada public dan/atau Otoritas Jasa Keuangan
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan

B. COMPLETENESS AND IMPLEMENTATION OF AUDIT COMMITTEE DUTIES

The Company has an Audit Committee consisting of:

- Chairman of the Audit Committee who is also an Independent Commissioner.
- Members of the Audit Committee.

Currently, the Audit Committee Chair is led by Edy Utomo as the Independent Commissioner. Meanwhile, the audit committee member position is held by Diana Mayawati through the Board of Commissioners Decree Number KEP-02/DK-JAMSYAR/IX/2021 dated September 6, 2021. The Chairman and members of the Company's Audit Committee already have adequate expertise in the Guarantee and Finance Fields.

2. Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The duties and responsibilities of the Audit Committee

according to Article 29 paragraph (3) of the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions states:

"The Audit Committee as referred to in paragraph (1) has the duty to assist the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the internal control system and the implementation of the duties of internal auditors and external auditors by monitoring and evaluating the planning and implementation of audits in order to assess the adequacy of internal controls including the financial reporting process."

The duties and responsibilities of the Audit Committee of PT. Jamkrindo Syariah based on the Decree of the Board of Commissioners of PT. Jamkrindo Syariah Number KEP-04/DK-JAMSYAR/II/2020 concerning the Establishment of the Audit Committee of PT. Jamkrindo Syariah are as follows:

1. Review financial information issued by the Company to the public and/or Financial Services Authority
2. Review compliance with laws and regulations related to Company activities
3. Provide independent opinion in the event of disagreements between management and accountants regarding the services provided
4. Provide recommendations to the Board of



atas jasa yang diberikannya

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan persyaratan minimal mempertimbangkan aspek independen, ruang lingkup penugasan, imbalan jasa audit dan keahlian serta pengalaman.
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit yang meliputi:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar yang berlaku
 - b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan
 - c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik, dan
 - d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan AP dan/atau KAP

Evaluasi disampaikan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir

1. Melakukan penelaahan atas pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal
2. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan
3. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan
4. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan

3. Frekuensi rapat komite audit

Selama tahun 2023, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat dengan rincian :

Commissioners regarding the appointment of Public Accountants and/or Public Accounting Firms with minimum requirements considering aspects of independence, scope of assignment, audit service fees, and expertise and experience.

5. Evaluate the implementation of audit services which includes:
 - a. Conformity of audit implementation by AP and/or KAP with applicable standards
 - b. Adequacy of field work time
 - c. Assessment of the scope of services provided and adequacy of sampling tests, and
 - d. Improvement recommendations provided by AP and/or KAP

Evaluation is submitted no later than 6 (six) months after the end of the financial year

1. Review examinations by Internal Auditors and supervise the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of Internal Auditors
2. Review complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes
3. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in the Company
4. Maintain the confidentiality of Company documents, data and information

3. Frequency of audit committee meetings

During 2023, the Audit Committee has held meetings with the following details:

Tabel 17. Frekuensi Rapat Komite Audit
Table 17. Audit Committee Meeting Frequency

No.	Periode Rapat/ Meeting Period	Tanggal Pelaksanaan/ Implementation Date	Kehadiran/Attendance	Agenda Rapat/Meeting Agenda
1	Februari February	24 Februari 2023 February 24, 2023	Komisaris Independen • Wildan Anggota Komite Audit • Diana Mayawati	• Pembahasan Laporan Keuangan Jamkrindo Syariah Posisi 31 Januari 2023 • Pembahasan Laba Rugi Jamkrindo Syariah 31 Januari 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja Penjaminan s.d. 31 Januari 2023 • Pembahasan Rasio Keuangan
2	Maret March	2 Maret 2023 March 2, 2023	Komisaris Independen • Wildan Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi • Diana Mayawati Direktur Keuangan, SDM & umum • Endang Sri Winarni Kadiv SPI • Juli Sumartana Kadiv Keuangan dan investasi • Arry Risaf Kabag SPI • Ibrahim Nur Setiawan • Sriyanto Kabag Keuangan • Citra Ayunanda Staff SPI • Nabila • Qonitasha • Garnadi	• Pembahasan Perkembangan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 • Pembahasan Audit Badan Pemeriksaan Keuangan Tahun 2023 • Pembahasan Rencana Kegiatan Pengawasan Audit Internal Untuk Tahun 2023. • Pembahasan Sinkronisasi Peraturan Holding



No.	Periode Rapat/ Meeting Periode	Tanggal Pelaksanaan/ Implementation Date	Kehadiran/Attendance	Agenda Rapat/Meeting Agenda
3	Maret	28 Maret 2023	Komisaris Independen • Wildan Anggota Komite Audit • Diana Mayawati	• Pembahasan Laporan Keuangan Jamkrindo Syariah • Pembahasan Laba Rugi Jamkrindo Syariah Februari 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja Penjaminan s.d. 28 Februari 2023 • Pembahasan Rasio Keuangan Jamkrindo Syariah
4	April	17 April 2023	Komisaris Independen • Wildan Anggota Komite Audit • Diana Mayawati	• Pembahasan Laporan Keuangan Jamkrindo Syariah • Pembahasan Laba Rugi Jamkrindo Syariah Maret 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja Penjaminan s.d. 31 Maret 2023 • Pembahasan Rasio Keuangan Jamkrindo Syariah
5	Mei	30 Mei 2023	Komisaris Independen • Wildan Anggota Komite Audit • Diana Mayawati	• Pembahasan Laporan Keuangan Jamkrindo Syariah • Pembahasan Laba Rugi Jamkrindo Syariah April 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja Penjaminan s.d. 30 April 2023 • Pembahasan Rasio Keuangan Jamkrindo Syariah
6	Juni	21 Juni 2023	Komisaris Independen • Wildan Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Anggota Komite Audit • Diana Mayawati Kadiv SPI • Juli Sumartana Kabag SPI • Ibrahim Nur Setiawan Staff SPI • Dita Fatimah Medina	• Pembahasan Jumlah Sumber Daya Manusia Spi Per Mei 2023 • Pembahasan Rencana Pengawasan Untuk Tahun 2023 • Pembahasan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 Oleh KAP PwC • Pembahasan Audit BPKRI Tahun 2023
		27 Juni 2023	Komisaris Independen • Wildan Anggota Komite Audit • Diana Mayawati	• Pembahasan Laporan Keuangan Jamkrindo Syariah • Pembahasan Laba Rugi Jamkrindo Syariah Mei 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja Penjaminan s.d. 31 Mei 2023 • Pembahasan Rasio Keuangan Jamkrindo Syariah
7	Juli	31 Juli 2023	Komisaris Utama • Aribowo Komisaris Independen • Edy Utomo Anggota Komite Audit • Diana Mayawati	• Pembahasan Laporan Keuangan Jamkrindo Syariah • Pembahasan Laba Rugi Jamkrindo Syariah Juni 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja Penjaminan s.d. 30 Juni 2023 • Pembahasan Rasio Keuangan Jamkrindo Syariah
8	Agustus	31 Agustus 2023	Komisaris Utama • Aribowo Komisaris Independen • Edy Utomo Anggota Komite Audit • Diana Mayawati	• Pembahasan Laporan Keuangan Jamkrindo Syariah • Pembahasan Laba Rugi Jamkrindo Syariah Juli 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja Penjaminan s.d. 31 Juli 2023 • Pembahasan Rasio Keuangan Jamkrindo Syariah
9	September	29 September 2023	Komisaris Utama • Aribowo Komisaris Independen • Edy Utomo Anggota Komite Audit • Diana Mayawati	• Pembahasan Laporan Keuangan Jamkrindo Syariah • Pembahasan Laba Rugi Jamkrindo Syariah Agustus 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja Penjaminan s.d. 31 Agustus 2023 • Pembahasan Rasio Keuangan Jamkrindo Syariah



No.	Periode Rapat/ Meeting Periode	Tanggal Pelaksanaan/ Implementation Date	Kehadiran/Attendance	Agenda Rapat/Meeting Agenda
10	Oktober	31 Oktober 2023	Komisaris Utama • Aribowo Komisaris Independen • Edy Utomo Anggota Komite Audit • Diana Mayawati	- Pembahasan Laporan Keuangan Jamkrindo Syariah - Pembahasan Laba Rugi Jamkrindo Syariah September 2023 - Pembahasan Laporan Kinerja Penjaminan s.d. 31 September 2023 - Pembahasan Rasio Keuangan Jamkrindo Syariah
11	November	8 November 2023	Komisaris Independen • Edy Utomo Anggota Komite Audit • Diana Mayawati Kabag SPI • Ibrahim Nur Setiawan	- Pembahasan Rencana Audit Satuan Pengawasan Internal Tahun 2023 - Pembahasan Realisasi Audit Satuan Pengawasan Internal Tahun 2023 - Pembahasan Hasil Audit Satuan Pengawasan Internal Tahun 2023
		29 November 2023	Komisaris Utama • Aribowo Komisaris Independen • Edy Utomo Anggota Komite Audit • Diana Mayawati	- Pembahasan Laporan Keuangan Jamkrindo Syariah - Pembahasan Laba Rugi Jamkrindo Syariah Oktober 2023 - Pembahasan Laporan Kinerja Penjaminan s.d. 31 Oktober 2023 - Pembahasan Rasio Keuangan Jamkrindo Syariah
12	Desember	22 Desember 2023	Komisaris Utama • Aribowo Komisaris Independen • Edy Utomo Anggota Komite Audit • Diana Mayawati	- Pembahasan Laporan Keuangan Jamkrindo Syariah - Pembahasan Laba Rugi Jamkrindo Syariah November 2023 - Pembahasan Laporan Kinerja Penjaminan s.d. 30 November 2023 - Pembahasan Rasio Keuangan Jamkrindo Syariah

Frekuensi rapat Komite Audit dan kehadiran anggota Komite Audit sebagai berikut:

The frequency of Audit Committee meetings and attendance of Audit Committee members are as follows:

Tabel 18. Frekuensi Rapat Komite Audit Tahun 2023
Table 18. Audit Committee Meeting Frequency in 2023

No.	Nama Anggota Komite/Fungsi Yang Membantu Dewan Komisaris	Rapat Komite Audit/Fungsi Yang Membantu Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Wildan	7	100%
2	Edy Utomo	7	100%
3	Eddy Rachmadi	2	100%
4	Diana Mayawati	14	100%



4. Program kerja komite audit dan realisasinya

Program Kerja Komite Audit pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.
- Menyiapkan bahan rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023.
- Mempersiapkan topik materi untuk pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris dalam proses pengusulan KAP untuk audit laporan keuangan tahun buku 2023.
- Menyampaikan ke Dewan Komisaris telaahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023.

5. Struktur komite lainnya.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin menyatakan bahwa "Selain komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris Lembaga Penjamin dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris".

Struktur Komite lainnya yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris di PT. Jamkrindo Syariah berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 015/Per-Dir/XI/2023 tentang Struktur Organisasi PT. Jamkrindo Syariah adalah Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 2/Per-Dir/III/2023 tentang Pedoman Manajemen Risiko tentang Pedoman Mitigasi Risiko menyebutkan bahwa Komite Pemantau Risiko adalah komite dibawah Dewan Komisaris yang dibentuk dalam rangka menangani hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan dan pemantauan risiko di Perusahaan.

Perusahaan melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-01/DK-JAMSYAR/IX/2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Komite Audit dan Pengangkatan Komite Pemantau Manajemen Risiko mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Eddy Rahmadi sebagai Komite Audit terhitung sejak tanggal 6 September 2021 dan mengangkat Eddy Rachmadi sebagai Komite Pemantau Manajemen Risiko pada Dewan Komisaris PT. Jamkrindo Syariah.

6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya

Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko diatur dalam Romawi III huruf E Peraturan Direksi No. 2/Per-Dir/III/2023 tentang Pedoman Manajemen Risiko tentang Pedoman Mitigasi Risiko antara lain:

4. Audit committee work program and its realization

The Audit Committee Work Program in 2023 is as follows:

- Assist the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system.
- Prepare materials for Board of Commissioners meetings throughout 2023.
- Prepare topic materials for the implementation of Board of Commissioners work visits.
- Assist the Board of Commissioners in the process of proposing KAP for the audit of financial statements for the 2023 financial year.
- Submit to the Board of Commissioners a review of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2023.

5. Structure of other committees.

Based on Article 29, paragraph (4) of the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, it states that "In addition to the audit committee as referred to in paragraph (1), the Board of Commissioners of a Guarantee Institution may form other committees to support the implementation of the duties of the Board of Commissioners."

The structure of other Committees under the supervision of the Board of Commissioners at PT. Jamkrindo Syariah based on Board of Directors Regulation Number 015/Per-Dir/XI/2023 concerning the Organizational Structure of PT. Jamkrindo Syariah is the Risk Monitoring Committee

Risk Monitoring Committee

Based on Board of Directors Regulation Number 2/Per-Dir/III/2023 concerning Risk Management Guidelines on Risk Mitigation Guidelines, it states that the Risk Monitoring Committee is a committee under the Board of Commissioners formed to handle matters related to supervision and monitoring of risks in the Company.

The Company, through the Decree of the Board of Commissioners Number KEP-01/DK-JAMSYAR/IX/2021 concerning Honorable Dismissal of the Audit Committee and Appointment of the Risk Management Monitoring Committee, confirmed the honorable dismissal of Eddy Rahmadi as the Audit Committee effective from September 6, 2021, and appointed Eddy Rachmadi as the Risk Management Monitoring Committee on the Board of Commissioners of PT. Jamkrindo Syariah

6. Work program related to the duties and responsibilities of other committees

Work program related to the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee

The obligations, authorities, and responsibilities of the Risk Monitoring Committee are regulated in Roman Numeral III letter E of Board of Directors Regulation No. 2/Per-Dir/III/2023 concerning Risk Management Guidelines on Risk Mitigation Guidelines, including:



- a. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko secara berkala, terutama apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan;
- b. Memastikan terlaksananya proses dan sistem Manajemen Risiko yang komprehensif dan efektif di dalam perusahaan;
- c. Menerima informasi dan melakukan pengawasan terkait dengan:
 - i) Strategi tahunan atas alokasi aset perusahaan;
 - ii) Selera risiko (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance);
 - iii) Potensi, limit, dan indikator pendorong risiko;
 - iv) Dampak akuntansi atas aktivitas investasi Perusahaan
 - v) Hasil investasi yang dihasilkan
 - vi) Performa atas asset management
- d. Penetapan hal-hal khusus dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

- a. Periodically evaluate Risk Management policies, especially if there are changes in factors that significantly affect business activities;
- b. Ensure the implementation of a comprehensive and effective Risk Management process and system within the company;
- c. Receive information and conduct supervision related to:
 - i) Annual strategy for the company's asset allocation;
 - ii) Risk appetite and risk tolerance;
 - iii) Potential, limits, and risk drivers;
 - iv) Accounting impact of the Company's investment activities
 - v) Investment results generated
 - vi) Performance of asset management
- d. Determination of special matters with business decisions that deviate from normal procedures.

C. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL, DAN AUDITOR EKSTERNAL

1. Fungsi Kepatuhan

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan penjaminan berdasarkan prinsip syariah memerlukan landasan GCG yang kuat serta penerapan prinsip prudential yang konsisten, salah satunya melalui pelaksanaan Kepatuhan. Seluruh insan Perusahaan wajib memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi kepatuhan perusahaan diwujudkan dalam tindakan atau langkah-langkah yang bersifat mencegah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh ketentuan regulasi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan GCG dan menjadi tolak ukur atas penilaian stakeholder terhadap kinerja Perusahaan. Fungsi kepatuhan pada Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
Berdasarkan POJK 03/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Lembaga Penjamin dijelaskan bahwa :

Pasal 10 ayat (1)

"Lembaga Penjamin wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan".

Pasal 10 ayat (2)

"Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi pemasaran, fungsi bisnis dan

C. IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE FUNCTION, INTERNAL AUDITOR, AND EXTERNAL AUDITOR FUNCTIONS

1. Compliance Function

The Company, in carrying out guarantee activities based on sharia principles, requires a strong GCG foundation and consistent implementation of prudential principles, one of which is through the implementation of Compliance. All Company personnel must understand their respective roles and responsibilities in carrying out the compliance function. The company's compliance function is manifested in actions or measures that are preventive in nature to ensure that policies, provisions, systems, and procedures, as well as business activities carried out by the company, are in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

The Company's compliance with all regulatory provisions and applicable laws and regulations becomes the most important part in the implementation of GCG and becomes a benchmark for stakeholder assessment of the Company's performance. The compliance functions at the Company are as follows:

- a. Member of the Board of Directors in charge of the compliance function
Based on POJK 03/POJK.05/2017 concerning Governance of Guarantee Institutions, it is explained that:

Article 10 paragraph (1)

"Guarantee Institutions must have a member of the Board of Directors who oversees the compliance function."

Article 10 paragraph (2)

"The member of the Board of Directors who oversees the compliance function as referred to in paragraph (1) cannot be concurrently held by a member of the Board of Directors who oversees the marketing



operasional, dan fungsi keuangan, kecuali direktur utama”.

Sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor 015/Per-Dir/XI/2023 tentang Struktur Organisasi PT. Jamkrindo Syariah tanggal 06 November 2023 menyatakan bahwa Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama. Adapun bagan struktur organisasi fungsi kepatuhan sesuai dengan bagan berikut:



function, business and operational functions, and financial functions, except for the president director”.

In accordance with the Board of Directors Regulation Number 015/Per-Dir/XI/2023 concerning the Organizational Structure of PT. Jamkrindo Syariah dated November 6, 2023, it states that the Director who oversees the compliance function is the President Director. The organizational structure chart of the compliance function is in accordance with the following chart:

- b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor 015/Per-Dir/XI/2023 tentang Struktur Organisasi PT. Jamkrindo Syariah, satuan kerja yang melaksanakan fungsi Kepatuhan dilaksanakan oleh Divisi Corporate Transformation, Renstra, dan Kepatuhan. Divisi Corporate Transformation, Renstra, dan Kepatuhan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Divisi tersebut membawahi:

1. Bagian Kepatuhan
2. Bagian Transformasi dan Renstra

- c. Pelaksanaan fungsi kepatuhan

Adapun pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Tahun 2023 adalah:

1. Memberikan opini kepatuhan kepada unit kerja
2. Mengkoordinasikan pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku melalui gap analysis
3. Pembuatan/kaji ulang pedoman GCG terintegrasi dengan induk dan holding.
4. Peningkatan Pemahaman Kepala Unit Kerja Dalam Melakukan Self Assessment GCG.
5. Menggunakan sistem pelaporan manajemen kepatuhan terintegrasi melalui melalui i-compliance IFG
6. Melakukan sosialisasi budaya kepatuhan dalam bentuk sosialisasi anti penyuapan.
7. Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
8. Berkoordinasi dengan Induk Perusahaan dalam pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku

- b. Work unit or employees who carry out the compliance function

In accordance with the Board of Directors Regulation Number 015/Per-Dir/XI/2023 concerning the Organizational Structure of PT. Jamkrindo Syariah, the work unit that carries out the Compliance function is implemented by the Corporate Transformation, Strategic Planning, and Compliance Division. The Corporate Transformation, Strategic Planning, and Compliance Division is directly responsible to the President Director. The Division oversees:

1. Compliance Department
2. Transformation and Strategic Planning Department

- c. Implementation of the compliance function

The implementation of the Compliance Function in 2023 includes:

1. Providing compliance opinions to work units
2. Coordinating compliance with applicable regulations through gap analysis
3. Creating/reviewing GCG guidelines integrated with the parent company and holding
4. Enhancing the Understanding of Work Unit Heads in Conducting GCG Self-Assessment
5. Using an integrated compliance management reporting system through IFG i-compliance
6. Conducting socialization of compliance culture in the form of anti-bribery socialization
7. Implementation of Anti-Bribery Management System Certification (SMAP)
8. Coordinating with the Parent Company in fulfilling compliance with applicable regulations



9. Berkoordinasi dengan Induk Perusahaan dan holding dalam menyelenggarakan forum kepatuhan.

- d. Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin Berikut ini adalah tingkat kesehatan tahun buku 2023 yang dihitung berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin, yang meliputi:

9. Coordinating with the Parent Company and holding in organizing compliance forums

- d. Financial health level of the Guarantee Institution The following is the health level for the 2023 financial year calculated based on the Financial Services Authority Circular Letter Number 18/SEOJK.05/2018 concerning Financial Health of Guarantee Institutions, which includes:

Tabel 19. Tingkat Kesehatan Perusahaan 2023
Table 19. Company Health Level 2023

Indikator/ Indicator	Rumus/ Formula	Nilai/ Value	Robot/Weight		Kriteria Nilai/ Value Criteria	Nilai/ Score	Keterangan Rentang Nilai per Kategori/Description of Value Range per Category
Likuiditas	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$	302.78%		10%	1.00	0.10	103% < Likuiditas < 800%
GEARING RATIO	$\frac{\text{Outstanding Penjaminan Kredit}}{\text{Saldo Ekuitas}}$	21.30		35%	1.00	0.35	4 < GR < 28
RENTABILITAS		1.60		35%	1.00	0.35	1 < Rentabilitas < 1,8
ROA	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$	1.24%	30%		3.00		ROA 0% < 2,5%
BOPO	$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$	27.08%	35%		1.00		BOPO < 85%
Rasio Klaim	$\frac{\text{Beban Klaim}}{\text{IJK}}$	68.45%	35%		1.00		RASIO KLAIM < 70%
GCG		sangat baik		20%	1.00	0.20	GCG Sangat Baik
Total						1.00	

Dari hasil pengukuran semua komponen tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin, Perusahaan telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan perhitungan sebagaimana tersebut di atas, dengan total nilai 1,00 maka tingkat kesehatan tahun buku 2023 berada pada kategori **"SANGAT SEHAT"**.

From the measurement results of all components of the Guarantee Institution's financial health level, the Company has met all the provisions set by the Financial Services Authority. Based on the calculation as mentioned above, with a total value of 1.00, the health level for the 2023 financial year is in the **"VERY HEALTHY"** category.

- e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.

Merujuk pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, diatur ketentuan sebagai berikut:

– Romawi IV butir 1 bahwa:
"PUJK membentuk fungsi atau unit Layanan Pengaduan untuk melaksanakan kegiatan Layanan Pengaduan di setiap kantor PUJK".

Atas ketentuan tersebut, Perusahaan telah memiliki Unit Kerja yang bertugas mengkoordinasikan Pengaduan Konsumen yaitu Sekretaris Perusahaan.

- e. Ownership of work units or functions in handling and resolving complaints submitted by consumers.

Referring to the Financial Services Authority Circular Letter Number 17/SEOJK.07/2018 concerning Guidelines for the Implementation of Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector, the following provisions are regulated:

– Roman Numeral IV point 1 that:
"Financial Services Institutions (PUJK) establish a Complaint Service function or unit to carry out Complaint Service activities at each PUJK office."

Based on these provisions, the Company already has a Work Unit tasked with coordinating Consumer Complaints, namely the Corporate Secretary.



Perusahaan dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

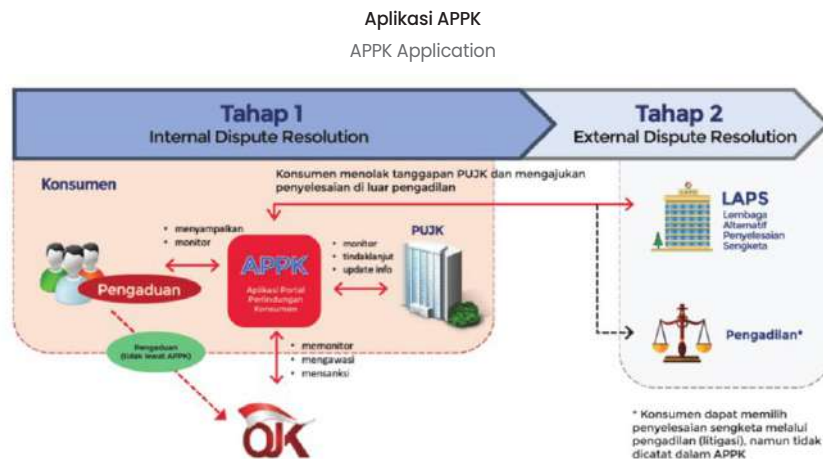
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di SJK oleh OJK.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dengan menggunakan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) adalah sebagai berikut:

In handling and resolving complaints submitted by consumers, the Company refers to the following provisions:

1. Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.07/2018 concerning Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector.
2. Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.07/2020 concerning Consumer and Public Services in the Financial Services Sector by the Financial Services Authority.
3. Financial Services Authority Regulation Number 61/POJK.07/2020 concerning Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector.
4. Financial Services Authority Regulation Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.

Based on POJK Number 31/POJK.07/2020 concerning the Implementation of Consumer and Public Services in the Financial Services Sector by the Financial Services Authority, the mechanism for handling complaints and resolving disputes using the Consumer Protection Portal Application (APPK) is as follows:



Manfaat Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) ini memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk menyampaikan pengaduannya kepada PUJK, karena dengan adanya aplikasi ini maka pengaduan dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun. Bagi para pelaku usaha dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) aplikasi ini memberikan kemudahan dalam:

1. Menerima permintaan penyelesaian sengketa dari konsumen, kemudahan untuk menyampaikan informasi tindak lanjut penanganan sengketa kepada konsumen;
2. Mendapatkan informasi guna perbaikan produk dan layanannya.

Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penggunaan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dapat digunakan untuk:

1. Memastikan pengaduan konsumen dapat ditangani dengan baik dengan memantau penanganan

The benefits of the Consumer Protection Portal Application (APPK) provide convenience for consumers to submit their complaints to financial service providers (PUJK), as with this application, complaints can be made anytime and anywhere. For business actors and Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector (LAPS SJK), this application provides convenience in:

1. Receiving dispute resolution requests from consumers, making it easier to convey information on follow-up dispute handling to consumers;
2. Obtaining information for improving their products and services.

For the Financial Services Authority (OJK), the use of the Consumer Protection Portal Application (APPK) can be used to:

1. Ensure consumer complaints can be handled properly by monitoring complaint handling by financial service



pengaduan oleh PUJK;

2. Memantau penyelesaian sengketa oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK),
3. Mendapatkan informasi pengaduan yang berindikasi pelanggaran untuk dapat segera ditindaklanjuti dan dari informasi-informasi yang didapatkan dapat dijadikan
4. Menjadi dasar penyempurnaan ketentuan dan pengawasan.

2. Fungsi Auditor Internal

Fungsi auditor internal sebagai pengawasan independen sudah dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan.
- b. Pemeriksaan dan penilaian atas efektifitas dan efisiensi dibidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

Cakupan pelaksanaan tugas Auditor Internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan, meliputi:

a. Ruang Lingkup Pekerjaan Audit

Ruang lingkup pekerjaan Satuan Pengawasan Internal (selanjutnya disebut SPI) dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Direksi Nomor 049/Per-Dir/XII/2022 tentang Pedoman Audit PT Jamkrindo Syariah huruf C antara lain sebagai berikut:

1. Audit meliputi semua aspek manajemen yaitu dapat mencakup seluruh kegiatan/program atau hanya menyangkut bagian tertentu dari suatu kegiatan/program. Cakupan periode yang diperiksa dapat bervariasi, tergantung pada masalah yang diidentifikasi yang memerlukan perbaikan.
2. Audit menyeluruh atas ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan, dan penilaian apakah kebijakan dan pelaksanaan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
 - b. Telah dilaksanakan, baik secara formal maupun materiil.
3. Penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sumberdaya yang tersedia.
4. Penilaian tentang hasil guna atau efektivitas kegiatan operasional atau manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan/program.
5. Audit keuangan meliputi:
 - a. Pengujian atas saldo aset, hutang dan modal dari transaksi, bukti transaksi sampai pencatatan transaksi di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
 - b. Pengujian atas realisasi pendapatan dan beban dari transaksi, bukti transaksi sampai

2. Monitor dispute resolution by Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector (LAPS SJK);
3. Obtain information on complaints indicating violations to be followed up immediately, and from the information obtained, it can be used as
4. A basis for improving regulations and supervision.

2. Internal Auditor Function

The internal auditor function as independent supervision has been carried out by the Internal Audit Unit (SPI) which has the following functions:

- a. Evaluation of the effectiveness of internal control implementation, risk management, and corporate governance processes in accordance with laws and regulations and Company policies.
- b. Examination and assessment of the effectiveness and efficiency in the fields of finance, operations, human resources, information technology, and other activities.

The scope of the Internal Auditor's duties in assessing all aspects and elements of activities includes:

a. Scope of Audit Work

The scope of work of the Internal Audit Unit (hereinafter referred to as SPI) is explained in the Attachment to Board of Directors Regulation Number 049/Per-Dir/XII/2022 concerning Audit Guidelines of PT Jamkrindo Syariah letter C, including the following:

1. Audits cover all aspects of management, which can include all activities/programs or only concern certain parts of an activity/program. The coverage period examined can vary, depending on the identified issues that need improvement.
2. Comprehensive audit of compliance with laws and regulations, and assessment of whether policies and implementation:
 - a. Do not conflict with higher regulations.
 - b. Have been implemented, both formally and materially.
3. Assessment of efficiency and economy in the use of available resources.
4. Assessment of the effectiveness of operational activities or planned benefits from an activity/program.
5. Financial audit includes:
 - a. Testing of the balance of assets, liabilities, and capital from transactions, transaction evidence to transaction recording at the Head Office and Branch Offices.
 - b. Testing of the realization of income and expenses from transactions, transaction



- pencatatan transaksi di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
- c. Laporan manajemen memuat data-data secara tepat waktu, teliti, lengkap, akurat, informatif dan bermanfaat serta disajikan secara wajar.
 - d. Kegiatan keuangan lainnya.
6. Audit operasional meliputi:
- a. Kegiatan operasional bisnis dan penunjang Perusahaan yang meliputi kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
 - b. Kegiatan operasional lainnya.
7. Audit operasional meliputi:
- a. Kegiatan operasional bisnis dan penunjang Perusahaan yang meliputi kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
 - b. Kegiatan operasional lainnya.
- b. Struktur Atau Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal
- Struktur atau Kedudukan SPI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Direksi Nomor 015/Per-Dir/XI/2023 tentang Struktur Organisasi PT. Jamkrindo Syariah, SPI membawahi:
1. Bagian Audit Internal, yang membawahi staf di bawahnya.
 2. Bagian Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Audit, yang membawahi staf di bawahnya.
- Kedudukan SPI dijelaskan pada Peraturan Direksi Nomor 015/Per-Dir/XI/2023 tentang Struktur Organisasi PT. Jamkrindo Syariah tentang Kedudukan SPI :
- 1) Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
 - 2) Satuan Pengawasan Internal bertanggung jawab secara struktural langsung kepada Direktur Utama.

- evidence to transaction recording at the Head Office and Branch Offices.
- c. Management reports containing data in a timely, thorough, complete, accurate, informative, and useful manner, and presented fairly.
 - d. Other financial activities.
6. Operational audit includes:
- a. Business operational activities and Company support which include compliance with procedures and provisions applicable in the Company.
 - b. Other operational activities.
7. Operational audit includes:
- a. Business operational activities and Company support which include compliance with procedures and provisions applicable in the Company.
 - b. Other operational activities.

- b. Structure or Position of the Internal Audit Unit
- The structure or position of SPI as regulated in Article 3 Paragraph (1) letter b of Board of Directors Regulation Number 015/Per-Dir/XI/2023 concerning the Organizational Structure of PT. Jamkrindo Syariah, SPI oversees:
1. Internal Audit Department, which supervises staff under it.
 2. Audit Policy and Quality Improvement Department, which supervises staff under it.
- The position of SPI is explained in Board of Directors Regulation Number 015/Per-Dir/XI/2023 concerning the Organizational Structure of PT. Jamkrindo Syariah regarding the Position of SPI:
- 1) The Internal Audit Unit is led by a Head of Internal Audit Unit who is appointed and dismissed by the President Director.
 - 2) The Internal Audit Unit is structurally directly responsible to the President Director.

Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Internal.

Internal Audit Unit Organizational Structure.





c. Independensi Auditor Internal

SPI dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap independen dan obyektif serta tidak memihak, sehingga SPI mampu mengungkapkan pandangan dan pikirannya tanpa pengaruh atau tekanan dari semua tingkatan manajemen, diluar Direktur Utama.

Independensi SPI dijelaskan pada Internal Audit Charter Butir 6 Independensi (Kemandirian). Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, SPI menyatakan diri mandiri dan senantiasa mempertahankan kemandirian itu terhadap semua tingkatan Manajemen yang menjadi obyek audit (auditee). Kemandirian SPI diupayakan baik secara faktual (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance).

SPI tidak boleh diberi tanggung jawab penuh dalam pengembangan dan implementasi rinci suatu sistem baru, namun dapat berperan sebagai pengamat (observer) atau penasihat (adviser) terutama dalam hal yang menyangkut metode dan standar pengendalian dari sistem yang baru tersebut.

d. Uraian Tugas Satuan Kerja Pengawasan Internal

Uraian tugas SPI dijelaskan dalam Peraturan Direksi Nomor 015/Per-Dir/XI/2023 tentang Struktur Organisasi PT. Jamkrindo Syariah sebagai berikut:

1. Bagian Audit Internal

- Penyusunan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)
- Pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)
- Penyusunan Laporan Pengawasan
- Pemeriksaan Khusus
- Pemberian Konsultasi sesuai Fungsi Pengawasan
- Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Audit
- Memonitoring Pelaksanaan Control Risk pada First Line dan Second Line of Defense

2. Bagian Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Audit

- Pembuatan dan Kaji Ulang Kebijakan dan SOP Satuan Pengawasan Internal
- Pendampingan Pemeriksaan oleh KAP, OJK dan Pemeriksaan Eksternal Lainnya
- Evaluasi Sistem Pengendalian Internal
- Review Risk Profile
- Review Hasil Pemeriksaan
- Membuat Kebijakan dan Mengelola Whistle Blower System (WBS)
- tandar Kualitas Audit.

Pelaksanaan kebijakan dan tata kelola Whistle Blowing System (selanjutnya disebut WBS) Perusahaan diatur dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT. Jamkrindo Syariah Nomor 046/Kep-Dir/VII/2022 dan Kep-Dir 01/DKJamsyar/ VII/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) PT. Jamkrindo Syariah. WBS bertujuan untuk menjadi pedoman mengelola pengaduan pelanggaran guna menjamin terselenggaranya mekanisme

c. Internal Auditor Independence

SPI in carrying out its duties must be independent and objective and impartial, so that SPI is able to express its views and thoughts without influence or pressure from all levels of management, outside the President Director.

The independence of SPI is explained in the Internal Audit Charter Point 6 Independence (Autonomy). In carrying out its functions and duties, SPI declares itself independent and continuously maintains that independence against all levels of Management that are the objects of audit (auditee). The independence of SPI is pursued both factually (in fact) and in appearance.

SPI should not be given full responsibility in the development and detailed implementation of a new system, but can act as an observer or adviser, especially in matters concerning the methods and control standards of the new system.

d. Description of Internal Audit Unit Duties

The description of SPI duties is explained in Board of Directors Regulation Number 015/Per-Dir/XI/2023 concerning the Organizational Structure of PT. Jamkrindo Syariah as follows:

1. Internal Audit Department

- Preparation of Annual Audit Work Program (PKAT)
- Implementation of Annual Audit Work Program (PKAT)
- Preparation of Supervision Reports
- Special Audits
- Providing Consultation according to Supervision Function
- Monitoring Follow-up on Audit Recommendations
- Monitoring the Implementation of Control Risk in the First Line and Second Line of

2. Audit Policy and Quality Improvement Department

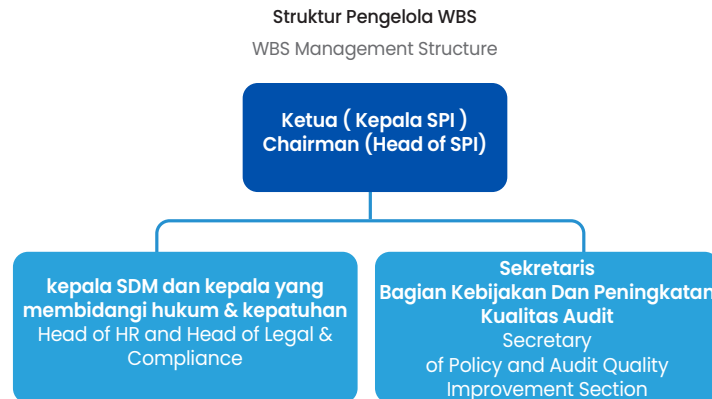
- Creation and Review of Internal Audit Unit Policies and SOPs
- Assistance during Examinations by KAP, OJK, and Other External Examinations
- Evaluation of Internal Control System
- Review of Risk Profile
- Review of Examination Results
- Creating Policies and Managing the Whistle Blower System (WBS)
- Audit Quality Standards.

The implementation of Whistle Blowing System (hereinafter referred to as WBS) policies and governance of the Company is regulated in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT. Jamkrindo Syariah Number 046/Kep-Dir/VII/2022 and Kep-Dir 01/DKJamsyar/VII/2022 concerning Guidelines for the Management of the Whistle Blowing System (WBS) of PT. Jamkrindo Syariah. WBS aims to serve as a guideline for managing violation reports to



penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif. Adapun struktur organisasi WBS di Perusahaan adalah sebagai berikut:

ensure the implementation of an effective violation complaint resolution mechanism. The organizational structure of WBS in the Company is as follows:



e. Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal

SPI dipimpin oleh Kepala SPI. Pada tahun 2023, Kepala SPI dijabat oleh Dadang Ary Avianto. Lahir di Mojokerto, 16 Oktober 1971. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang tahun 1996. Sebelum menjabat sebagai Kepala SPI PT. Jamkrindo Syariah. Dadang Ary Avianto pernah menduduki beberapa posisi jabatan pada PT. Jamkrindo antara lain :

- 1) Kepala Bagian pada Kantor Wilayah Surabaya PT. Jamkrindo Tahun 2015 – 2017
- 2) Kepala Bagian SPI PT. Jamkrindo Tahun 2017 – 2018
- 3) Pemimpin Cabang Mataram PT. Jamkrindo Tahun 2018 – 2019
- 4) Wakil Kepala SPI PT. Jamkrindo pada tahun 2019 – 2020
- 5) Pemimpin Cabang Banyuwangi PT. Jamkrindo sejak tahun 2020 hingga 2023

e. Profile of the Head of Internal Audit Unit

SPI is led by the Head of SPI. In 2023, the Head of SPI position was held by Dadang Ary Avianto. Born in Mojokerto, October 16, 1971. He obtained a Bachelor's degree in Economics from Brawijaya University Malang in 1996. Before serving as Head of SPI at PT. Jamkrindo Syariah, Dadang Ary Avianto held several positions at PT. Jamkrindo, including:

- 1) Head of Department at the Surabaya Regional Office of PT. Jamkrindo, 2015 – 2017
- 2) Head of SPI Department of PT. Jamkrindo, 2017 – 2018
- 3) Branch Manager of Mataram PT. Jamkrindo, 2018 – 2019
- 4) Deputy Head of SPI of PT. Jamkrindo in 2019 – 2020
- 5) Branch Manager of Banyuwangi PT. Jamkrindo from 2020 to 2023



- f. Jumlah Pegawai Pada Satuan Pengawasan Internal Pada posisi per tanggal 31 Desember 2023, Unit Kerja SPI didukung oleh 11 (Sebelas) SDM dengan komposisi sebagai berikut:

- f. Number of Employees in the Internal Audit Unit As of December 31, 2023, the SPI Work Unit is supported by 11 (Eleven) human resources with the following composition:

Tabel 20. Satuan Pengawas Internal Tahun 2023
Table 20. Internal Audit Unit 2023

No	Jabatan/Position	JUMLAH/TOTAL
1	Kepala Satuan Pengawasan Internal	1
2	Kepala Bagian Audit Internal	1
3	Kepala Bagian Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Audit	1
4	Staf Audit Internal	6
5	Staf Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Audit	2
Total		11

- g. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Audit Internal Dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2023, terdapat 8 (delapan) Surat Perintah Tugas (SPT) dengan rincian sebagai berikut:

- g. Report on the Implementation of Internal Audit Tasks In the framework of implementing the Annual Supervision Work Program (PKPT) for 2023, there were 8 (eight) Assignment Orders (SPT) with the following details:

- 1) SPT Nomor 057/SPT/1/VI/2023 tanggal 25 Juli 2023 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Padang.
- 2) SPT Nomor 058/SPT/1/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Pekanbaru.
- 3) SPT Nomor 066/SPT/1/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Palembang.
- 4) SPT Nomor 070/SPT/1/IX/2023 tanggal 15 September 2023 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Balikpapan.
- 5) SPT Nomor 077/SPT/1/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Bandung.
- 6) SPT Nomor 085/SPT/1/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 untuk Pengawasan pada Divisi Klaim & Subrogasi.
- 7) SPT Nomor 089/SPT/DUT/XI/2023 tanggal 15 November 2023 untuk Pengawasan pada Divisi Teknik Penjaminan.
- 8) SPT Nomor 095/SPT/DUT/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023 untuk Pengawasan pada Divisi SDM & Umum.

- 1) SPT Number 057/SPT/1/VI/2023 dated July 25, 2023, for Supervision at the Padang Branch Office.
- 2) SPT Number 058/SPT/1/VII/2023 dated July 25, 2023, for Supervision at the Pekanbaru Branch Office.
- 3) SPT Number 066/SPT/1/VIII/2023 dated August 18, 2023, for Supervision at the Palembang Branch Office.
- 4) SPT Number 070/SPT/1/IX/2023 dated September 15, 2023, for Supervision at the Balikpapan Branch Office.
- 5) SPT Number 077/SPT/1/X/2023 dated October 2, 2023, for Supervision at the Bandung Branch Office.
- 6) SPT Number 085/SPT/1/X/2023 dated October 24, 2023, for Supervision at the Claims & Subrogation Division.
- 7) SPT Number 089/SPT/DUT/XI/2023 dated November 15, 2023, for Supervision at the Guarantee Technical Division.
- 8) SPT Number 095/SPT/DUT/XII/2023 dated December 7, 2023, for Supervision at the HR & General Affairs Division.

Atas kegiatan audit sebagaimana tersebut diatas, telah disusun Laporan Hasil Audit (LHA) yang disampaikan ke Direksi dan Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

For the audit activities as mentioned above, Audit Result Reports (LHA) have been prepared and submitted to the Board of Directors and Board of Commissioners with the following details:

- 1) LHA Kantor Cabang Padang Nomor 01/LHA-JAMSYAR/IX/2023 tanggal 1 September 2023.
- 2) LHA Kantor Cabang Pekanbaru Nomor 02/LHA-

- 1) LHA Padang Branch Office Number 01/LHA-JAMSYAR/IX/2023 dated September 1, 2023.
- 2) LHA Pekanbaru Branch Office Number 02/LHA-



- JAMSYAR/IX/2023 tanggal 8 September 2023.
- 3) LHA Kantor Cabang Palembang Nomor 03/LHA-JAMSYAR/IX/2022 tanggal 22 September 2023.
 - 4) LHA Kantor Cabang Balikpapan Nomor 04/LHA-JAMSYAR/X/2022 tanggal 18 Oktober 2023.
 - 5) LHA Kantor Cabang Bandung Nomor 05/LHA-JAMSYAR/X/2022 tanggal 30 Oktober 2023.
 - 6) LHA Divisi Klaim & Subrogasi Nomor 06/LHA-JAMSYAR/XII/2022 tanggal 24 November 2023.
 - 7) LHA Divisi Teknik Penjaminan Nomor 07/LHA-JAMSYAR/XII/2022 tanggal 15 Desember 2023.
 - 8) LHA Divisi SDM & Umum Nomor 08/LHA-JAMSYAR/XII/2022 tanggal 29 Desember 2023.

- JAMSYAR/IX/2023 dated September 8, 2023.
- 3) LHA Palembang Branch Office Number 03/LHA-JAMSYAR/IX/2022 dated September 22, 2023.
 - 4) LHA Balikpapan Branch Office Number 04/LHA-JAMSYAR/X/2022 dated October 18, 2023.
 - 5) LHA Bandung Branch Office Number 05/LHA-JAMSYAR/X/2022 dated October 30, 2023.
 - 6) LHA Claims & Subrogation Division Number 06/LHA-JAMSYAR/XII/2022 dated November 24, 2023.
 - 7) LHA Guarantee Technical Division Number 07/LHA-JAMSYAR/XII/2022 dated December 15, 2023.
 - 8) LHA HR & General Affairs Division Number 08/LHA-JAMSYAR/XII/2022 dated December 29, 2023.

Lembaga Auditor Eksternal
External Audit Institution



3. Fungsi Auditor Eksternal

Berdasarkan Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Romawi I Umum dinyatakan bahwa "Dalam rangka peningkatan kualitas informasi keuangan tersebut, Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan menggunakan jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik." Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik memiliki peran yang penting sebagai penunjang kegiatan sektor jasa keuangan dalam penegakkan disiplin pasar.

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perusahaan diperkuat oleh Auditor Eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP merupakan pihak yang bertanggung jawab melaksanakan audit terhadap laporan keuangan tahunan Perusahaan.

Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan (stakeholders). Untuk menunjang fungsi Auditor Eksternal, Perusahaan telah membantu menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh Auditor Eksternal sehingga memungkinkan Auditor Eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketepatan-asasan, dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). KAP yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan selama 5 (Lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

3. External Auditor Function

Based on the Explanation of the Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services in Financial Service Activities, Roman Numeral I General states that "In order to improve the quality of financial information, Parties Conducting Financial Service Activities use services provided by Public Accountants and Public Accounting Firms." Public Accountants and Public Accounting Firms have an important role as supporting the financial services sector activities in enforcing market discipline.

The function of independent supervision of the Company's financial aspects is strengthened by an External Auditor, namely the Public Accounting Firm (KAP). KAP is the party responsible for conducting audits of the Company's annual financial statements.

The External Auditor must be free from the influence of the Board of Directors and interested parties in the Company (stakeholders). To support the function of the External Auditor, the Company has helped provide all accounting records and supporting data required by the External Auditor, enabling the External Auditor to provide its opinion on the fairness, consistency, and conformity of the Company's financial statements with Financial Accounting Standards (SAK). The Public Accounting Firms that have audited the Company's Financial Statements for the past 5 (Five) years are as follows:



Tabel 21. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Eksternal
Table 21. Appointment of Public Accounting Firms as External Auditors

Tahun/Year	Kantor Akuntan/ Accounting Firm	Nama Akuntan (Perorangan) Dan Nomor Pendaftaran Di Ojk/Name of Accountant (Individual) And Registration Number at OJK	Biaya Auditor Eksternal/ External Auditor Fee
2019	KAP Hertanto, Grace & Karunawan	Drs. Hertanto, MS., Ak., CPA., CPMA., CA (AP. 0136), Grace Octavia, SE., CPA., CA (AP. 0151), Bambang Karunawan, SE., Ak, CPA (AP. 0912) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308	Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp. 81.400.000,00 belum termasuk PPN 10%.
2020	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)	M. Jusuf Wibisana (AP.0222), Eddy Rintis, S.E., CPA (AP. 0230), Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA (AP. 0226) Nomor Pendaftaran di OJK adalah STTD.KAP-04/ PM.22/2018	Biaya Jasa Audit adalah Rp. 1.825.000.000 sudah termasuk PPN 10 % namun belum termasuk biaya OPE 3%.
2021	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)	M. Jusuf Wibisana (AP.0222), Eddy Rintis, S.E., CPA (AP. 0230), Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA (AP. 0226) Nomor Pendaftaran di OJK adalah STTD.KAP-04/ PM.22/2018	Biaya Jasa Audit adalah Rp. 1.189.650.000 sudah termasuk PPN 10 %, namun belum termasuk biaya OPE 3%.
2022	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)	M. Jusuf Wibisana (AP.0222), Eddy Rintis, S.E., CPA (AP. 0230), Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA (AP. 0226) Nomor Pendaftaran di OJK adalah STTD.KAP-04/ PM.22/2018	Biaya Jasa Audit adalah Rp. 1.825.000.000 sudah termasuk PPN 10 % namun belum termasuk biaya OPE 3%.
2023	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)	M. Jusuf Wibisana (AP.0222), Eddy Rintis, S.E., CPA (AP. 0230), Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA (AP. 0226) Nomor Pendaftaran di OJK adalah STTD.KAP-04/ PM.22/2018	Biaya Jasa Audit adalah Rp. 1.475.000.000 sudah termasuk PPN 11 % sudah termasuk biaya OPE 3%.



D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank Direksi dan Dewan Komisaris pengawasan aktif dalam menerapkan manajemen risiko.

Selain itu, dalam penerapan manajemen risiko secara umum di Perusahaan juga merujuk kepada peraturan internal perusahaan, diantaranya :

1. Peraturan Direksi Nomor 1/Per-Dir/I/2023 tentang Kebijakan Umum Business Continuity Management PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.
 2. Peraturan Direksi Nomor 2/Per-Dir/III/2023 tentang Pedoman Manajemen Risiko PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
 3. Peraturan Direksi Nomor 018/Per-Dir/XII/2023 tentang Person in Charge (PIC) Manajemen Risiko PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
 4. Peraturan Direksi Nomor 019/Per-Dir/XII/2023 tentang Komite Manajemen Risiko PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
 5. Peraturan Direksi Nomor 020/Per-Dir/XII/2023 tentang Pendapat (Opini) Manajemen Risiko PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
 6. Peraturan Direksi Nomor 014/Per-Dir/XII/2015 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Manajemen Risiko PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
 7. Peraturan Direksi Nomor 011/Per-Dir/XII/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
- a. Direksi berwenang dan bertanggung jawab untuk:
1. Menetapkan rencana pengembangan Teknologi Informasi dan kebijakan terkait penggunaan Teknologi Informasi;
 2. Menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan mengkomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi.
 3. Memastikan:
 - a. Teknologi Informasi yang digunakan dapat mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan terhadap konsumen;
 - b. Kecukupan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi;
 - c. Ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi;
 - d. Penerapan proses manajemen risiko dalam

D. IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT, INTERNAL CONTROL SYSTEM, INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

1. Active supervision by the Board of Directors and Board of Commissioners

Based on Article 6 and Article 7 of the Financial Services Authority Regulation Number 4/POJK.05/2021 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions, the Board of Directors and Board of Commissioners provide active supervision in implementing risk management.

In addition, in the implementation of risk management in general in the Company also refers to the company's internal regulations, including:

1. Board of Directors Regulation Number 1/Per-Dir/I/2023 concerning General Policy on Business Continuity Management of PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.
 2. Board of Directors Regulation Number 2/Per-Dir/III/2023 concerning Risk Management Guidelines of PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
 3. Board of Directors Regulation Number 018/Per-Dir/XII/2023 concerning Person in Charge (PIC) of Risk Management of PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
 4. Board of Directors Regulation Number 019/Per-Dir/XII/2023 concerning Risk Management Committee of PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
 5. Board of Directors Regulation Number 020/Per-Dir/XII/2023 concerning Risk Management Opinion of PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
 6. Board of Directors Regulation Number 014/Per-Dir/XII/2015 concerning Standard Operating Procedure (SOP) for Risk Management of PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
 7. Board of Directors Regulation Number 011/Per-Dir/XII/2015 concerning the Implementation of Risk Management of PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
- a. The Board of Directors is authorized and responsible for:
1. Establishing Information Technology development plans and policies related to the use of Information Technology;
 2. Establishing adequate policies and procedures related to Information Technology implementation and communicating them effectively, both to the work units implementing and users of Information Technology.
 3. Ensuring:
 - a. The Information Technology used can support business development, achievement of business objectives, and continuity of service to consumers;
 - b. Adequacy and improvement of human resource competencies related to the implementation and use of Information Technology;
 - c. Availability of an effective information security management system that is communicated to the work units of users and providers of Information Technology;
 - d. The implementation of risk management processes in the use of Information Technology



penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan secara memadai dan efektif;

- e. Kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi diterapkan secara efektif pada satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi;
- f. Terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dapat paling sedikit:
 - i) Mendukung proses pemantauan terhadap implementasi pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi;
 - ii) Mendukung penyelesaian proyek pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi;
 - iii) Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan investasi pada infrastruktur Teknologi Informasi; dan
 - iv) Meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dan kualitas layanan penyampaian hasil proses kepada pengguna Teknologi Informasi

b. Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- 1. Mengevaluasi, mengarahkan dan memantau rencana pengembangan Teknologi Informasi dan kebijakan terkait penggunaan Teknologi Informasi;
- 2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.

2. Kecukupan kebijakan, Prosedur dan Penggunaan Teknologi Informasi

Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Batas Risiko, dalam penggunaan Teknologi Informasi meliputi:

- 1. Peraturan Direksi Nomor 04/Per-Dir/X/2018 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi PT. Jamkrindo Syariah.
- 2. Peraturan Direksi Nomor 18/PerDir/X/2017 tentang Kebijakan Pengelolaan Backup Data dan Recovery Data PT. Jamkrindo Syariah.
- 3. Peraturan Direksi Nomor 016/Per-Dir/III/2022 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi PT. Jamkrindo Syariah.
- 4. Peraturan Direksi Nomor 026/Per-Dir/VIII/2022 tentang Kodifikasi Penomoran Sertifikat Kafalah (SK) PT. Jamkrindo Syariah.
- 5. Peraturan Direksi Nomor 050/Per-Dir/XII/2022 tentang Disaster Recovery Plan (DRP) PT. Jamkrindo Syariah.
- 6. Peraturan Direksi Nomor 051/Per-Dir/XII/2022 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Keamanan Akses PT. Jamkrindo Syariah.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan Pengendalian risiko

Perusahaan telah memiliki Peraturan Direksi Nomor 04/Per-Dir/X/2018 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi PT. Jamkrindo Syariah yang didalamnya memuat proses identifikasi,

is carried out adequately and effectively;

- e. Information Technology policies and procedures are effectively implemented in work units that manage and use Information Technology;
- f. There is a performance measurement system for Information Technology implementation processes that can at minimum:
 - i) Support the monitoring process for Information Technology development and procurement implementation;
 - ii) Support the completion of Information Technology development and procurement projects;
 - iii) Optimize the utilization of human resources and investments in Information Technology infrastructure; and
 - iv) Improve the performance of Information Technology implementation processes and the quality of service delivery results to Information Technology users

b. The Board of Commissioners has the authority and responsibility to:

- 1. Evaluate, direct, and monitor Information Technology development plans and policies related to Information Technology use;
- 2. Evaluate the Board of Directors' accountability for risk management implementation in Information Technology use.

2. Adequacy of Information Technology Policies, Procedures, and Use

The adequacy of Policies, Procedures, and Risk Limit Determination in Information Technology use includes:

- 1. Board of Directors Regulation Number 04/Per-Dir/X/2018 concerning Information Technology Governance and Management Policy of PT. Jamkrindo Syariah.
- 2. Board of Directors Regulation Number 18/PerDir/X/2017 concerning Data Backup and Data Recovery Management Policy of PT. Jamkrindo Syariah.
- 3. Board of Directors Regulation Number 016/Per-Dir/III/2022 concerning Information Technology Steering Committee of PT. Jamkrindo Syariah.
- 4. Board of Directors Regulation Number 026/Per-Dir/VIII/2022 concerning Kafalah Certificate (SK) Numbering Codification of PT. Jamkrindo Syariah.
- 5. Board of Directors Regulation Number 050/Per-Dir/XII/2022 concerning Disaster Recovery Plan (DRP) of PT. Jamkrindo Syariah.
- 6. Board of Directors Regulation Number 051/Per-Dir/XII/2022 concerning Standard Operating Procedure (SOP) for Access Security Management of PT. Jamkrindo Syariah.

3. Adequacy of risk identification, measurement, monitoring, and control processes

The Company has established Board of Directors Regulation Number 04/Per-Dir/X/2018 concerning Information Technology Governance and Management



pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan Teknologi Informasi. Proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi dilakukan paling sedikit terhadap aspek:

1. Kerangka Kerja Proses dan Organisasi
2. Perencanaan Teknologi Informasi
3. Manajemen Risiko Teknologi Informasi
4. Manajemen Backup Data dan Recovery Data
5. Manajemen Layanan Teknologi Informasi
6. Manajemen Pengembangan, Akuisisi dan Implementasi Teknologi Informasi
7. Manajemen Operasio dan Dukungan Layanan Teknologi Informasi
8. Manajemen Keamanan Layanan Teknologi Informasi
9. Manajemen Kualitas, Kinerja dan Kepatuhan

Pada tahun 2023, PT. Jamkrindo Syariah telah melakukan rapat Komite Pengarah TI sebagai berikut:

Policy of PT. Jamkrindo Syariah, which includes processes for identification, measurement, monitoring, and risk control of Information Technology use. The processes of identification, measurement, control, and monitoring of Information Technology use risks are conducted at minimum on the following aspects:

1. Process Framework and Organization
 2. Information Technology Planning
 3. Information Technology Risk Management
 4. Data Backup and Recovery Management
 5. Information Technology Service Management
 6. Information Technology Development, Acquisition, and Implementation Management
 7. Information Technology Operations and Service Support Management
 8. Information Technology Service Security Management
 9. Quality, Performance, and Compliance Management
- In 2023, PT. Jamkrindo Syariah conducted IT Steering Committee meetings as follows:

Tabel 22. Rapat Komite Pengarah TI
Table 22. IT Steering Committee Meetings

No	Tanggal/Date	Topik/Topic
1	11 Oktober 2023	Pembahasan Pengadaan Perangkat Storage Server dan Server Database Discussion on Procurement of Storage Server and Database Server Equipment
2	13 November 2023	Pengembangan Core System dan Roadmap MPTI Core System Development and MPTI Roadmap

Dalam pengembangan aplikasi, dilakukan User Acceptance Testing (UAT) dan pemberian opini Manajemen Risiko (MR) sehingga kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terlaksana dengan baik.

Sesuai dengan Kebijakan Manajemen Keamanan Akses, PT. Jamkrindo Syariah telah melakukan User Access Review (UAR) berkala setiap triwulanan untuk memastikan hak akses telah sesuai dengan prinsip pemisahan tugas. Selama tahun 2023, telah dilakukan UAR sebanyak 4 (empat) kali.

Uji Coba Disaster Recovery Plan (DRP) juga telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada 22 September 2023 dan 29 November 2023 untuk memastikan DRP dapat diterapkan saat terjadi bencana.

4. Struktur organisasi sistem informasi

Sesuai Peraturan Direksi Nomor 015/Per-Dir/XI/2023 tentang Struktur Organisasi PT. Jamkrindo Syariah, Struktur Organisasi Teknologi Informasi berada dibawah Direktorat Operasional dibawah Koordinator TI. Adapun bagan struktur organisasi sistem informasi Perusahaan sebagai berikut:

In application development, User Acceptance Testing (UAT) and Risk Management (RM) opinions were conducted to ensure that the adequacy of risk identification, measurement, monitoring, and control processes was properly implemented.

In accordance with Access Security Management Policy, PT. Jamkrindo Syariah has conducted quarterly User Access Reviews (UAR) to ensure access rights comply with the principle of segregation of duties. During 2023, UAR was conducted 4 (four) times.

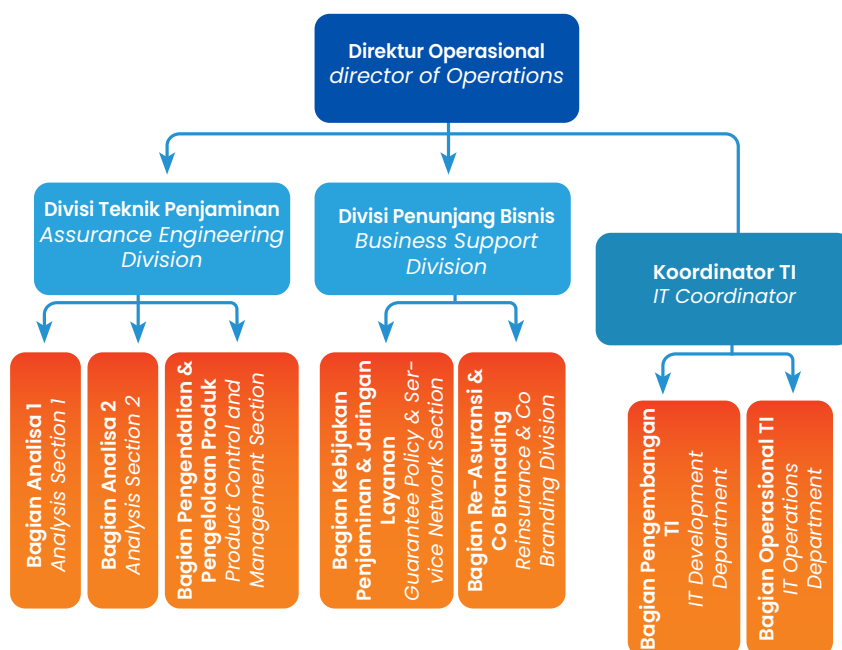
Disaster Recovery Plan (DRP) testing was also conducted twice on September 22, 2023, and November 29, 2023, to ensure the DRP can be implemented in case of disaster.

4. Information system organizational structure

According to Board of Directors Regulation Number 015/Per-Dir/XI/2023 concerning the Organizational Structure of PT. Jamkrindo Syariah, the Information Technology Organizational Structure is under the Directorate of Operations under the IT Coordinator. The organizational structure chart of the Company's information system is as follows:



Struktur Organisasi Koordinator TI IT Coordinator Organizational Structure



5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi

Sistem Pengendalian Internal atas penggunaan teknologi informasi diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 04/Per-Dir/X/2018 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi. Peraturan tersebut mengatur mengenai manajemen perencanaan, manajemen risiko TI, backup dan recovery data, layanan, pengembangan, implementasi, operasi, dukungan layanan, keamanan informasi, kualitas, kinerja dan kepatuhan TI. Peraturan tersebut diberlakukan secara menyeluruh pada komponen Perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang termasuk didalamnya adalah Pengendalian Internal atas Penggunaan Teknologi Informasi. Adapun implementasi atas regulasi tersebut, Perusahaan menetapkan:

- Peraturan Direksi tentang Backup dan pengamanan data dan data center dalam Peraturan Direksi Nomor 18/PerDir/X/2017 tentang Kebijakan Pengelolaan Backup Data dan Recovery Data PT. Jamkrindo Syariah dan
- Peraturan Direksi Nomor 051/Per-Dir/XII/2022 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Keamanan Akses PT. Jamkrindo Syariah.
- Peraturan Direksi tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi No 016/Per-Dir/III/2022 yang termasuk didalamnya Direksi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif agar pengembangan TI dapat

5. Internal control system for information technology use

The Internal Control System for information technology use is regulated in Board of Directors Regulation Number 04/Per-Dir/X/2018 concerning Information Technology Governance and Management Policy. This regulation governs planning management, IT risk management, data backup and recovery, services, development, implementation, operations, service support, information security, quality, performance, and IT compliance. The regulation is implemented comprehensively across all Company components.

The Financial Services Authority has established Financial Services Authority Regulation Number 4/POJK.05/2021 concerning Risk Management Implementation in Information Technology Use by Non-Bank Financial Service Institutions, which includes Internal Control over Information Technology Use. For implementation of this regulation, the Company has established:

- Board of Directors Regulation on Backup and security of data and data center in Board of Directors Regulation Number 18/PerDir/X/2017 concerning Data Backup and Recovery Management Policy of PT. Jamkrindo Syariah and
- Board of Directors Regulation Number 051/Per-Dir/XII/2022 concerning Standard Operating Procedure (SOP) for Access Security Management of PT. Jamkrindo Syariah.
- Board of Directors Regulation concerning Information Technology Steering Committee No. 016/Per-Dir/III/2022, which includes active supervision by the



mendukung perkembangan usaha dan pencapaian tujuan bisnis Perusahaan, serta

- d. Peraturan Direksi tentang Disaster Recovery Plan (DRP) Nomor 050/Per-Dir/XII/2022 sebagai upaya perencanaan terperinci tentang cara menanggapi insiden yang tidak direncanakan pada sarana teknologi informasi.

6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh
Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Sistem pengendalian internal dilaksanakan secara menyeluruh kepada setiap Divisi di Perusahaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) PT. Jamkrindo Syariah, sistem pengendalian internal antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur yang terdiri dari:
 - 1) Integritas, nilai etika, kompetensi karyawan.
 - 2) Filosofi dan gaya manajemen.
 - 3) Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.
 - 4) Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia.
 - 5) Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
- b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
- c. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perusahaan.
- d. Sistem informasi dan komunikasi yaitu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan oleh Perusahaan.
- e. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Board of Directors and Board of Commissioners to ensure IT development can support business development and achievement of the Company's business objectives, and

- d. Board of Directors Regulation concerning Disaster Recovery Plan (DRP) Number 050/Per-Dir/XII/2022 as a detailed planning effort on how to respond to unplanned incidents in information technology facilities.

6. Comprehensive internal control system
The Board of Directors establishes an effective internal control system to secure company investments and assets. The internal control system is implemented comprehensively to every Division in the Company.

As explained in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners Number 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance of PT. Jamkrindo Syariah, the internal control system includes the following:

- a. Internal control environment within the Company implemented with discipline and structure consisting of:
 - 1) Integrity, ethical values, employee competence.
 - 2) Management philosophy and style.
 - 3) The way management exercises authority and responsibility.
 - 4) Human resource organization and development.
 - 5) Attention and direction given by the Board of Directors.
- b. Assessment of business risk management (risk assessment), which is a process to identify, analyze, and assess the management of relevant risks.
- c. Control activities, namely actions taken in a control process for Company activities at each level and unit within the Company's organizational structure, including authority, authorization, verification, reconciliation, performance appraisal, division of duties, and security of Company assets.
- d. Information and communication system, namely the process of reporting on operational activities, finances, as well as compliance with the provisions of laws and regulations by the Company.
- e. Monitoring, namely the process of assessing the quality of the internal control system, including the internal audit function at each level and structure of the Company's organization, so that it can be implemented optimally.



E. PENERAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS, DAN PEGAWAI

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Berdasarkan peraturan tersebut di Perusahaan terbagi atas 2 (dua) yakni, remunerasi dalam bentuk non natura dan remunerasi dalam bentuk natura.

- Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), tantiem dan bentuk remunerasi lainnya yang diberikan untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah mengacu pada:
 - Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-03/MBU/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - Peraturan Direksi Nomor 004/Per-Dir/IV/2023 tentang Ketentuan Penghasilan dan Fasilitas Direksi Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) PT. Jamkrindo Syariah.
 - Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Jamkrindo Syariah tanggal 12 Juli 2023 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT. Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2022.

Sesuai peraturan-peraturan tersebut diatas, remunerasi dalam bentuk non natura untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Direksi/Board of Directors	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Dewan Pengawas Syariah/ Sharia Supervisory Board
Gaji + Tunjangan Tahunan: 1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2. Tunjangan Asuransi Purna Jabatan 3. Tantiem Tunjangan Bulanan: 1. Tunjangan Perumahan	Honorarium + Tunjangan Tahunan: 1. Tunjangan Hari Raya 2. Asuransi Purna Jabatan 3. Tantiem Tunjangan Bulanan: 1. Tunjangan Transportasi	Honorarium Tunjangan Tahunan: Tunjangan Hari Raya

- Fasilitas lain dalam bentuk natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya. Fasilitas yang diberikan perusahaan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah terdiri dari:

Direksi/Board of Directors	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Dewan Pengawas Syariah/ Sharia Supervisory Board
Tunjangan Bulanan: • Kendaraan Dinas Beserta Biaya Operasionalnya • Fasilitas Kesehatan • Bantuan Hukum (Sebesar Pemakaian/ At Cost)	Tunjangan Bulanan: • Fasilitas Kesehatan • Bantuan Hukum (Sebesar Pemakaian/ At Cost)	Tunjangan Bulanan: • Fasilitas BPJS Kesehatan*) • Fasilitas BPJS Ketenagakerjaan*)

*) apabila belum ditanggungkan pada faskes bpjs ditempat lainnya

E. IMPLEMENTATION OF REMUNERATION POLICY AND OTHER FACILITIES FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, SHARIA SUPERVISORY BOARD, AND EMPLOYEES

1. Disclosure regarding remuneration policy and other facilities for members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board

Based on the regulation, the Company divides it into 2 (two) types: remuneration in non-in-kind form and remuneration in in-kind form.

- Remuneration in non-in-kind form, including salary and other fixed income, such as benefits, bonuses, and other forms of remuneration provided to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board refers to:
 - Regulation of the Minister of SOE RI Number PER-03/MBU/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises (SOE)
 - Board of Directors Regulation Number 004/Per-Dir/IV/2023 concerning Provisions for Income and Facilities of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT. Jamkrindo Syariah.
 - Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT. Jamkrindo Syariah dated July 12, 2023, concerning Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements of PT. Jamkrindo Syariah for Fiscal Year 2022.

According to the above regulations, remuneration in non-in-kind form for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board is as follows:

Tabel 23. Remunerasi Non Natura
Table 23. Non-In-Kind Remuneration

- Other facilities in in-kind form, namely other non-fixed income, including allowances for housing, transportation, health insurance, and other facilities. Facilities provided by the company to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board consist of:

Tabel 24. Remunerasi Natura
Table 24. In-Kind Remuneration



F. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN LEMBAGA PENJAMIN

1. Sebagai perusahaan penjaminan yang mengedepankan transparansi kondisi keuangan, PT. Jamkrindo Syariah menyampaikan laporan keuangan kepada pemegang saham secara periodik (bulanan, triwulan & tahunan). Disamping itu PT. Jamkrindo Syariah menyampaikan laporan keuangan bulanan kepada OJK melalui email serta mempublikasikan laporan keuangan tahunan melalui media. Berikut uraian penyampaian laporan keuangan PT. Jamkrindo Syariah:
2. Laporan Keuangan PT. Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2022 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, Tanuredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang merupakan firma anggotajaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi atau Wajar Tanpa Pengecualian.

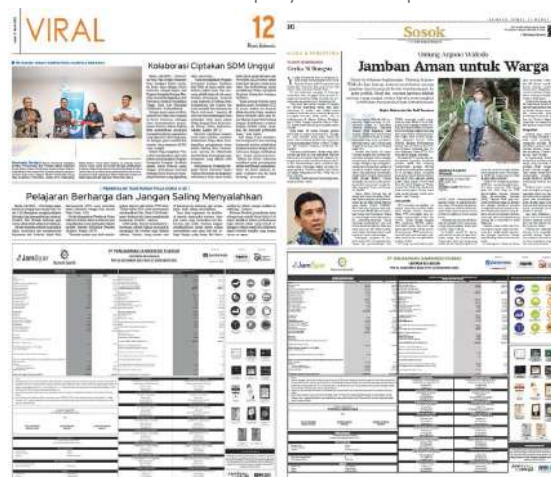
Hasil laporan keuangan tahun buku 2022 tersebut juga telah dipublikasikan secara terbuka pada Koran Kompas dan Koran Bisnis Indonesia per 31 Maret 2023. Laporan

F. TRANSPARENCY OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS OF THE GUARANTEE INSTITUTION

1. As a guarantee company that prioritizes transparency of financial conditions, PT. Jamkrindo Syariah submits financial reports to shareholders periodically (monthly, quarterly & annually). In addition, PT. Jamkrindo Syariah submits monthly financial reports to OJK via email and publishes annual financial reports through the media. Following is a description of the submission of financial reports of PT. Jamkrindo Syariah
2. The Financial Statements of PT. Jamkrindo Syariah for Fiscal Year 2022 were audited by Public Accounting Firm, Tanuredja, Wibisana, Rintis & Partners, which is a member firm of the PricewaterhouseCoopers (PwC) global network, with an Unmodified Fair Opinion or Unqualified Opinion.

The results of the financial statements for fiscal year 2022 have also been publicly published in Kompas Newspaper and Bisnis Indonesia Newspaper as of March 31, 2023. These Financial Statements are also published

Penyampaian Hasil Laporan Keuangan Perusahaan
Submission of Company Financial Report Results



Keuangan tersebut juga dipublikasikan melalui website PT. Jamkrindo Syariah.

3. PT. Jamkrindo Syariah secara regular mengirimkan laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan baik dalam format laporan yang sudah ditentukan maupun format laporan lainnya serta mengirimkan laporan keuangan kepada OJK sesuai dengan format yang telah ditetapkan melalui website www.ojk.go.id paling

through the website of PT. Jamkrindo Syariah.

3. PT. Jamkrindo Syariah regularly submits reports describing financial and non-financial conditions to stakeholders in both predetermined report formats and other report formats, and submits financial reports to the Financial Services Authority in accordance with the format established through the website www.ojk.go.id no later than the 8th day of the following month.

Contoh Tanda Terima Laporan Bulanan dan Laporan Realisasi Bisnis
Example of Monthly Report Receipt and Business Realization Report

OTORITAS JASA KEUANGAN	
Gedung Sinar Bina Djendral Sudirman Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10130, Indonesia Telp. 021-3858000 Pstx. 021-3857919	
TANDA TERIMA	
Nama:	PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH
Alamat:	Gd. Jamkrindo Lt. 7, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bander, Kemayoran Jakarta
NPWP:	71.227.393.7-027.000
Tanggal Pelaporan:	15 Feb 2023
Periode Pelaporan:	Laporan Bulanan Januari 2023
Tanggal Terima Pelaporan:	15 Feb 2023 00:00 WIB
Tanda terima ini merupakan bukti penerimaan yang sah atas laporan keuangan bulanan dan laporan realisasi bisnis yang diterima oleh OJK yang berlaku.	

OTORITAS JASA KEUANGAN	
Gedung Sinar Bina Djendral Sudirman Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10130, Indonesia Telp. 021-3858000 Pstx. 021-3857919	
TANDA TERIMA	
Nama:	PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH
Alamat:	Gd. Jamkrindo Lt. 7, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bander, Kemayoran Jakarta
NPWP:	71.227.393.7-027.000
Tanggal Pelaporan:	07 Des 2022
Periode Pelaporan:	Laporan Tahunan 2022
Tanggal Terima Pelaporan:	07 Des 2022 15:38 WIB
Tanda terima ini merupakan bukti penerimaan yang sah atas laporan keuangan bulanan dan laporan realisasi bisnis yang diterima oleh OJK yang berlaku.	

4. PT. Jamkrindo Syariah publishes a book of Activity and Financial Reports every semester and annually containing activities, achievements, and financial and non-financial performance in that period as an effort for transparency and accountability. In addition, the audited Financial Statements of PT. Jamkrindo Syariah have been uploaded on the company's website, namely www.jamkrindosyariah.co.id as a form of transparency

5. PT. Jamkrindo Syariah also provides explanatory information about guarantee products in the form of brochures and leaflets.



PRODUK NON CASH LOAN

TENTANG PERUSAHAAN

Perusahaan Jamkrindo Syariah adalah perusahaan syariah berbadan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Keuangan Syariah (JPUS) dengan kegiatan usaha meliputi kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan, investasi, asuransi syariah, reasuransi syariah, asuransi tabung, asuransi reasuransi tabung, asuransi jiwa, asuransi jiwa tabung, asuransi reasuransi jiwa yang dijamin oleh Tabung Asuransi Jamkrindo Syariah Syariah Syariah.





KONTRA PAK GARANSI

Kontak perusahaan dengan jaminan (pak) adalah salah satu cara untuk meminimalisir risiko yang dihadapi oleh perusahaan.



SURETY BOND

Asuransi penjaminan dengan jaminan (surety bond) adalah salah satu cara untuk meminimalisir risiko yang dihadapi oleh perusahaan.



CUSTOM BOND

Asuransi penjaminan dengan jaminan (custom bond) adalah salah satu cara untuk meminimalisir risiko yang dihadapi oleh perusahaan.



KAFALAH DISTRIBUTUSI BARANG

Asuransi penjaminan dengan jaminan (kafalah distribusi barang) adalah salah satu cara untuk meminimalisir risiko yang dihadapi oleh perusahaan.



KONTAK KAMI

 <http://jamkrindosyariah.co.id/>
 info@jamkrindo.id
 Alamat Kantor Pusat
 31142 Bandung (Jalan Lingkar No. 20, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, 10510)
 Telp. 021-2164777

Info lebih lanjut dapat dilihat melalui

<http://jamkrindosyariah.co.id>

JAMKRINDO SYARIAH

Memjamin Bisnis Anda Dengan Progress

<http://jamkrindosyariah.co.id>

Jaringan & Layanan

Kantor: Bandung, Yogyakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, Aceh, Lampung, Makassar, Balikpapan, Surabaya, Semarang, Banjarmasin

The screenshot displays the Jamkrindo website's service offerings. At the top, the Jamkrindo logo and tagline "Syariah JAMKRINDO" are visible. Below the navigation bar, a grid of 12 service categories is presented, each with a representative image and a title:

- Proyek**: Kolaborasi (dari Sosial Ramping)
- Proyek**: Kolaborasi Kredit (dalam Rangka R&D)
- Proyek**: Kolaborasi Supply Chain Financing
- Proyek**: Kolaborasi Pembiayaan Segitiga RUP, KPR
- Proyek**: Kemitraan Bank Garansi
- Proyek**: Customs Bond
- Proyek**: Surety Bond
- Kolaborasi Pembiayaan Umum**
- Proyek**: Kolaborasi Pembiayaan Konstruksi Pengadaan Barang Jasa
- Proyek**: Kolaborasi Pembiayaan Mikro
- Proyek**: Kolaborasi Pembiayaan Multiguna

At the bottom of the grid, the text "44 Post Views: 7,178" is displayed. Below the grid, the website's footer contains the Jamkrindo logo, contact information, and a list of services.

Laporan Tahunan 2023 Annual Report PT Jamkrindo Syariah 185



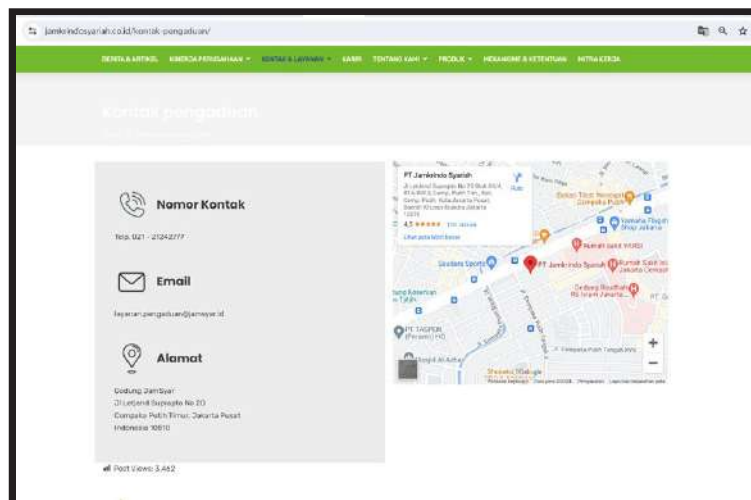
kegiatan literasi dan edukasi penjaminan sepanjang tahun 2023 (diambil dari laporan realisasi rencana bisnis), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Seminar Nasional Keuangan Inklusif bagi Pondok Pesantren di Hotel Grand Mercure Kemayoran pada tanggal 7 November 2023,
 - b. Sosialisasi Keuangan Inklusif Bagi Pemuda, Perempuan dan Santri di Pondok Pesantren Nurul Iman Wonogiri pada tanggal 2 Desember 2023,
 - c. Sosialisasi Inklusi Keuangan Bagi Pondok Pesantren Di Pondok Pesantren Asy-Syarifiyyah Sunan Gunung Jati, Indramayu pada tanggal 8 Desember 2023 ,
 - d. d. Focus Group Discussion Pemberdayaan Akses Keuangan dengan Skema Closedloop pada Klaster Peternakan Rakyat di Hotel Arch Bogor pada tanggal 12 Desember 2023.
 - e. Focus Group Discussion: Inklusi Keuangan Bagi UMK Pedesaan di Warunge Aisyah Seafood and Catering Tegal pada tanggal 15 Desember 2023
 - f. General Lecture : Kewirausahaan di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada pada Tanggal 12 Mei 2023.
7. Saat ini tersedia layanan dan pengaduan pelanggan yang tertera di situs resmi PT. Jamkrindo Syariah (www.jamkrindosyariah.co.id).

6. PT. Jamkrindo Syariah conducted socialization regarding literacy activities and guarantee education throughout 2023 (taken from the business plan realization report), with the following details:

- a. National Seminar on Financial Inclusion for Islamic Boarding Schools at Grand Mercure Hotel Kemayoran on November 7, 2023,
 - b. Financial Inclusion Socialization for Youth, Women, and Students at Nurul Iman Islamic Boarding School Wonogiri on December 2, 2023,
 - c. Financial Inclusion Socialization for Islamic Boarding Schools at Asy-Syarifiyyah Sunan Gunung Jati Islamic Boarding School, Indramayu on December 8, 2023,
 - d. Focus Group Discussion on Empowering Financial Access with Closed-loop Schemes in People's Livestock Clusters at Arch Hotel Bogor on December 12, 2023.
 - e. . Focus Group Discussion: Financial Inclusion for Rural Micro Enterprises at Warunge Aisyah Seafood and Catering Tegal on December 15, 2023
 - f. General Lecture: Entrepreneurship at the Faculty of Agricultural Technology, Gadjah Mada University on May 12, 2023.
7. Currently, customer service and complaints are available on the official website of PT. Jamkrindo Syariah (www.jamkrindosyariah.co.id).

Tampilan Web Layanan dan Pengaduan Pelanggan Perusahaan
Company Customer Service and Complaints Web View



G. RENCANA JANGKA PANJANG SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

1. Rencana jangka panjang Perusahaan
 - A. Rencana Jangka Panjang Perusahaan

Seiring dengan perkembangan bisnis saat ini, perusahaan dituntut untuk menjadi lebih dinamis dan fleksibel dalam fungsi perencanaan bisnis yang memungkinkan pemantauan setiap saat dan fleksibel terhadap perubahan sebagai bentuk antisipasi terhadap ketidakpastian di masa mendatang.

G. LONG-TERM PLAN AND ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET

1. Company's long-term plan
 - A. Company's Long-Term Plan

Along with current business developments, companies are required to be more dynamic and flexible in business planning functions that allow monitoring at any time and flexibility towards changes as a form of anticipation of future uncertainties.



Dalam konteks inilah rencana perusahaan dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang menjadi acuan bagi Perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategik, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. RJPP dibuat dengan jangka waktu 5 tahunan. RJPP Jamkrindo Syariah yang digunakan sampai saat ini adalah RJPP periode tahun buku 2020-2024. Arah pengembangan PT. Jamkrindo Syariah dalam 5 tahun ke depan terdiri dari tiga tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap I Penguatan Daya Saing (2020-2021) Tahapan awal roadmap strategi PT. Jamkrindo Syariah adalah penguatan daya saing dan penguatan kapabilitas internal kemudian menjadi modal perusahaan untuk mengembangkan daya saing dan penguatan pasar dalam tahap berikutnya. Perusahaan melakukan berbagai inisiatif untuk penguatan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi sumber daya. Reorganisasi, penguatan jumlah dan kompetensi SDM, dan perbaikan sistem manajemen adalah beberapa program strategis yang dijalankan pada fase ini.
- b. Tahap II Pengembangan Daya Saing (2022-2023) Tahapan kedua roadmap strategi PT. Jamkrindo Syariah adalah penguatan daya saing. Pada tahapan ini perusahaan melakukan berbagai inisiatif untuk pengembangan bisnis dan perluasan pasar berbasis teknologi dan manajemen risiko. Pengembangan daya saing dan penguatan pasar tidak terlepas dari teknologi mengingat lingkungan industri yang terus berkembang. Untuk itu, PT. Jamkrindo Syariah akan terus memperkuat sistem IT melalui pengembangan roadmap IT untuk meningkatkan pelayanan konsumen.
- c. Tahap III Pertumbuhan Berkesinambungan (2024 dan seterusnya) Setelah melalui dua tahapan sebelumnya, PT. Jamkrindo Syariah akan masuk ke tahap pertumbuhan berkesinambungan. Untuk mendukung arah pengembangan PT. Jamkrindo Syariah maka ditentukan sasaran strategis dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:
 - a. Perspektif Kepemimpinan Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan
 - Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko
 - Penguatan Budaya Internal
 - b. Perencanaan Strategis
 - Peningkatan Investasi Strategis
 - Pengembangan Organisasi
 - c. Fokus pada Pelanggan dan Pasar
 - Peningkatan pangsa pasar
 - Peningkatan jaringan
 - Peningkatan hubungan pelanggan
 - d. Fokus Tenaga Kerja
 - Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM
 - Peningkatan keterikatan & kepuasan pegawai
 - e. Efektivitas Produksi & Proses
 - Peningkatan kapasitas, efisiensi, efektivitas operasi
 - Peningkatan inovasi produk

In this context, the company's plan is outlined in the Company's Long-Term Plan (RJPP) which serves as a reference for the Company in making strategic decisions, both for the short and long term. RJPP is made with a 5-year timeframe. The RJPP of Jamkrindo Syariah that is used until now is the RJPP for the 2020-2024 fiscal year period. The development direction of PT. Jamkrindo Syariah in the next 5 years consists of three stages as follows:

- a. Stage 1 Strengthening Competitiveness (2020-2021) The initial stage of PT. Jamkrindo Syariah's strategy roadmap is strengthening competitiveness and internal capabilities which then becomes the company's capital to develop competitiveness and market strengthening in the next stage. The company undertakes various initiatives to strengthen capacity, effectiveness, and resource efficiency. Reorganization, strengthening the number and competence of human resources, and improving management systems are some of the strategic programs implemented in this phase.
- b. Stage II Development of Competitiveness (2022-2023) The second stage of PT. Jamkrindo Syariah's strategy roadmap is strengthening competitiveness. At this stage, the company undertakes various initiatives for business development and market expansion based on technology and risk management. The development of competitiveness and market strengthening is inseparable from technology given the evolving industry environment. For this reason, PT. Jamkrindo Syariah will continue to strengthen the IT system through the development of an IT roadmap to improve customer service.
- c. Stage III Sustainable Growth (2024 and beyond) After going through the two previous stages, PT. Jamkrindo Syariah will enter the stage of sustainable growth. To support the development direction of PT. Jamkrindo Syariah, strategic objectives are determined for the next five years as follows:
 - a. Governance Leadership and Social Responsibility Perspective
 - Improvement of Governance and Risk Management
 - Strengthening Internal Culture
 - b. Strategic Planning
 - Increase in Strategic Investment
 - Organizational Development
 - c. Focus on Customers and Markets
 - Increase in market share
 - Network expansion
 - Improvement of customer relations
 - d. Workforce Focus
 - Increase in HR capacity and quality
 - Increase in employee engagement & satisfaction
 - e. Production & Process Effectiveness
 - Increase in capacity, efficiency, operation effectiveness
 - Increase in product innovation



- Pengembangan sistem TI terintegrasi
- f. Hasil Keuangan
- Peningkatan Profit Berkesinambungan

Sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT. Jamkrindo Syariah periode 2020–2024, untuk mencapai sasaran strategis maka inisiatif strategis yang perlu dijalankan oleh PT. Jamkrindo Syariah, adalah sebagai berikut:

- a. Roadmap Fungsi Bisnis
 - 1) Mengembangkan portofolio produk.
 - 2) Meningkatkan investasi strategis.
 - 3) Memperluas kemitraan dan sinergi BUMN.
 - 4) Mengembangkan sistem hubungan pelanggan.
 - 5) Mengembangkan jaringan pasar.
 - 6) Meningkatkan kualitas layanan basis TI.
- b. Roadmap Fungsi Operasional
 - 1) Meningkatkan efisiensi proses internal.
 - 2) Mengembangkan integrasi sistem manajemen berbasis TI.
 - 3) Mengembangkan efektivitas standarisasi proses kerja.
 - 4) Memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.
- c. Roadmap Fungsi Keuangan, SDM & Umum
 - 1) Mengembangkan organisasi untuk memperkuat kapasitas.
 - 2) Mengembangkan internalisasi budaya perusahaan.
 - 3) Meningkatkan sistem pengelolaan SDM.
 - 4) Meningkatkan tata kelola perusahaan.

B. Rencana Kerja

Rencana Kerja dibuat dengan jangka waktu tahunan, biasanya disebut dengan Rencana Kerja Jangka Pendek atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). RKAP dibuat dengan disesuaikan sasaran usaha sesuai dengan jangka waktu dalam visi misi perusahaan.

Rencana Kerja Perusahaan tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Tema rencana kerja tahun 2023 adalah “Enhanced Competitiveness Strengthen the Business” dengan isu strategis yaitu :

1. Restrukturisasi Portofolio: Memperbaiki portofolio produk yang ada saat ini dengan fokus untuk menghilangkan potensi kerugian.
2. Restrukturisasi Model Bisnis: Perubahan bisnis model dengan memfokuskan pada produk yang memberi solusi kepada mitra, bukan sekedar komoditas.
3. Penguatan Fokus Bisnis (Sharpen Our Focus of Business): Meningkatkan fokus bisnis pada produk yang menjadi core competence Perusahaan untuk mengurangi price war dalam bersaing.
4. Tata Kelola yang berbasis risiko.
5. Risk Management yang Robust: Aplikasi prinsip kehati-hatian dalam usaha dengan mekanisme four eyes principle.

- Development of integrated IT systems
- f. Financial Results
- Increase in Sustainable Profit

In accordance with the Company’s Long-Term Plan of PT. Jamkrindo Syariah for the 2020–2024 period, to achieve strategic objectives, the strategic initiatives that need to be implemented by PT. Jamkrindo Syariah are as follows:

- a. Business Function Roadmap
 - 1) Develop product portfolio.
 - 2) Increase strategic investments.
 - 3) Expand partnerships and SOE synergies.
 - 4) Develop customer relationship systems.
 - 5) Develop market networks.
 - 6) Improve IT-based service quality.
- b. Operational Function Roadmap
 - 1) Increase internal process efficiency.
 - 2) Develop integration of IT-based management systems.
 - 3) Develop the effectiveness of work process standardization.
 - 4) Strengthen internal control systems and risk management.
- c. Finance, HR & General Affairs Function Roadmap
 - 1) Develop the organization to strengthen capacity.
 - 2) Develop internalization of corporate culture.
 - 3) Improve HR management systems.
 - 4) Enhance corporate governance.

B. Work Plan

The Work Plan is created with an annual timeframe, usually referred to as the Short-Term Work Plan or Corporate Work Plan and Budget (RKAP). The RKAP is created in accordance with business targets aligned with the timeframe in the company’s vision and mission.

The Company’s Work Plan for 2023 is prepared with consideration of the Company’s Long-Term Plan. The theme for the 2023 work plan is “Enhanced Competitiveness Strengthen the Business” with the following strategic issues:

1. Portfolio Restructuring: Improving the current product portfolio with a focus on eliminating potential losses.
2. Business Model Restructuring: Changing the business model by focusing on products that provide solutions to partners, not just commodities.
3. Strengthening Business Focus (Sharpen Our Focus of Business): Increasing business focus on products that are the Company’s core competence to reduce price wars in competition.
4. Risk-based Governance.
5. Robust Risk Management: Application of prudential principles in business with a four eyes principle mechanism.



6. Peningkatan Kompetensi SDM: Peningkatan kompetensi SDM di bidang penjaminan, tata kelola dan kualitas leadership skill.
7. Sinergi antar Anggota Holding: Kerjasama dalam ekosistem holding untuk menghasilkan efisiensi biaya.
8. Peningkatan Daya Saing Bisnis (Enhance Our Competitiveness): Peningkatan kompetensi bisnis untuk meningkatkan persaingan di pasar.

2. Anggaran tahunan

Anggaran tahunan Perusahaan sebagaimana dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2023 yang telah disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2023, menargetkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 antara lain sebagai berikut:

- Total Aset sebesar Rp. 3.010.145.508.742
- Total Liabilitas sebesar Rp. 1.614.416.401.554
- Total Ekuitas sebesar Rp. 1.395.729.107.188
- Laba Sebelum Pajak Rp. 285.476.667.472
- Laba Setelah Pajak Rp. 222.916.222.532

Laba sebelum pajak Tahun 2023 diperoleh dari total pendapatan penjaminan sebesar Rp. 847.737.042.281, total beban kafalah sebesar Rp. 533.288.941.201 dan total beban usaha Rp. 125.064.304.016.

H. PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG MENCAPAI 5% (LIMA PER SERATUS) ATAU LEBIH, YANG MELIPUTI JENIS DAN JUMLAH LEMBAR SAHAM

1. Direksi
2. Dewan Komisaris

6. HR Competency Enhancement: Improving HR competencies in the areas of assurance, governance, and quality leadership skills.
7. Synergy among Holding Members: Cooperation within the holding ecosystem to generate cost efficiency.
8. Enhancement of Business Competitiveness (Enhance Our Competitiveness): Improving business competencies to increase market competition.

2. Annual budget

The Company's annual budget as stated in the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) for Fiscal Year 2023 which has been approved through the General Meeting of Shareholders (GMS) regarding the Ratification of the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of PT. Jamkrindo Syariah for Fiscal Year 2023, targets the Financial Statements as of December 31, 2023, including the following:

- Total Assets of Rp. 3,010,145,508,742
- Total Liabilities of Rp. 1,614,416,401,554
- Total Equity of Rp. 1,395,729,107,188
- Profit Before Tax of Rp. 285,476,667,472
- Profit After Tax of Rp. 222,916,222,532

Profit before tax for 2023 is derived from total guarantee income of Rp. 847,737,042,281, total kafalah expenses of Rp. 533,288,941,201, and total operating expenses of Rp. 125,064,304,016.

H. DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS REACHING 5% (FIVE PERCENT) OR MORE, INCLUDING THE TYPE AND NUMBER OF SHARES

1. Board of Directors
2. Board of Commissioners

Tabel 29. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi
Table 29. Disclosure of Share Ownership of Board of Directors Members

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1	Hari Purnomo	A B C D	- - - -	- - - -
2	Loesdarwanto	A B C D	- - - -	- - - -
3	Endang Sri Winarni	A B C D	- - - -	- - - -

Keterangan:

- a. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- b. Lembaga penjamin lain;
- c. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
- d. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek



I. PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DPS LAIN, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM LEMBAGA PENJAMIN TEMPAT ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS DIMAKSUD MENJABAT

I. COMMISSIONERS AND MEMBERS OF THE DPS WITH OTHER MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, OTHER MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, OTHER MEMBERS OF THE DPS, AND/OR SHAREHOLDERS OF THE GUARANTEE INSTITUTION WHERE THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, AND MEMBERS OF THE DPS ARE INTENDED TO SERVE

Tabel 30. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi
Table 30. Disclosure of Share Ownership of Board of Directors Members

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1	Drs. Aribowo, Ak, MM	A B C D	- - - -	- - - -
2	Edy Utomo	A B C D	- - - -	- - - -
3	Ali Basya Syamsudin	A B C D	- - - -	- - - -

Keterangan:
a. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
b. Lembaga penjamin lain;
c. Perusahaan/jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
d. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

1. Financial relationships and family relationships of members of the Board of Directors with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, and/or shareholders of the Guarantee Institution where the members of the Board of Directors serve

Tabel 31. Pengungkapan Hubungan Keluarga Direksi
Table 31. Disclosure of Family Relationships of the Board of Directors

No.	Nama/Name	Hubungan Dengan/ Relationship With	Bentuk Hubungan/Type of Relationship				Ket./ Note
			Keuangan/Financial		Keluarga/Family		
			Ya/yes	Tidak/No	Ya/Yes	Tidak/no	
1	Hari Purnomo	Direksi Lainnya Dewan Komisaris DPS Pemegang Saham	- - - -	✓ - ✓ -	- - - -	✓ ✓ ✓ -	- - - -
2	Loesdarwanto	Direksi Lainnya Dewan Komisaris DPS Pemegang Saham	- - - -	✓ ✓ ✓ -	- - - -	✓ ✓ ✓ -	- - - -
3	Endang Sri Winarni	Direksi Lainnya Dewan Komisaris DPS Pemegang Saham	- - - -	✓ ✓ ✓ -	- - - -	✓ ✓ ✓ -	- - - -

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

2. Financial relationships and family relationships of members of the Board of Commissioners with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, and/or shareholders of the Guarantee Institution where the members of the Board of Directors serve

Tabel 32. Pengungkapan Hubungan Keluarga Direksi
Table 32. Disclosure of Family Relationships of the Board of Directors

No.	Nama/Name	Hubungan Dengan/ Relationship With	Bentuk Hubungan/Type of Relationship				Ket./ Note
			Keuangan/Financial		Keluarga/Family		
			Ya/yes	Tidak/No	Ya/Yes	Tidak/no	
1	Aribowo	Direksi Lainnya Dewan Komisaris DPS Pemegang Saham	- - - -	✓ ✓ ✓ -	- - - -	✓ ✓ ✓ -	- - - -
2	Edy Utomo	Direksi Lainnya Dewan Komisaris DPS Pemegang Saham	- - - -	✓ ✓ ✓ -	- - - -	✓ ✓ ✓ -	- - - -
3	Ali Basya Syamsudin	Direksi Lainnya Dewan Komisaris DPS Pemegang Saham	- - - -	✓ ✓ ✓ -	- - - -	✓ ✓ ✓ -	- - - -



3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

3. Financial relationships and family relationships of members of the DPS with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, other members of the DPS, and/or shareholders of the Guarantee Institution where the members of the Board of Directors serve

Tabel 33. Pengungkapan Hubungan Keluarga Direksi
Table 33. Disclosure of Family Relationships of the Board of Directors

No.	Nama/Name	Hubungan Dengan/ Relationship With	Bentuk Hubungan/Type of Relationship				Ket./ Note
			Keuangan/Financial		Keluarga/Family		
			Ya/yes	Tidak/No	Ya/Yes	Tidak/no	
1	Dr. H. Abdul Aziem, S.H, M.Pd	Direksi Lainnya Dewan Komisaris DPS Lainnya Pemegang Saham	-	✓	-	✓	-
			-	✓	-	✓	-
			-	✓	-	✓	-
			-	✓	-	✓	-

J. PENGUNGKAPAN HAL PENTING LAINNYA

- Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal**
Selama kurun waktu tersebut tidak terdapat pengunduran diri yang dilakukan oleh Auditor Eksternal maupun pemberhentian yang dilakukan terhadap Auditor Eksternal.
- Transaksi material dengan pihak terkait**
PT. Jamkrindo Syariah pada dapat disampaikan pada tahun 2023 tidak memiliki transaksi Material dengan Pihak Terkait.
- Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi**
Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direksi, Dewan Komisaris, karyawan atau para pemegang saham utama sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau pembuatan keputusan secara objektif.

J. DISCLOSURE OF OTHER IMPORTANT MATTERS

- Resignation or dismissal of external auditor**
During that period, there was no resignation by the External Auditor or dismissal of the External Auditor.
- Material transactions with related parties**
PT. Jamkrindo Syariah can state that in 2023 it did not have Material Transactions with Related Parties.
- Ongoing conflicts of interest and/or those that may occur**
Conflict of Interest is a difference between the economic interests of the Company and the personal economic interests of the Board of Directors, Board of Commissioners, employees, or major shareholders that could affect the objective performance of duties or decision-making.

Tabel 34. Benturan Kepentingan Antar Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai Lembaga Penjamin
Table 34. Conflicts of Interest Between Directors, Board of Commissioners, and Employees of the Guarantee Institution

No.	Nama & jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan kepentingan / Name & Position of Party with Conflict of Interest	Nama Dan Jabatan Pengambil Keputusan / Name and Position of Decision Maker	Jenis Transaksi / Type of Transaction	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) / Transaction Value (in Rupiah)	Keterangan / Note
1	-	-	-	-	-

Tidak terdapat benturan kepentingan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Lembaga Penjamin.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Para Pemegang Saham Utama, Dewan Komisaris, Direksi serta Karyawan dilarang menyalahgunakan jabatan dan wewenang serta harus senantiasa mendahulukan kepentingan Perusahaan. Pada saat pengambilan keputusan, apabila terdapat pihak yang memiliki benturan kepentingan, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak pengambil Keputusan lainnya dan tidak diperkenankan ikut serta dalam pengambilan keputusan.

There were no conflicts of interest by members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or employees of the Guarantee Institution.

In carrying out their duties and obligations, the Major Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees are prohibited from misusing their positions and authority and must always prioritize the interests of the Company. When making decisions, if there are parties with conflicts of interest, those parties must notify other Decision-makers and are not permitted to participate in decision-making.



Dewan Komisaris, Direksi atau Karyawan tidak diperbolehkan oleh Perusahaan untuk mengambil kesempatan atau peluang usaha bagi dirinya sendiri didalam menjalankan tugas mereka apabila kondisi tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan ekonomis Perusahaan. Adapun cakupan benturan kepentingan yang dimaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- Apabila melakukan pekerjaan di luar Perusahaan atau terlibat dalam Perusahaan pesaing (competitor).
- Menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, orang lain ataupun Perusahaan lain (termasuk di dalamnya perusahaan pesaing).
- Menggunakan wewenang untuk memilih pemasok atas dasar pertimbangan hubungan kedekatan (kakak, adik, ipar, saudara jauh, sahabat, anggota partai politik, dan lain-lain) bukan pertimbangan professional.

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin Selain hal-hal yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, selama tahun 2023 tidak terdapat informasi yang bersifat material.

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

Pada tahun 2023 tidak terdapat pengunduran diri Komisaris Independen. Namun demikian, pada tahun tersebut, pemegang saham melakukan pemberhentian Komisaris Independen melalui Akta Pernyataan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jamkrindo Syariah Nomor 42 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Wildan dengan jabatan Komisaris Independen.

6. Sertifikasi Perusahaan

The Board of Commissioners, Directors, or Employees are not allowed by the Company to take business opportunities or prospects for themselves in carrying out their duties if such conditions could conflict with the economic interests of the Company. The scope of the conflicts of interest referred to includes but is not limited to:

- If performing work outside the Company or involved in competitor companies.
- Using confidential information for personal interests, others, or other companies (including competitor companies).
- Using authority to select suppliers based on close relationship considerations (siblings, in-laws, distant relatives, friends, political party members, etc.) rather than professional considerations.

4. Other material information regarding the Guarantee Institution

Apart from the matters that have been conveyed as stated above, during 2023 there was no material information.

5. Resignation or dismissal of Independent Commissioner

In 2023, there was no resignation of an Independent Commissioner. However, in that year, the shareholders dismissed an Independent Commissioner through the Deed of Statement Outside the General Meeting of Shareholders of PT. Jamkrindo Syariah Number 42 dated July 25, 2023, for Wildan with the position of Independent Commissioner.

6. Company Certification

Tabel 35. Sertifikasi Perusahaan
Table 35. Company Certification

No.	Materi Sertifikasi / Certification Material	Tanggal / Date	Nilai / Value	Penyelenggara / Organizer
1	Sertifikat Pemeringkatan Atas PT. Jamkrindo Syariah Periode 5 April 2023 Sampai Dengan 1 April 2024	6 April 2023	A+ / Stable (Single A Plus; Stable Outlook)	PEFINDO
2	Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai ISO 37001:2016	29 AGUSTUS 2023	-	SAI GLOBAL INTERTEK



7. Tenaga Kerja Asing Perusahaan selama Tahun 2023 tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

6. Foreign Workers The Company did not employ any foreign workers during 2023.

Tabel 36. Tenaga Kerja Asing Perusahaan
Table 36. Company's Foreign Workers

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Nomor Fit And Proper Test / Fit And Proper Test Number	Kits / Permit		IMTA	
				Izin Kerja / Work Permit	Masa berlaku / Validity Period	No. Izin / Permit Number	Masa berlaku / Validity Period
1	-	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)
Selama tahun 2023, tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS serta Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.

7. Number of internal fraud cases
During 2023, there were no internal fraud cases committed by Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors, and Members of the Sharia Supervisory Board, as well as Permanent and Non-Permanent Employees.

Tabel 37. Tenaga Kerja Asing Perusahaan
Table 37. Company's Foreign Workers

Penyimpangan Internal Dalam 1 (Satu) Tahun / Internal Violations In 1 (One) Year	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh / Number of Cases Conducted By		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota Dps / Members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and DPS Members	Pegawai Tetap / Permanent Employees	Pegawai Tidak Tetap / Non-Permanent Employees
Total Penyimpangan / Total Violations	-	-	-
Telah Diselesaikan / Resolved	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian Di Internal / In Internal Resolution Process	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian / Resolution Not Yet Started	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum / Followed Up Through Legal Process	-	-	-

9. Permasalahan Hukum
Selama tahun 2023, PT. Jamkrindo Syariah terlibat

8. Permasalahan Hukum
Selama tahun 2023, PT. Jamkrindo Syariah terlibat

Tabel 38. Permasalahan Hukum Perusahaan
Table 38. Company's Legal Issues

Permasalahan Hukum / Legal Issues	Jumlah Kasus / Number of Cases	
	Perdata / Civil	Pidana / Criminal
Telah Mendapatkan Putusan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap / Cases with Final and Binding Legal Decisions	2	-
Dalam Proses Penyelesaian Di Pengadilan Dan Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Kasus Perdata / Cases in Settlement Process in Court and in Alternative Dispute Resolution Institutions for Civil Cases	2	-
Total / Total	4	-

langsung sebagai Tergugat yang mempunyai permasalahan hukum baik secara perdata maupun pidana.

langsung sebagai Tergugat yang mempunyai permasalahan hukum baik secara perdata maupun pidana.



9. Etika bisnis Lembaga Penjamin

Etika Bisnis PT. Jamkrindo Syariah diatur dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT. Jamkrindo Syariah Nomor 19/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-07/DKJamsyar/ VIII/2015 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Jamkrindo Syariah. Di dalam Pedoman Perilaku (Code of Conduct) tersebut dijelaskan mengenai Standar Perilaku Perusahaan yang mencakup:

- a. Etika Perusahaan dengan Stakeholders
- b. Etika Perusahaan dengan Karyawan
- c. Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja (Pelanggan)
- d. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa (Supplier)
- e. Etika Perusahaan dengan Pesaing
- f. Etika Perusahaan dengan Pemerintah
- g. Etika Perusahaan dengan Masyarakat
- h. Etika Perusahaan dengan Media Massa

Dalam rangka menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Karyawan PT. Jamkrindo Syariah, telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban secara amanah dan tidak menyimpang dari Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT. Jamkrindo Syariah, dengan menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

9. Business Ethics of the Guarantee Institution

The Business Ethics of PT. Jamkrindo Syariah is regulated in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT. Jamkrindo Syariah Number 19/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-07/DKJamsyar/VIII/2015 concerning the Code of Conduct of PT. Jamkrindo Syariah. The Code of Conduct explains the Company's Behavioral Standards which include:

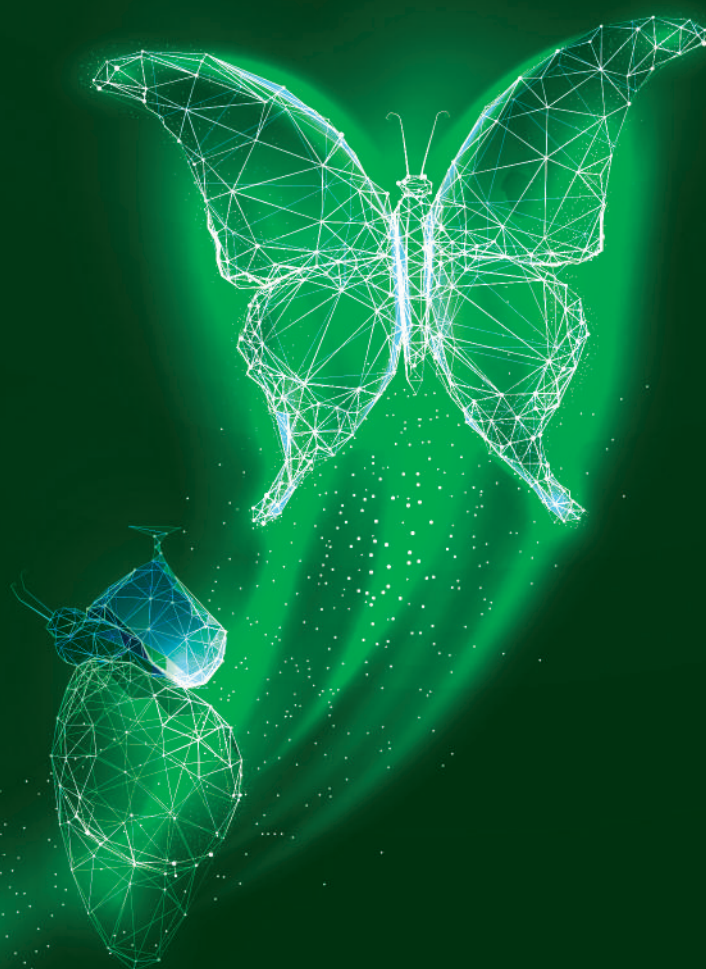
- a. Company Ethics with Stakeholders
- b. Company Ethics with Employees
- c. Company Ethics with Business Partners (Customers)
- d. Company Ethics with Goods/Services Providers (Suppliers)
- e. Company Ethics with Competitors
- f. Company Ethics with the Government
- g. Company Ethics with the Community
- h. Company Ethics with Mass Media

In order to enforce Good Corporate Governance, the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Employees of PT. Jamkrindo Syariah have committed to carrying out their duties and obligations responsibly and without deviating from the Code of Conduct of PT. Jamkrindo Syariah, by signing a Statement of Commitment to the Implementation of Good Corporate Governance.



**PENILAIAN SECARA MANDIRI
(SELF ASSESSMENT)
ATAS PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK OLEH
PT. JAMKRINDO SYARIAH**

***SELF ASSESSMENT ON THE
IMPLEMENTATION OF GOOD
CORPORATE GOVERNANCE
BY PT. JAMKRINDO SYARIAH***





**PENILAIAN SECARA MANDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK OLEH
PT. JAMKRINDO SYARIAH**

**A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi,
Dewan Komisaris, Dan DPS**

**SELF ASSESSMENT ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD
CORPORATE GOVERNANCE BY PT. JAMKRINDO SYARIAH**

**A. Implementation of Duties and Responsibilities of the
Board of Directors, Board of Commissioners, and DPS**

Direksi / Board of Directors

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/ Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Ap- propriate	2 Sesuai / Appropri- ate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropri- ate	4 Kurang Sesuai / Less Appropri- ate	5 Tidak Sesuai / Not Appropri- ate			
1	Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan sebagai Direksi. Directors have knowledge relevant to their positions as directors.		4						4
2	Direksi mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional. Directors are able to act with good faith, prudence and professionalism.		4						4
3	Direksi bertindak untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan. Directors act in the interest of the Guarantee Institution, guarantors, and/or guarantee recipients		4						4
4	Direksi mendahulukan kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan, daripada kepentingan pribadi. Directors prioritize the interests of the Guarantee Institution, guarantors, and/or guarantee recipients over personal interests.		4						4
5	Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan. Directors are able to make decisions independently without intervention from any party in the interest of the Guarantee Institution, guarantors, and/or guarantee recipients.		4						4
6	Direksi mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Lembaga Penjamin. Directors are able to avoid actions that may cause conflicts of personal interest or lead to losses for the Guarantee Institution.		4						4
7	Direksi menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis. Directors make decisions that are effective, accurate, and independent without having interests that may interfere with their ability to perform their duties independently and critically.		4						4
8	Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Lembaga Penjamin dalam melaksanakan tugasnya. Directors comply with laws, regulations, articles of association, and other internal regulations of the Guarantee Institution in performing their duties.		4						4
9	Direksi mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Directors manage the Guarantee Institution with integrity and responsibility.		4						4
10	Direksi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS. Directors are able to account for their performance to RUPS		4						4
11	Direksi telah memastikan agar Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan terjamin dan/atau penerima jaminan. Directors ensure the Guarantee Institution considers the interests of all parties, especially the interests of guarantors and/or guarantee recipients.		4						4
12	Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Lembaga Penjamin kepada Dewan Komisaris dan DPS. Directors have provided timely and adequate information to the Guarantee Institution's Board of Commissioners and DPS.		4						4
13	Direksi telah membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite, karyawan Lembaga Penjamin, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi. Directors have assisted in meeting DPS needs in utilizing members of the committee, Guarantee Institution employees, and organizational resources under the Board of Directors.		4						4
14	Direksi mampu menghindarkan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat. Directors are able to avoid transactions with conflicts of interest at the Guarantee Institution where the Board of Directors member is appointed.		4						4



No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/ Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Ap- propriate	2 Sesuai / Appropri- ate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropri- ate	4 Kurang Sesuai / Less Appropri- ate	5 Tidak Sesuai / Not Appropri- ate			
15	Direksi mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat. Directors are able to not use their position at the Guarantee Institution where they are appointed for personal interest or activities or other matters that may harm or reduce profits of the Guarantee Institution where the Board of Directors member is appointed.		4						4
16	Direksi mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Directors are able to avoid receiving personal benefits or advantages from the Guarantee Institution where the Board of Directors member is appointed other than remuneration and facilities determined based on RUPS decisions		4						4
17	Direksi mampu untuk menolak permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS. Directors are able to reject shareholder requests related to activities of the Guarantee Institution where the Board of Directors member is appointed if they are contrary to regulations that have been stipulated in RUPS.		4						4
18	Hasil rapat Direksi secara rutin telah dituangkan dalam risalah rapat Direksi. Minutes of Board of Directors meetings are routinely documented in Board of Directors meeting minutes.	5							5
19	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik. Meeting minutes documenting joint decisions of all Board of Directors members are well documented.	5							5
20	Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi secara jelas. Involvement of members in Board of Directors meetings including differences of opinion (dissenting opinions) is clearly documented.		4						4
21	Anggota Direksi Lembaga Penjamin berdomisili di Indonesia. Members of the Guarantee Institution's Board of Directors are domiciled in Indonesia						5		5
22	Lembaga Penjamin yang didalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia. Guarantee Institutions that have foreign ownership either directly or indirectly must have at least 50% (fifty percent) of Board of Directors members who are Indonesian citizens.						5		5
23	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi yang berwenang. Directors with foreign citizenship have valid work permits and residence permits						5		5
24	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang. Directors with foreign citizenship have valid work permits and residence permits.						5		5
25	Direksi Lembaga Penjamin memiliki komite investasi. The Guarantee Institution's Board of Directors has an investment committee.						5		5
26	Anggota Direksi Lembaga Penjamin tidak merangkap jabatan pada Lembaga Penjamin atau badan usaha lain. Members of the Guarantee Institution's Board of Directors do not hold positions at other Guarantee Institutions or business entities.						5		5
27	Anggota Direksi tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan. Board members are not from active employees or officials of the Financial Services Authority						5		5
29	Direksi Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. The Guarantee Institution's Board of Directors holds Board of Directors meetings periodically at least 1 (one) time per month						5		5
30	Direksi Lembaga Penjamin menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun. The Guarantee Institution's Board of Directors attends at least 50% (fifty percent) of the total Board of Directors meetings in a 1 (one) year period						5		5



No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/ Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator						Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Appropriate	2 Sesuai / Appropriate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropriate	4 Kurang Sesuai / Less Appropriate	5 Tidak Sesuai / Not Appropriate				
31	Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. The number of Board of Directors meetings held and attendance of each Board member must be stated in the Good Corporate Governance Implementation Report							5		5

Dewan Komisaris

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/ Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator						Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Appropriate	2 Sesuai / Appropriate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropriate	4 Kurang Sesuai / Less Appropriate	5 Tidak Sesuai / Not Appropriate				
1	Dewan Komisaris mampumelaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. The Board of Commissioners is able to monitor and evaluate the implementation and performance of the Board of Directors.		4							4
2	Dewan Komisaris mampu mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak. The Board of Commissioners is able to oversee the Board of Directors in maintaining relationships with all parties.		4							4
3	Dewan Komisaris mampu memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. The Board of Commissioners is able to monitor the effectiveness of the Company's good governance implementation.		4							4
4	Dewan Komisaris mampu memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris. The Board of Commissioners is able to provide recommendations during the selection of members of committees whose organizational structure is under the Board of Commissioners.	5								5*)
5	Dewan Komisaris mampu memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Lembaga Penjamin, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. The Board of Commissioners is able to implement certain duties to follow up on audit findings and recommendations from work units that carry out the internal control function, external auditors, Financial Services Authority and/or other supervisory authorities.		4							4
6	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat. Board of Commissioners members are able to not conduct transactions that have conflicts of interest with the business activities of the Guarantor Institution where the Board of Commissioners members serve.		4							4
7	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat. Board of Commissioners members are able to not take advantage of their position at the Guarantor Institution for personal, family, and/or other party interests that harm or reduce the profits of the Guarantor Institution where the Board of Commissioners members serve.		4							4
8	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Board of Commissioners members are able to not take and/or receive personal benefits from the Guarantor Institution where they serve, other than remuneration and facilities determined in the GMS.		4							4
9	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak mencampuri kegiatan operasional Lembaga Penjamin yang menjadi tanggung jawab Direksi. Board of Commissioners members are able to not get involved in operational decision-making of the Guarantor Institution which is the responsibility of the Board of Directors.		4							4



No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/ Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Appropriate	2 Sesuai / Appropriate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropriate	4 Kurang Sesuai / Less Appropriate	5 Tidak Sesuai / Not Appropriate			
10	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris. The results of Board of Commissioners meetings are disclosed in the minutes of Board of Commissioners meetings.	5							5
11	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik. Meeting minutes that include all members of the Board of Commissioners' opinions are well documented.	5							5
12	Keputusan Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi secara jelas. The Board of Commissioners' work plan, including board meeting schedules, has been communicated to the Board of Directors, including differences in views (dissenting opinions) that occur explicitly.		4						4
13	Dewan Komisaris mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas. The Board of Commissioners is able to establish effective communication with the Board of Directors and can act independently in implementing its duties.		4						4
14	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. The Guarantor Institution has at least 2 (two) members of the Board of Commissioners.						5		5
15	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia. The Guarantor Institution has at least 1 (one) Commissioner who is domiciled in Indonesia.						5		5
16	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang. Board of Commissioners members who have foreign citizenship have expertise in guarantee business and are sourced from international organizations.						5		5
17	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi berwenang. Board of Commissioners members who are foreign citizens have expertise in guarantee business and come from guarantor institutions.						5		5
18	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain. The Board of Commissioners does not currently serve as a member of the Board of Commissioners at more than 3 (three) Guarantor Institutions or other business entities.						5		5
19	Anggota Dewan Komisaris tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan. Board of Commissioners members do not come from employees or previous board members.						5		5
20	Anggota Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Board of Commissioners members receive positive assessment from the Board of Commissioners who evaluate part of the Company's good governance implementation report.						5		5
21	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Board of Commissioners members of the Guarantor Institution have organized Board of Commissioners meetings at least 1 (one) time within 3 (three) months.						5		5
22	Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun. Board of Commissioners members have attended Board of Commissioners meetings at least 75% (seventy-five percent) of the total Board of Commissioners meetings in 1 (one) year.						5		5
23	Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. The number of Board of Commissioners meetings that have been held and the attendance of each Board of Commissioners member have been included in the Company's good governance implementation report.						5		5



DPS

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/ Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Ap- propriate	2 Sesuai / Appropri- ate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropri- ate	4 Kurang Sesuai / Less Approp- riate	5 Tidak Sesuai / Not Approp- riate			
1	DPS mampu bertindak sebagai wakil Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah pada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. DPS is capable of acting as a representative of Sharia Guarantee Companies, Sharia Reinsurance Companies, or Guarantee Companies that have sharia business units at the National Sharia Council – Indonesian Ulama Council.		4						4
2	DPS mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional. DPS is capable of acting in good faith, honestly, and professionally.		4						4
3	DPS mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya. DPS is capable of acting in the interests of Sharia Guarantee Companies, Sharia Reinsurance Companies, or Guarantee Companies that have sharia business units and/or other stakeholders.		4						4
4	DPS mampu mendahulukan kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi. DPS is capable of prioritizing the interests of Sharia Guarantee Companies, Sharia Reinsurance Companies, or Guarantee Companies that have sharia business units and/or other stakeholders over personal interests.		4						4
5	DPS mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya. DPS is capable of making decisions based on independent and objective assessments for the benefit of Sharia Guarantee Companies, Sharia Reinsurance Companies, or Guarantee Companies that have sharia business units and/or other stakeholders.		4						4
6	DPS mampu menghindari penyalahgunaan kewenangan untuk mendapat keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah. DPS is capable of avoiding abuse of authority to obtain improper personal benefits or cause losses to Sharia Guarantee Companies, Sharia Reinsurance Companies, or Guarantee Companies that have sharia business units.		4						4
7	DPS mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif. DPS is capable of ensuring effective, appropriate, and timely decision-making, and acting independently without having interests that could interfere with its ability to carry out duties independently and objectively.		4						4
8	DPS mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah sesuai dengan prinsip syariah. DPS is capable of carrying out supervisory duties and providing advice and recommendations to the Board of Directors so that the activities of Sharia Guarantee Companies, Sharia Reinsurance Companies, or Guarantee Companies that have sharia business units comply with sharia principles.		4						4
9	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik. Meeting minutes representing joint decisions of all DPS members have been well documented.			3					3
10	Keputusan DPS telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi secara jelas. DPS decisions have been recorded in meeting minutes, including any dissenting opinions that occur clearly.			3					3



No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/ Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Appropriate	2 Sesuai / Appropriate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropriate	4 Kurang Sesuai / Less Appropriate	5 Tidak Sesuai / Not Appropriate			
11	Anggota DPS mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat. DPS members are capable of not conducting transactions that have conflicts of interest with the activities of Sharia Guarantee Companies, Sharia Reinsurance Companies, and sharia business units where the respective DPS members serve.		4						4
12	Anggota DPS mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan mengurangi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat. DPS members are capable of not exploiting their positions for personal, family, and/or other party interests that reduce assets or reduce profits of Sharia Guarantee Companies, Sharia Reinsurance Companies, and sharia business units where the respective DPS members serve.		4						4
13	Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS. DPS members do not take and/or receive personal benefits from Sharia Guarantee Companies, Sharia Reinsurance Companies, and sharia business units where the respective DPS members serve, except for remuneration and other facilities determined based on the General Meeting of Shareholders.		4						4
14	DPS meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah menyangkut kegiatan Pembiayaan Syariah, akad Pembiayaan Syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah, dan praktik pemasaran pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah. DPS requests explanations from Board of Directors members regarding policies or actions of Board of Directors members that do not comply with Sharia Principles concerning Sharia Financing activities, Sharia Financing contracts marketed by Sharia Guarantee Companies, Sharia Reinsurance Companies, and sharia business units, and sharia financing marketing practices conducted by Sharia Guarantee Companies, Sharia Reinsurance Companies, and sharia business units.		4						4
15	DPS melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS terkait penolakan Direksi atas hasil penilaian DPS terhadap penerapan prinsip syariah oleh Direksi. DPS reports completely and comprehensively to the Financial Services Authority and copies the Board of Directors from the time explanations from Board of Directors members are received by DPS regarding the Board of Directors' rejection of DPS's assessment results on the implementation of sharia principles by the Board of Directors.	5							5**)
16	DPS dengan segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan sebagaimana yang dimintakan DPS agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS immediately reports completely and comprehensively to the Financial Services Authority and copies the Board of Directors from the time it becomes known that Board of Directors members have not made improvement efforts as requested by DPS to comply with sharia principles.	5							5***)
17	DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. DPS is appointed by the General Meeting of Shareholders upon recommendation of the National Sharia Council – Indonesian Ulama Council.						5		5
18	Pengangkatan DPS oleh RUPS dituangkan dalam akta notaris. The appointment of DPS by the General Meeting of Shareholders is recorded in a notarial deed.						5		5
19	Anggota DPS memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas Direksi terkait aspek syariah terhadap kegiatan operasional Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah. DPS members provide recommendations regarding the implementation of Board of Directors duties related to sharia aspects of operational activities of Sharia Guarantee Companies, Sharia Reinsurance Companies, and sharia business units.						5		5



No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/ Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Ap- propriate	2 Sesuai / Appropri- ate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropri- ate	4 Kurang Sesuai / Less Appropri- ate	5 Tidak Sesuai / Not Appropri- ate			
20	Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya. DPS members do not hold concurrent positions as Board of Directors members, Board of Commissioners members, or DPS members at more than 4 (four) other sharia financial institutions.						5		5
21	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait kegiatan kegiatan penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah. DPS carries out supervision and provides advice and recommendations related to sharia guarantee and sharia reinsurance activities.						5		5
22	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait akad penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah. The Sharia Supervisory Board carries out supervision and provides advice and recommendations related to sharia guarantee and sharia reinsurance contracts marketed by Sharia Guarantee Companies, Sharia Reinsurance Companies, and sharia business units.						5		5
23	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah. The Sharia Supervisory Board carries out supervision and provides advice and recommendations related to sharia guarantee and sharia reinsurance marketing practices conducted by Sharia Guarantee Companies, Sharia Reinsurance Companies, and sharia business units.						5		5
24	Dalam pelaksanaan tugas, DPS dibantu oleh anggota komite dan/atau pegawai yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi. In carrying out its duties, the Sharia Supervisory Board is assisted by committee members and/or employees whose organizational structure is under the Board of Commissioners and/or Board of Directors.						5		5
25	Anggota DPS memperoleh informasi dari Direksi mengenai praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah secara lengkap dan tepat waktu. Sharia Supervisory Board members obtain information from the Board of Directors regarding sharia guarantee and sharia reinsurance marketing practices conducted by Sharia Guarantee Companies, Sharia Reinsurance Companies, and sharia business units completely and in a timely manner.						5		5
26	Anggota DPS menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Sharia Supervisory Board members hold meetings regularly at least 4 (four) times in 1 (one) year.						5		5
27	Hasil rapat anggota DPS dituangkan dalam risalah rapat DPS. The results of Sharia Supervisory Board member meetings are recorded in Sharia Supervisory Board meeting minutes.						5		5
28	Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. The number of Sharia Supervisory Board meetings held and the attendance of each Sharia Supervisory Board member are included in the Good Corporate Governance implementation report.						5		5

Jumlah Skor Indikator / Total Indicator Score	361
Total Indikator / Number of Indicators	81
Bobot / Weight	35.00
Nilai Faktor / Factor Value	31.20

Keterangan:

- *) DPS belum memerlukan bantuan komite yang struktur organisasinya berada dibawah Dewan Komisaris.
- **) Tidak terdapat penolakan Direksi atas hasil penilaian DPS
- ***) Tidak terdapat perbaikan yang harus dilakukan oleh Direksi
- *) The Sharia Supervisory Board does not yet require the assistance of a committee with an organizational structure under the Board of Commissioners.
- **) There is no rejection from the Board of Directors regarding the assessment results from the Sharia Supervisory Board.
- ***) There are no improvements that need to be made by the Board of Directors.



B. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Atau Fungsi Yang Membantu Dewan Komisaris

B. Completeness and Implementation of Audit Committee Duties or Functions That Assist the Board of Commissioners

A. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi atau terdapat kepemilikan asing

A. For Guarantee Institutions that have national or provincial operational areas or have foreign ownership

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/ Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Appropriate	2 Sesuai / Appropriate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropriate	4 Kurang Sesuai / Less Appropriate	5 Tidak Sesuai / Not Appropriate			
1	Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama. Independent Commissioners do not have affiliate relationships with Board of Directors members, Board of Commissioners members, Sharia Supervisory Board members, or shareholders of Guarantee Institutions within the same Guarantee Institution.		4						4
2	Komisaris Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. Independent Commissioners have never served as Board of Directors members, Board of Commissioners members, Sharia Supervisory Board members, or held positions one level below the Board of Directors at the same Guarantee Institution or other business entities that have affiliate relationships with the Guarantee Institution within the last 6 (six) months.		4						4
3	Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan/atau penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Independent Commissioners understand laws and regulations in the fields of guarantee, sharia guarantee, reinsurance, and/or sharia reinsurance and other relevant laws and regulations.		4						4
4	Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat. Independent Commissioners have good knowledge regarding the financial condition of the Guarantee Institution where the respective Independent Commissioner serves.		4						4
5	Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya. Independent Commissioners are capable of carrying out their main duties of performing supervisory functions to voice the interests of the guaranteed parties, guarantee recipients, and other stakeholders.		4						4
6	Lembaga Penjamin memiliki komite audit. Guarantee Institutions have audit committees.		4						4
7	Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas. Audit committee members possess expertise in task implementation.		4						4
8	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Audit committees are capable of assisting the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of internal control systems.		4						4
9	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Audit committees are capable of assisting the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of internal auditor and external auditor task implementation.		4						4
10	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Audit committees are capable of assisting the Board of Commissioners in conducting monitoring and evaluation of audit planning and implementation to assess the adequacy of internal controls including financial reporting processes.		4						4
11	Komite audit secara rutin melakukan rapat. Audit committees regularly conduct meetings.		4						4
12	Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen. Guarantee Institutions have Independent ommissioners.						5		5



No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/ Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator							Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Ap- propriate	2 Sesuai / Appropri- ate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropri- ate	4 Kurang Sesuai / Less Appropri- ate	5 Tidak Sesuai / Not Appropri- ate	Ya/Yes	Tidak / No	
13	Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. Independent Commissioners are Indonesian citizens.						5		5
14	Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. Independent Commissioners are domiciled in Indonesia.						5		5
15	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Independent Commissioners report to the Financial Services Authority no later than 10 (ten) calendar days from the discovery of violations of laws and regulations in the guarantee field.						5		5*)
16	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Guarantee Institutions disclose to the Financial Services Authority regarding Independent Commissioner resignations.						5		5
17	Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Independent Commissioners who resign communicate the reasons for their resignation to the Financial Services Authority.						5		5
18	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian Komisaris Independen. Guarantee Institutions disclose to the Financial Services Authority regarding Independent Commissioner dismissals.						5		5
19	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen Kepada Otoritas Jasa Keuangan. Guarantee Institutions communicate the reasons for Independent Commissioner dismissals to the Financial Services Authority.						5		5
20	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin. Independent Commissioners report to the Financial Services Authority no later than 10 (ten) calendar days from the discovery of circumstances or anticipated circumstances that could endanger the business continuity of Guarantee Institutions.						5		5**)
21	Komisaris Independen merupakan ketua komite audit. Independent Commissioners serve as audit committee chairpersons.						5		5
22	Perusahaan memiliki struktur komite. Companies have committee structures.						5		5
23	Komite audit memiliki program kerja komite. Audit committees have committee work programs.						5		5
24	Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite kepada Komisaris Independen. Audit committees report implementation related to committee work programs to Independent Commissioners.						5		5

Jumlah Skor Indikator	109
Total Indikator	24
Bobot	5.00
Nilai Faktor	4.54

Keterangan:

- *) Tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan
- **) Tidak terdapat keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin



C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal

C. Implementation of Compliance Functions, Internal Auditors, and External Auditors

1. Fungsi kepatuhan / Compliance Function

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Appropriate	2 Sesuai / Appropriate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropriate	4 Kurang Sesuai / Less Appropriate	5 Tidak Sesuai / Not Appropriate			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Board of Directors members who oversee compliance functions are capable of ensuring that policies, provisions, systems and procedures, and business activities conducted by Guarantee Institutions comply with laws and regulations.		4						4
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Board of Directors members who oversee compliance functions are capable of ensuring Guarantee Institution compliance with commitments made by Guarantee Institutions to the Financial Services Authority and/or other competent supervisory authorities.			3					4
3	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Work units or employees who carry out compliance functions assist the Board of Directors in ensuring Guarantee Institution compliance with laws and regulations in the guarantee business field and other laws and regulations.			3					3
4	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Work units or employees who carry out compliance functions are capable of being accountable for task implementation to Board of Directors members who oversee compliance functions.			3					3
5	Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Guarantee Institutions have Board of Directors members who oversee compliance functions.						5		5
6	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Companies have work units or employees who carry out compliance functions.						5		5

2. Fungsi auditor internal / Internal Auditor Function

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Appropriate	2 Sesuai / Appropriate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropriate	4 Kurang Sesuai / Less Appropriate	5 Tidak Sesuai / Not Appropriate			
1	Perusahaan memiliki auditor internal. Companies have internal auditors.						5		5
2	Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Internal auditors have audit work scope.						5		5
3	Auditor internal memiliki struktur organisasi. Internal auditors have organizational structures.						5		5
4	Auditor internal bersifat independen. Internal auditors are independent in nature.						5		5
5	Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal. Internal auditors report the results of internal audit task implementation.						5		5



3. Fungsi auditor eksternal / External Auditor Function

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Appropriate	2 Sesuai / Appropriate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropriate	4 Kurang Sesuai / Less Appropriate	5 Tidak Sesuai / Not Appropriate			
1	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Companies use external auditor services.						5		5
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. External auditors are proposed by the Board of Commissioners.						5		5
3	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. External auditors are appointed by the General Meeting of Shareholders.						5		5
4	Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. External auditors are registered with the Financial Services Authority.						5		5
5	Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal. Guarantee Institutions provide all accounting records and supporting data required by external auditors.						5		5
6	Auditor eksternal bersifat independen. External auditors are independent in nature.						5		5
7	Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. Guarantee Institutions limit the use of audit services for annual historical financial information from the same external auditor for a maximum audit period of 3 (three) consecutive reporting fiscal years.						5		5

Jumlah Skor Indikator	83
Total Indikator	18
Bobot	7.50
Nilai Faktor	6.92

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

D. Implementation of Risk Management, Internal Control Systems, and Information Technology Governance

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris / Active Supervision by the Board of Commissioners

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Appropriate	2 Sesuai / Appropriate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropriate	4 Kurang Sesuai / Less Appropriate	5 Tidak Sesuai / Not Appropriate			
1	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memahami risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin. The Board of Directors and Board of Commissioners of Guarantee Institutions understand the risks faced by Guarantee Institutions.		4						4
2	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memberikan arahan yang jelas terkait penerapan manajemen risiko. The Board of Directors and Board of Commissioners of Guarantee Institutions provide clear direction regarding risk management implementation.		4						4
3	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif. The Board of Directors and Board of Commissioners of Guarantee Institutions actively conduct supervision and risk mitigation.		4						4
4	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin mengembangkan budayamanajemen risiko di Lembaga Penjamin. The Board of Directors and Board of Commissioners of Guarantee Institutions develop a risk management culture within Guarantee Institutions.		4						4
5	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan ketersediaan struktur organisasi yang memadai. The Board of Directors and Board of Commissioners of Guarantee Institutions ensure the availability of adequate organizational structures.		4						4
6	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja. The Board of Directors and Board of Commissioners of Guarantee Institutions establish clear duties and responsibilities for each work unit.		4						4



No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator							Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Ap- propriate	2 Sesuai / Appropri- ate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropri- ate	4 Kurang Sesuai / Less Appropri- ate	5 Tidak Sesuai / Not Appropri- ate	Ya/Yes	Tidak / No	
7	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. The Board of Directors and Board of Commissioners of Guarantee Institutions ensure adequate quantity and quality of human resources to support effective risk management implementation.		4						4

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko / Adequacy of Policies, Procedures, and Risk Limit Setting

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator							Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Ap- propriate	2 Sesuai / Appropri- ate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropri- ate	4 Kurang Sesuai / Less Appropri- ate	5 Tidak Sesuai / Not Appropri- ate	Ya/Yes	Tidak / No	
1	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga Penjamin. Risk management implementation by Guarantee Institutions aligns with the vision, mission, and business strategy of Guarantee Institutions.		4						4
2	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko. Risk management implementation by Guarantee Institutions considers policy adequacy in risk management.						5		5
3	Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko. Guarantee Institutions have procedures and processes to implement risk management policies.						5		5
4	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko. Risk management implementation by Guarantee Institutions considers risk limit setting in risk management.						5		5

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko / Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring, and Control Processes

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator							Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Ap- propriate	2 Sesuai / Appropri- ate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropri- ate	4 Kurang Sesuai / Less Appropri- ate	5 Tidak Sesuai / Not Appropri- ate	Ya/Yes	Tidak / No	
1	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala. Guarantee Institutions conduct comprehensive risk identification periodically.		4						4
2	Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan. Guarantee Institutions have methods or systems to conduct risk identification across all business activities and company business activities.		4						4
3	Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala. Guarantee Institutions conduct periodic risk measurement.		4						4
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko. Guarantee Institutions have risk monitoring systems and procedures.		4						4
5	Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Guarantee Institutions have risk control methods appropriate to risk exposure and the level of risk to be taken and risk tolerance.		4						4
6	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko. Risk management implementation by Guarantee Institutions considers adequate identification processes in risk management.						5		5
7	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko. Risk management implementation by Guarantee Institutions considers measurement in risk management.						5		5
8	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko. Risk management implementation by Guarantee Institutions considers risk monitoring and control.						5		5



4. Sistem informasi manajemen risiko / Risk Management Information System

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Appropriate	2 Sesuai / Appropriate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropriate	4 Kurang Sesuai / Less Appropriate	5 Tidak Sesuai / Not Appropriate			
1	Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. Guarantee Institutions have risk management information systems appropriate to the characteristics, activities, and complexity of company business activities.		4						4
2	Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Lembaga Penjamin mampu mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Risk management information systems owned by Guarantee Institutions are capable of supporting the implementation of risk identification, measurement, monitoring, and control processes.			3					3
3	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko. Risk management information systems are capable of ensuring the availability of accurate, complete, informative, timely, and reliable information for use by the Board of Directors, Board of Commissioners, and related work units in risk management implementation.			3					3
4	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. Risk management information systems are capable of ensuring the effectiveness of risk management implementation including policies, procedures, and risk limit setting.			3					3
5	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin. Risk management information systems are capable of ensuring the availability of information about the results (realization) of risk management implementation compared to targets set by Guarantee Institutions.			3					3

5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh / Comprehensive Internal Control System

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Appropriate	2 Sesuai / Appropriate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropriate	4 Kurang Sesuai / Less Appropriate	5 Tidak Sesuai / Not Appropriate			
1	Lembaga Penjamin melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin. Guarantee Institutions implement internal control systems effectively in Guarantee Institution risk management implementation.		4						4
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan. Comprehensive internal control systems consider reporting mechanisms in cases of deviations.						5		5

6. Tata kelola teknologi informasi / Information Technology Governance

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Appropriate	2 Sesuai / Appropriate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropriate	4 Kurang Sesuai / Less Appropriate	5 Tidak Sesuai / Not Appropriate			
1	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif. Guarantee Institutions implement effective information technology governance.			3					3
2	Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi sistem informasi. Guarantee Institutions have information system organizational structures.						5		5



No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Ap- propriate	2 Sesuai / Appropri- ate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropri- ate	4 Kurang Sesuai / Less Appropri- ate	5 Tidak Sesuai / Not Appropri- ate			
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi. Guarantee Institutions have information system usage guidelines equipped with instructions or work commands for each function.						5		5
4	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen pengamanan data dan insiden (disaster recovery plan). Guarantee Institutions have data security and incident management guidelines (disaster recovery plan).						5		5

Jumlah Skor Indikator	125
Total Indikator	30
Bobot	10.00
Nilai Faktor	8.40

E. Penerapan Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain

E. Implementation of Remuneration Policies and Other Facilities

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS /
Disclosure regarding remuneration policies and other facilities for Board of Directors members, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Ap- propriate	2 Sesuai / Appropri- ate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropri- ate	4 Kurang Sesuai / Less Appropri- ate	5 Tidak Sesuai / Not Appropri- ate			
1	Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent behaviour) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan dan/atau pemangku kepentingan lainnya. Guarantee Institutions implement remuneration policies for Board of Directors members, Board of Commissioners members, Sharia Supervisory Board, and employees that encourage behavior based on prudent principles aligned with the long-term interests of Guarantee Institutions and fair treatment of guaranteed parties, guarantors, guarantee recipients and/or other stakeholders.		4						4
2	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Remuneration policies consider financial performance and fulfillment of Guarantee Institution obligations as regulated in applicable laws and regulations.		4						4
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja individual. Remuneration policies consider individual work performance.			3					3
4	Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan yang setara (peer group). Remuneration policies consider fairness with Guarantee Institutions and/or equivalent position levels (peer group).		4						4
5	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga Penjamin. Remuneration policies consider long-term targets and strategies of Guarantee Institutions.		4						4
6	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk non natura. Board of Directors members, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board receive remuneration in non-natura forms.						5		5
7	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk natura. Board of Directors members, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board receive remuneration in natura forms.						5		5



2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun / Disclosure of remuneration packages or policies within 1 (one) year

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Ap- propriate	2 Sesuai / Appropri- ate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropri- ate	4 Kurang Sesuai / Less Appropri- ate	5 Tidak Sesuai / Not Appropri- ate			
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS. Remuneration packages or policies and other facilities for Board of Directors members, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board are determined by the General Meeting of Shareholders.						5		5
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain. Remuneration and other facilities for all Board of Directors members, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board at minimum include the number of Board of Directors members, number of Board of Commissioners members, number of Sharia Supervisory Board members, and the total amount of all remuneration policies and other facilities.						5		5
3	Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan. The number of Board of Directors members, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board members who receive remuneration packages within 1 (one) year grouped according to income levels.						5		5

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah / Highest and lowest salary ratio

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Ap- propriate	2 Sesuai / Appropri- ate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropri- ate	4 Kurang Sesuai / Less Appropri- ate	5 Tidak Sesuai / Not Appropri- ate			
1	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah. Companies report the ratio comparison between highest and lowest salaries.						5		5

Jumlah Skor Indikator	49
Total Indikator	11
Bobot	2.50
Nilai Faktor	2.23



F. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Perusahaan

F. Transparency of Company Financial and Non-Financial Conditions

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Appropriate	2 Sesuai / Appropriate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropriate	4 Kurang Sesuai / Less Appropriate	5 Tidak Sesuai / Not Appropriate			
1	Lembaga Penjamin melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan. Guarantee Institutions implement transparency of financial and non-financial conditions to stakeholders.	5							5
2	Lembaga Penjamin memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu. Guarantee Institutions provide data and information to the Financial Services Authority completely and in a timely manner.		4						4
3	Lembaga Penjamin menjelaskan perjanjian transaksi penjaminan serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam setiap transaksi penjaminan. Guarantee Institutions explain guarantee transaction agreements and the rights and obligations of stakeholders in each guarantee transaction.		4						4
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain. Guarantee Institutions have reliable financial reporting systems for supervisory purposes and other stakeholders.		4						4
5	Lembaga Penjamin melakukan promosi tentang jasa penjaminan. Guarantee Institutions conduct promotion of guarantee services.						5		5
6	Lembaga Penjamin secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan. Guarantee Institutions transparently communicate complaint procedures and dispute resolution to stakeholders.						5		5

Jumlah Skor Indikator	27
Total Indikator	6
Bobot	15.00
Nilai Faktor	13.50

G. Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan

G. Long-Term Plans and Annual Work Plans and Budgets

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Appropriate	2 Sesuai / Appropriate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropriate	4 Kurang Sesuai / Less Appropriate	5 Tidak Sesuai / Not Appropriate			
1	Lembaga Penjamin menyusun rencana jangka panjang Lembaga Penjamin. Guarantee Institutions prepare long-term plans for Guarantee Institutions.						5		5
2	Lembaga Penjamin menyusun rencana kerja Lembaga Penjamin. Guarantee Institutions prepare work plans for Guarantee Institutions.						5		5
3	Lembaga Penjamin menyusun anggaran tahunan Lembaga Penjamin. Guarantee Institutions prepare annual budgets for Guarantee Institutions.						5		5
4	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Long-term plans and annual work plans and budgets of Guarantee Institutions are submitted to the Financial Services Authority.						5		5

Jumlah Skor Indikator	20
Total Indikator	4
Bobot	7.50
Nilai Faktor	7.50



H. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Mencapai 5% (Lima Per Seratus) Atau Lebih

H. Disclosure of Share Ownership by Board of Directors and Board of Commissioners Members Reaching 5% (Five Percent)

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Appropriate	2 Sesuai / Appropriate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropriate	4 Kurang Sesuai / Less Appropriate	5 Tidak Sesuai / Not Appropriate			
1	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin. Guarantee Institutions report share ownership by Board of Directors members, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board that reaches 5% (five percent) or more in Guarantee Institutions.						5		5*)
2	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lain. Guarantee Institutions report share ownership by Board of Directors members, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board that reaches 5% (five percent) or more in other Guarantee Institutions.						5		5**)
3	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin. Guarantee Institutions report share ownership by Board of Directors members, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board that reaches 5% (five percent) or more in financial services companies other than Guarantee Institutions.						5		5***)
4	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek. Guarantee Institutions report share ownership by Board of Directors members, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board that reaches 5% (five percent) or more in other Guarantee Institutions domiciled domestically or abroad, including shares acquired through stock exchanges.						5		5****)

Jumlah Skor Indikator	20
Total Indikator	4
Bobot	2.50
Nilai Faktor	2.50

Keterangan:

- *) Tidak Terdapat kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin.
- **) Tidak Terdapat kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lain.
- ***) Tidak Terdapat kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin.
- ****) Tidak Terdapat kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.



I. Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Bagi Direksi, Dewan Komisaris, Dan DPS

I. Financial Relationships and Family Relationships for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Ap- propriate	2 Sesuai / Appropri- ate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropri- ate	4 Kurang Sesuai / Less Appropri- ate	5 Tidak Sesuai / Not Appropri- ate			
1	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat. The Guarantee Institution reports the financial relationships of members of the Board of Directors with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, and/or shareholders of the Guarantee Institution where the said member of the Board of Directors serves.						5		5*)
2	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat. The Guarantee Institution reports the family relationships of members of the Board of Directors with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, and/or shareholders of the Guarantee Institution where the said member of the Board of Directors serves.						5		5**)
3	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat. The Guarantee Institution reports the financial relationships of members of the Board of Commissioners with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Sharia Supervisory Board, and/or shareholders of the Guarantee Institution where the said member of the Board of Commissioners serves.						5		5***)
4	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat. The Guarantee Institution reports the family relationships of members of the Board of Commissioners with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Sharia Supervisory Board, and/or shareholders of the Guarantee Institution where the said member of the Board of Commissioners serves.						5		
5	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat. The Guarantee Institution reports the financial relationships of members of the Sharia Supervisory Board with other members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or shareholders of the Guarantee Institution where the said member of the Sharia Supervisory Board serves.						5		
6	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat. The Guarantee Institution reports the family relationships of members of the Sharia Supervisory Board with other members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or shareholders of the Guarantee Institution where the said member of the Sharia Supervisory Board serves.						5		

Jumlah Skor Indikator	30
Total Indikator	6
Bobot	5.00
Nilai Faktor	5.00

Keterangan:

- *) Tidak terdapat hubungan keuangan antar Direksi, Dekom dan DPS.
- **) Tidak terdapat hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.
- ***) Tidak terdapat hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.
- ****) Tidak terdapat hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.
- *****) Tidak terdapat hubungan keuangan anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.
- *****) Tidak terdapat hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.



J. Pengungkapan Hal-Hal Penting Lainnya Kepada Otoritas Jasa Keuangan

J. Disclosure of Other Important Matters to the Financial Services Authority

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal / Resignation or dismissal of external auditor

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Appropriate	2 Sesuai / Appropriate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropriate	4 Kurang Sesuai / Less Appropriate	5 Tidak Sesuai / Not Appropriate			
1	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri auditor eksternal. The Guarantee Institution discloses to the Financial Services Authority regarding the resignation of external auditor.						5		5*)
2	Auditor eksternal yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. The external auditor who resigns communicates the reasons for the resignation to the Financial Services Authority.						5		5**)
3	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian auditor eksternal. The Guarantee Institution discloses to the Financial Services Authority regarding the dismissal of external auditor						5		5***)
4	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian auditor eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan. The Guarantee Institution communicates the reasons for dismissal of external auditor to the Financial Services Authority.						5		5****)

2. Transaksi material dengan pihak terkait / Material transactions with related parties

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Appropriate	2 Sesuai / Appropriate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropriate	4 Kurang Sesuai / Less Appropriate	5 Tidak Sesuai / Not Appropriate			
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi material dengan pihak lain. The Guarantee Institution has disclosed to the Financial Services Authority regarding material transactions with other parties.						5		

3. Benturan kepentingan / Conflict of interest

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Appropriate	2 Sesuai / Appropriate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropriate	4 Kurang Sesuai / Less Appropriate	5 Tidak Sesuai / Not Appropriate			
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait benturan kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain. The Guarantee Institution has disclosed to the Financial Services Authority regarding ongoing conflicts of interest with other parties.						5		
2	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain. The Guarantee Institution has disclosed to the Financial Services Authority regarding transactions of the Guarantee Institution that have potential conflicts of interest with other Guarantee Institutions.						5		

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik / Other material information regarding the Guarantee Institution related to Good Corporate Governance

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Appropriate	2 Sesuai / Appropriate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropriate	4 Kurang Sesuai / Less Appropriate	5 Tidak Sesuai / Not Appropriate			
1	Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. There is no intervention from the owner of the Guarantee Institution.		4						4
2	Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. There are no internal disputes within the Guarantee Institution.		4						4
2	Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin here are no problems that are the impact of the Guarantee Institution's remuneration policy.		4						



5. Penyimpangan intern. / Internal irregularities.

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Appropriate	2 Sesuai / Appropriate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropriate	4 Kurang Sesuai / Less Appropriate	5 Tidak Sesuai / Not Appropriate			
1	Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Resolution of internal irregularities involves legal process.	5							
2	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. There are no irregularities committed by members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.						5		5
3	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. There are no irregularities committed by permanent employees.						5		5
4	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap. There are no irregularities committed by non-permanent employees.						5		5
5	Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal. The Guarantee Institution provides mediation for resolution regarding internal irregularities.						5		5

6. Permasalahan hukum. / Legal problems.

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Appropriate	2 Sesuai / Appropriate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropriate	4 Kurang Sesuai / Less Appropriate	5 Tidak Sesuai / Not Appropriate			
1	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus perdata. The Guarantee Institution has no legal problems that constitute civil cases.							1	1
2	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus pidana. The Guarantee Institution has no legal problems that constitute criminal cases.						5		5

7. Etika bisnis. / Business ethics.

No. /No.	Pernyataan/Pertanyaan/Statement/Question	Kriteria/Indikator Penilaian/Assessment Criteria/Indicator					Ya/Yes	Tidak / No	Skor Score
		1 Sangat Sesuai / Very Appropriate	2 Sesuai / Appropriate	3 Cukup Sesuai / Moderately Appropriate	4 Kurang Sesuai / Less Appropriate	5 Tidak Sesuai / Not Appropriate			
1	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Lembaga Penjamin mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi penjaminan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. The Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Guarantee Institution are able not to offer or give anything, either directly or indirectly to other parties, to influence decision-making related to guarantee transactions, in violation of applicable laws and regulations.		4						4
2	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan. The Board of Directors, Board of Commissioners, and company employees are able not to accept anything for their personal interests in violation of applicable laws and regulations, either directly or indirectly, from anyone, which may influence decision-making related to financing transactions.		4						4
3	pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh karyawan Lembaga Penjamin. Guidelines on ethical behavior, which contain business ethics values as guidance for the organs of the Guarantee Institution and all employees of the Guarantee Institution.						5		5



Jumlah Skor Indikator	91
Total Indikator	20
Bobot	10.00
Nilai Faktor	9.10

Keterangan:

1. *) Tidak terdapat transaksi material dengan pihak lain.
2. **) Tidak terdapat transaksi material dengan pihak lain.
3. ***) Tidak terdapat transaksi material dengan pihak lain.
4. ****) Tidak terdapat transaksi material dengan pihak lain.
5. *****) Tidak terdapat transaksi material dengan pihak lain.
6. *****) Tidak terdapat benturan kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain.
7. *****) Tidak terdapat transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.
8. *****) Tidak terdapat Penyelesaian penyimpangan internal yang melibatkan proses hukum.

K. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Secara Mandiri (Self Assessment) PT. Jamkrindo Syariah

K. General Conclusion of Self-Assessment Results PT. Jamkrindo Syariah

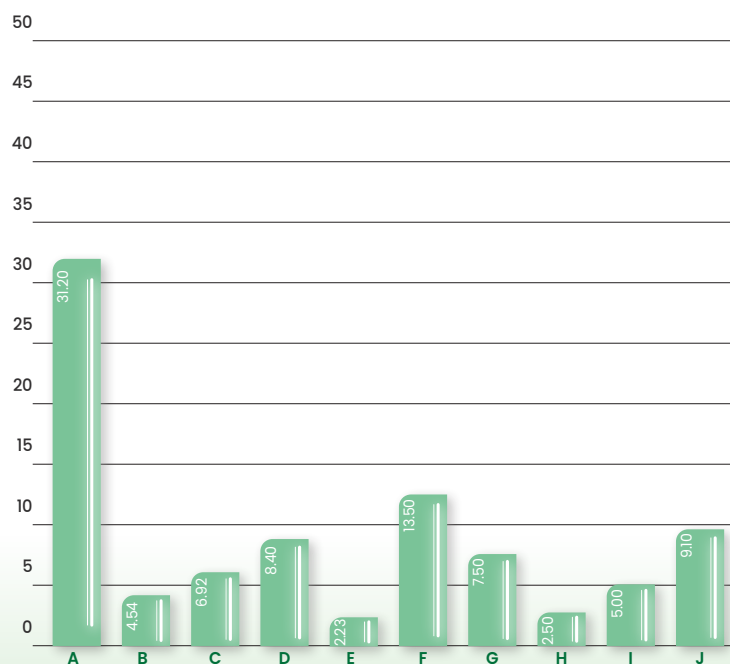
Ketentuan Penilaian

Nilai	Ranking	Predikat
84 - 100	1	Sangat Baik
68 - 83	2	Baik
52 - 67	3	Cukup Baik
36 - 51	4	Kurang Baik
20 - 35	5	Tidak Baik



Hasil Penilaian			Laporan 2023	
Faktor	Ranking	Bobot (%)	Nilai 2023	Pencapaian 2023
A	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board (DPS)	35.00	31.20	89.14%
B	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit bagi Lembaga Penjamin yang Memiliki Lingkup Wilayah Operasional Nasional atau Provinsi, atau terdapat Kepemilikan Asing dalam Memantau dan Memastikan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Completeness and Implementation of Audit Committee Duties for Guarantee Institutions that Have National or Provincial Operational Scope, or have Foreign Ownership in Monitoring and Ensuring the Effectiveness of Internal Control Systems	5.00	4.54	90.83%
C	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, Auditor Eksternal Implementation of Compliance Function, Internal Auditor, External Auditor	7.50	6.92	92.22%
D	Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Tata Kelola Informasi Implementation of Risk Management, Internal Control Systems, and Implementation	10.00	8.40	84.00%
E	Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Implementation of Remuneration Policy and Other Facilities	2.50	2.23	89.09%
F	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin Transparency of Financial and Non-Financial Conditions of the Guarantee Institution	15.00	13.50	90.00%
G	Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Long-term Plans and Annual Work Plans and Budget	7.50	7.50	100.00%
H	Pengungkapan Kepemilikan Saham Disclosure of Share Ownership	2.50	2.50	100.00%
I	Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, dan atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tersebut Menjabat Disclosure of Financial Relationships and Family Relationships of Members of the Board of Directors, and Members of the Board of Commissioners with Other Members of the Board of Directors, and or Shareholders of the Guarantee Institution Where the Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners Serve	5.00	5.00	100.00%
J	Pengungkapan Hal-hal Penting Lainnya Disclosure of Other Important Matters	10.00	9.10	91.00%
Total Nilai		100.00	90.88	90.88%
Predikat			Sangat Baik	

Hasil Penilaian GCG Tahun 2023 2023 GCG Assessment Results





6

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

*Corporate Social and
Environmental Responsibility*



TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Governance of Corporate Social Responsibility



Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah senantiasa berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas bisnis yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Perusahaan meyakini bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan bagian integral dari upaya menciptakan nilai jangka panjang yang sejalan dengan prinsip syariah, tata kelola yang baik, serta tujuan pembangunan nasional.

Sebagai lembaga penjaminan berbasis syariah, Jamkrindo Syariah mengelola zakat perusahaan sebagai salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pengelolaan zakat perusahaan tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat yang nyata dan tepat sasaran kepada masyarakat, khususnya melalui penyaluran kepada delapan golongan penerima zakat (asnaf) sesuai dengan ketentuan syariah, dengan fokus pada pencapaian dampak sosial yang berkelanjutan. Melalui pengelolaan zakat ini, Jamkrindo Syariah turut berperan aktif dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs),

In carrying out its business activities, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah remains committed to ensuring that every policy and business activity is not only oriented toward achieving corporate performance but also delivers sustainable benefits to stakeholders and the wider community. The company believes that the implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) is an integral part of creating long-term value aligned with sharia principles, good governance, and national development goals.

As a sharia-based guarantee institution, Jamkrindo Syariah manages corporate zakat as one of the main instruments in implementing Social and Environmental Responsibility programs. The management of corporate zakat is directed toward providing tangible and well-targeted benefits to society, particularly through distribution to the eight categories of zakat recipients (asnaf) in accordance with sharia provisions, with a focus on achieving sustainable social impact. Through zakat management, Jamkrindo Syariah actively contributes to supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), especially in the areas of social pillars and community empowerment.



khususnya pada pilar sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan TJSL yang terintegrasi dengan pengelolaan zakat perusahaan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif beserta perubahannya, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Dengan berlandaskan regulasi tersebut, Jamkrindo Syariah berupaya memastikan bahwa seluruh pelaksanaan TJSL dan penyaluran zakat perusahaan dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan syariah.

Melalui pendekatan ini, Jamkrindo Syariah tidak hanya menjalankan perannya sebagai lembaga penjaminan syariah, tetapi juga sebagai entitas yang berkontribusi aktif dalam memperkuat ketahanan sosial, mendorong pemerataan kesejahteraan, dan menghadirkan kebermanfaatan yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

The implementation of TJSL integrated with corporate zakat management is carried out in compliance with applicable laws and regulations, including Law Number 23 of 2011 on Zakat Management, Ministry of Religious Affairs Regulation Number 52 of 2014 on Requirements and Procedures for Calculating Zakat Mal and Zakat Fitrah and Utilizing Zakat for Productive Enterprises and its amendments, as well as Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies. Based on these regulations, Jamkrindo Syariah strives to ensure that all TJSL activities and corporate zakat distribution are conducted in an accountable, transparent manner and in accordance with prudential principles and sharia compliance.

Through this approach, Jamkrindo Syariah not only fulfills its role as a sharia guarantee institution but also as an entity that actively contributes to strengthening social resilience, promoting equitable welfare, and delivering sustainable benefits for society and the environment.



PRINSIP PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

1. Pengelolaan zakat Perusahaan dilaksanakan berdasarkan prinsip berikut:
 - a. Syariat Islam;
Pengelolaan zakat perusahaan dilaksanakan dengan berlandaskan ketentuan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa dan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas syariah yang berwenang. Penyaluran zakat dilakukan secara tepat sasaran kepada delapan golongan penerima (asnaf) yang telah ditetapkan, sehingga tujuan zakat sebagai instrumen ibadah dan pemberdayaan sosial dapat tercapai secara optimal.
 - b. Amanah;
Jamkrindo Syariah mengelola zakat perusahaan dengan penuh tanggung jawab dan kepercayaan. Seluruh dana zakat yang dihimpun disalurkan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, melalui mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.
 - c. Kemanfaatan;
Pengelolaan zakat diarahkan untuk memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi penerima zakat serta masyarakat luas. Penyaluran zakat tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup, ketahanan sosial, dan kemandirian ekonomi penerima manfaat sesuai dengan kebutuhan yang relevan.
 - d. Keadilan;
Prinsip keadilan diterapkan dengan memastikan penyaluran zakat dilakukan secara proporsional, objektif, dan tidak diskriminatif. Jamkrindo Syariah berupaya agar manfaat zakat dapat dirasakan secara merata oleh kelompok penerima yang berhak, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masing-masing.
 - e. Kepastian hukum;
Pengelolaan zakat perusahaan dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan regulator terkait. Hal ini memberikan landasan hukum yang jelas dan memastikan seluruh proses pengelolaan zakat berjalan secara tertib dan sesuai ketentuan.

PRINCIPLES OF ZAKAT MANAGEMENT AS A SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM

1. Corporate zakat management is carried out based on the following principles:
 - a. Sharia Compliance
Corporate zakat management is implemented in accordance with Islamic law as stipulated in the Qur'an, Hadith, and fatwas and regulations issued by authorized sharia bodies. Zakat distribution is carried out accurately and directed to the eight eligible recipient groups (asnaf) as prescribed, ensuring that zakat fulfills its purpose as both an act of worship and a social empowerment instrument.
 - b. Trustworthiness
Jamkrindo Syariah manages corporate zakat with full responsibility and integrity. All zakat funds collected are distributed according to their intended purpose through transparent and accountable mechanisms, reflecting the company's commitment to maintaining stakeholder trust.
 - c. Benefit-Oriented
Zakat management is directed toward delivering tangible and sustainable benefits to recipients and the wider community. Distribution is not merely charitable but also aimed at improving quality of life, strengthening social resilience, and fostering economic independence for beneficiaries in line with relevant needs.
 - d. Fairness
The principle of fairness is applied by ensuring zakat distribution is proportional, objective, and non-discriminatory. Jamkrindo Syariah strives to ensure that zakat benefits are equitably shared among eligible groups according to their level of need and socio-economic conditions.
 - e. Legal Certainty
Corporate zakat management is carried out in compliance with applicable laws and regulations, including Law No. 23 of 2011 on Zakat Management, its implementing regulations, and relevant regulatory provisions. This provides a clear legal foundation and ensures that all zakat management processes are orderly and compliant.



- f. terintergerasi;
dan Pelaksanaan pengelolaan zakat perusahaan dilakukan secara terintegrasi dengan program TJSL perusahaan serta kebijakan keberlanjutan yang telah ditetapkan. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program zakat selaras dengan visi, misi, dan strategi perusahaan dalam memberikan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
- g. akuntabilitas ;
Jamkrindo Syariah memastikan pengelolaan zakat perusahaan dilakukan secara akuntabel melalui pencatatan, pelaporan, dan evaluasi yang transparan. Pertanggungjawaban pengelolaan zakat disampaikan kepada pemangku kepentingan sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik dan penerapan prinsip good corporate governance.

2. Pelaksanaan program TJSL dapat menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Terarah ;
Program TJSL dilaksanakan dengan arah dan tujuan yang jelas, selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai PT Jamkrindo Syariah. Penetapan fokus program dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan sosial dan lingkungan, serta relevansinya dengan peran Perusahaan sebagai lembaga penjaminan syariah. Dengan arah yang terencana, program TJSL diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal dan mendukung pencapaian sasaran strategis Perusahaan secara berkelanjutan.
- b. Terukur Dampaknya ;
Setiap pelaksanaan program TJSL dirancang agar memiliki dampak yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan evaluasi atas kontribusi dan hasil dari program yang dijalankan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Pengukuran dampak ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa program TJSL tidak hanya bersifat kegiatan sesaat, tetapi mampu menghasilkan perubahan positif, nilai tambah, serta keberlanjutan manfaat bagi masyarakat dan Perusahaan.
- c. Akuntabilitas ;
Pelaksanaan program TJSL dilandasi oleh prinsip akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh proses perencanaan, penyaluran, hingga pelaporan program TJSL dilakukan secara tertib dan terdokumentasi dengan baik guna meminimalkan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. Jumlah dan bentuk penyaluran dana TJSL ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Perusahaan, sehingga memastikan penggunaan dana yang efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan program.

- f. Integration
Corporate zakat management is implemented in an integrated manner with the company's Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs and established sustainability policies. This synergy ensures that zakat programs align with the company's vision, mission, and strategy in delivering sustainable social contributions.
- g. Accountability
Jamkrindo Syariah ensures that corporate zakat management is conducted with accountability through transparent recording, reporting, and evaluation. Zakat management accountability is communicated to stakeholders as part of the company's commitment to good governance and the application of sound corporate governance principles.

2. The implementation of TJSL programs may apply the following principles:

- a. Clear Direction
TJSL programs are carried out with a clear direction and purpose, aligned with the vision, mission, and core values of PT Jamkrindo Syariah. Program focus is determined based on priority social and environmental needs and its relevance to the Company's role as a sharia guarantee institution. With a well-planned direction, TJSL programs are expected to deliver optimal contributions and support the achievement of the Company's strategic objectives in a sustainable manner.
- b. Measurable Impact
Each TJSL program is designed to have measurable impact and provide tangible benefits to stakeholders. The Company evaluates the contributions and outcomes of the programs implemented, covering social, economic, and environmental aspects. This impact measurement serves as the basis to ensure that TJSL programs are not merely short-term activities but generate positive change, added value, and sustainable benefits for society and the Company.
- c. Accountability
The implementation of TJSL programs is grounded in the principle of accountability, meaning they can be transparently justified and comply with applicable regulations. All processes—from planning and distribution to reporting—are carried out in an orderly and well-documented manner to minimize potential misuse or irregularities. The amount and form of TJSL fund allocation are determined based on evaluations conducted by the Company, ensuring effective use of funds, accurate targeting, and alignment with program objectives.



3. Sumber dana zakat Perusahaan Besar zakat Perusahaan ditetapkan sebesar 2,5% dari Laba Perusahaan.
 4. Mekanisme pengelolaan zakat Perusahaan Zakat Perusahaan dikelola oleh Unit Kerja pengelola zakat Perusahaan dan TJSL bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi atau dapat disalurkan secara langsung oleh Perusahaan jika memenuhi ketentuan syariah.
 5. Pilar utama program TJSL Pelaksanaan program TJSL didasarkan pada 4 (empat) Pilar Utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang memuat 17 (tujuh belas) butir TPB sebagai berikut:
 1. Sosial
Tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pilar sosial meliputi tujuan:
 - i) Mengentaskan kemiskinan (TPB1)
 - ii) Mengakhiri kelaparan (TPB 2);
 - iii) Kehidupan sehat dan sejahtera (TPB
 - iv) Pendidikan berkualitas (TPB 4); dan
 - v) Kestetaraan gender (TPB 5).
 2. Lingkungan
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Pilar lingkungan meliputi:
 - i) Penyediaan air bersih dan sanitasi layak (TPB 6);
 - ii) Pembangunan kota dan pemukiman yang layak (TPB 11);
 - iii) Proses konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab (TPB 12);
 - iv) Penanganan perubahan iklim (TPB 13);
 - v) Menjaga ekosistem kelautan (TPB 14); dan
 - vi) Menjaga ekosistem daratan (TPB 15).
 3. Ekonomi
Tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih dan terjangkau, dan didukung kemitraan. Pilar ekonomi meliputi tujuan:
 - i) Penggunaan energi bersih dan terjangkau (TPB 7);
 - ii) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (TPB 8);
 - iii) Industri, ekonomi dan infrastruktur (TPB 9);
 - iv) Mengurangi kesenjangan (TPB 10); dan
 - v) Melakukan kemitraan untuk mencapai tujuan (TPB 17).
3. Corporate Zakat Funding Source The amount of corporate zakat is set at 2.5% of the Company's net profit.
 4. Corporate Zakat Management Mechanism Corporate zakat is managed by the Company's zakat and TJSL management unit in collaboration with an official Zakat Management Institution (Lembaga Amil Zakat or LAZ), or it may be distributed directly by the Company provided that it complies with sharia requirements.
 5. Main Pillars of TJSL Programs The implementation of TJSL programs is based on four main pillars of the Sustainable Development Goals (SDGs), which encompass 17 goals as follows:
 1. Social
Achieving the fulfillment of basic human rights in a fair and equitable manner to improve the welfare of all communities. The social pillar includes the following goals:
 - i) No Poverty (SDG 1)
 - ii) Zero Hunger (SDG 2)
 - iii) Good Health and Well-being (SDG 3)
 - iv) Quality Education (SDG 4)
 - v) Gender Equality (SDG 5)
 2. Environmental
Sustainable management of natural resources and the environment as the foundation of life. The environmental pillar includes:
 - i) Clean Water and Sanitation (SDG 6)
 - ii) Sustainable Cities and Communities (SDG 11)
 - iii) Responsible Consumption and Production (SDG 12)
 - iv) Climate Action (SDG 13)
 - v) Life Below Water (SDG 14)
 - vi) Life on Land (SDG 15)
 3. Economic
Achieving quality economic growth through sustainable employment and business opportunities, innovation, inclusive industry, adequate infrastructure, clean and affordable energy, supported by partnerships. The economic pillar includes:
 - i) Affordable and Clean Energy (SDG 7)
 - ii) Decent Work and Economic Growth (SDG 8)
 - iii) Industry, Innovation, and Infrastructure (SDG 9)
 - iv) Reduced Inequalities (SDG 10)
 - v) Partnerships for the Goals (SDG 17)



4. Hukum dan Tata Kelola

Terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Pilar hukum dan tata kelola meliputi tujuan perdamaian, keadilan yang tangguh (TPB 16).

4. Law and Governance

Establishing legal certainty and effective, transparent, accountable, and participatory governance to create security stability and uphold the rule of law. The law and governance pillar includes Peace, Justice, and Strong Institutions (SDG 16)

6. Program Zakat dan TJSL

Realisasi Anggaran pengelolaan zakat sebagai program TJSL pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

6. Zakat and CSR Programs

Budget realization for zakat management as CSR program in 2023 is as follows:

Asnaf	Realisasi / Realization (Rp)
Fisabilillah	3.114.754.322
Miskin	980.000.000
Amil	204.737.716
Total <i>Total</i>	4.299.492.038

Penyaluran zakat perusahaan sebagai program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Distribution of corporate zakat as Corporate Social Environmental Responsibility (CSR) program in 2023 is as follows:

SDG's	Realisasi / Realization (Rp)
Ekonomi <i>Economic</i>	661.027.500
Pendidikan <i>Education</i>	1.221.929.478
Kesehatan <i>Health</i>	118.000.000
Lingkungan <i>Environment</i>	582.750.000
Sosial <i>Social</i>	1.715.785.060
Total <i>Total</i>	4.299.492.038



7

LAPORAN KEUANGAN *financial Report*



PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

LAPORAN KEUANGAN/ *FINANCIAL STATEMENTS*

31 DESEMBER/*DECEMBER* 2023

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

**DIRECTOR'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hari Purnomo
Alamat kantor : Gedung Jamkrindo Syariah
Jl. Let. Jend. Suprpto No. 20
Blok A II/4
Nomor telepon : 021-21242777
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Loesdarwanto
Alamat kantor : Gedung Jamkrindo Syariah
Jl. Let. Jend. Suprpto No. 20
Blok A II/4
Nomor telepon : 021-21242777
Jabatan : Direktur
3. Nama : Endang Sri Winarni
Alamat kantor : Gedung Jamkrindo Syariah
Jl. Let. Jend. Suprpto No. 20
Blok A II/4
Nomor telepon : 021-21242777
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah;
2. Laporan keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned:

1. Name : Hari Purnomo
Office address : Gedung Jamkrindo Syariah
Jl. Let. Jend. Suprpto No. 20
Blok A II/4
Phone number : 021-21242777
Title : President Director
2. Name : Loesdarwanto
Office address : Gedung Jamkrindo Syariah
Jl. Let. Jend. Suprpto No. 20
Blok A II/4
Phone number : 021-21242777
Title : Director
3. Name : Endang Sri Winarni
Office address : Gedung Jamkrindo Syariah
Jl. Let. Jend. Suprpto No. 20
Blok A II/4
Phone number : 021-21242777
Title : Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and the presentation of the financial statements of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah;
2. The financial statements of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the financial statements of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah have been fully and correctly disclosed;
b. The financial statements of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts;
4. We are responsible for PT Penjaminan Jamkrindo Syariah's internal control system.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 22 Maret/March 2024

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Directors



Hari Purnomo
Direktur Utama/
President Director

Loesdarwanto
Direktur/
Director

Endang Sri Winarni
Direktur/
Director

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

Jl. Letjend Suprpto No. 20 Blok A II / 4

Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat 10510 Telp. 021 21242777

Email : info@jamkrindosyariah.co.id

www.jamkrindosyariah.co.id



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan" pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Opinion

We have audited the financial statements of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (the "Company"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of sources and distributions of zakat funds, and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 December 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*



- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

JAKARTA,
22 Maret/March 2024

Drs. M. Jusuf Wibisono, M.Ec., CPA
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP.0222



Penjaminan Jaminan Syariah
00336/2.1025/AU.1/09/0222-4/1/III/2024

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	4	249,007	452,038	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu	5	796,133	757,183	Time deposits for certain purposes
Investasi	6	601,852	459,697	Investments
Piutang imbal jasa <i>kafalah</i> - bersih	7	9,402	53,067	<i>Kafalah</i> fee receivables - net
Piutang penjaminan ulang - bersih	8	186,384	92,376	Re-guarantee receivables - net
Piutang hasil investasi	9	10,041	8,183	Investment income receivables
Piutang lain-lain-bersih		78	157	Other receivables-net
Aset penjaminan ulang	10	354,324	428,727	Re-guarantee assets
Biaya akuisisi ditangguhkan	11	55,531	70,889	Deferred acquisition costs
Pajak dibayar dimuka	13a	50,415	-	Prepaid tax
Biaya dibayar dimuka		3,554	3,226	Prepaid expenses
Aset tetap - bersih	12	83,497	74,280	Fixed assets - net
Aset tidak berwujud - bersih		340	482	Intangible assets - net
Aset pajak tangguhan	13c	51,537	49,147	Deferred tax assets
JUMLAH ASET		2,452,095	2,449,452	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang klaim		5,110	5,456	Claim payables
Utang pajak	13b	4,507	1,671	Tax payables
Utang penjaminan ulang	14	53,857	48,315	Re-guarantee payables
Imbal jasa <i>kafalah</i> ditangguhkan	15	686,139	715,196	Unearned <i>kafalah</i> fees
Pendapatan komisi ditangguhkan	16	30,573	42,863	Deferred commission income
Estimasi klaim	17	358,504	366,887	Estimated claims
Liabilitas imbalan kerja	18	6,137	6,241	Employee benefit liabilities
Akrual dan utang lain-lain	19	113,147	116,998	Accruals and other payables
TOTAL LIABILITAS		1,257,974	1,303,627	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 500.000 (nilai penuh) per saham				Share capital - Rp 500,000 (full amount) par value per share
Modal dasar - 2.000.000				Authorised - 2,000,000
Modal ditempatkan dan disetor - 1.411.241 saham	20	705,620	705,620	Issued and paid-up - 1,411,241 shares
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak		450	(439)	Remeasurement of employee benefit liabilities, after tax
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		(468)	(13,986)	Unrealised loss on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income
Saldo laba				Retained earnings
- Ditentukan penggunaannya		454,630	265,000	Appropriated -
- Tidak ditentukan penggunaannya		33,889	189,630	Unappropriated -
JUMLAH EKUITAS		1,194,121	1,145,825	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		2,452,095	2,449,452	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

**LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
PENDAPATAN KAFALAH				KAFALAH INCOME
Imbal jasa <i>kafalah</i> bruto	21	408,035	503,297	Gross <i>kafalah</i> fees
Premi penjaminan ulang bruto (Penurunan)/kenaikan atas imbai jasa <i>kafalah</i> yang belum merupakan pendapatan	22	(50,385)	(168,928)	Gross re-guarantee premiums
				(Decrease)/increase in unearned <i>kafalah</i> fees
	23	<u>(24,213)</u>	<u>128,623</u>	
Jumlah pendapatan <i>kafalah</i>		333,437	462,992	Total <i>kafalah</i> income
BEBAN KAFALAH				KAFALAH EXPENSES
Klaim bruto	24	(480,284)	(397,167)	Gross claims
Klaim penjaminan ulang	25	194,362	182,627	Re-guarantee claims
Beban <i>ujrah</i>	26	(16,148)	(40,113)	<i>Ujrah</i> expenses
Pendapatan <i>ujrah</i> penjaminan ulang	27	18,719	33,738	Re-guarantee <i>ujrah</i> income
Pendapatan subrogasi	28	42,885	51,841	Subrogation income
Kenaikan estimasi klaim	29	<u>(12,751)</u>	<u>(959)</u>	Increase in estimated claims
Jumlah beban <i>kafalah</i>		<u>(253,217)</u>	<u>(170,033)</u>	Total <i>kafalah</i> expenses
Pendapatan <i>kafalah</i> bersih		<u>80,220</u>	<u>292,959</u>	Net <i>kafalah</i> income
Pendapatan investasi	30	85,822	68,229	Investment income
Beban usaha	31	(128,258)	(113,972)	Operating expenses
Beban lain-lain - bersih	32	<u>(9,770)</u>	<u>(7,176)</u>	Other expenses - net
LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK PENGHASILAN		28,014	240,040	INCOME BEFORE ZAKAT AND INCOME TAX
Zakat	34	<u>(700)</u>	<u>(6,001)</u>	Zakat
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		27,314	234,039	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX EXPENSES
Beban pajak kini	13b	-	(45,441)	Current income tax
Manfaat pajak tangguhan	13b	<u>6,575</u>	<u>1,032</u>	Deferred tax benefit
Jumlah beban pajak penghasilan		<u>6,575</u>	<u>(44,409)</u>	Total tax expense
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		<u>33,889</u>	<u>189,630</u>	NET PROFIT FOR THE YEAR
Penghasilan komprehensif lainnya				Other comprehensive income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
- Pengukuran kembali imbai kerja	18	1,156	(1,106)	Remeasurements of - employee benefits
- Efek pajak terkait		(267)	243	Related tax effect -
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified to profit or loss:
- Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		17,395	(25,628)	Unrealised gain/(loss) on - marketable securities measured at fair value through other comprehensive
- Efek pajak terkait		<u>(3,877)</u>	<u>5,639</u>	Related tax effect -
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lainnya		<u>14,407</u>	<u>(20,852)</u>	Other comprehensive income/(loss)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		<u>48,296</u>	<u>168,778</u>	Total comprehensive income for the year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Note	Modal saham/ Share capital	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income			Saldo laba/ Retained earnings		Jumlah ekuitas/ Total equity	
			Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak / Unrealised gain/(loss) on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak/ Remeasurement of employee benefit liabilities, after tax		Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022/ 31 Desember 2021		705,620	6,003	424		96,843	168,157	977,047	Balance as at 1 January 2022/ 31 December 2021
Pembentukan cadangan umum	20	-	-	-		168,157	(168,157)	-	Allowances for general reserve
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-		-	189,630	189,630	Net profit for the year
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak		-	(19,989)	-		-	-	(19,989)	Unrealised loss on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak		-	-	(863)		-	-	(863)	Remeasurement of employee benefit liabilities, after tax
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022		705,620	(13,986)	(439)		265,000	189,630	1,145,825	Balance as at 31 December 2022
Pembentukan cadangan umum	20	-	-	-		189,630	(189,630)	-	Allowances for general reserve
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-		-	33,889	33,889	Net profit for the year
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak		-	13,518	-		-	-	13,518	Unrealised loss on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak		-	-	889		-	-	889	Remeasurement of employee benefit liabilities, after tax
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023		705,620	(468)	450		454,630	33,889	1,194,121	Balance as at 31 December 2023

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of
these financial statements.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Laba sebelum pajak penghasilan		27,314	234,039	Income before income tax
Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas operasi:				Add items not affecting operating cash flows:
Depresiasi		8,194	8,121	Depreciation
(Penurunan)/kenaikan atas imbal jasa <i>kafalah</i> yang belum merupakan pendapatan	23	24,213	(128,623)	(Decrease)/increase in unearned <i>kafalah</i> fee
Kenaikan estimasi klaim	29	12,750	959	Increase in estimated claims
Liabilitas imbalan kerja		1,039	1,140	Employee benefit liabilities
Amortisasi dan perubahan nilai investasi		(645)	419	Amortisation and changes in investment value
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	7, 8	15,855	-	Allowance for impairment losses of receivables
Keuntungan penjualan aset tetap		-	(107)	Gain on sale of fixed assets
Arus kas operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas		<u>88,720</u>	<u>115,948</u>	Operating cash flow before changes in assets and liabilities
Perubahan aset dan liabilitas:				Changes in assets and liabilities:
Piutang imbal jasa <i>kafalah</i>		43,616	53,437	<i>Kafalah</i> fee receivables
Piutang penjaminan ulang		(109,814)	(44,215)	Re-guarantee receivables
Piutang hasil investasi		(1,858)	(2,480)	Investment income receivables
Piutang lain-lain -bersih		79	80	Other receivables-net
Biaya akuisisi ditangguhkan		15,358	18,124	Deferred acquisition costs
Biaya dibayar dimuka		(328)	(2,527)	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka		(50,415)	-	Prepaid taxes
Utang klaim		(346)	(17,155)	Claim payables
Utang pajak		2,836	(106,043)	Tax payables
Utang penjaminan ulang		5,542	(7,240)	Re-guarantee payables
Pendapatan komisi ditangguhkan		(12,290)	(118)	Deferred commission income
Akrual dan utang lain-lain		<u>(2,505)</u>	<u>44,188</u>	Accruals and other payables
Arus kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi		<u>(21,405)</u>	<u>51,999</u>	Net cash flows (used in)/provided from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Pelepasan investasi		10,265	31,259	Sale of investment
Pembelian investasi		(134,326)	(254,733)	Purchase of investment
Pembelian aset tetap		(13,484)	(11,563)	Purchase of fixed assets
Penjualan aset tetap		-	130	Sale of fixed assets
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		<u>(137,545)</u>	<u>(234,907)</u>	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran liabilitas sewa		<u>(5,131)</u>	<u>(3,353)</u>	Payment for lease liabilities
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		<u>(5,131)</u>	<u>(3,353)</u>	Net cash flows used in financing activities
Penurunan bersih kas dan setara kas		<u>(164,081)</u>	<u>(186,261)</u>	Net decrease in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun		<u>1,209,221</u>	<u>1,395,482</u>	Cash and cash equivalents at the beginning of year
Kas dan setara kas pada akhir tahun		<u><u>1,045,140</u></u>	<u><u>1,209,221</u></u>	Cash and cash equivalents at the end of year
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:				Cash and cash equivalents at the end of the year consist of:
Kas dan setara kas		249,007	452,038	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu		<u>796,133</u>	<u>757,183</u>	Time deposits for certain purposes
		<u><u>1,045,140</u></u>	<u><u>1,209,221</u></u>	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

**LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN
DANA ZAKAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTIONS
OF ZAKAT FUNDS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Sumber dana zakat			<i>Sources of zakat fund</i>
Zakat perusahaan	<u>700</u>	<u>6,001</u>	<i>Zakat from the Company</i>
Kenaikan dana zakat	700	6,001	<i>Increase in zakat funds</i>
Penyaluran dana zakat			<i>Distribution of zakat fund</i>
Disalurkan melalui lembaga zakat	<u>(4,299)</u>	<u>(1,385)</u>	<i>Distributed through zakat institution</i>
Saldo awal dana zakat	<u>10,779</u>	<u>6,163</u>	<i>Beginning balance of zakat funds</i>
Saldo akhir dana zakat	<u><u>7,180</u></u>	<u><u>10,779</u></u>	<i>Ending balance of zakat funds</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN
DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF SOURCES AND USES OF
QARDHUL HASAN FUNDS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Sumber dana kebajikan			Sources of qardhul hasan funds
Pendapatan non-halal	<u>41</u>	<u>14</u>	Non-halal income
Kenaikan dana kebajikan	41	14	Increase in qardhul hasan funds
Saldo awal dana kebajikan	<u>52</u>	<u>38</u>	Beginning balance of qardhul hasan funds
Saldo akhir dana kebajikan	<u>93</u>	<u>52</u>	Ending balance of qardhul hasan funds

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Perusahaan") didirikan sesuai dengan Akta Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., No. 68 tanggal 19 September 2014. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-26462.40.10.2014 tanggal 24 September 2014 dan telah mendapat Izin Pendirian Usaha dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-134/D.05/2014 tanggal 7 November 2014.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 15 tanggal 11 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.P.A., Notaris di Jakarta, tentang penambahan modal disetor sebesar Rp 155.620 atau sebanyak 311.241 lembar saham. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0462802 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021.

Perusahaan menyelenggarakan usaha jasa penjaminan dengan prinsip syariah.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat terletak di Gedung Jamkrindo Syariah Jl. Letjend Suprpto No 20, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat.

Perusahaan memiliki 15 kantor cabang di beberapa kota di Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan masing-masing memiliki 315 dan 281 karyawan (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, komposisi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Komisaris Utama	Aribowo	Aribowo	President Commissioner
Komisaris	Alie Basya Syamsudin ⁴⁾	M. Syakir Sula ¹⁾	Commissioner
Komisaris Independen	Edy Utomo ⁴⁾	Wildan ¹⁾	Independent Commissioner
Direksi			Directors
Direktur Utama	Hari Purnomo ²⁾	Gatot Suprabowo ¹⁾	President Director
Direktur Operasional	Loesdarwanto ³⁾	Achmad Sonhadji ¹⁾	Operational Director
Direktur Keuangan	Endang Sri Winarni	Endang Sri Winarni	Finance Director
Dewan Pengawas Syariah			Sharia Supervisory Board
Ketua	-	-	Chairman
Anggota	Abdul Aziem	Abdul Aziem	Member

1. Masa jabatan berakhir pada 21 Juli 2023.

2. Efektif menjabat sejak tanggal 29 Februari 2024

3. Efektif menjabat sejak tanggal 28 Februari 2024

4. Efektif menjabat sejak tanggal 14 Maret 2024

1. Term of office ended on 21 July 2023.

2. Effective joined since 29 February 2024

3. Effective joined since 28 February 2024

4. Effective joined since 14 March 2024

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan Perusahaan disusun dan diotorisasi oleh Direksi untuk terbit pada tanggal 22 Maret 2024.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seperti yang dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah ("PSAK Syariah"), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK No. 101 "Penyajian Laporan Keuangan Syariah". Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2019), laporan keuangan entitas syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- (i) Laporan posisi keuangan;
- (ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- (iii) Laporan perubahan ekuitas;
- (iv) Laporan arus kas;
- (v) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
- (vi) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
- (vii) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Perusahaan sesuai prinsip-prinsip syariah.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The financial statements of the Company were prepared and authorised by the Directors for issuance on 22 March 2024.

The principal accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are set out below:

a. Basis of preparation of the financial statements

Presented below are the principal accounting policies applied in the preparation of the financial statements of the Company in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise of Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS"), Statements of Sharia Financial Accounting Standards ("SFAS Sharia"), Interpretation of Financial Accounting Standards ("IFAS") issued by Institute of Indonesian Chartered Accountant.

The financial statements are prepared in accordance with SFAS No. 101, "Presentation of Sharia Financial Statements". Based on SFAS No. 101 (Revised 2019), a complete sharia entity financial statements consist of the following components:

- (i) Statement of financial position;
- (ii) Statement of profit or loss and other comprehensive income;
- (iii) Statement of changes in equity;
- (iv) Statement of cash flows;
- (v) Statement of sources and distributions of zakat funds;
- (vi) Statement of sources and uses of qardhul hasan funds; and
- (vii) Notes to the financial statements.

The financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian financial accounting standards. The financial statements have been prepared under the historical cost convention except for financial assets measured at fair value through other comprehensive income. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statement of cash flows.

Statement of financial positions, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows represent the financial statements reflecting the Company's commercial activities in accordance with sharia principles.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas disusun menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank, deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, dan deposito berjangka untuk tujuan tertentu.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, disajikan dalam jutaan Rupiah ("Rp").

Pos-pos yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah ("Rp").

Dalam penyusunan laporan keuangan dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, dan jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula (lihat Catatan 3).

b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material"

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

The statement of cash flows is prepared based on the indirect method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash, cash in banks, time deposits with original maturities of three months or less, and time deposits for certain purposes.

Statement of sources and distribution of zakat funds shows the source of funds, distribution during the year and undistributed zakat fund as at point in time.

Statement of sources and uses of qardhul hasan funds shows the sources and uses of qardhul hasan during the year and the remaining balance of qardhul hasan funds as at point in time.

Figures in the financial statements are expressed in million Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency at the primary economy environment in which the Company operates ("functional currency"). The functional currency of the Company is Rupiah ("Rp").

The preparation of financial statements requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates (refer to Note 3).

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision of the following accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards which are effective as at 1 January 2023 as follows:

- Amendment of SFAS 1, "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide explanations of material accounting policies"

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan (lanjutan)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 sebagai berikut: (lanjutan)

- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya;
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensifkan;
- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal; dan
- Amendemen PSAK 107, "Akuntansi Ljarah".

Implementasi dari standar-standar tersebut di atas tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

c. Penjabaran mata uang asing

(a) Mata uang fungsional dan penyajian

Hal-hal yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah ("Rp") yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Angka-angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

(b) Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards (continued)

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision of the following accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards which are effective as at 1 January 2023 as follows: (continued)

- Amendment of SFAS 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors" regarding the definition of "accounting estimates" and its explanations;
- Amendment of SFAS 16, "Fixed Assets" regarding proceeds before the intended use;
- Amendment of SFAS 46, "Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction which adopted from Amended IAS No. 12 Income Taxes on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and
- Amendment of SFAS 107, "Accounting for Ljarah".

Except for the changes as explained below, the implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material impact to the financial statements for current year or prior financial years.

c. Foreign currency translation

(a) Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the "functional currency").

The financial statements are presented in Rupiah ("Rp"), which is the functional currency of the Company. Figures in the financial statements are rounded in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

(b) Transaction and balances

Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rate prevailing at the date of the transactions. At the statement of financial position date, monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at statement of financial position date.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

(b) Transaksi dan saldo (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kurs nilai tukar yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia dan masing-masing adalah Rp15.439 dan Rp15.731 untuk 1 Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS").

d. Akad penjaminan syariah

Akad yang digunakan dalam penjaminan syariah adalah akad *kafalah*.

Imbal Jasa Kafalah (IJK)

Imbal jasa *kafalah* dari terjamin dicatat sebesar nilai bersih, setelah diskonto, sesuai dengan ketentuan pada kontrak.

IJK ditanggguhkan merupakan bagian dari IJK yang berkaitan dengan persyaratan belum berakhirnya cakupan penjaminan.

Pembentukan imbal jasa *kafalah* ditanggguhkan dihitung berdasarkan IJK neto sesuai dengan proporsi jumlah hari sampai dengan sertifikat *kafalah* berakhir (proporsional harian).

Kenaikan/penurunan atas imbal jasa *kafalah* yang belum merupakan pendapatan adalah selisih antara IJK belum menjadi hak periode berjalan dan periode lalu.

Penyajian imbal jasa *kafalah* dalam laporan laba rugi menunjukkan jumlah imbal jasa bruto.

Pendapatan *ujrah* penjaminan ulang

Pendapatan *ujrah* penjaminan ulang merupakan *ujrah* yang diterima dari mitra penjaminan ulang dengan persentase tertentu dari jumlah premi yang dibayar ke mitra penjaminan ulang.

Ujrah penjaminan ulang dicatat sebagai pendapatan ditanggguhkan dan diamortisasi selama jangka waktu penjaminan.

Jika terdapat pelunasan dipercepat atau terjadi klaim atas pembiayaan yang dijamin, jumlah pendapatan imbalan jasa *kafalah* dan pendapatan *ujrah* penjaminan ulang yang masih ditanggguhkan diakui seluruhnya ke laporan laba rugi tahun berjalan.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Foreign currency translation (continued)

(b) Transaction and balances (continued)

Exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currencies monetary assets and liabilities are recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

As at 31 December 2023 and 2022, the exchange rate used is the Bank Indonesia middle rate of Rp15,439 and Rp15,731, respectively, for 1 United States Dollar ("USD").

d. Sharia guarantee contract

The contract used for sharia guarantee contract is *kafalah*.

Kafalah Fees

Kafalah fees from guarantee are accounted for, net of any discounts, in accordance with the terms of contracts.

Unearned *kafalah* fees represent portion of the *kafalah* fee written relating to the unexpired terms of coverage guarantee.

Unearned *kafalah* fees are determined and calculated based on net *kafalah* fees in proportion to the number of days until the *kafalah* certificate expires (daily proportion).

Increase/decrease in unearned *kafalah* fees represent the difference between the balance of unearned *kafalah* fees for current and prior period.

Presentation of *kafalah* fees in the profit or loss statement represents gross fees.

Re-guarantee *ujrah* income

Re-guarantee *ujrah* income is *ujrah* receipt from re-guarantee partner with certain percentage of premium paid to re-guarantee partner.

Re-guarantee *ujrah* is recorded as unearned revenue and amortised over the period of the guarantee.

If there is an accelerated repayment or there is a claim of the guarantee receivables, the amount of *kafalah* fees and deferred re-guarantee *ujrah* income are entirely recognised to profit or loss for the current year.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Akad penjaminan syariah (lanjutan)

Pendapatan jasa administrasi kafalah

Pendapatan jasa administrasi *kafalah* diakui seluruhnya saat sertifikat *kafalah* ("SK") diterbitkan.

Beban *ujrah*

Ujrah diberikan kepada agen dan penerima jaminan sehubungan dengan penutupan pertanggungan. Beban *ujrah* besarnya dinyatakan sebagai persentase tertentu dari IJK. Beban *ujrah* dicatat sebagai biaya dibayar dimuka dan diamortisasi sesuai dengan periode penjaminan.

Premi penjaminan ulang

Premi penjaminan ulang merupakan beban atas premi yang dibayarkan kepada mitra penjaminan ulang guna mengalihkan risiko klaim. Besaran premi penjaminan ulang yang menjadi hak mitra penjaminan ulang ditentukan berdasarkan jenis produk penjaminan.

Premi penjaminan ulang dicatat sebagai aset penjaminan ulang dan diamortisasi sesuai dengan periode penjaminan ulang.

Estimasi klaim adalah jumlah yang menjadi tanggungan Perusahaan sehubungan dengan klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Disajikan dalam laporan posisi keuangan berdasarkan penelaahan secara teknis asuransi.

Klaim meliputi klaim disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian, termasuk estimasi atas klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan ("IBNR") dan beban penyelesaian klaim. Klaim tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. *Sharia guarantee contract* (continued)

Kafalah administrative service income

Kafalah administrative service income is fully recognised when kafalah certificates ("SK") were issued.

Ujrah expenses

Ujrah is given to agents and recipient of the guarantee related to insurance coverage. Ujrah expenses are expressed as a certain percentage of the IJK. Ujrah expenses are recorded as prepaid expenses and amortised over the guarantee period.

Re-guarantee premiums

Re-guarantee premiums are premium expenses paid to re-guarantee company to transfer the claim risk. Amount of re-guarantee premium is defined based on the type of product guarantee.

Re-guarantee premiums are recorded as re-guarantee asset and amortised over the period of re-guarantee.

Estimated claims represent outstanding claims and the Company's estimate of claims already incurred but not yet reported. This account is stated in the statement of financial position based on the insurance technical review.

Claims consist of settled claims, outstanding claims including claims incurred but not yet reported ("IBNR") and claim settlement expenses. Claims are recognised as expenses when incurred. Re-guarantee claims received from re-guarantee companies are recognised as deduction from claim expenses in the same period as the recognition of claim expenses. Subrogated rights are recognised as deduction from claim expenses upon realisation.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Akad penjaminan syariah (lanjutan)

Premi penjaminan ulang (lanjutan)

Penyajian beban klaim dalam laporan laba rugi menunjukkan jumlah klaim bruto, klaim penjaminan ulang, dan kenaikan/penurunan estimasi klaim. Klaim penjaminan ulang disajikan sebagai pengurang klaim bruto.

Cadangan atas estimasi klaim bruto dibuat berdasarkan taksiran beban klaim yang akan dibayar sesuai dengan klaim yang diterima Perusahaan sampai dengan tanggal laporan. Pemulihan klaim dari reasuradur untuk cadangan atas estimasi klaim bruto dicatat sebagai estimasi klaim penjaminan ulang pada aset penjaminan ulang.

Perusahaan menetapkan cadangan berdasarkan lini usaha ("LoB"). Ada dua kategori cadangan: cadangan untuk klaim yang sudah dilaporkan dan cadangan untuk klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan ("IBNR").

Cadangan Perusahaan untuk klaim yang sudah dilaporkan adalah berdasarkan pada estimasi pembayaran di masa mendatang untuk menyelesaikan klaim yang sudah dilaporkan. Perusahaan membuat estimasi tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang tersedia pada saat cadangan ditetapkan.

Perusahaan membentuk cadangan IBNR dengan menggunakan metode triangulasi dan metode gabungan (seperti *Bornhuetter-Ferguson*), termasuk asumsi tingkat diskonto, rasio klaim, dan rasio biaya.

Perubahan jumlah estimasi utang klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

Piutang penjaminan ulang

Piutang penjaminan ulang merupakan piutang atas pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra penjaminan ulang.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. *Sharia guarantee contract (continued)*

Re-guarantee premiums (continued)

Claim expenses in the statement of profit or loss represent gross claims, re-guarantee claims and increase/decrease in estimated claims. Re-guarantee claims are presented as deduction from gross claims.

Provision for estimated gross claims is made for the full estimated costs of claims to be paid in respect of claims notified to the Company until the date of the reporting period. Reinsurance recoveries of the provision for estimated gross claims is recorded as estimated re-guarantee claims in re-guarantee assets.

Company establishes its reserves by line of business ("LoB"). There are two categories of reserve: reserves for reported losses and reserves for incurred but not yet reported ("IBNR") losses.

Company's reserves for reported losses are based on estimates of future payments to settle reported claims. The Company bases such estimates on the facts available at the time the reserves are established.

The Company establishes IBNR reserves using triangulation method and hybrid methods (such as Bornhuetter-Ferguson), include discount rate assumptions, claim ratio, and expense ratio.

Changes in the amount of estimated total claim liabilities as a result of further review and differences between estimated claims and claims paid are recognised in the profit or loss in the period when the changes occur.

Re-guarantee receivables

Re-guarantee receivables represent receivables for the payment of claims to the recipient of the guarantee which is the responsibility of the re-guarantee partner.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan.

f. Investasi

Investasi pada efek-efek

Efek-efek adalah investasi pada efek-efek yang terdiri dari sukuk. Efek-efek diklasifikasikan atas dasar tujuan investasi atau intensi dari manajemen.

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain Surat Berharga Syariah Negara dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Unit Syariah berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 110 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- 2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
- 3) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, time deposits with original maturities of three months or less, which are not restricted and not pledged as collaterals for borrowings.

f. Investments

Investments in marketable securities

Marketable securities are investments in securities which consist of sukuk. Securities are classified on the basis of investment objectives or management's intentions.

Sharia Securities are proof of investment based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including Government Islamic Securities and other securities following sharia principles.

Investment in marketable securities, specifically sukuk, are classified based on business model defined by Sharia Unit in accordance with SFAS No. 110 on "Accounting for Sukuk" as follows:

- 1) At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity.
- 2) At fair value securities are stated at fair value through profit or loss. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in the current year statement of profit or loss.
- 3) At fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Investasi (lanjutan)

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar investasi dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

Investasi dianggap memiliki kuotasi pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Nilai wajar untuk investasi yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan menggunakan harga yang dipublikasikan secara rutin dan berasal dari sumber yang terpercaya, seperti harga kuotasi di Bursa Efek dan IBPA (*"Indonesia Bond Pricing Agency"*).

Untuk investasi yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar terkini investasi lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas estimasian terhadap aset bersih investasi tersebut.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Investments (continued)

Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Company measures the fair value of investments using the quoted price in an active market for that instrument.

Investment is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.

The fair value of investment traded in active markets is determined based on quoted market prices at the statement of financial position date, from credible sources. This includes quoted market price in Stock Exchange and IBPA ("Indonesia Bond Pricing Agency"*).*

For investment with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another investment which substantially has the same characteristic or is calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset of the investment.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Investasi (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa investasi mengalami penurunan nilai. Investasi diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa (atau peristiwa-peristiwa) yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas investasi yang dapat diestimasi secara andal.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun penyisihan penurunan nilai. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan investasi dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset tersebut berakhir, atau ketika investasi tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan).

g. Piutang lain-lain

Piutang dinyatakan sebesar jumlah nilai nominal setelah dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu. Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk berdasarkan penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun. Apabila terdapat piutang yang benar-benar tidak tertagih, maka piutang tersebut dihapuskan dan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Investments (continued)

Impairment of investments

The Company assesses at each statement of financial position date whether there is objective evidence that investment is impaired. Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the investment that can be reliably estimated.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's credit rating), the previously recognised impairment loss is reversed by adjusting the impairment provision account. The amount of the reversal is recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Derecognition

Investments are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (that is, if substantially all the risks and rewards have not been transferred, Company evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition).

g. Other receivables

Receivables are stated at their nominal value net of allowance for impairment losses. Allowance for impairment losses is estimated based on a review of the status of the individual receivables accounts. Uncollectible receivables, if any, will be written-off and charged to the current year's profit or loss.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Aset tetap - bersih

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Biaya akuisisi meliputi semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan aset tersebut. Aset tetap didepresiasi menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis dari aset tetap tersebut sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>
Gedung	30
Perlengkapan kantor	5
Kendaraan bermotor	5
Perlengkapan lainnya	5

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke laporan laba rugi di periode yang sama pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset dikapitalisasi dan didepresiasi.

Apabila aset tetap dihentikan penggunaannya atau dijual, harga perolehan dan akumulasi depresiasi yang terkait dengan aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara harga jual neto dengan nilai pakai.

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi selesai. Depresiasi mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

j. Zakat dan dana kebajikan

Zakat menurut istilah syara (hukum Islam) adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortised over the periods of benefit using the straight-line method.

i. Fixed assets - net

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Acquisition cost covers expenditures that is directly attributable to the acquisitions of the assets. Fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated useful life of the assets as follows:

	<i>Buildings</i>
	<i>Office equipments</i>
	<i>Vehicles</i>
	<i>Other equipments</i>

Repair and maintenance expenses are charged to the statement of profit or loss during the financial period in which they are incurred. Expenditure which extends the useful life of the assets or provides further economic benefits are capitalised and depreciated.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements and any resulting gains or losses are recognised in the statement of profit or loss.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined based on the higher of net selling price or value in use.

The accumulated costs of the construction of fixed assets are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to the fixed assets accounts when the construction is completed. Depreciation is charged from such date.

j. Zakat and qardhul hasan funds

Zakat according to syara (the Islamic law) means expending an amount of certain possession by giving to people, who have rights to accept under terms determined by syara.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Zakat dan dana kebajikan (lanjutan)

Perusahaan tidak mengakui penerimaan pendapatan yang berasal dari denda dan penerimaan non-halal lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari denda dan penerimaan non-halal lainnya dialokasikan untuk dana kebajikan dan dicatat sebagai liabilitas Perusahaan.

k. Beban usaha dan beban lain-lain

Beban usaha dan beban lain-lain diakui sesuai masa manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual basis*).

l. Liabilitas imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja, seperti pensiun, uang pisah, uang penghargaan, dan imbalan lainnya dihitung berdasarkan peraturan Perusahaan dan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 ("UUCK").

Liabilitas imbalan pensiun merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal posisi keuangan dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial (pengukuran kembali) dikreditkan atau dibebankan seluruhnya di ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Biaya pemutusan kontrak kerja dan keuntungan/kerugian kurtailmen diakui pada periode di saat Perusahaan menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Zakat and qardhul hasan funds (continued)

The Company does not recognise income from fines and other non-halal income. Income received from fines and other non-halal income are allocated for qardhul hasan funds and recognised as liabilities of the Company.

k. Operating and other expenses

Operating and other expenses are recognised according to beneficial period in the current year (*accrual basis*).

l. Employee benefits liabilities

Short term employee benefits are recognised when they become due to the employees.

Long-term and post employment benefits, such as pension, severance payments, service payments, and other benefits are calculated in accordance with the Company's Regulation and the Job Creation Law No. 11/2020 ("UUCK").

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at the financial position date, together with adjustments for unrecognised actuarial gains or losses and past service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity similar to the related pension liability.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions (remeasurement) are credited or charged to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Termination costs and curtailment gain or loss are recognised in the period when the Company is demonstrably committed to make a material reduction in the number of employees covered by a plan.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Perpajakan

Beban pajak terdiri atas pajak kini dan tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen mengevaluasi secara periodik implementasi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku terutama yang memerlukan interpretasi lebih lanjut mengenai pelaksanaannya termasuk juga evaluasi terhadap surat ketetapan pajak yang diterima dari kantor pajak. Lebih lanjut, manajemen membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau utang pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Akumulasi pajak yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Taxation

The tax expense comprise current and deferred tax. Tax is recognised in the statement of profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. The Management periodically evaluates the implementation of prevailing tax regulation, especially those that are subject to further interpretation on its implementation, including evaluation on tax assessment letters received from tax authorities. Furthermore, where appropriate, management establishes provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Accumulated tax loss carry forward is recognised as a deferred tax asset when it is probable that there will be future taxable profit available against which the unused tax losses can be utilised.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan utang pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan utang pajak kini dan apabila aset dan utang pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara bersih.

Koreksi atas utang pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, apabila diajukan keberatan dan/atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut diterima. Manajemen juga dapat membentuk provisi terhadap utang pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan provisi tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

n. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan pihak-pihak berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan yang memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
 - iii. merupakan personel manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk dari Perusahaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Taxation (continued)

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined. Management provides provision for future tax liability at the amount that will be payable to the tax office on probable tax exposure, based on assessment as at the date of statement of financial position. Assumptions and estimations used in the provision calculations may involve element of uncertainty.

n. Transactions with related parties

The Company enters into transactions with related parties as defined in SFAS 7 (Revised 2015) "Related party disclosures". The nature of transactions and balance of accounts with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

A related party is an individual or entity related with the Company that meets the following requirements:

- 1) *A person or a close member of that person's family is related to the Company if that person:*
 - i. has control or joint control over the Company;*
 - ii. has significant influence over the Company; or*
 - iii. is a member of the key management personnel of the Company or parent entity of the Company.*

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan yang memenuhi persyaratan berikut: (lanjutan)

- 2) Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. entitas dan Perusahaan adalah anggota dari grup yang sama;
 - ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu grup yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan;
 - vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Definisi pihak-pihak berelasi untuk Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah yang memiliki pengendalian, atau pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan, atas entitas pelapor; dan
- b. entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena dikendalikan atau dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah yang sama atas entitas pelapor dan entitas lain tersebut.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Transactions with related parties (continued)

A related party is an individual or entity related with the Company that meets the following requirements: (continued)

- 2) An entity is related to the Company if any of the following conditions applies:
 - i. the entity and the Company are members of the same group;
 - ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - iii. both entities are joint ventures of the same third party;
 - iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - v. the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Company or an entity related to the Company. If the Company is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the Company;
 - vi. the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

The definition of related parties for the Company is as follows:

- a. The Government that has control of, or joint control, or significant influence over, the reporting entity; and
- b. other entity that is a related party because it is controlled or jointly controlled, or is significantly influenced by the same government over the reporting entity and the other entity.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Pemerintah yang dimaksud oleh Perusahaan sebagai pihak berelasi adalah Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Milik Negara yang dimiliki langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan anak perusahaan namun tidak termasuk Perusahaan Milik Pemerintah Daerah.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 33.

o. Transaksi sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Perusahaan dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- sewa jangka pendek; dan
- sewa yang aset dasarnya bernilai rendah

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Transactions with related parties (continued)

The Government referred to by the Company as a related party is the Government of the Republic of Indonesia and State-Owned Companies which are directly owned by the Government of Indonesia and their subsidiaries but do not include Local Government-Owned Companies.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 33.

o. Leases

At the commencement of a contract, the Company assesses whether the contract is or contains a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. The Company can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

- short term lease; and
- low value asset

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company shall assess whether:

- The Company has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and
- The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has described when it has a decision-making right that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:
 1. The Company has the right to operate the asset;
 2. The Company has designed the asset in a way that predetermine how and for what purpose it will be used.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Transaksi sewa (lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima dan didiskontokan menggunakan suku bunga inkremental penyewa pada tanggal penerapan awal.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap tahun.

Perusahaan menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa sebagai bagian dari liabilitas lain-lain di dalam laporan posisi keuangan.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Leases (continued)

The Company recognises a right-of-use asset and leases liabilities at the leases commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and the estimated costs that will be incurred to dismantle and transfer the underlying asset or to restore the underlying asset to the required and lease conditions, less any rental incentives received and discounted at the lessee's incremental interest rate at the initial application date.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that right cannot be readily determined, using incremental borrowing rate.

In general, the Company uses the incremental loan interest rate as the discount rate.

Leases payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the leases period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Company presents right-of-use assets as part of fixed assets and leases liabilities as part of other liabilities in the statement of financial position.

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Company by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Company will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the leases term.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Transaksi sewa (lanjutan)

Modifikasi sewa

Perusahaan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Keuangan adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

a. Estimasi klaim

Perusahaan wajib membentuk cadangan untuk pembayaran klaim yang timbul. Cadangan ini merupakan biaya yang diharapkan untuk menyelesaikan klaim yang telah terjadi, tetapi masih dalam proses pada tanggal laporan posisi keuangan. Perusahaan menetapkan cadangan berdasarkan jenis produk, jenis dan periode penjaminan dan tahun kejadian. Ada dua kategori cadangan: cadangan untuk klaim yang sudah dilaporkan dan cadangan untuk klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan ("IBNR").

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Leases (continued)

Lease modification

The Company account for a lease modification as a separate lease if both:

- The modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets;
- The consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements where require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with the Financial Accounting Standard are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

a. Estimated claims

The Company is required to establish reserves for payment of claim that arise. These reserves represent the expected ultimate cost to settle claims occurring prior to, but still outstanding as of the statement of financial position date. The Company establishes its reserves by product line, type and extent of coverage and year of occurrence. There are two categories of reserve: reserves for reported losses and reserves for incurred but not reported ("IBNR") losses.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Estimasi klaim (lanjutan)

Cadangan Perusahaan untuk klaim yang sudah dilaporkan adalah berdasarkan pada estimasi pembayaran di masa mendatang untuk menyelesaikan klaim yang sudah dilaporkan. Perusahaan membuat estimasi tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang tersedia pada saat cadangan ditetapkan.

Perusahaan membentuk cadangan IBNR dengan menggunakan metode teknik perhitungan teknis asuransi oleh aktuaris.

b. Aset penjaminan ulang

Aset yang timbul dari kontrak penjaminan ulang juga dihitung dengan menggunakan metode di atas. Selain itu, pemulihan aset ini dinilai secara periodik untuk memastikan bahwa jumlahnya mencerminkan jumlah yang pada akhirnya akan diterima, mempertimbangkan faktor-faktor seperti *counterparty* dan risiko kredit. Penurunan nilai diakui dimana terdapat bukti objektif bahwa Perusahaan tidak dapat menerima jumlah yang terutang untuk itu dan jumlah ini dapat diukur secara andal.

c. Liabilitas imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaris. Perhitungan aktuaris menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain.

d. Estimasi pengakuan imbal jasa kafalah

Perusahaan memperkirakan pengakuan imbal jasa kafalah dengan mempertimbangkan kontrak-kontrak kafalah yang belum dicatat pada akhir tahun. Perkiraan ini didasarkan pada pengalaman tahun sebelumnya, volume usaha tahun ini serta perkiraan usaha masa datang. Perusahaan mencatat perkiraan imbal jasa ini sebagai kafalah yang diperkirakan, dan juga mengevaluasi cadangan premi yang belum diterima terkait dengan imbal jasa tersebut.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

a. Estimated claims (continued)

The Company's reserves for reported losses are based on estimates of future payments to settle reported claims. The Company bases such estimates on the facts available at the time the reserves are established.

The Company establishes IBNR reserves using actuarial insurance technical calculations.

b. Re-guarantee assets

Assets arising from re-guarantee contracts are also computed using the above methods. In addition, the recoverability of these assets are assessed on a periodic basis to ensure that the balance is reflective of the amounts that will ultimately be received, taking into consideration factors such as counterparty and credit risk. Impairment is recognised where there is objective evidence that the Company may not receive amounts due to it and these amounts can be reliably measured.

c. Employee benefits liabilities

Employee benefits liabilities are determined based on actuarial valuation. The actuary valuation involves making assumptions about discount rate, expected rate of return on investments, future salary increases, mortality rate, resignation rate and others.

d. Estimated kafalah fees recognition

The company estimates the recognition of kafalah fees by considering the kafalah contracts that have not been recorded at the end of the year. This estimation is based on the previous year's experience, the current year's business volume, and future business projections. The company records these estimated service fees as estimated kafalah and also evaluates the provision for unearned premiums associated with these fees.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2023	2022	
Kas	<u>443</u>	<u>365</u>	Cash on hand
Kas di bank			Cash in bank
Rupiah			Rupiah
PT Bank Jabar Banten Syariah	10,042	14,186	PT Bank Jabar Banten Syariah
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	9,548	4,099	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank BTPN Syariah	1,769	178	PT Bank BTPN Syariah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Unit Syariah	703	118	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Sharia Unit
PT BPD Jawa Tengah, Unit Syariah	448	25	PT BPD Jawa Tengah, Sharia Unit
PT Bank Sinarmas Syariah	365	117	PT Bank Sinarmas Syariah
PT BPD Kalsel Syariah	264	9	PT BPD Kalsel Syariah
PT BPD Sulselbar	250	48	PT BPD Sulselbar
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	223	269	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT BPD Sumbang (Nagari) Syariah	222	2	PT BPD Sumbang (Nagari) Syariah
PT Bank Syariah Bukopin	202	154	PT Bank Syariah Bukopin
PT BPD Riau Syariah	181	47	PT BPD Riau Syariah
PT Bank Aceh Syariah	168	83	PT Bank Aceh Syariah
PT BPD Kalimantan Barat, Unit Syariah	146	320	PT BPD Kalimantan Barat, Sharia Unit
PT Bank NTB Syariah	143	157	PT Bank NTB Syariah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	110	54	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Lain-lain	<u>651</u>	<u>1,549</u>	Others
	<u>25,435</u>	<u>21,415</u>	
Deposito			Time deposits
Rupiah			Rupiah
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	53,300	36,750	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	46,138	9,926	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Aceh Syariah	23,143	11,661	PT Bank Aceh Syariah
PT BPD Jawa Tengah, Unit Syariah	22,900	20,200	PT BPD Jawa Tengah, Sharia Unit
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Unit Syariah	17,395	235,558	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Sharia Unit
PT BPD Kalimantan Selatan, Unit Syariah	9,875	9,268	PT BPD Kalimantan Selatan, Sharia Unit
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Unit Syariah	9,375	10,543	PT BPD Kalimantan Timur and Kalimantan Utara, Sharia Unit
PT BPD DKI Syariah	9,109	8,874	PT BPD DKI Syariah
PT Bank Jabar Banten Syariah	7,640	1,900	PT Bank Jabar Banten Syariah
PT BPD Riau Syariah	6,200	900	PT BPD Riau Syariah
PT Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Unit Syariah	5,000	7,052	PT Bank Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat, Sharia Unit
PT Bank Syariah Bukopin	3,476	5,957	PT Bank Syariah Bukopin
PT BPD Sumatera Barat Nagari, Unit Syariah	2,665	-	PT BPD Sumatera Barat Nagari, Sharia Unit
PT BPD Jawa Timur Tbk, Unit Syariah	2,250	-	PT Bank Jawa Timur, Sharia Unit
PT Bank Sinarmas Syariah	2,113	-	PT Bank Sinarmas Syariah
PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Unit Syariah	1,000	1,000	PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Sharia Unit
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Unit Syariah	850	2,500	PT BPD Sumatera Selatan and Bangka Belitung, Sharia Unit
PT BPD Sumatera Utara, Unit Syariah	500	3,600	PT BPD Sumatera Utara, Sharia Unit
PT BPD Kalimantan Barat, Unit Syariah	200	2,100	PT BPD Kalimantan Barat, Sharia Unit
PT Bank BTPN Syariah Tbk	-	26,608	PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Bank Mega Syariah	-	18,211	PT Bank Mega Syariah
PT Bank NTB Syariah	-	15,100	PT Bank NTB Syariah
PT BPRS Artha Madani	-	2,150	PT BPRS Artha Madani
PT BPRS Dinar Ashri	<u>-</u>	<u>400</u>	PT BPRS Dinar Ashri
	<u>223,129</u>	<u>430,258</u>	
	<u>249,007</u>	<u>452,038</u>	

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. DEPOSITO BERJANGKA UNTUK TUJUAN TERTENTU

	2023	2022
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	755,139	709,689
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Unit Syariah	20,500	20,500
PT BPD Kalimantan Barat, Unit Syariah	17,400	17,400
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Unit Syariah	3,094	3,094
PT BPD DKI Syariah	-	5,000
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Unit Syariah	-	1,500
	<u>796,133</u>	<u>757,183</u>

Sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati dengan mitra, Perusahaan wajib mengalokasikan sejumlah dana dalam bentuk deposito berjangka yang akan dipergunakan sebagai pelengkap persyaratan dalam perjanjian kerjasama tersebut. Perusahaan dapat menentukan jangka waktu penempatan deposito. Pada tahun 2023 dan 2022 semua deposito memiliki jatuh tempo dibawah tiga bulan.

5. TIME DEPOSITS FOR CERTAIN PURPOSES

*PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT BPD Sumatera Selatan and Bangka Belitung, Sharia Unit
PT BPD Kalimantan Barat, Sharia Unit
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Sharia Unit
PT BPD DKI Syariah
PT BPD Kalimantan Timur and Kalimantan Utara, Sharia Unit*

In accordance with the cooperation agreement with partners, the Company are required to allocated certain amount of fund in the form of time deposits which will be utilised as the fulfillment of requirement on the related cooperation agreement. The Company could determined the period of time deposits placement. On 2023 and 2022 all time deposits has period below 3 months.

6. INVESTASI

	2023	2022
Sukuk	591,688	459,697
Reksadana syariah	<u>10,164</u>	<u>-</u>
	<u>601,852</u>	<u>459,697</u>

Sukuk
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

SBSN seri PBS029	105,671	102,041
SBSN seri PBS028	99,506	93,827
SBSN seri PBS033	93,641	82,657
SBSN seri PBS037	75,751	-
SBSN seri PBS032	68,364	67,971
SBSN seri PBS030	64,391	63,523
SBSN seri PBS003	44,480	-
SBSN seri PBS034	28,680	27,628
SBSN seri PBS036	6,880	-
SBSN seri PBSG001	3,009	-
SBSN seri PBS031	1,315	1,291
SBSN seri PBS011	-	5,103
SBSN seri PBS019	-	2,244
SBSN seri PBS021	-	13,412
	<u>591,688</u>	<u>459,697</u>

Reksadana syariah
Nilai wajar yang diukur melalui laba/rugi

Reksadana syariah kelas S	<u>10,164</u>	<u>-</u>
	<u>601,852</u>	<u>459,697</u>

6. INVESTMENTS

*Sukuk
Sharia mutual fund*

Sukuk
Fair value through other comprehensive income

*SBSN seri PBS029
SBSN seri PBS028
SBSN seri PBS033
SBSN seri PBS037
SBSN seri PBS032
SBSN seri PBS030
SBSN seri PBS003
SBSN seri PBS034
SBSN seri PBS036
SBSN seri PBSG001
SBSN seri PBS031
SBSN seri PBS011
SBSN seri PBS019
SBSN seri PBS021*

Sharia mutual fund
Fair value through profit/loss
Sharia mutual fund Class S

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG IMBAL JASA KAFALAH - BERSIH

Piutang imbal jasa *kafalah* terdiri atas jumlah yang terutang kepada Perusahaan oleh pemegang sertifikat penjaminan, Pemerintah Republik Indonesia (program PEN), atau agen-agen.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pihak berelasi	128	52,489
Pihak ketiga	<u>10,183</u>	<u>1,536</u>
	10,311	54,025
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(909)</u>	<u>(958)</u>
	<u>9,402</u>	<u>53,067</u>

Direksi berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang imbal jasa *kafalah*.

Lihat Catatan 33 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk dalam piutang imbal jasa *kafalah* - bersih adalah estimasi pengakuan piutang imbal jasa *kafalah* sebesar Rp 8.481.

7. KAFALAH FEE RECEIVABLES - NET

Kafalah fee receivables consist of amounts owed to the Company by the guarantee certificate holder, Government of Indonesia, or agents.

*Related parties
Third parties*

Less:
Allowance for impairment losses

The Board of Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover for possible losses on kafalah fee receivables.

Refer to Note 33 for details of related parties balance and transactions.

As at 31 December 2023, included in kafalah fee receivables - net is estimated kafalah fee receivables recognition amounting to Rp 8,481.

8. PIUTANG PENJAMINAN ULANG - BERSIH

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pihak berelasi	<u>202,190</u>	<u>92,376</u>
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(15,806)</u>	<u>-</u>
	<u>186,384</u>	<u>92,376</u>

Direksi berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang penjaminan ulang.

Lihat Catatan 33 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

8. RE-GUARANTEE RECEIVABLES - NET

Related parties

Less:
Allowance for impairment losses

The Board of Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover for possible losses on re-guarantee receivables.

Refer to Note 33 for details of related parties balance and transactions.

9. PIUTANG HASIL INVESTASI

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Sukuk	9,197	6,889
Deposito berjangka	<u>844</u>	<u>1,294</u>
	<u>10,041</u>	<u>8,183</u>

*Sukuk
Time deposits*

9. INVESTMENT INCOME RECEIVABLES

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET PENJAMINAN ULANG

10. RE-GUARANTEE ASSETS

	2023	2022	
Imbal jasa <i>kafalah</i> ditangguhkan (Catatan 15)	193,192	246,462	Unearned <i>kafalah</i> fees (Notes 15)
Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (Catatan 17)	118,483	139,123	Claims incurred but not yet reported (Notes 17)
Klaim dalam proses (Catatan 17)	<u>42,649</u>	<u>43,142</u>	Claims in process (Notes 17)
	<u><u>354,324</u></u>	<u><u>428,727</u></u>	

Direksi berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset penjaminan ulang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The Board of Directors believe that there is no impairment of re-guarantee assets as of 31 December 2023 and 2022.

11. BIAYA AKUISISI DITANGGUHKAN

11. DEFERRED ACQUISITION COSTS

	2023	2022	
Kontra bank garansi	1,638	5,386	Contra bank guarantee
FLPP	11,161	12,308	FLPP
Multiguna	41,401	50,889	Multipurpose
Bond	166	809	Bond
Umum dan konstruksi	918	1,169	General and construction
Mikro	<u>247</u>	<u>328</u>	Micro
	<u><u>55,531</u></u>	<u><u>70,889</u></u>	

12. ASET TETAP - BERSIH

12. FIXED ASSETS - NET

Aset tetap terdiri dari:

Fixed assets consist of:

	2023	2022	
Kepemilikan langsung	79,307	70,095	Direct ownership
Aset hak-guna	<u>4,190</u>	<u>4,185</u>	Right-of-use assets
	<u><u>83,497</u></u>	<u><u>74,280</u></u>	

	1 Januari/ January 2023	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 2023	
Kepemilikan langsung					Direct ownership
Biaya perolehan					Acquisition costs
Tanah	35,493	-	-	35,493	Land
Gedung	25,521	5,044	-	30,565	Buildings
Perlengkapan kantor	17,734	8,374	-	26,108	Office equipments
Kendaraan bermotor	915	66	-	981	Motor vehicles
Perlengkapan lainnya	<u>7</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7</u>	Other equipments
	<u><u>79,670</u></u>	<u><u>13,484</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>93,154</u></u>	
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Gedung	(853)	(1,043)	-	(1,896)	Buildings
Perlengkapan kantor	(7,947)	(3,168)	-	(11,115)	Office equipments
Kendaraan bermotor	(768)	(61)	-	(829)	Motor vehicles
Perlengkapan lainnya	<u>(7)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(7)</u>	Other equipments
	<u><u>(9,575)</u></u>	<u><u>(4,272)</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>(13,847)</u></u>	
Nilai buku bersih	<u><u>70,095</u></u>			<u><u>79,307</u></u>	Net book value

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP - BERSIH (lanjutan)

12. FIXED ASSETS - NET (continued)

2023					
	1 Januari/ January 2023	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 2023	
Aset hak-guna					Right-of-use assets
Biaya perolehan					Acquisition costs
Gedung	5,365	1,767	(1,054)	6,078	Buildings
Kendaraan bermotor	8,322	2,018	(1,491)	8,849	Motor vehicles
	<u>13,687</u>	<u>3,785</u>	<u>(2,545)</u>	<u>14,927</u>	
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Gedung	(3,652)	(1,549)	1,054	(4,147)	Buildings
Kendaraan bermotor	(5,850)	(2,231)	1,491	(6,590)	Motor vehicles
	<u>(9,502)</u>	<u>(3,780)</u>	<u>2,545</u>	<u>(10,737)</u>	
Nilai buku bersih	<u>4,185</u>	<u>5</u>	<u>-</u>	<u>4,190</u>	Net book value
2022					
	1 Januari/ January 2022	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 2022	
Kepemilikan langsung					Direct ownership
Biaya perolehan					Acquisition costs
Tanah	35,493	-	-	35,493	Land
Gedung	17,066	8,455	-	25,521	Buildings
Perlengkapan kantor	15,330	3,069	(665)	17,734	Office equipments
Kendaraan bermotor	893	39	(17)	915	Motor vehicles
Perlengkapan lainnya	7	-	-	7	Other equipments
	<u>68,789</u>	<u>11,563</u>	<u>(682)</u>	<u>79,670</u>	
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Gedung	-	(853)	-	(853)	Buildings
Perlengkapan kantor	(5,846)	(2,753)	652	(7,947)	Office equipments
Kendaraan bermotor	(712)	(63)	7	(768)	Motor vehicles
Perlengkapan lainnya	(1)	(6)	-	(7)	Other equipments
	<u>(6,559)</u>	<u>(3,675)</u>	<u>659</u>	<u>(9,575)</u>	
Nilai buku bersih	<u>62,230</u>			<u>70,095</u>	Net book value
2022					
	1 Januari/ January 2023	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 2023	
Aset hak-guna					Right-of-use assets
Biaya perolehan					Acquisition costs
Gedung	5,278	354	(267)	5,365	Buildings
Kendaraan bermotor	7,204	1,918	(800)	8,322	Motor vehicles
	<u>12,482</u>	<u>2,272</u>	<u>(1,067)</u>	<u>13,687</u>	
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Gedung	(2,547)	(1,372)	267	(3,652)	Buildings
Kendaraan bermotor	(3,722)	(2,928)	800	(5,850)	Motor vehicles
	<u>(6,269)</u>	<u>(4,300)</u>	<u>1,067</u>	<u>(9,502)</u>	
Nilai buku bersih	<u>6,213</u>	<u>(2,028)</u>	<u>-</u>	<u>4,185</u>	Net book value

Jumlah pengeluaran kas untuk sewa selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 5.131 dan Rp 3.353.

The total cash outflow for leases for the period ended 31 December 2023 and 2022 were Rp 5,131 and Rp 3,353.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP - BERSIH (lanjutan)

Seluruh aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya. Direksi berpendapat bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Berdasarkan evaluasi Direksi, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

12. FIXED ASSETS - NET (continued)

All fixed assets were insured against fire, theft and other possible risk. The Directors believe that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Based on the Board of Directors evaluation, there have been no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of fixed assets as at 31 December 2023 and 2022.

13. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pajak penghasilan badan:		
Tahun 2022	5,445	-
Tahun 2023	<u>44,970</u>	<u>-</u>
	<u>50,415</u>	<u>-</u>

Corporate income tax:
Year 2022
Year 2023

b. Utang pajak

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pajak penghasilan badan:		
Tahun 2022	-	<u>311</u>
	-	<u>311</u>
Pajak lainnya:		
Pasal 21	543	1,060
Pasal 23	61	37
Pasal 25	3,787	-
Pasal 4(2)	<u>116</u>	<u>263</u>
	<u>4,507</u>	<u>1,360</u>
	<u>4,507</u>	<u>1,671</u>

Corporate income tax:
Year 2022

Other taxes:
Article 21
Article 23
Article 25
Article 4(2)

c. (Beban)/manfaat pajak penghasilan

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kini	-	(45,441)
Tanggungan	<u>6,575</u>	<u>1,032</u>
	<u>6,575</u>	<u>(44,409)</u>

c. Income tax (expenses)/benefit

*Current
Deferred*

Rekonsiliasi antara beban pajak Perusahaan dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak Perusahaan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the Company's total tax expenses and the amounts computed by applying the statutory tax rates to the Company's income before tax are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	<u>27,314</u>	<u>234,039</u>	<i>Profit before income tax</i>
Pajak dihitung menggunakan tarif pajak yang berlaku	6,009	51,489	<i>Tax calculated with applicable tax rate</i>
Perbedaan permanen:			<i>Permanent difference:</i>
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(18,842)	(15,099)	<i>Income subject to final tax</i>
Biaya yang tidak diperkenankan	<u>6,004</u>	<u>8,019</u>	<i>Non-deductible expenses</i>
Beban pajak penghasilan	<u>(12,838)</u>	<u>(44,409)</u>	<i>Income tax expense</i>

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

b. (Beban)/manfaat pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

b. Income tax (expenses)/benefit (continued)

The reconciliations between the Company's profit before income tax and the taxable income are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	27,314	234,039	<i>Profit before income tax</i>
Beda tetap:			Permanent differences:
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(85,646)	(68,632)	<i>Income subject to final tax</i>
Beban pajak final	13,387	10,618	<i>Final tax expenses</i>
Biaya yang tidak diperkenankan	13,904	25,833	<i>Non-deductible expenses</i>
	<u>(58,355)</u>	<u>(32,181)</u>	
Beda waktu:			Timing differences:
Depresiasi aset tetap	1,045	387	<i>Fixed asset depreciation</i>
Estimasi klaim	12,751	959	<i>Estimated claims</i>
Liabilitas imbalan kerja	(1,052)	1,140	<i>Employee benefit liabilities</i>
Cadangan bonus	(415)	2,205	<i>Provision for bonus</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang penjaminan ulang dan piutang imbal jasa kafalah	16,714	-	<i>Allowance for impairment losses for re-guarantee receivables and kafalah receivables</i>
	<u>29,043</u>	<u>4,691</u>	
(Rugi)/penghasilan kena pajak	<u>(60,084)</u>	<u>206,549</u>	<i>Taxable (loss)/income</i>
Beban pajak penghasilan	<u>-</u>	<u>45,441</u>	<i>Income tax expenses</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Pajak penghasilan dibayar dimuka	<u>(44,970)</u>	<u>(45,130)</u>	<i>Prepaid income tax</i>
Pajak penghasilan (lebih)/kurang bayar	<u>(44,970)</u>	<u>311</u>	<i>Income tax (over)/underpayment</i>

Aset dan utang pajak tangguhan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Deferred tax assets and liabilities at reporting dates consist of the following:

<u>31 Desember/December 2023</u>				
<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to profit and loss</u>	<u>Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya/ Credited to other comprehensive income</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>	
Depresiasi aset tetap dan aset hak guna	143	(804)	(661)	<i>Fixed asset and right-of-use assets depreciation</i>
Liabilitas sewa	-	575	575	<i>Lease liabilities</i>
Estimasi klaim	40,616	2,805	43,421	<i>Estimated claims</i>
Liabilitas imbalan kerja	1,373	231	1,350	<i>Employee benefit liabilities</i>
Nilai wajar surat berharga tersedia untuk dijual	3,931	-	(3,931)	<i>Fair value on financial asset available for sale</i>
Cadangan bonus	3,084	91	3,175	<i>Provision for bonus</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang reasuransi dan piutang imbal jasa kafalah	-	3,677	3,677	<i>Allowance for impairment losses for reinsurance receivables and kafalah receivables</i>
	<u>49,147</u>	<u>6,575</u>	<u>(4,185)</u>	

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset dan utang pajak tangguhan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

c. Deferred tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities at reporting dates consist of the following: (continued)

	31 Desember/December 2022				
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to profit and loss	(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya/ (Charged)/credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Depresiasi aset tetap	58	85	-	143	Fixed asset depreciation
Estimasi klaim	40,405	211	-	40,616	Estimated claims
Liabilitas imbalan kerja	879	251	243	1,373	Employee benefit liabilities
Nilai wajar surat berharga tersedia untuk dijual	(1,708)	-	5,639	3,931	Fair value on financial asset available for sale
Cadangan bonus	2,599	485	-	3,084	Provision for bonus
	<u>42,233</u>	<u>1,032</u>	<u>5,882</u>	<u>49,147</u>	

Direksi berkeyakinan bahwa saldo aset pajak tangguhan di atas dapat digunakan di masa yang akan datang.

The Board of Directors believe that the deferred tax assets balance above can be recovered.

d. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah utang pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

d. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

14. UTANG PENJAMINAN ULANG

14. RE-GUARANTEE PAYABLES

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pihak berelasi	<u>53,857</u>	<u>48,315</u>	Related parties
Lihat Catatan 33 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.			Refer to Note 33 for details of related parties balance and transactions.

15. IMBAL JASA KAFALAH DITANGGUHKAN

15. UNEARNED KAFALAH FEES

	2023			2022			
	Aset Penjaminan Ulang/ Re- guarantee assets			Aset Penjaminan Ulang/ Re- guarantee assets			
	Bruto/Gross	Bersih/Net		Bruto/Gross	Bersih/Net		
PEN	4,022	(902)	3,120	62,706	(14,933)	47,773	PEN
Kontra bank garansi	37,771	(8,619)	29,152	67,427	(27,842)	39,585	Contra bank guarantee
FLPP	128,332	(36,701)	91,631	125,996	(38,482)	87,514	FLPP
KUR	265,561	(46,783)	218,778	141,879	(33,586)	108,293	KUR
Multiguna	223,250	(92,213)	131,037	276,706	(115,167)	161,539	Multipurpose
Bond	4,449	(1,189)	3,260	13,262	(5,168)	8,094	Bond
Umum dan konstruksi	15,800	(4,841)	10,959	17,058	(6,957)	10,101	General and construction
Mikro	6,954	(1,944)	5,010	10,162	(4,327)	5,835	Micro
	<u>686,139</u>	<u>(193,192)</u>	<u>492,947</u>	<u>715,196</u>	<u>(246,462)</u>	<u>468,734</u>	

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**15. IMBAL JASA KAFALAH DITANGGUHKAN
(lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk dalam imbal jasa kafalah ditangguhkan adalah estimasi pengakuan imbal jasa kafalah ditangguhkan sebesar Rp 1.786.

15. UNEARNED KAFALAH FEES (continued)

As at 31 December 2023, included in unearned kafalah fees is estimated unearned kafalah fees recognition amounting to Rp 1,786.

16. PENDAPATAN KOMISI DITANGGUHKAN

16. DEFERRED COMMISSION INCOME

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
PEN	162	2,649	PEN
Kontra bank garansi	1,678	5,568	Contra bank guarantee
FLPP	5,552	5,947	FLPP
KUR	6,578	6,716	KUR
Multiguna	15,334	18,966	Multipurpose
Bond	219	1,032	Bond
Umum dan konstruksi	728	1,189	General and construction
Mikro	322	796	Micro
	<u>30,573</u>	<u>42,863</u>	

17. ESTIMASI KLAIM

17. ESTIMATED CLAIMS

Cadangan klaim merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

The claim reserves is the reserve of claim that might occur in the coming years onto the guarantee that has not matured yet.

Cadangan klaim dicatat di laporan posisi keuangan berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan asumsi aktuarial. Termasuk dalam cadangan klaim adalah klaim dalam proses dan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (IBNR).

Reserves for claims are recorded in the statement of financial position based on actuarial calculations using actuarial assumptions. Included in the reserves for claims are claims in process and claims incurred but not yet reported (IBNR).

	<u>2023</u>			<u>2022</u>			
	Klaim bruto/ Gross claims	Aset penjaminan ulang/ Re-guarantee assets	Estimasi klaim retensi sendiri/ Estimated own retention claim	Klaim bruto/ Gross claims	Aset penjaminan ulang/ Re-guarantee assets	Estimasi klaim retensi sendiri/ Estimated own retention claim	
PEN	16,336	(4,072)	12,264	50,723	(6,022)	44,701	PEN
Kontra bank garansi	130,312	(50,140)	80,172	50,902	(36,001)	14,901	Contra bank guarantee
FLPP	13,180	(1,110)	12,070	48,264	(14,375)	33,889	FLPP
KUR	56,019	(13,251)	42,768	29,244	(6,730)	22,514	KUR
Multiguna	30,973	(26,259)	4,714	70,541	(49,305)	21,236	Multipurpose
Bond	59,011	(33,134)	25,877	26,651	(21,597)	5,054	Bond
Umum dan konstruksi	11,332	(10,465)	867	10,539	(5,880)	4,659	General and construction
Mikro	41,341	(22,700)	18,641	80,023	(42,355)	37,668	Micro
	<u>358,504</u>	<u>(161,131)</u>	<u>197,373</u>	<u>366,887</u>	<u>(182,265)</u>	<u>184,622</u>	

Pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk dalam estimasi klaim adalah estimasi klaim yang terjadi namun belum dilaporkan - bersih sebesar Rp 112.808 (2022: Rp 108.687).

As at 31 December 2023, included in estimated claims is estimated claims incurred but not yet reported - net amounting to Rp 112,808 (2022: Rp 108,687).

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Riana dan Rekan dan Kantor Konsultan Aktuaria Nandi dan Utama, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Perusahaan menunjuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-084/KM.10/2007 tanggal 23 April 2007. Iuran pensiun yang ditanggung oleh Perusahaan adalah 6%, sedangkan yang ditanggung oleh karyawan adalah 4%, masing-masing dari gaji pokok bulanan karyawan.

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
Asumsi Aktuarial:				
Tingkat diskonto	6.75% & 6.25%		7.00% & 5.16%	
Tingkat kenaikan upah	8.00%		8.00%	
Tingkat mortalita	TMI IV 2019		TMI IV 2019	
Tingkat cacat	5% of TMI IV 2019		5% of TMI IV 2019	
Tingkat pengunduran diri	<u>Usia/Age</u>	<u>Tingkat/Rate</u>	<u>Usia/Age</u>	<u>Tingkat/Rate</u>
	20 - 39	5.0%	20 - 39	5.0%
	40 - 44	3.0%	40 - 44	3.0%
	45 - 49	2.0%	45 - 49	2.0%
	50 - 54	1.0%	50 - 54	1.0%
	> 54	0.0%	> 54	0.0%
Usia pensiun normal	55 tahun		55 tahun	
Metode penilaian aktuarial	Projected Unit Credit		Projected Unit Credit	

Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuaris untuk mengestimasi liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

18. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

The liability for employee benefits as at 31 December 2023 and 2022 are calculated by an independent actuary, Kantor Konsultan Aktuaria Riana dan Rekan and Kantor Konsultan Aktuaria Nandi dan Utama, using the "Projected Unit Credit" method.

The Company has appointed Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk whose establishment has been approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia based on Decision Letter No. KEP-084/KM.10/2007 dated 23 April 2007. Portion of contributions borne by the Company is 6%, while portion of contributions borne by the employees are 4%, of the employees' gross monthly salaries.

The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

Actuarial Assumption:
Discount rate
Salary incremental rate
Mortality rate
Disability rate
Resignation rate

The following are the key matters disclosed in the actuarial report to estimate employee benefits liabilities as at 31 December 2023 and 2022.

	<u>2023</u>			
	Penghargaan masa kerja/ Long service reward			
	<u>UU No.13/2013</u>		<u>Jumlah/ Total</u>	
Nilai kini liabilitas yang didanai	<u>4,855</u>	<u>1,282</u>	<u>6,137</u>	Present value of funded obligation
	<u>2022</u>			
	Penghargaan masa kerja/ Long service reward			
	<u>UU No.13/2013</u>		<u>Jumlah/ Total</u>	
Nilai kini liabilitas yang didanai	<u>4,758</u>	<u>1,483</u>	<u>6,241</u>	Present value of funded obligation

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

18. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

The movements of employee benefits liabilities recognised in the statement of financial position are as follows:

2023				
	UU No. 13/2003	Penghargaan masa kerja/ Long services award	Jumlah/ Total	
Pada awal tahun	4,758	1,483	6,241	At the beginning of the year
Jumlah yang dibebankan pada laporan laba rugi	1,435	(162)	1,273	Total charged to the profit or loss
Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(1,156)	-	(1,156)	Total amount recognised in other comprehensive income
	5,037	1,321	6,358	
Pembayaran imbalan pasca kerja selama tahun berjalan	(182)	(39)	(221)	Payment of post-employment benefits during the year
	<u>4,855</u>	<u>1,282</u>	<u>6,137</u>	
2022				
	UU No. 13/2003	Penghargaan masa kerja/ Long services award	Jumlah/ Total	
Pada awal tahun	3,007	988	3,995	At the beginning of the year
Jumlah yang dibebankan pada laporan laba rugi	1,715	536	2,251	Total charged to the profit or loss
Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(89)	-	(89)	Total amount recognised in other comprehensive income
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	1,006	-	1,006	Adjustment due to change in benefit attribution method
	5,639	1,524	7,163	
Pembayaran imbalan pasca kerja selama tahun berjalan	(881)	(41)	(922)	Payment of post-employment benefits during the year
	<u>4,758</u>	<u>1,483</u>	<u>6,241</u>	

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The amount recognised in profit or loss and other comprehensive income are as follows:

2023				
	UU No. 13/2003	Penghargaan masa kerja/ long services award	Jumlah/ Total	
Laporan laba rugi:				Profit or loss:
Beban jasa kini	1,151	493	1,644	Current service costs
Beban bunga	285	(655)	(370)	Interest cost
	<u>1,436</u>	<u>(162)</u>	<u>1,273</u>	
Penghasilan komprehensif lain:				Other comprehensive income:
Keuntungan yang timbul dari perubahan asumsi aktuarial	(1,251)	-	(1,251)	Gain arising from changes in actuarial assumptions
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	94	-	94	Adjustment due to change in benefit attribution method
	<u>(1,156)</u>	<u>-</u>	<u>(1,156)</u>	

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut: (lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

The amount recognised in profit or loss and other comprehensive income are as follows: (continued)

	2022			
	UU No. 13/2003	Penghargaan masa kerja/ Long services award	Jumlah/ Total	
Laporan laba rugi:				Profit or loss:
Beban jasa kini	1,294	316	1,610	Current service costs
Beban jasa lalu	31	-	31	Past service costs
Beban bunga	253	220	473	Interest cost
Selisih imbalan kerja yang dicatat pada beban	137	-	137	Excess benefits payment
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	(190)	-	(190)	Adjustment due to change in benefit attribution method
	<u>1,525</u>	<u>536</u>	<u>2,061</u>	
Penghasilan komprehensif lain:				Other comprehensive income:
Keuntungan yang timbul dari perubahan asumsi aktuarial	(89)	-	(89)	Gain arising from changes in actuarial assumptions
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	1,195	-	1,195	Adjustment due to change in benefit attribution method
	<u>1,106</u>	<u>-</u>	<u>1,106</u>	

Pada tanggal 31 Desember 2023, durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas imbalan kerja adalah 16,37 tahun (2022: 22,27 tahun).

As of 31 December 2023, the weighted average duration of the defined benefits liabilities was 16.37 years (2022: 22.27 years).

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan pada asumsi aktuarial yang relevan, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas imbalan kerja:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in relevant actuarial assumptions, with all other variables held constant, to the liabilities of employee benefits:

Dampak terhadap imbalan kerja 31 Desember 2023 / Impact on employee benefits 31 December 2023			Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of benefit obligation	
	Perubahan asumsi/ Change in assumption			
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1%	(397)		Discount rate
	Penurunan/Decrease 1%	452		
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1%	565		Salary incremental rate
	Penurunan/Decrease 1%	(504)		

Dampak terhadap imbalan kerja 31 Desember 2022 / Impact on employee benefits 31 December 2022			Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of benefit obligation	
	Perubahan asumsi/ Change in assumption			
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1%	(733)		Discount rate
	Penurunan/Decrease 1%	877		
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1%	822		Salary incremental rate
	Penurunan/Decrease 1%	(703)		

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. AKRUAL DAN UTANG LAIN-LAIN

19. ACCRUALS AND OTHER PAYABLES

	2023	2022	
Setoran jaminan	54,886	40,057	<i>Deposit guarantee</i>
Beban yang masih harus dibayar	28,904	31,865	<i>Accrued expense</i>
Titipan imbal jasa kafalah	21,537	28,926	<i>Kafalah fee deposits</i>
Utang lain-lain	4,820	11,839	<i>Other payable</i>
Liabilitas sewa	2,615	3,961	<i>Lease liabilities</i>
Utang komisi agen	279	279	<i>Agent's commission payable</i>
Lain-lain	106	71	<i>Others</i>
	<u>113,147</u>	<u>116,998</u>	

20. MODAL SAHAM

20. SHARE CAPITAL

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023 dan/and 2022			
Pemegang saham	Jumlah saham (nilai penuh) /Number of shares (full amount)	Persentase/ Percentage	Jumlah/ Amount	Shareholders
PT Jaminan Kredit Indonesia	1,410,241	99.9290%	705,120	<i>PT Jaminan Kredit Indonesia</i>
Koperasi Warga Jamkrindo	<u>1,000</u>	<u>0.0710%</u>	<u>500</u>	<i>Koperasi Warga Jamkrindo</i>
Sejahtera	<u>1,411,241</u>	<u>100%</u>	<u>705,620</u>	<i>Sejahtera</i>

Saldo laba yang telah dicadangkan

Appropriated retained earnings

Perusahaan membentuk penyisihan cadangan wajib sebesar Rp 265.000 sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007. Undang-undang ini mengharuskan perusahaan di Indonesia untuk membentuk cadangan wajib sekurang-kurangnya sebesar 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan cadangan wajib tersebut.

The Company has set up statutory reserves amounting to Rp 265,000 in accordance with the Indonesia Limited Company Law No. 40 Year 2007. The Law requires Indonesian companies to set up a statutory reserve to a minimum of 20% of the Company's issued and paid up share capital. The Law does not set the period of time within which this statutory reserve should be created.

21. IMBAL JASA KAFALAH BRUTO

21. GROSS KAFALAH FEES

	2023	2022	
PEN	17,909	171,452	<i>PEN</i>
Kontra bank garansi	96,044	165,972	<i>Contra bank guarantee</i>
FLPP	17,104	10,496	<i>FLPP</i>
KUR	226,590	79,513	<i>KUR</i>
Multiguna	5,651	9,422	<i>Multipurpose</i>
Bond	25,304	61,214	<i>Bond</i>
Umum dan konstruksi	13,443	276	<i>General and construction</i>
Mikro	5,990	4,952	<i>Micro</i>
	<u>408,035</u>	<u>503,297</u>	

Pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk dalam imbal jasa kafalah bruto adalah estimasi pengakuan imbal jasa kafalah sebesar Rp 8.481.

As at 31 December 2023, included in gross kafalah fees is estimated gross kafalah fees recognition amounting to Rp 8,481.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PREMI PENJAMINAN ULANG BRUTO

22. GROSS RE-GUARANTEE PREMIUMS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
PEN	3,794	30,839	PEN
Kontra bank garansi	11,781	69,108	Contra bank guarantee
FLPP	2,501	4,251	FLPP
KUR	25,675	18,960	KUR
Multiguna	651	13,658	Multipurpose
Bond	3,348	23,861	Bond
Umum dan konstruksi	1,841	2,053	General and construction
Mikro	794	6,198	Micro
	<u>50,385</u>	<u>168,928</u>	

23. (PENURUNAN)/KENAIKAN ATAS IMBAL JASA KAFALAH YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN

23. (DECREASE)/INCREASE IN UNEARNED KAFALAH FEES

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
PEN	44,653	84,524	PEN
Kontra bank garansi	10,433	(2,237)	Contra bank guarantee
FLPP	(4,117)	3,592	FLPP
KUR	(110,485)	(12,032)	KUR
Multiguna	30,502	37,588	Multipurpose
Bond	4,834	(781)	Bond
Umum dan konstruksi	(858)	6,936	General and construction
Mikro	825	11,033	Micro
	<u>(24,213)</u>	<u>128,623</u>	

24. KLAIM BRUTO

24. GROSS CLAIMS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
PEN	43,268	53,642	PEN
Kontra bank garansi	221,386	155,347	Contra bank guarantee
FLPP	10,027	7,313	FLPP
KUR	38,621	10,414	KUR
Multiguna	75,551	90,933	Multipurpose
Bond	67,398	39,643	Bond
Umum dan konstruksi	10,479	19,845	General and construction
Mikro	13,554	20,030	Micro
	<u>480,284</u>	<u>397,167</u>	

25. KLAIM PENJAMINAN ULANG

25. RE-GUARANTEE CLAIMS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
PEN	3,690	3,216	PEN
Kontra bank garansi	84,591	76,341	Contra bank guarantee
FLPP	925	1,915	FLPP
KUR	10,430	2,635	KUR
Multiguna	50,603	57,946	Multipurpose
Bond	33,894	19,063	Bond
Umum dan konstruksi	4,876	12,799	General and construction
Mikro	5,353	8,712	Micro
	<u>194,362</u>	<u>182,627</u>	

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. BEBAN UJRAH

26. UJRAH EXPENSES

	2023	2022	
Kontra bank garansi	3,755	18,132	<i>Contra bank guarantee</i>
FLPP	1,146	1,142	<i>FLPP</i>
Multiguna	8,773	11,930	<i>Multipurpose</i>
Bond	643	6,605	<i>Bond</i>
Umum dan konstruksi	1,608	1,493	<i>General and construction</i>
Mikro	<u>223</u>	<u>811</u>	<i>Micro</i>
	<u>16,148</u>	<u>40,113</u>	

27. PENDAPATAN UJRAH PENJAMINAN ULANG

27. RE-GUARANTEE UJRAH INCOME

	2023	2022	
PEN	3,287	3,114	<i>PEN</i>
Kontra bank garansi	5,716	13,870	<i>Contra bank guarantee</i>
FLPP	625	738	<i>FLPP</i>
KUR	3,454	2,904	<i>KUR</i>
Multiguna	3,695	4,524	<i>Multipurpose</i>
Bond	1,261	4,577	<i>Bond</i>
Umum dan konstruksi	135	2,556	<i>General and construction</i>
Mikro	<u>546</u>	<u>1,455</u>	<i>Micro</i>
	<u>18,719</u>	<u>33,738</u>	

28. PENDAPATAN SUBROGASI

28. SUBROGATION INCOME

	2023	2022	
Penjaminan bank	36,507	48,643	<i>Bank guarantee</i>
Penjaminan non-bank	<u>6,378</u>	<u>3,198</u>	<i>Non-bank guarantee</i>
	<u>42,885</u>	<u>51,841</u>	

29. KENAIKAN ESTIMASI KLAIM

29. INCREASE IN ESTIMATED CLAIMS

	2023	2022	
PEN	(32,437)	(72,898)	<i>PEN</i>
Kontra bank garansi	65,271	14,901	<i>Contra bank guarantee</i>
FLPP	(21,819)	16,745	<i>FLPP</i>
KUR	20,254	14,098	<i>KUR</i>
Multiguna	(16,522)	8,379	<i>Multipurpose</i>
Bond	20,823	5,054	<i>Bond</i>
Umum dan konstruksi	(3,792)	1,731	<i>General and construction</i>
Mikro	<u>(19,027)</u>	<u>12,949</u>	<i>Micro</i>
	<u>12,751</u>	<u>959</u>	

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. PENDAPATAN INVESTASI

30. INVESTMENT INCOME

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Bagi hasil			Profit sharing
Deposito berjangka	49,427	37,521	Time deposits
Sukuk	35,683	28,108	Sukuk
Penjualan sukuk	547	2,600	Sale of sukuk
Reksadana	<u>165</u>	<u>-</u>	Reksadana
	<u>85,822</u>	<u>68,229</u>	

31. BEBAN USAHA

31. OPERATING EXPENSES

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Beban kepegawaian	62,159	64,754	Salaries expenses
Beban administrasi dan umum	25,330	24,603	General and administrative expenses
Beban operasional	34,557	21,156	Operational expenses
Beban sistem, teknologi dan pengembangan usaha	<u>6,212</u>	<u>3,459</u>	Technology, system and development expenses
	<u>128,258</u>	<u>113,972</u>	

32. BEBAN LAIN-LAIN - BERSIH

32. OTHER EXPENSES - NET

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Beban pajak final	13,387	10,618	Final tax expenses
Pendapatan administrasi kafalah	(1,605)	(2,883)	Kafalah administration income
Pendapatan lain-lain	<u>(2,012)</u>	<u>(559)</u>	Other income
	<u>9,770</u>	<u>7,176</u>	

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

33. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS

a. Perusahaan Milik Negara dan Anak Perusahaan

a. State Owned Enterprises and Subsidiaries

Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham Perusahaan Milik Negara. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Syariah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Pegadaian (Persero), PT Pegadaian Syariah, PT Propernas Griya Utama, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Reasuransi Syariah Indonesia, Koperasi Warga Semen Gresik dan Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera adalah entitas-entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, serta memiliki transaksi signifikan dengan Perusahaan.

The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of State Owned Enterprises. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Syariah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Pegadaian (Persero), PT Pegadaian Syariah, PT Propernas Griya Utama, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Reasuransi Syariah Indonesia, Koperasi Warga Semen Gresik and Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera, are entities owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia, which have significant transactions with the Company.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Perusahaan Milik Negara dan Anak Perusahaan (lanjutan)

Perusahaan memiliki penempatan kas dan setara kas, investasi, deposito berjangka untuk tujuan tertentu, piutang imbal jasa *kafalah* - bersih, piutang hasil investasi, utang klaim, utang penjaminan ulang, imbal jasa *kafalah*, premi penjaminan ulang, klaim, beban *ujrah*, pendapatan *ujrah* penjaminan ulang, beban *kafalah* lain, pendapatan investasi dan beban usaha.

b. Manajemen kunci

Manajemen kunci adalah Dewan Komisaris dan Direksi.

Saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

33. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)

a. State Owned Enterprises and Subsidiaries (continued)

The Company has placement in cash and cash equivalent, investments, time deposits for certain purposes, *kafalah* fee receivables - net, investment income receivables, claim payables, re-guarantee payables, re-guarantee premiums, claims, *ujrah* expenses, re-guarantee *ujrah* income, other *kafalah* expenses, investment income and operating expenses.

b. Key management

Key management are Board of Commissioners and Directors.

Significant balances and transactions with related parties are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Aset:			Assets
Kas dan setara kas			Cash and cash equivalents
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	55,686	14,025	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Unit Syariah	18,098	235,676	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Sharia Unit
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	110	54	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	21	61	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	<u>10</u>	<u>-</u>	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
	<u>73,925</u>	<u>249,816</u>	
Investasi			Investments
Sukuk			Sukuk
Pemerintah Republik Indonesia	<u>591,688</u>	<u>459,697</u>	Th Government of the Republic of Indonesia
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu			Time deposits for certain purposes
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	755,139	709,689	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Unit Syariah	<u>3,094</u>	<u>3,094</u>	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Sharia Unit
	<u>758,233</u>	<u>712,783</u>	
Piutang imbal jasa <i>kafalah</i> - bersih			Kafalah fee receivables - net
Pemerintah Republik Indonesia	<u>128</u>	<u>52,489</u>	The Government of the Republic of Indonesia
Piutang penjaminan ulang			Re-guarantee receivables
PT Reasuransi Syariah Indonesia	88,063	61,135	PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT Reasuransi Nasional Indonesia	<u>114,127</u>	<u>31,241</u>	PT Reasuransi Nasional Indonesia
	<u>202,190</u>	<u>92,376</u>	

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**33. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS (continued)**

**a. Perusahaan Milik Negara dan Anak
Perusahaan (lanjutan)**

**a. State Owned Enterprises and Subsidiaries
(continued)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Aset: (lanjutan)			Assets (continued)
Piutang hasil investasi			Investment income receivables
Pemerintah Republik Indonesia	9,197	6,889	The Government of the Republic of Indonesia
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	606	498	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Unit Syariah	<u>13</u>	<u>674</u>	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Sharia Unit
	<u>9,816</u>	<u>8,061</u>	
Jumlah aset dengan pihak berelasi	<u>1,646,143</u>	<u>1,575,222</u>	Total assets with related parties
Persentase terhadap jumlah aset	<u>67.13%</u>	<u>64.31%</u>	Percentage of total assets
Liabilitas:			Liabilities:
Utang penjaminan ulang			Re-guarantee payables
PT Reasuransi Syariah Indonesia	47,560	29,117	PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT Reasuransi Nasional Indonesia	6,102	17,299	PT Reasuransi Nasional Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia	<u>195</u>	<u>1,899</u>	The Government of the Republic of Indonesia
	<u>53,857</u>	<u>48,315</u>	
Jumlah liabilitas dengan pihak berelasi	<u>53,857</u>	<u>52,751</u>	Total liabilities with related parties
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>4.28%</u>	<u>4.05%</u>	Percentage of total liabilities
Pendapatan kafalah:			Kafalah income:
Imbal jasa kafalah bruto			Gross kafalah fees
Pemerintah Republik Indonesia	<u>17,909</u>	<u>171,452</u>	The Government of the Republic of Indonesia
Persentase terhadap jumlah imbal jasa kafalah bruto	<u>4.40%</u>	<u>34.07%</u>	Percentage of total gross kafalah fees
Premi penjaminan ulang bruto			Gross re-guarantee premiums
PT Reasuransi Nasional Indonesia	49,722	96,147	PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Reasuransi Syariah Indonesia	3,390	66,986	PT Reasuransi Syariah Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia	<u>-</u>	<u>4,015</u>	The Government of the Republic of Indonesia
	<u>53,112</u>	<u>167,148</u>	
Persentase terhadap jumlah premi penjaminan ulang	<u>96.66%</u>	<u>98.95%</u>	Percentage of total gross re-guarantee premiums

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)

b. Manajemen kunci (lanjutan)

b. Key management (continued)

Saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Significant balances and transactions with related parties are as follows: (continued)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Beban kafalah:			Kafalah expenses:
Klaim bruto			Gross claims
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	96,987	122,338	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	80,252	45,267	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	68,198	44,269	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Pegadaian Syariah	14,139	18,224	PT Pegadaian Syariah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Unit Syariah	7,156	1,349	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Sharia Unit
Koperasi Warga Semen Gresik	272	452	Koperasi Warga Semen Gresik
Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera	-	21	Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera
	<u>267,004</u>	<u>231,920</u>	
Persentase terhadap jumlah klaim bruto	<u>55,59%</u>	<u>58,39%</u>	Persentase terhadap jumlah gross claims
Beban ujarah			Ujarah expenses
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1,566	1,749	PT Bank Indonesia Tbk
PT Jaminan Kredit Indonesia	762	1,068	PT Jaminan Kredit Indonesia
PT Bank Tabungan Negara, Unit Syariah	9	-	PT Bank Tabungan Negara, Sharia Unit
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	888	909	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
	<u>3,225</u>	<u>3,726</u>	
Persentase terhadap jumlah beban ujarah	<u>19,97%</u>	<u>9,29%</u>	Persentase terhadap jumlah ujarah expenses
Pendapatan ujarah penjaminan ulang			Re-guarantee ujarah income
PT Reasuransi Syariah Indonesia	9,260	14,681	PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT Reasuransi Nasional Indonesia	8,792	18,382	PT Reasuransi Nasional Indonesia
	<u>18,052</u>	<u>33,063</u>	
Persentase terhadap jumlah pendapatan ujarah penjaminan ulang	<u>96,43%</u>	<u>98,00%</u>	Persentase terhadap jumlah re-guarantee ujarah income
Pendapatan investasi			Investment income
Pemerintah Republik Indonesia	36,395	30,523	The Government of the Republic of Indonesia
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	24,899	27,819	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Unit Syariah	3,322	1,755	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Sharia Unit
	<u>64,616</u>	<u>60,097</u>	
Persentase terhadap jumlah Pendapatan investasi	<u>75,29%</u>	<u>88,08%</u>	Persentase terhadap jumlah investment income

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Manajemen kunci (lanjutan)

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 13.872 (31 Desember 2022: Rp 11.892).

33. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)

b. Key management (continued)

Total compensation paid to the Company's Board of Commissioners and Directors for the year ended 31 December 2023 amounted to Rp 13,872 (31 December 2022: Rp 11,892).

34. ZAKAT

Perusahaan telah menghitung besarnya biaya zakat sebesar 2,5% dari laba tahun 2022 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 6.001. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan menghitung besarnya biaya zakat sebesar 2,5% dari laba tahun 2023 sebesar Rp 700.

34. ZAKAT

The Company has calculated zakat based on 2.5% of the income from year 2022 for the year ended 31 December 2022 amounting to Rp 6,001. For the year ended 31 December 2023, the Company has calculated zakat based on 2.5% of the income from year 2023 amounted to Rp 700.

35. RISIKO PENJAMINAN KEUANGAN

Risiko utama yang dihadapi Perusahaan dengan kontrak penjaminan adalah kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat dilihat pada besarnya *default risk* dan tingkat *Non-performing financing* (NPF) pinjaman yang dijamin, serta tingkat pengembalian piutang subrogasi. Selain itu, terdapat risiko atas perbedaan antara klaim aktual, pembayaran manfaat dan tanggal klaim dari yang diprediksi sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi, keparahan klaim, manfaat yang dibayarkan dan perkembangan klaim jangka panjang selanjutnya. Oleh karena itu, tujuan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa cadangan cukup dibuat untuk menutupi kewajiban tersebut.

Eksposur risiko yang berkaitan dengan kontrak penjaminan diminimalisir dengan diversifikasi portofolio penjaminan kontrak dan wilayah geografis. Variabilitas risiko juga ditingkatkan dengan risiko seleksi yang bijak dan implementasi pedoman strategi *underwriting*, serta pengaturan program penjaminan ulang.

Operasional Perusahaan didiversifikasi berdasarkan lini bisnis dan penyebaran geografis risiko. Pendekatan global untuk manajemen risiko memungkinkan Perusahaan untuk *underwrite* dan menerima penjaminan besar.

35. FINANCIAL GUARANTEE RISK

The principal risk the Company faces under guarantee contracts is the guarantee's failure to fulfill its obligations. This risk can be seen in the amount of default risk and the level of guarantee's Non-performing financing (NPF), as well as the rate of return on subrogation receivables. In addition, there is a risk from the difference between actual claims, benefit payments and claim dates from the one predicted previously. This is influenced by the frequency, severity of claims, actual benefits paid and subsequent development of long-term claims. Therefore, the objective of the Company is to ensure that sufficient reserves are made to cover those liabilities.

The risk exposure related to guarantee contracts is mitigated by diversification of guarantee contracts portfolio and geographical areas. The variability of risks is also improved by prudent risks selection and implementation of underwriting strategy guidelines, as well as re-guarantee program arrangements.

The Company's operations are diversified by line of business and the geographic spread of risk. A global approach to risk management allows the Company to underwrite and accept large guarantee accounts.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. RISIKO PENJAMINAN KEUANGAN (lanjutan)

Untuk meminimalkan risiko penjaminan, maka pada proses penjaminan kredit dilakukan identifikasi risiko menggunakan 4P, yaitu *Prospect*, *Productivity*, *Payment*, dan *Personality*. Item yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait. Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya risiko penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif untuk setiap aspek 4P. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan sistem *scoring* yaitu berdasarkan *score* prediksi risiko penjaminan masing-masing terjamin atau sekelompok terjamin, atau suatu produk baru.

Selanjutnya, pengambilan keputusan apakah suatu pengajuan penjaminan dapat disetujui atau tidak dilakukan dalam sebuah rapat komite. Sesuai prinsip kehati-hatian, maka anggota komite tersebut terdiri dari pejabat yang terkait secara langsung dengan kegiatan penjaminan (*risk taker unit*) dan pejabat yang terkait langsung dengan konsekuensi biaya atas potensi risiko (*risk financing unit*). Dengan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan dua pihak atau lebih dari sisi yang berlainan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih objektif dan potensi risiko karena kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalisasi. Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan penjaminan, hasil analisis risiko yang telah dilakukan juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap kredit yang sedang berjalan. Untuk kredit yang berisiko tinggi, maka pemantauan terhadap kredit dilakukan secara lebih intensif.

Manajemen penjaminan ulang terkoordinasi terpusat memfasilitasi transfer risiko yang tepat dan penggunaan biaya yang efektif dan efisien pasar penjaminan ulang eksternal. Penjaminan ulang yang digunakan oleh Perusahaan harus memenuhi persyaratan pengalaman di bidang keuangan tertentu yang dimasukkan melalui proses review keuangan yang ketat untuk disetujui oleh personel manajemen senior. Sebagai hasil dari kontrol ini, penjaminan ulang ditempatkan hanya pada perusahaan yang secara finansial paling aman dan berpengalaman dalam industri penjaminan ulang. Pendekatan yang konsisten untuk praktik pencadangan dan penyelesaian klaim juga diperhatikan. Selain kontrol internal, unit operasional Perusahaan dan bidang fungsional akan ditinjau oleh tim audit perusahaan yang secara teratur melakukan audit operasional.

Eksposur Perusahaan terhadap risiko konsentrasi penjaminan ini diatasi dengan beragam portofolio bisnis di berbagai lokasi dan industri.

35. FINANCIAL GUARANTEE RISK (continued)

To minimise the risk of the guarantee, in the credit guarantee process, risk identification is carried out using the 4Ps, which are *Prospect*, *Productivity*, *Payment*, and *Personality*. The items that must be considered for each of these aspects are adjusted to the characteristics of the credit to be guaranteed, and are described in the related guarantee system and procedures. The results of the risk identification process are then followed up with the determination of the guarantee risk prediction to determine the amount of guarantee risk. In its implementation, risk prediction can be done qualitatively and/or quantitatively for each aspect of the 4Ps. Quantitative prediction is done with a scoring system which is based on the score of the risk prediction of each guaranteed or a group of guaranteed, or a new product.

Furthermore, decision whether a guarantee application can be approved or not is carried out in a committee meeting. In accordance with the principle of prudence, the committee members consist of officials directly related to the guarantee activity (*risk taker unit*) and officials directly related to the cost consequences of potential risks (*risk financing unit*). With a decision-making mechanism that involves two or more parties from different sides, it is expected that decisions will be more objective and potential risk because decision-making errors can be minimised. Apart from being used to assist the guarantee decision-making process, the results of the risk analysis that have been carried out are also used as a basis for consideration in monitoring ongoing credit. For high-risk credit, credit monitoring is conducted more intensively.

Centrally-coordinated re-guarantee management facilitates appropriate risk transfer and efficient and cost-effective use of external re-guarantee markets. Re-guarantee utilised by the Company must fulfill certain financial experience requirements and are put through a stringent financial review process in order to be approved by senior management personnel. As a result of these controls, re-guarantee is placed only on the most financially secured and experienced companies in the re-guarantee industry. Consistent approach to reserving practices and the settlement of claims are also ensured. In addition to these internal controls, the Company's operating units and functional areas are subject to review by the Company's audit team that regularly carries out operational audits.

The Company's exposure to the concentration of guarantee risk is mitigated by a diverse portfolio of business written across a broad range of locations and industries.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. RISIKO PENJAMINAN KEUANGAN (lanjutan)

35. FINANCIAL GUARANTEE RISK (continued)

ANALISA EKSPOSUR

EXPOSURE ANALYSIS

Pada tahun 2023 dan 2022, risiko penjaminan yang dihadapi oleh Perusahaan diklasifikasikan berdasarkan kelas bisnis sebagai berikut:

In 2023 and 2022, the Company's guarantee risks classified based on class of businesses are as follows:

2023					
	Klaim bruto/ Gross claims	Klaim penjaminan ulang/ Re-guarantee claims	Penurunan/ (kenaikan) estimasi klaim/ Decrease/ (increase) in estimated claims	Beban klaim - bersih/Claim expenses - net	
PEN	(43,268)	3,690	(32,437)	(72,015)	PEN
Kontra bank garansi	(221,386)	84,591	65,271	(71,524)	Contra bank guarantee
FLPP	(10,027)	925	(21,820)	(30,922)	FLPP
KUR	(38,621)	10,430	20,254	(7,937)	KUR
Multiguna	(75,551)	50,063	(16,522)	(41,470)	Multipurpose
Bond	(67,398)	33,894	20,824	(12,680)	Bond
Umum dan konstruksi	(10,479)	4,876	(3,793)	(9,396)	General and construction
Mikro	(13,554)	5,353	(19,027)	(27,228)	Micro
	<u>(480,284)</u>	<u>194,362</u>	<u>12,750</u>	<u>(273,172)</u>	
2022					
	Klaim bruto/ Gross claims	Klaim penjaminan ulang/ Re-guarantee claims	Penurunan/ (kenaikan) estimasi klaim/ Decrease/ (increase) in estimated claims	Beban klaim - bersih/Claim expenses - net	
PEN	(53,642)	3,216	72,898	22,472	PEN
Kontra bank garansi	(155,347)	76,341	(14,901)	(93,907)	Contra bank guarantee
FLPP	(7,313)	1,915	(16,745)	(22,143)	FLPP
KUR	(10,414)	2,635	(14,098)	(21,877)	KUR
Multiguna	(90,933)	57,946	(8,379)	(41,366)	Multipurpose
Bond	(39,643)	19,063	(5,054)	(25,634)	Bond
Umum dan konstruksi	(19,845)	12,799	(1,731)	(8,777)	General and construction
Mikro	(20,030)	8,712	(12,949)	(24,267)	Micro
	<u>(397,167)</u>	<u>182,627</u>	<u>(959)</u>	<u>(215,499)</u>	

CADANGAN TEKNIS

TECHNICAL RESERVES

Metode *Expected Loss Ratio*, *Incurred Chain-ladder* dan *Incurred Bornhuetter-Ferguson* ("BF") telah diterapkan untuk masing-masing kelas bisnis untuk menentukan kewajiban penjaminan yang tidak didiskontokan.

The *Expected Loss Ratio*, *Incurred Chain-ladder* and *Incurred Bornhuetter-Ferguson* ("BF") method have been applied to each class of business to determine the undiscounted guarantee liabilities.

Cadangan kerugian dipotong untuk mewakili nilai waktu dari uang.

The loss reserves have been discounted to represent the time value of money.

Tingkat beban klaim yang belum dialokasikan dihitung dengan membagi data historis beban klaim dengan pembayaran klaim. Variabel ini dianggap sama untuk setiap LoB.

The unallocated claim expense rate is calculated by observing the historical claim expense divided by the claim paid. It is assumed to be the same for each LoB.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. RISIKO PENJAMINAN KEUANGAN (lanjutan)

Margin risiko secara keseluruhan ditentukan setelah memungkinkan untuk ketidakpastian estimasi klaim yang luar biasa. Ketidakpastian dianalisis dengan mempertimbangkan potensi ketidakpastian yang berkaitan dengan model aktuarial dan asumsi, kualitas data yang mendasari yang digunakan dalam model dan lingkungan penjaminan umum.

SENSITIVITAS

Kewajiban klaim sangat mudah berubah untuk digunakan sebagai asumsi utama. Karena hal tersebut, tidak mungkin untuk mengukur sensitivitas dari asumsi tertentu seperti perubahan peraturan atau ketidakpastian dalam proses estimasi.

Analisis berikut dibuat untuk menunjukkan dampak pada laporan laba rugi jika asumsi utama berubah sementara semua asumsi lain tetap. Korelasi antara asumsi-asumsi tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan kewajiban klaim.

Dampak dari kenaikan/penurunan kewajiban dan laba sebelum pajak pada tahun berjalan dari perubahan variabel adalah sebagai berikut:

2023			
Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Dampak terhadap liabilitas bersih/ Impact on net liabilities	Dampak terhadap laba sebelum pajak/ Impact on profit before tax	
Rasio kerugian atau rasio klaim	+5%	7,442	7,442
	-5%	(7,442)	(7,442)
Tingkat beban klaim tidak teralokasikan	+1%	180	180
	-1%	(180)	(180)
2022			
Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Dampak terhadap liabilitas bersih/ Impact on net liabilities	Dampak terhadap laba sebelum pajak/ Impact on profit before tax	
Rasio kerugian atau rasio klaim	+5%	27,746	27,746
	-5%	(28,186)	(28,186)
Tingkat beban klaim tidak teralokasikan	+1%	192	192
	-1%	(192)	(192)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko manajemen modal

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalannya adalah untuk menjaga kelangsungan usaha Perusahaan untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada *stakeholders* lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya operasional.

35. FINANCIAL GUARANTEE RISK (continued)

The overall risk margin was determined after allowing for uncertainty of the outstanding claim estimate. Uncertainty was analysed by taking into account potential uncertainties relating to the actuarial models and assumptions, the quality of the underlying data used in the models and the general guarantee environment.

SENSITIVITIES

Claim liabilities are very volatile to key assumptions used. Therefore, it is not possible to quantify the sensitivity of certain assumptions such as regulation change or uncertainty in the estimation process.

The following analysis is made to show the impact on the statement of profit or loss if the main assumptions change while all the other assumptions stay. The correlation between those assumptions can give significant impact in determining the claim liability.

The impact of the increase/decrease in liability and profit before tax on the current year from change in variable are as follows:

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Capital management risk

The Company's objective from managing its capital is to safeguard the Company's going concern ability in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of operation.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko manajemen modal (lanjutan)

Perusahaan memonitor *Gearing Ratio* yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.2/POJK.05/2017 tertanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. *Gearing Ratio* adalah perbandingan antara total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu.

Gearing Ratio Penjaminan untuk Usaha Produktif ditetapkan paling tinggi 20 (dua puluh) kali dari ekuitas Perusahaan dan total *Gearing Ratio* ditetapkan paling tinggi 40 (empat puluh) kali dari ekuitas Perusahaan.

Perusahaan telah memenuhi ketentuan dalam peraturan tersebut.

Risiko manajemen keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan adalah risiko investasi, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko harga pasar. Kegiatan operasional Perusahaan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Perusahaan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih.

Risiko likuiditas

Perusahaan terekspos terhadap kegiatan harian atas ketersediaan sumber kas terutama dari klaim-klaim yang terjadi atas kontrak penjaminan jangka pendek. Risiko likuiditas adalah risiko dimana kas tidak tersedia untuk memenuhi liabilitas di saat jatuh tempo. Risiko ini diminimalisir dengan mengelola profil jatuh tempo liabilitas keuangan dan memastikan tersedianya pendanaan dari sejumlah piutang premi dan investasi yang jatuh tempo serta memiliki deposito berjangka sebagai investasi terbesar Perusahaan.

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Capital management risk (continued)

The Company monitors Gearing Ratio which is calculated in accordance with Financial Services of Authority of the Republic of Indonesia Decree No. 2/POJK.05/2017 dated 11 January 2017 regarding Business Operation of Guarantor Institution. Gearing Ratio is the ratio between the total outstanding value of the Guarantee that is borne by itself with the net capital of the Guarantor at a certain time.

Gearing Ratio for Guarantees for Productive Businesses are set at a maximum of 20 (twenty) times the equity of the Company and the total Gearing Ratio is set at no higher than 40 (forty) times of the equity of the Company.

The Company has fulfilled the requirements outlined in the regulation.

Financial risk management

The main risks arising from the Company's financial instruments are investment risk, credit risk, liquidity risk, and market price risk. The operational activities of the Company are managed in a prudential manner by managing those risks to minimise potential losses.

Credit risk

Credit risk is the risk that the Company may suffer a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk. The Company manages and controls the credit risk by dealing only with credit worthy parties, setting internal policies on verifications and authorisations of credit, and monitoring the collectability of receivables regularly to reduce the exposure to bad debts.

Liquidity risk

The Company is exposed to daily calls on its available cash resources mainly from claims arising from short-term guarantee contract. Liquidity risk is the risk that cash may not be available to pay obligation when due. This risk has been minimised by managing the maturity profile of financial liabilities and ensuring the availability of funding from matured premium receivables and investment portfolio and having time deposits as the Company's major investment.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko manajemen keuangan (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Sebagian besar ketersediaan dana Perusahaan ditempatkan pada deposito berjangka yang tersebar dalam berbagai tanggal jatuh tempo di dalam periode berjalan. Kebijakan untuk menjaga investasi pada dana yang likuid dapat membantu kebutuhan likuiditas yang tidak terduga.

Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk management (continued)

Liquidity risk (continued)

Most of the Company's available funds are placed in time deposits spread over various maturity dates within a period. The policy of keeping investment in liquid funds helps to meet any unexpected liquidity requirement.

The table below shows the maturity date of the undiscounted financial liabilities which are based on the contractual payment as of 31 December 2023 and 2022:

2023				
Tanpa tanggal jatuh tempo kontraktual/ <i>No contractual maturity date</i>	Sampai dengan satu tahun/ <i>Up to a year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than a year</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Utang pajak	-	4,507	-	4,507
Utang klaim	-	5,110	-	5,110
Utang penjaminan ulang	-	53,857	-	53,857
Akrual dan utang lain-lain	-	113,147	-	113,147
	-	176,621	-	176,621
				<i>Tax payables</i>
				<i>Claim payables</i>
				<i>Re-guarantee payables</i>
				<i>Accruals and other payables</i>
2022				
Tanpa tanggal jatuh tempo kontraktual/ <i>No contractual maturity date</i>	Sampai dengan satu tahun/ <i>Up to a year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than a year</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Utang pajak	-	1,671	-	1,671
Utang klaim	-	5,456	-	5,456
Utang penjaminan ulang	-	48,315	-	48,315
Akrual dan utang lain-lain	-	86,441	1,631	88,072
	-	141,883	1,631	143,514
				<i>Tax payables</i>
				<i>Claim payables</i>
				<i>Re-guarantee payables</i>
				<i>Accruals and other payables</i>

Risiko harga pasar

Dalam pengelolaan risiko harga pasar, Perusahaan telah melakukan pembatasan penempatan portofolio berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain itu, komposisi portofolio juga dibatasi berdasarkan aset alokasi yang dibuat sesuai dengan tingkatan risikonya.

Market price risk

The Company has a portfolio placement restrictions, to manage the market price, based on applicable regulation. In addition, the composition of the portfolio is also restricted by risk level of assets allocation.

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan beberapa standar baru, revisi dan interpretasi, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas lancar atau tidak lancar; dan
- Amendemen PSAK 73: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024 dan penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK 74: "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK 74: "Kontrak Asuransi" terkait Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dan penerapan dini diperbolehkan.

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diterbitkan oleh DSAK-IAI.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. PROSPECTIVE ACCOUNTING PRONOUNCEMENT

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants ("DSAK-IAI") issued several new standards, amendments and interpretations but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2023 are as follows:

- *Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" insurance contract regarding long-term liabilities with the covenant;*
- *Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities as current or non-current; and*
- *Amendment of SFAS 73: "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transactions.*

The above standards will be effective on 1 January 2024 and early adoption is permitted.

- *SFAS 74: "Insurance Contract"; and*
- *Amendment of SFAS 74: "Insurance Contract" regarding Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - Comparative Information.*

The above standards will be effective on 1 January 2025 and early adoption is permitted.

Beginning on 1 January 2024, references to the individual SFAS and ISAKs will be changed as published by DSAK-IAI.

As at the authorisation date of this financial statement, the Company is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the financial statements.

2023

Laporan Tahunan
Annual Report

TRANSFORMASI UNTUK TUMBUH BERKELANJUTAN

Transformation for Sustainable Growth